Kalau Tidak Turun, Nanti Dimarahi Pak Kadus

geliat kepemimpinan kaum muda di kawasan konservasi

ahtu • bobby • deddy • ecky • fifin
hari • isep • keleng • munawir • regen • suer
sulis • supriyanto • susi • swiss • ujang • wahyu • yusuf



Kalau Tidak Turun, Nanti Dimarahi Pak Kadus

geliat kepemimpinan kaum muda di kawasan konservasi

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Kementerian Kehutanan
2012

Kalau Tidak Turun, Nanti Dimarahi Pak Kadus
geliat kepemimpinan kaum muda di kawasan konservasi

Penulis:
Ahmad Munawir • Ahtu Trihangga • Bobby Nopandry •
Deddy Asriyadi • Ecky Saputra • Fifin Nopiansyah •
Hari Kushardanto • Isep Mukti Wiharja • Keleng Ukur •
Rendra Regen Rais • Suer Suryadi • Sulistriantoro •
Supriyanto • Susi Sumaryati • Swiss Winnasis •
Ujang Wisnu Barata • Wahyu Murdyatmaka • Yusuf Syaefuddin

Editor:
Wiratno
Nurman Hakim

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-602-19319-9-8

Desain Sampul Depan:
Bisro Sya'bani

Diterbitkan oleh:
Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Kementerian Kehutanan
dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, bahwa dengan ridhoNya, buku yang berupa kumpulan pengalaman dari lapangan ini dapat diterbitkan. Sebuah upaya untuk mendokumentasi berbagai pengalaman dari lapangan, dalam bentuk buku dan kemudian dapatlah disebarkan kepada seluruh staf Ditjen PHKA, khususnya yang tersebar di 77 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Seluruh artikel dituliskan berdasarkan pengalaman lapangan yang dialami sendiri oleh para penulisnya. Banyak hal yang dapat dipetik, mulai dari upaya melakukan reformasi sistem kerja di TN Siberut agar menjadi lebih terencana dan dan melibatkan orang-orang lapangan, upaya penerapan *resort based management* (RBM) di TN Alas Purwo, dinamika membangun kekompakan dan spirit kerja PEH di TN Baluran dan TN Karimunjawa, menjawab berbagai tantangan untuk menyelesaikan okupasi lahan di SM Dolok Surungan, SM Cikepuh dan TN Bukit Barisan Selatan, upaya

menggenjot PNBP di TN Bantimurung Bulusaraung atau suka duka para interpreter di TN Gunung Rinjani. Ada 11 artikel ditambah artikel dari Hari Kushardanto, Manajer Program *RARE Campaign*, tentang *leadership* konservasi, serta artikel telahaan hukum tentang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus-kasus tindak pidana kehutanan dari Suer Suryadi, praktisi hukum sekaligus konservasi..

Proses editing buku ini sedapat mungkin tidak merubah tidak merubah *style* dari masing-masing penulis. Pada beberapa artikel terkesan santai, mengalir, dengan gaya bertutur yang sangat cair diselingi dialog-dialog kocak tentang banyak hal yang mereka alami di lapangan. Editor buku hanya melakukan perbaikan salah ketik, merapikan kejernihan ungkapan dalam kalimat-kalimat yang kadang terlalu panjang. Tidak lebih dari itu. Maka, pembaca akan menemukan gaya penulisan yang beragam, sangat menarik, dan tentu saja unik.

Buku ini menjadi buku yang pertama yang mengungkapan kegelisahan, perjuangan kaum muda konservasi alam Indonesia, yang sebagian besar adalah staf dari lapangan. Semoga, kehadiran buku ini menambah dan dapat memompakan semangat para staf di lapangan, untuk membuat jurnal harian, yang ternyata sangat bermanfaat di kemudian hari. Selamat membaca dan mengambil pelajaran darinya.

DIREKTUR,

Bambang Dahono Adji

Ucapan Terima Kasih

Berkat rahmat Allah SWT., maka kumpulan pengalaman dari lapangan ini dapat hadir di hadapan pembaca di seluruh tanah air. Proses panjang untuk mendapatkan artikel dari lapangan. Semula kami Tim Editor pesimis, apakah bisa mendapatkan cerita yang menarik dari pengalaman pribadi staf UPT Ditjen PHKA, baik yang bekerja di Balai Taman Nasional maupun di Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Namun, kekawatiran tersebut lenyap seiring dengan masuknya beberapa artikel, yang ternyata sangat menarik. Dituliskan dengan gaya anak muda; santai, mengalir, penuh dengan ekpresi pribadi yang memancarkan energi positif tentang optimisme. Nurman Hakim yang memainkan peran sebagai "penghubung" antara teman-teman di lapangan dengan saya, saat itu sebagai Kasubdit Pemolaan dan Pengembangan (Agustus 2007-2010). Kekuatan network Nurman Hakim-lah yang memungkinkan kita dapat nyaman membangun komunikasi, melalui jejaring sosial dan email.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Bapak Ir.Darori, MM Dirjen PHKA, Bapak Ir.Sonny Partono, MM-Direktur KKBHL, dan Bapak Ir. Bambang Dahono Adji, sebagai Direktur KKBHL yang baru, Dr.Ir.Bambang Novianto Wawandono, Msi-Direktur KKH. Pak Gatot Subiantoro-Kasubdit Pemolaan dan Pengembangan beserta timnya; Toni Anwar, Toto Indraswanto, Ecky Saputra, Erna, Juju, Eru, Nining. Ratna Hendratmoko, Agus Sartono, dan Tim DIPA Direktorat KKBHL.

Mereka yang dikenang oleh para penulis karena kepemimpinannya, yaitu Pak Hartono di TN Alas Purwo, Pak Gunung Nababan di TN Karimunjawa, Pak Darsono di TN Bantimurung Bulusaraung dan Pak Kuspriyadi di TN Baluran termasuk Pak Yusuf Sabarno yang menjadi koordinator PEH-nya. Mereka secara tidak langsung telah mewariskan semangat kerja lapangan kepada para stafnya dan akhirnya mampu mendorong melakukan perubahan menuju perbaikan performa organisasi maupun penguasaan lapangan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Mas Hari Kushardanto, Rully Prayoga, Putu, Galuh dan Tim RARE lainnya yang telah memberikan kesempatan beberapa staf UPT untuk belajar dan mempraktikkan metode kampanye konservasi, yang terbukti memberikan manfaat nyata di lapangan seperti di SM Dolok Surungan, TN Karimunjawa, dan masih banyak kawasan konservasi lainnya yang sentuh dengan RARE.

Penghargaan disampaikan kepada rekan Suer Suryadi, yang telah bersedia menyumbangkan tulisannya yang semoga dapat memberikan inspirasi dan menajdi motivasi penggerak perubahan di lapangan.

Spirit kaum muda tercermin dari seluruh artikel yang dirangkai dalam buku ini. Energi positif meruap di segala penjuru kesadaran kita setelah menikmati seluruh artikel tersebut. Temuan ini memberikan semangat kepada kita, bahwa generasi muda konservasi Indonesia sebenarnya masih ada. Ruang ekspresi itu telah diwadahi selama 3 tahun penerbitan buku-buku di Direktorat KKHBL. Dokumentasi adalah salah satu dari 4 tradisi yang berhasil digali oleh Pak Pandji Yudistira, dan dikristalkan oleh Pak Agus Mulyana-Peneliti CIFOR. Pak Pandji berhasil menuliskan sejarah konservasi alam Indonesia, dan peran Dr. S.H. Koorders, salah satu dari tokoh di awal sejarah konservasi modern di Indonesia. Keempat tradisi tersebut adalah : (1) ke lapangan (2) riset, (3) dokumentasi dan (4) jejaring kerja. Keempat tradisi ini telah lahir kembali, dengan bukti terbitnya buku cerita perjuangan kaum muda dari lapangan ini. Selamat membaca.

Editor

Kepemimpinan Kaum Muda Konservasi

Ketika Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Dit Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, memutuskan membiayai 9 judul buku pada Tahun Anggaran 2012, digagas sebuah buku yang berisi kumpulan cerita dari lapangan, yang dituliskan oleh staf lapangan berdasarkan pengalaman mereka. kami meyakini bahwa catatan-catatan yang dibuat oleh para staf yang bekerja di lapangan amat berharga dan menjadi pembelajaran, bahkan menginspirasi staf lainnya. Hingga Agustus 2012, telah terkumpul 14 naskah. Empat belas tulisan dalam buku ini ibarat penggalan kisah yang dibawa oleh masing-masing anak sungai. Masih ada ratusan bahkan ribuan anak sungai yang lain yang belum sempat dipotret dari mereka yang hiruk pikuk bekerja dalam kesunyian. Mereka yang terus mengalirkan airnya ke sungai besar bernama gerakan konservasi.

Gagasan buku ini sederhana saja: saling menginspirasi dan saling berbagi energi positif. Membaca buku ini adalah

menikmati rangkaian pengalaman yang seringkali tidak terduga. Setting, pilihan tema, dan cara menuturkannya, kami merasakan getaran yang kuat. Aroma optimisme, pencarian identitas diri atau kelompok, spirit perjuangan, bahkan kegeraman menguak kental. Inisiatif melakukan terobosan, pantang menyerah melawan beragam tingkat kesulitan, keterbatasan, dan ketidakmenentuan atau lemahnya kapasitas kepemimpinan.

Dari keempat belas artikel, satu artikel ditulis oleh perempuan. Susi Sumaryati adalah PEH TN Karimunjawa yang mampu menggambarkan dinamika kerja penuh optimisme di antara PEH di Karimunjawa di bawah kepemimpinan Pak Gunung Nababan. Pemikiran dan kerja konservasi Pak Gunung menjadi pokok bahasan pada artikel Hari Kushardanto. Ia menjadi salah satu tokoh penting konservasi Indonesia modern, setelah Pak Hartono dari Alas Purwo, yang banyak disebut dalam artikel Wahyu Murdiyatmaka. Pak Gunung dan Pak Hartono menjadi model leadership bagi para generasi muda konservasi Indonesia. Mereka membangun sistem kelola kawasan, tanpa bantuan dari lembaga donor manapun. Tiga tahun dan sistem itu mampu menghujam tajam ke bumi kedua taman nasional itu. 2 artikel ditulis oleh mitra Ditjen PHKA. Hari Kushardanto, manajer RARE Indonesia, yang diminta secara khusus untuk menuliskan tentang kepemimpinan konservasi. Topik yang langka namun sangat relevan saat ini dan ke depan. Artikel lain disiapkan oleh Suer Suryadi. Dia aktif bekerja untuk konservasi sejak di Conservation International Indonesia (Papua Programme), di UNESCO (TN Gunung Leuser). Akhirnya, ia yang semula berlatar belakang pasca sarjana bidang biologi menjadi sarjana hukum dan beberapa tahun terakhir ini membantu beberapa UPT untuk mendampingi dan melakukan telahaan hukum kasus-kasus

tindak pidana kehutanan. Ia adalah seorang biolog, atau praktisi konservasi yang ahli hukum

Suasana kebatinan seperti itulah yang merebak kuat pada seluruh tulisan. Tulisan yang tidak berasal dari aktifitas berfikir semata melainkan benar-benar berasal dari apa dikerjakan. Setiap pengalaman adalah unik, rahasia dan kerap sulit direplikasi. Namun bukan berarti menutup kemungkinan memercikkan inspirasi. Setiap tulisan menyampaikan pesan yang sangat kuat muatan konservasinya. Ulasan dalam pengantar editor ini sekedar menyampaikan catatan bahwa cara terbaik menangkap percikan itu hanyalah dengan kerelaan mendengar dan membacanya dengan hati.

Reformasi dari Dalam

Ahmad Munawir, Ecky Saputra, **dan** ***Fifin Nopiansyah*** adalah staf muda TN Siberut. Proses reformasi ini terkadi pada tahun 2004, dimana meraka menyadari akan tidaknyamanan suasana kerja di Kantor di Padang, sementara lapangan (Pulau Siberut, 90 mil laut dari Padang) memerlukan kerja keras dan kerja tim. Reformasi yang dilakukan oleh Tim Lima ini telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Situasi seperti di TN Siberut ini, juga banyak ditemukan di beberapa Balai, baik Balai TN/KSDA. Pelajaran dari reformasi internal TN Siberut ini patut diacungi jempol, sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sangat penting, yang seharusnya juga dilakukan di tempat-tempat lainnya. Keterbukaan, komunikasi antar staf, membangun perencanaan partisipatif dari bawah, merupakan modal sosial dan telah menjadi indikator dari gerakan untuk mendorong lahirnya suatu *good governance*. Beberapa tokoh muda TN Siberut itu, tersebut kini telah berhasil menjadi

ujung tombak di tempat tugasnya yang baru. Ahmad Munawir dan Ecky Saputra ditugaskan ke Direktorat KKBHL Jakrta. Fifin saat ini sedang S3 di IPB.

Wahyu Murdiyatmaka, adalah salah satu pelaku sejarah dibangunnya Resort Based Management (RBM) di TN Alas Purwo (TNAP). Maka potret dan ulasan yang disampaikan sangat relevan dan memang gambaran itulah yang terjadi di sebagian besar kelola TN dan kawasan konservasi lainnya. RBM sebagai kendaraan (*mean*) dan bukan tujuan (*end*) cukup menjanjikan sebagaimana telah diterapkan di TNAP, disusul TN Karimunjawa, tanpa dukungan dari mitra. Sementara itu Balai TN Gunung Halimun Salak mendapatkan dukungan dari JICA selama lebih dari 15 tahun. Dalam perkembangannya, awal tahun 2010, RBM menjadi program nasional yang didorong dan dikawal oleh Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Dit KKBHL sampai dengan 2012 ini. Pengalaman berharga dari TNAP, TNKJ, menjadi acuan dan mereka yang menjadi tokoh kunci pengembangan RBM di kedua TN tersebut diminta membantu fasilitasi proses-proses wrokshop RBM di tingkat nasional. Kata kunci bagi keberhasilan RBM ini adalah *leadership* di berbagai tingkatannya.

Semoga artikel ini memberikan tambahan spirit bagi para penggerak RBM di seluruh tanah air. Tidak ada kata menyerah dalam membangun gerakan baru, untuk kelola kawasan yang lebih baik, di tingkat lapangan, di tingkat tapak. Wahyu Murdiyatmaka adalah salah satu tokoh muda itu, yang sampai dengan saat ini aktif terus berkarya, ia adalah “penjaga” Resort Tanjung Pasir. Dan ia menikmati kerja lapangannya itu dengan *passion*.

Deddy Asriyadi adalah staf muda TN Bantimurung Bulusaraung. Ia menulis sebuah artikel yang menarik tentang perjuangan memberlakukan PNBP dari kawasan wisata terkenal Bantimurung, yang semula dikelola oleh Pemkab Maros. Diperlukan waktu hampir 2 tahun (2010-awal 2012) untuk dapat mencapai kesepahaman Pemkab tentang kewenangan penarikan karcis tersebut. Peranan Kepala Balai TN Babul, Ir Darsono, cukup besar dan menentukan, dengan meminta Kepala Seksinya, Deddy Asriyadi, seorang putra daerah untuk membangun komunikasi dengan pihak Pemkab menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dengan perjuangan yang lumayan panjang, maka pada awal 2011, penarikan PNBP wisata di TN Babul berhasil dilakukan. Dari nol rupiah, pemerintah pusat mendapatkan pemasukan PNBP sampai lebih dari Rp. 1,2 milyar. Suatu dana yang cukup besar yang dihasilkan oleh TN Babul yang tergolong masih muda tersebut. Semoga, pengalaman membangun komunikasi dan pemahaman kepada Pemda, dalam kerangka kebijakan nasional konservasi, menjadi sangat menentukan. Hasil inilah yang disebut sebagai sinergi. Semua pihak mendapatkan manfaatnya tanpa harus bersitegang atau berbeda pendapat yang berkepanjangan. Pemuda ini patut mendapatkan acungan jempol. Kini ia menjabat sebagai Kepala Subbag Balai TN Babul.

Swiss Winnasis, adalah satu salah tokoh (PEH) kunci TN Baluran. Artikel ini dituliskan olehnya dan diedit rame-rame oleh rekan-rekannya, dengan gaya intens dan penuh dengan dinamika, khususnya mengulas "perjuangan" PEH di TN Baluran. Kekompakan, kerjasama, dan kesetiakawanan yang dibangun ketika mereka menghadapi berbagai persoalan dan keterbatas bekerja di lapangan adalah bukti nyata akan pentingnya bekerja di lapangan, di lapangan. Swiss dan 2 rekannya yang "gila" urus

burung (Sutadi dan Achmad Toha) adalah figur-figur anomali di antara ratusan PEH di seluruh Indonesia. Buku mereka berjudul : *"Birds of Baluran National Park"*, yang diterbitkan oleh Balai TN Baluran dan Dit KKBHL pada tahun 2011, membuktikan keuletan dan kekuatan kelompok ini. Dalam artikel ini diungkapkan liku-liku perjuangan membangun spirit kerja PEH dengan segala keterbatasannya. Muncul figur *leadership* seorang Yusuf Sabarno, sang koordinator PEH, yang memberikan peran besar dalam berkembangnya kekompakan dan sistem kerja PEH TN Baluran yang semakin menunjukkan hasilnya yang nyata. *Leadership*, kerja keras, dan kekompoakan menjadi kata kunci keberhasilan PEH di TN Baluran ini. Di tingkat Balai, muncul figur-figur Kepala Balai yang juga mendorong berkembangnya suasana yang kondusif bagi perkembangan kelompok Swiss, dan kawan-kawan, saat itu, yaitu Pak Kuspriyadi.

Berguru pada Alam

Rendra Regen Rais adalah sebuah fenomena yang kami temukan. Ia berjuang untuk bekerja di Pulau Enggano, dimana terdapat 3 kawasan Cagar Alam (3.7% dari luas pulau), 1 Taman Buru (18.37 %), Hutan Lindung (8.72 %) dan HPT (5.54 %). Bekerja di kepulauan terpencil selalu menjadi semacam tantangan tetapi –bagi sebagian besar staf di Kantor Balai-cenderung dianggap sebagai tempat buangan. Regent membuktikan bahwa dengan ketulusan dan kerja kerasnya, ia mampu taklukkan Enggano yang dulu tidak dikenal itu. Berbekal kameranya ia memotret berbagai fragmen menarik dari Pulau yang indah itu dan memperkenalkannya di dunia maya. Ketangguhan dan eduransinya yang tinggi membuktikan kepada kita dan publik secara umum, bahwa Regent mampu "menaklukan" pulau Enggano itu. Dengan cara dan model

membangun spirit kerja yang ia kembangkan. Menjelajah pulau yang dianggapnya sebagai hobby dan kesenangan mampu melawan kesepian dan menghapus berbagai keluhan akibat tidak adanya dukungan dari manajemen di Bengkulu. Kegigihannya kemudian menggungah manajemen untuk secara bertahap mengakuinya dan mulai mengalirkan kegiatan-kegiatan di Pulau Enggano itu.

Sebuah contoh perjuangan anak muda Balai KSDA Bengkulu yang patut pula dijadikan contoh. Artikelnya semoga dapat menggugah spirit kerja kita untuk kembali ke lapangan. Resort menjadi ujung tombak di lapangan. Dan Regent telah membuktikan itu, bukan hanya teori belaka. Ini adalah *quote* dari Regent yang sangat menarik untuk kita renungkan : *"pola pikir seorang konservasionis adalah menyelamatkan alam dari kepunahan, menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan tatanan hidup dalam rangka keberlangsungan hidup dan kehidupan. Sebuah kerja mulia dan tentunya bernilai ibadah disisi-Nya".*

Susi Sumaryati menuliskan pengalamannya yang menggambarkan dinamika dan kehangatan kerja para PEH di TN Karimunjawa. Pak Gunung menjadi figur pemimpin yang dicintai anak buahnya. Mampu membawa suasana yang nyaman untuk berkembangnya tunas-tunas muda, terutama PEH untuk melakukan eksplorasi dan kerja di lapangan. Ide-ide segar dan terobosan Pak Gunung sangat membanggakan dan hal ini ditindaklajuti oleh sebagian besar PEH. Susi Sumaryati, menuliskan berbagai pengalaman lapangan, mulai dari pengalaman pertama belajar diving, inventarisasi mangrove, pengamatan burung, menggali potensi wisata, penyelamatan penyu, yang dikemas dalam bahasa yang mengalir enak. Cara bertutur yang mengalir seperti ini membuat kita seolah-olah masuk dan terhisap ke dalam suasana yang ceria, hangat, penuh dengan guyonan tetapi juga

tetap diselingi dengan *content* yang sarat dengan pesan konservasi, penerapan teknik atau metoda tertentu.

Semoga yang dituliskan dalam artikel ini mampu menginspirasi PEH di seluruh tanah air. *Never dive alone* menjadi pengalaman pribadi Susi Sumaryati ketika diselamatkan rekannya karena adanya kerusakan pada regulator tabung selamnya. Betapa, konservasi di lapangan dapat dan sering membawa implikasi yang sangat luas bahkan nyawa menjadi taruhannya, khususnya dalam pekerjaan penyelaman di kedalaman samudera yang penuh dengan resiko.

Supriyanto dan Sulistrianto menuliskan pengalaman unik, lucu, dan mengesankan saat menyelamatkan turis yang mendaki di Gunung Rinjani. Tak ada rotan akarpun berguna, pepatah lama mengingatkan kita akan cerita unik ini. Petugas Resort yang berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi wisatawan asing yang terperosok dalam jurang sedalam 30 meter pada ketinggian > 3.000 m dpl dengan mengangkutnya dengan peralatan sederhana, dengan waktu tempuh 7 jam perjalanan turun untuk meminta bantuan dan pengobatan.

Cerita yang sungguh menggugah nurani, jiwa korsa, jiwa menyelamatkan sesama, dan rasa tanggungjawabnya yang tinggi. Sikap mereka tentu patut dicontoh oleh petugas lapangan di manapun. Dituturkan dengan bahasa kocak, membuat cerita tentang "tandu sarung" sebagai pengganti *helycopter* ini menjadi sangat menawan, sekaligus menyentuh nurani. Semoga juga memberikan inspirasi anak muda di seluruh Indonesia yang cinta pada keindahan alam di tanah air yang sekaligus penuh dengan tantangan untuk menjaganya.

Perambahan

Isep Mukti, adalah figur muda yang juga tergolong unik. Ia membuat jurnal hariannya ketika awal bekerja dan diminta bergabung dalam Tim untuk menyelesaikan perambahan di SM Cikepuh. Ia tak menyangka bahwa 10 tahun kemudian, Nurman Hakim, memintanya untuk berbagi pengalamannya dalam penanganan perambahan. Dan catatan itu masih ada. Inilah kekuatan Isep, dan kebiasaan ini sebenarnya menjadi kewajiban para petugas PPA di masa 1980. Selalu membawa buku saku, dan setiap langkahnya ketika bertugas di lapangan, selalu masuk dalam catatannya. Kita mengtahui banyak keberhasilan penyelesaian perambahan, tidak sempat didokumentasikan sebagaimana Isep telah melakukannya dengan *passion*, dengan hatinya. Kata-kata kunci dari keberhasilan penyelesaian perambahan di SM Cikepuh ini adalah koordinasi, komunikasi yang sangat intensif dalam jangka panjang (hampir 2 tahun), dibarengi dengan kekompakan Tim Satgas yang juga didukung oleh masyarakat setempat.

Semoga catatan ini, menjadikan cermin bagi kita semua, dan semoga pembaca terutama generasi muda Ditjen PHKA dan para pecinta lingkungan dapat mengambil hikmah dari jurnal hariannya Isep, yang dibukukan 10 tahun kemudian. *Better late than never.*

Adhie Masturiatna adalah penyuluh di TN Bukit Barisan Selatan. Artikelnya didasarkan pada catatannya ketika pertugas sebagai penyuluh dan menghadapi berbagai persoalan perambahan. Ia melakukanberbagai upaya pemahaman kepada para perambah untuk turun dan keluar dari kawasan TNBBS. Upayanya cukup berhasil, dengan dukungan dari Kadus, dan diberikan penyuluhan yang berulang-ulang. Pendekatan tanpa senjata dan non represif ini

nampaknya cukup efektif mendorong para perambah untuk keluar, walaupun mereka sudah bermukim sejak 1999.

Ia tidak sempat menguraikan tentang tingkat kesejahteraan perambah setelah sekian lama mengusahakan kopi. Apakah mereka punya modal yang cukup untuk kehidupannya ke depan. Kepindahan perambah ke lokasi HPT yang berbatasan dengan taman nasional menunjukkan mereka memang tidak punya lahan. Ini persoalan utamanya. Bukan hanya tempat bermukim tetapi persoalan tidak dimilikinya lahan garapan. Ini tentu persoalan pokoknya yang seharusnya diupayakan jalan keluarnya.

Catatan seorang penyuluh yang cukup komprehensif dan mampu menunjukkan sisi persoalan kunci dari perambahan di TNBBS dan betapa salah satu penyebabnya adalah kurangnya petugas (6 orang harus menjaga kawasan seluas 20.000-30.000 Ha). Sedangkan di Jawa luas tersebut identik dengan luas 1 taman nasional (TN Gunung Gede Pangrango) yang dikelola oleh 200 orang staf, dan bahkan kini menjadi Balai Besar. Kondisi ini diperparah dengan euforia reformasi dan otonomi daerah, dimana seolah tidak ada hukum di lapangan.

Catatan ini juga menunjukan dedikasi dan peran seorang penyuluh ternyata cukup signifikan dalam memberikan pemahaman dan membuka jalur komunikasi dengan masyarakat. Kuncinya, seorang penyuluh harus seringkali ke lapangan. Sekali lagi, lapanganlah yang membuat kerja menjadi lebih nyata dan bermakna, dimana pengalaman konkrit bersentuhan dengan masyarakat dapat dilakukan. Tanpa senjata, mereka bersedia turun Ini kata kunci untuk keberhasilan penurunan perambah TNBBS di Kabupaten Liwa. Keberhasilan ini membuat Adhie semakin *pede* dengan profesinya sebagai penyuluh.

Kampanye Konservasi

Bobby Nopandy saya kenal pada masa 2005-2007 ketika saat itu saya menjadi Kepala TN Gunung Leuser. Ia seorang pribadi yang kalem dan seringkali bertandang ke kantor Balai TN Gunung Leuser untuk mengajak diskusi dan bertanya berbagai hal tentang konservasi. Artikel yang Bobby tulis adalah pengalaman pribadinya selama menjadi salah satu peserta RARE Program, dan penerapannya di SM Dolok Surungan. RARE memiliki program yang sangat bagus tentang bagaimana memperkenalkan kawasan dan mendapatkan dukungan dari konstituennya di tingkat masyarakat. Metodenya telah diuji di berbagai negara dan banyak memberikan hasil yang sangat positif tentang "membangun gerakan" konservasi, melalui beberapa tahapan. Bobby telah mengujinya di SM Dolok Surungan dan menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat positif untuk terjadinya dukungan atas dasar kesadaran yang dibangun bersama. Kutipan tentang perubahan tersebut adalah sbb:

> *Pada tahun 2011, Rumah Pintar Dongan didirikan oleh para konstituen SM Dolok Surungan bersama tim resort. Rumah Pintar Dongan diharapkan dapat menjadi simpul kerja bersama para pihak dalam rangka menjaga bara perubahan yang sudah dihasilkan demi upaya lestarinya SM Dolok Surungan yang berkelanjutan.*
>
> *Inisiatif pembangunan Arboretum Tanaman Asli SM Dolok Surungan muncul dari simpul ini. Penyediaan buku-buku bacaan dan media informasi lainnya ditujukan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak dan petani di Dolok Surungan melongok dunia yang lebih luas. Pak Mariadi, Ketua KSM Lestari Dongan, dan Pak Siddik, Fasilitator Forum Guru Dolok Surungan, mengatakan : "Masyarakat yang lebih pintar kelak akan lebih menjaga hutannya".*

Namun demikian, sebagaimana saya menyakini selama ini bahwa : "dalam konservasi tidak ada solusi tunggal". Kampanye saja tidak bisa menyelesaikan masalah perambahan. Demikian pula dengan penegakan hukum. Bobby menyimpulkan bahwa kini yang diperlukan untuk menyelamatkan SM Dolok Surungan, adalah penegakan hukum yang tegas terhadap aktor-aktornya, yang tetap membandel setelah diberikan peringatan berulang kali.

Yusuf Syaifudin adalah salah satu peserta program RARE. Ia telah membuktikan model kampanye dengan SMS Blast ternyata memberikan dampak nyata terhadap tingkat gangguan di Zona Inti TN Karimunjawa. Ia seorang pemuda dan staf muda yang gigih bekerja di lapangan. Ia beruntung karena didukung oleh kekompakan kerja seluruh staf TN Karimunjawa, di bawah kepemimpinan Gunung Nababan. Dua figur kepemimpinan muncul hampir bersamaan. Yaitu di TN Alas Purwo, lahir seorang Hartono yang membangun RBM selama 3 tahun penuh, sejak akhir 2007. Balai TN Alas Purwo menjadi UPT terbaik di 2009 dan TN Karimunjawa pada tahun 2010.

Yusuf Syaifudin menguji kampanye PRIDE dengan metode yang menarik yang disebut *"SMS Blast"*. Metode ini mengembangkan pola komunikasi dan kampanye pelestarian TN Karimunjawa melalui *handphone* yang dimiliki masyarakat. Dan terbukti ampuh untuk menyebarkan pesan-pesan konservasi. Metode ini patut dipelajari dan diterapkan di banyak kawasan konservasi dimana pun sinyalnya kuat.

Kisah-kisah dari lapangan dan telah menunjukkan keberhsilan, seperti inilah sebenarnya yang perlu dibungkus menjadi dalam *new initiative* dan sebaiknya diakui di tingkat nasional. Melalui

penerbitan buku ini semoga berbagai cerita menarik dan inspiratif dari berbagai belahan Indonesia dapat disebarkan dan ditularkan. Semangat kerja lapangan, dengan berbagai metode dan pendekatan baru, tentu akan menambah deretan spirit kaum muda konservasi alam di Indonesia. Walaupun semakin berat tantangan yang dihadapi, optimisme yang telah berhasil ditunjukkan, seperti yang diceritakan kembali oleh Yusuf Syaifudin, tentu perlu kita sebarluaskan ke berbagai kalangan. Pengambil kebijakan sebaiknya semakin membuka diri di era digital dimana batas dan jarak tidak lagi menjadi penghalang kita untuk berkomunikasi dan saling berbagi pengalaman. Welcome generasi-C yang telah terbukti mampu mendukung kelola kawasan konservasi yang semakin efektif, di tingkat lapangan.

Hukum dan Konservasi

Suer Suryadi adalah pribadi yang unik. Semula adalah ahli biologi dan dengan pengalaman kerja konservasi yang panjang. Penugasan di Program Manager CI Papua membelokkan minatnya dari biologi ke hukum. Ia bahkan mengambil S1 hukum sampai lulus dan saat ini tetap mengemban minat awalnya di bidang konservasi dan lingkungan secara luas sekaligus seringkali membantu UPT dalam analisis hukum kasus-kasus kejahatan kehutanan. Pernah selama 2 tahun membantu Pokja Penanangan Perambahan, DitKKBHL (2010-2011). Dua kasus Pra Peradilan tersebut adalah kajian hukumnya, yang dapat secara gamblang membantu kita untuk belajar dari kesalahan di masa lalu, untuk tidak diulangi di masa depan. Sebuah tawaran yang sangat simpatik dan semoga bisa disambut oleh Dit PPH. Artikel ini menunjukkan pentingnya dilakukannya pembenahan dan kajian-kajian hukum secara lebih sistematis. Hal ini mengingat kasus-kasus hukum baik perdata,

pidana, dan Peratun akan semakin meningkat baik dalam hal jumlah dan kompleksitasnya. Artikel ini merupakan satu-satunya berbagi pengalaman tentang aspek hukum yang berdasarkan pengalaman dari lapangan. Semoga memberikan kontribusinya yang nyata dalam seluruh artkel dalam bukum kompilasi ini.

Restorasi Leuser

Ujang Wisnu Barata, Ahtu Trihangga, Keleng Ukur. Inisiatif membangun percontohan restorasi ekosistem di areal eks perambahan sawit, di TN Gunung Leuser, yang luasnya tak lebih dari 50 hektar, pada mulanya dianggap angin lalu oleh banyak pihak. Inisitaif ini digelar setelah editor meninggalkan TN Gunung Leuser (Agustus 2007) dan bertugas di Jakarta. Mereka yang mendorong mulai dari gagasan menjadi aksi nyata adalah Ratna Hendratmoko, Ujang Wisnu Barata, Subhan, dan didukung oleh Suer Suryadi dan Koen Meyers. Akhirnya UNESCO menyetujui ide ini dan membiayainya untuk beberapa tahun.

Artikel ini menceritakan proses detil dari tahapan restorasi di Resort Cinta Raja ini. Yang perlu dicatat adalah munculnya "fenomena Keleng Ukur". Dialah yang menjadi penjaga hutan sejak awal proyek ini berjalan, dengan cara tinggal di pondok restorasi hampir sepanjang 2,5 tahun dan bahkan sampai saat ini. Pendekatan ke masyarakat tanpa senjata. Menyapa masyarakat eks perambah. Menghampiri mereka dan berbaur dengan mereka. Menjelaskan apa tugas dia dan mengapa dia menjaga kawasan hutan eks prambahan itu.

Kini, areal restorasi ini seringkali dijadikan tempat studi banding. Hutannya kembali tumbuh, membelukar dan mengundang satwa yang semula tidak pernah datang, mulai menghampiri petak

hutan yang sudah mulai aman dan terjaga dari punya *chainsaw* dan kayu tumbang tersebut. Pak Keleng selalu mengirimkan pesan pendeknya ke kami di Jakarta, tentang pondok restorasi dan perkembangan pertumbuhan hutan yang dijaganya. Sampai kini, ia dan kawan-kawannya masih terus menjaganya, menghampiri setiap pohon yang ditanam dan menyulaminya bila ada yang mati.

Suatu tindakan mulai dari seorang Kepala Resort yang memiliki tanggungjawab akan pekerjaannya. Dari restorasi Sei Serdang, kita akan banyak belajar banyak, bukan hanya soal pemulihan hutan, tetapi juga tentang sikap mental kita. Tentang etos kerja dan ketulusan dalam bekerja. Pak Keleng mendapatkan penghargaan Menteri Kehutanan pada tahun 2010 atas kerja kerasnya itu. Ia didaulat berbicara di depan peserta workshop penanganan perambahan di Bogor. Semoga akan lahir banyak *"Keleng Ukur"* lain di berbagai belahan dan sudut-sudut kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kami yakin, masih banyak contoh-contoh nyata dari lapangan, yang harus segera dituliskan pengalamannya itu agar tidak hilang tak berbekas. Dokumentasi dari pengalaman lapangan ini menjadi salah satu strategi pewarisan (*legacy*) untuk generasi masa depan. Sebaiknya kita tidak memandang sebelah mata akan upaya-upaya dokumentasi ini, karena ia menjadi bagian dari arus utama strategi konservasi di era Indonesia modern. Selamat menikmati berbagai pengalaman penuh makna dari lapangan tersebut. ***

Daftar Isi

1 Restorasi Ekosistem dan Pengamanan Hutan di Resort Cinta Raja, TNGL

Restorasi Ekosistem dan Pengamanan Hutan di Resort Cinta Raja, TNGL

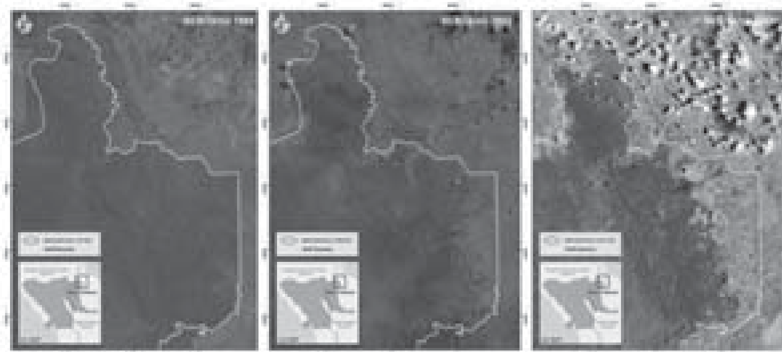
Ujang Wisnu Barata, Ahtu Trihangga, Keleng Ukur

Sisi Timur TN Gunung Leuser

Kawasan hutan di wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah VI Besitang, Kabupaten Langkat merupakan salah satu bagian kawasan TN.Gunung Leuser yang mengalami kerusakan parah. Kerusakan tersebut telah terjadi sejak tahun 1978, ketika masih berstatus Suaka Margasatwa.

Penyebab kerusakan / terbukanya kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang kaya jenis dan merupakan habitat satwa gajah tersebut, antara lain disebabkan oleh kesalahan kebijakan di masa lalu, *illegal logging,* pembukaan lahan untuk kepentingan tanaman pertanian dan umumnya untuk penanaman sawit dan karet, perambahan oleh pengusaha sawit skala sedang, penjualan lahan yang sudah terbuka kepada pihak-pihak ketiga, dan pendudukan sebagian kawasan oleh ± 500 KK pengungsi asal Aceh sejak tahun 1999. Penguasaan dan jual beli lahan kawasan ini meliputi areal seluas ± 16.000 Ha.

Pada tahun 2006, laju kerusakan tersebut telah coba dikendalikan melalui upaya penegakan hukum terhadap para pelaku ilegal logging dan perambahan serta upaya pendekatan kepada para pengungsi yang bermukim di dalam kawasan agar tidak menambah luasan lahan garapan. Di sisi lain, proses suksesi alami pada bekas-bekas lahan yang dikerjakan para perambah yang telah "terusir" terus berjalan, sehingga di beberapa blok hutan telah banyak ditumbuhi semak, dan menjadi tempat hidup satwa.



Series data deforestasi tahun 1989, 2001, dan 2009 di Besitang
(sumber: GIS UNESCO Office, Jakarta)

Sekoci Akhir-akhir Ini: Gambaran Penegakan Hukum yang Berlarut-larut

Sekoci adalah salah satu wilayah resort di TNGL yang cukup fenomenal. Sejarah kelam banyak tercatat di areal ini. Tekanan terhadap kawasan yang diakibatkan kesalahan kebijakan masa lalu membuat upaya penegakan hukum tak pernah putus, dan tak kalah sulitnya dengan menegakkan benang basah. Areal yang subur, relatif datar dan mudah terjangkau sangat mengundang hasrat para perambah untuk menguasai. Ditambah lagi program-

program rehabilitasi di kawasan ini sering kurang optimal karena perencanaan yang kurang komprehensif dan pengawalan paska kegiatan yang sangat lemah. Padahal diyakini, bahwa kegiatan rehabilitasi sebenarnya dapat menjadi pintu masuk strategis untuk kembali menguasai kawasan secara utuh. Dukungan para pihak dan masyarakat sekitar dapat digalang melalui kegiatan rehabilitasi dengan melibatkan mereka. Perlu komitmen dan keseriusan dalam merehabilitasi dan mengamankan Sekoci, mengingat penyelesaian permasalahan di wilayah ini tidak lepas dari permasalahan pada simpul-simpul lain termasuk keberadaan pengungsi di resort Sei Lepan.

Dalam kurun waktu setahun terakhir (2011-2012), upaya penertiban perambah di Sekoci kembali digeber dengan intensitas yang kembali mengencang di bawah kendali kepemimpinan Bp. Andi Basrul. Upaya ini adalah yang kesekian kali dan patut diapresiasi. Ditengah ketidakjelasan program relokasi pengungsi, serta kurang optimalnya kegiatan-kegiatan tanam-menanam, gebrakan ini mengagetkan para perambah yang telah kembali terorganisir rapi dibalik tameng keberadaan pengungsi.

Pengulangan penanganan kembali dilakukan. Pintu masuk berupa paket kegiatan penanaman yang kali ini melibatkan TNI kembali dibuka. Pada pelaksanaannya, komponen TNI membuka posko di beberapa titik di dalam kawasan, sekaligus untuk menguasai dan mengamankan areal kegiatan. Penanaman dilakukan dengan melibatkan kelompok - kelompok masyarakat di sekitar Sekoci. Dalam selang waktu September – Desember 2011 TNI melakukan penanaman di sekoci seluas ± 3.000 Ha. Wow!! Luasan yang fantastis.

Penguasaan kawasan melalui kegiatan penanaman ini kemudian dilanjutkan dengan penumbangan tanaman ilegal (sawit, karet) dan pengrusakan gubuk2 perambah di lokasi-lokasi lainnya yang berdekatan. Sampai dengan Februari 2012, lahan seluas ± 1200 Ha berhasil dibebaskan dari tanaman kelompok perambah, yang meliputi wilayah Alur Gusta (kelompok HS) sampai dengan Tower (kelompok DS dan sebagian MS). Mereka adalah tokoh-tokoh lama yang berpindah-pindah areal rambahan. Penumbangan yang dilaksanakan belum menyentuh lahan milik pengungsi, dimana sudah ada pertemuan dengan Darmo –ketua kelompok pengungsi- bahwa lahan pengungsi sementara masih dibiarkan sebelum ada keputusan penyelesaian pengungsi lebih lanjut.

Upaya kembali terhenti ketika penumbangan mengarah ke areal rambahan milik kelompok 52, yang lahannya berada pada batas kawasan TNGL yang memiliki sejarah konflik. Areal ini telah dipahami oleh sebagian besar mayarakat berada di luar kawasan TNGL berdasarkan hasil rekonstruksi batas tahun 1992. Puncaknya adalah ketika ratusan massa mendatangi kantor sekoci/poskotis dan memaksa personil TNI untuk mengakhiri keberadaannya di Sekoci. Demonstran sampai melakukan aksi menginap di depan resort dengan mendirikan tenda teratak dan membuat dapur umum, memaksa akan menginap sampai permintaan terkabul. Akhirnya pasukan TNI ditarik. Kondisi ini membuat petugas TNGL kembali mendapat tekanan dari kelompok perambah di lapangan.



Suasana Operasi Khusus Pengamanan Hutan (OKPH) di resort Sekoci tahun 2011

Cerita tentang Sekoci tersebut hanya untuk menggambarkan betapa sulitnya upaya penuntasan masalah di sana. Upaya terakhir sangatlah mirip dengan kencangnya upaya penegakan hukum pada tahun 2006 yang berhasil kembali menguasai wilayah Sekoci. Namun masalah tidak akan pernah tuntas selama 3 permasalahan pokok belum diselesaikan, yaitu: keberadaan pengungsi, kesepahaman batas kawasan, dan upaya hukum terhadap aktor intelektual perambahan. Sementara itu, dari sisi pemulihan kawasan, upaya penanaman yang dilakukan sangatlah jauh dari konsep *scientific based restoration*. Diperlukan fokus areal, yang tidak perlu terlalu luas (untuk memudahkan kontrol), namun benar-benar dilakukan secara *scientific* untuk menjamin keberhasilan. Baru kemudian diperluas secara pelan-pelan dan tak putus-putus, sambil terus melakukan upaya penegakan hukum. Tentunya, untuk wilayah

yang level keamanannya seperti Sekoci, *back up* personil juga harus dipikirkan, baik kuantitas maupun kualitas.

Cinta Raja: Kawasan dengan Potensi Penyelesaian Permasalahan yang Menjanjikan

Selain Sekoci dan Sei Lepan, salah satu lokasi yang masih belum bebas dari aktifitas perambahan dan illegal logging adalah resort Cinta Raja. Di lokasi ini terdapat areal sawit perusahaan yang masuk ke dalam kawasan taman nasional. Pada tahun 2002, Balai TNGL pada saat itu menyatakan areal sawit PT. Mutiara Sei Lepan sebagian masuk ke kawasan TNGL seluas ± 50 Ha. Selanjutnya, manajemen PT. Mutiara Sei Lepan memohon kepada Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I Medan untuk mengukur areal sawit tersebut. Dari hasil pengukuran BPKH, dinyatakan bahwa areal PT. Mutiara Sei Lepan sebagian tanamannya masuk ke dalam kawasan TNGL seluas 53,5 Ha. Terhadap areal ini kemudian dinyatakan dalam status stanfas. Selama sampai dengan tahun 2006, belum dilakukan penanganan lanjutan pada areal ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, PT. Mutiara Sei Lepan menjual seluruh asset kebunnya kepada PT. Tunas Baru, yang juga meliputi areal tanaman yang berstatus stanfas. Pada akhir tahun 2006, melalui Operasi Hutan Lestari II dilakukan pemasangan *police line* oleh aparat keamanan pada areal sawit PT. Tunas Baru yang telah diserahkan kembali kepada pihak Balai TNGL tersebut. OHL II berhasil merelokasi kantor dan camp karyawan PT. Tunas Baru ke luar kawasan TNGL. Dalam perkembangannya, areal tersebut kemudian dikosongkan, meskipun beberapa pihak masih memanfaatkan buah tanaman sawit yang tersisa.



Peta letak lokasi resort Cinta Raja (warna hijau)

Pada tahun 2007, manajemen PT. Tunas Baru menjual asset kebunnya kepada PT. Megah Puspa Plantation. Pemilik baru ini telah mengetahui sejarah dan status sebagian areal kebun sawit tersebut. Koordinasi secara intensif terus dilakukan oleh manajemen Balai Besar TNGL di tingkat lapangan dengan perusahaan PT. MPP. Penyelesaian yang berlarut-larut tersebut dan ditambah dengan fakta bahwa sering terjadi kesimpangsiuran batas serta banyaknya pal batas yang telah hilang di lapangan, membuat beberapa oknum masyarakat melakukan perambahan kawasan. Mereka berani merambah kawasan karena areal kebun perusahaan yang berada di dalam kawasan TNGL tidak segera diselesaikan. Untuk itu, restorasi kawasan di areal tersebut bernilai strategis dalam upaya penegakan hukum, menentukan kejelasan batas, dan melakukan pemulihan kawasan.

Proyek Pelibatan Masyarakat?

Pengelola yang konvensional biasanya memiliki pola pikir bahwa masyarakat biasanya apatis, dan pelibatan mereka hanya buang-buang waktu. Padahal, pengelola pada dasarnya memiliki tanggungjawab untuk melakukan pendekatan partisipasi masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, dan lembaga-lembaga masyarakat mempunyai tugas berdasarkan hukum yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebaliknya, masyarakat semakin meningkat kesadarannya dengan mengharapkan ”partisipasi yang lebih bermanfaat”, yang dalam keyakinan mereka termasuk pula pelimpahan sebagian kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan ini menimbulkan isu ”apakah kelompok yang diberi kepercayaan dan kekuasaan dapat dipercaya” (Bruce Mitchell et. al., 2003). Kepercayaan, komunikasi, kesempatan dan fleksibilitas merupakan elemen penting yang menentukan efektif tidaknya program-program partisipasi masyarakat.

Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukan sistem-sistem pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pada tingkat negara, pengelolaan dilakukan oleh kantor pemerintah yang diberi wewenang khusus dan resmi untuk bidang-bidang pengelolaan sumberdaya tertentu. Bentuk pengelolaannya selalu dicirikan dengan sangat terpusat dan hirarki, dengan kantor pusat yang menentukan kebijakan serta kantor lokal yang menerapkannya. Pelaksanaannya didasarkan pada otoritas yang diberikan berdasar hukum dan peraturan. Sebaliknya, sistem-sistem pengelolaan lokal didasarkan atas pengetahuan percobaan, tradisi budaya, adat-istiadat, tanpa aturan dan hukum resmi. Pendekatannya sepenuhnya tidak terpusat. Semua keputusan

ditentukan berdasar kesepakatan, sementara pelaksanaannya didasarkan atas sanksi-sanksi sosial.

Pada lingkup wilayah kerja Balai Besar TNGL, kesepakatan dua desa dalam membuat Peraturan Desa dan diperkuat dengan pembentukan lembaga pengelola yaitu Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat pinggiran Leuser memiliki inisiatif untuk turut serta mengelola kawasan pada lingkup pengembangan ekowisata. Kedua desa tersebut, yaitu desa Namo Sialang dan desa Sei Serdang, telah sepenuhnya menjadi pengelola dan mitra BBTNGL dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Balai TNGL dan LPT pada tahun 2006. Model seperti inilah yang harusnya ditularkan ke wilayah ”pinggiran leuser” lainnya.

Kita sering mendengar bahwa sebuah proyek akan dinilai ideal, bagus, ketika ada unsur pelibatan masyarakat di dalamnya. Namun pertanyaannya kemudian adalah, pelibatan seperti apa? Kenyataan menunjukkan beberapa proyek baik yang diinisiasi oleh pemerintah, swasta, maupun LSM justru meracuni pola pikir masyarakat akan essensi sebuah proyek. *Project oriented* yang salah arah, banyak dimaknai dengan sangat pragmatis, sehingga justru menciptakan ketergantungan. Menjadi lebih sulit ketika staf-staf lapangan juga sudah terbiasa dengan urusan bagaimana ”mengakali” kegiatan. Maka yang terjadi kemudian adalah kegiatan selesai, akuntable dari sisi keproyekan, namun masalah tak pernah terselesaikan.

Keberhasilan sebuah proyek seharusnya belum bisa dinilai tepat ketika proyek selesai, apalagi sedang berjalan. Proyek mestinya menciptakan kesinambungan (sustainability), jaminan pengembangan (improvement), dan pendewasaan sikap bagi para

pelaku dan objek sasaran. Pengulangan suatu kegiatan pada tapak yang sama, target yang sama, serta sasaran pelaku yang sama, merupakan wujud kegagalan. Apa kaitan aspek ini dengan restorasi ekosistem di TN Gunung Leuser? Apa sebenarnya makna restorasi ekosistem versi orang lapangan yang tidak tahu-menahu mengenai keproyekan? Sepenggal cerita dari ”wilayah tak terpantau” berupa hamparan ”kecil” di sisi tenggara TN Gunung Leuser berikut ini mudah-mudahan dapat memberikan tambahan informasi yang berguna dalam menjaga dan mengamankan kawasan.

Seperti Apa Restorasi Ekosistem di Cinta Raja?

Gagasan awal restorasi ekosistem didasari oleh keprihatinan terhadap output kegiatan tanam-menanam. Kuantitas dalam hal luas areal, jumlah bibit tertanam, personil/masyarakat yang terlibat, seolah-olah menjadi tolok ukur sahih keberhasilan dengan melupakan essensi dalam hal akselerasi menumbuhkan dan memulihkan hutan sebagai kesatuan tumbuhan beserta segala biodiversity yang membentuk ekosistem di dalamnya. Ilmu kehutanan yang melekat sebagai seorang forester seolah-olah lenyap ditelan hingar-bingarnya nuansa keproyekan. Cerita Sekoci adalah salah satu refleksi bagaimana sulitnya meremajakan hutan meskipun melalui target-target luasan yang begitu mencengangkan, ditengah kompleksitas masalah penegakan hukum yang begitu rumit. Jadi, kenapa harus selalu mengejar luasan besar ketika yang kecil-kecil, namun fokus dan dilaksanakan dengan penuh komitmen bisa lebih menjamin keberhasilan? Dan kemudian yang kecil-kecil namun berhasil tersebut diduplikasi di segala penjuru areal? Yang kecil namun banyak ini juga lama-lama akan terakumulasi menjadi sesuatu yang besar. Sedangkan secara teknis teoritis, tidak perlu memaksakan diri juga untuk melakukan pemulihan di setiap titik,

karena pada prinsipnya hutan dapat pulih secara alami. Kenapa tidak dimulai dari pinggir kawasan, pada spot-spot strategis yang mudah dimonitor, namun benar-benar jadi?

Pada tahun 2007, adalah tokoh-tokoh seperti Suer Suryadi dan Koen Meyers, selaku pentolan UNESCO yang kebetulan keduanya sangat intens bekerja sama dengan BBTNGL -melalui program kemitraan pasca tsunami 2004 yang berkelanjutan-, yang melontarkan ide brilian tersebut. Mereka mencoba benar-benar menyentuh substansi "roh" dari makna restorasi ekosistem itu sendiri. Menyadari akan sulitnya menularkan pemahaman dasar mengenai restorasi ekosistem, kedua orang ini, dengan kesabaran dan keuletannya mulai merancang setting agenda. Semua serba terencana dan terukur. Mulailah konsep *scientific based restoration* mereka godog bersama pakar restorasi ekosistem yaitu Dr. Kuswata Kartawinata dan Dr. Ismayadi Syamsoedin. Tahapan pra kegiatan, *enabling condition*, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, semuanya terjadi *by design*. Termasuk juga kehati-hatian dalam memilih lokasi. Dimana selama proses ini juga terjadi diskusi dan koordinasi dengan manajemen BBTNGL saat itu.

Mengutip hasil penelitian Dr. Kuswata Kartawinata, diperlukan waktu tidak kurang dari 170 tahun untuk memulihkan kerusakan hutan hujan tropis dataran rendah seperti di wilayah Besitang tersebut. Restorasi merupakan bentuk campur tangan manajemen untuk meng-akselerasi pemulihan ekosistem. Kegiatan ini bertujuan memulihkan kawasan TNGL mendekati kondisi ekosistem aslinya, melalui pendekatan ilmiah dengan metode monitoring serta penyajian database areal restorasi. Di sinilah pemahaman dalam mengimplementasikan sebuah konsep restorasi ekosistem sangat dibutuhkan. Bahwa restorasi ekosistem

merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang ternyata bukan melulu urusan pembibitan dan penanaman.

Pengalaman di resort Cinta Raja membuktikan bahwa ternyata kegiatan restorasi bisa menjadi awal dari pengembangan strategi pengamanan kawasan di tingkat tapak. Tidaklah terbayangkan sebelumnya bahwa kegiatan di areal yang "hanya" kurang lebih 30 Ha, berdampak luas terhadap pengamanan ratusan hektar areal sekitarnya.

Awal mula ketika konsep restorasi digulirkan, tanggapan yang muncul sangatlah beragam. Di tengah kegagalan demi kegagalan dalam proyek tanam-menanam, terbersit kekhawatiran bahwa yang satu ini juga akan menghasilkan cerita kegagalan yang sama. Bahkan sejak tahap pra persiapan, dibutuhkan lebih dari kerja keras dan kesabaran untuk memberikan pemahaman. Sebuah konsep hanya akan nampak manis di atas kertas ketika orang-orang yang terlibat dalam implementasinya tidak mampu menerjemahkan secara benar di lapangan. Diakui, bahwa ini menjadi tahap yang paling menyulitkan karena berbenturan dengan pemahaman umum mengenai keproyekan, dimana kegiatan tanam-menanam selalu identik dengan dana yang besar dan ouput yang bisa ditawar-tawar. Apa sih yang dilihat pertama kali dalam sebuah kegiatan? Kita semua sudah sangat mahfum bahwa besaran danalah yang selalu pertama kali menarik perhatian.

Dalam masa persiapan ini segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan sangat matang. *Setting agenda* dalam tahap ini adalah memetakan staf dan personil lain yang akan dilibatkan. *General planning* telah ada dalam kepala, bahwa kegiatan ini butuh support dalam hal kajian teknis, pelatihan, penetapan jenis tanaman

endemik, kajian antropologis, bahkan studi banding. Support, pendampingan dan arahan langsung sangat intens dilakukan oleh UNESCO dan para tokoh pengagas restorasi. Sampai kemudian, terealisasi sebuah paket kegiatan restorasi yang dibungkus dalam program kerjasama BBTNGL-UNESCO.

Hal lain yang tak kalah urgen adalah, siapa yang akan mengawal? Personifikasi seperti apa yang dapat menjamin semua ini diterjemahkan secara benar di lapangan? Singkat cerita, tim inti, tim underground, tim kecil (karena memang jumlahnya cuma segelintir orang), atau tim apalah namanya, mulai bergerak melakukan pemetaan personil. Kepala Seksi Wilayah Besitang pada saat itu, Subhan, pada saat yang sama sedang melakukan pembenahan staf. Melalui diskusi intensif dengan tim kecil, beliau menjadikan agenda restorasi ini sebagai pertimbangan utama dalam memilih kepala resort di Cinta Raja. *Screening* kemudian dilakukan, *track record* mulai kembali dibuka-buka, bahkan sampai dengan *interview* secara personal. Proses tersebut kemudian memunculkan satu nama, yaitu Keleng Ukur. Beliau memiliki reputasi lapangan yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sembiring Ompong (begitu sebutan para *logger* dan perambah), sangat mengenal tiap sudut Leuser, khususnya wilayah Langkat, memiliki hubungan baik dengan aparat desa di sekitar Leuser, khususnya Kecamatan Batang Serangan, Sei Lepan, dan Besitang, disegani oleh para pencuri kayu dan perambah, mau tinggal di lapangan, meskipun di tengah hutan, dan yang paling penting, di kalangan orang Karo, bapak satu ini terbilang "sakti" karena tidak pernah memakai alas kaki meskipun harus berjalan melewati semak berduri (di kalangan orang Karo, mereka yang berjalan kaki di hutan tanpa alas kaki adalah orang sakti). Kemasyuran dan keluwesan beliau dalam berinteraksi

dengan problem di lapangan adalah modal utama. Namun satu kendala kemudian muncul, bahwa pangkat beliau yang masih IIa ketika itu, belum memungkinkan untuk menjadi kepala resort. Dan masalah administrasi ini pun kemudian berhasil diperjuangkan oleh Kepala Seksi dengan mendapat dukungan dari top manajemen di tingkat Balai Besar.

Selanjutnya, tim dan atas advise intensif dari Suer Suryadi, mulai bekerja. Dari mulai tahapan survey dan persiapan lapangan, Pak Keleng terlibat langsung. Hingga pihak perusahaan (PT. MPP, yang sawitnya mau ditumbang), memberikan penginapan gratis plus logistik selama 9 hari ketika survey dan pembuatan plot permanen bersama tim ahli dari Litbanghut, Bogor. Hal yang membuat takjub Dr. Ismayadi Samsoedin, *team leader* saat itu. Bagaimana mungkin ketika tanaman sawitnya mau ditumbang, justru perusahaan membantu memberikan fasilitasnya. Inilah bukti nyata pendekatan humanis di tingkat lapangan, membuat kedua belah pihak tetap saling menghormati dan berhubungan secara harmonis. Sampai kemudian saat itu benar-benar tiba, bahwa pohon sawit mereka dirobohkan. Dimana penumbangan dilakukan pada areal yang benar-benar *clear and clean*, dan dilakukan dengan disaksikan oleh pihak perusahaan. Sampai dengan tahap ini, semua berjalan mulus.

Kemudian, tahap persiapan lahan lainnya adalah memperjelas pal batas, karena banyak tanda batas yang hilang. Peletakan pal batas ini didasarkan pada peta tata batas dan diperkuat dengan hasil pengukuran tahun 2002 yang menyatakan bahwa areal sawit seluas 53,5 Ha masuk ke dalam kawasan TNGL. Sebelum kegiatan, saat survey pertama kali dilakukan, hasil pengukuran internal Balai Besar TNGL (atas dukungan penuh UNESCO) hanya

menghasilkan wilayah *clear and clean* seluas ± 30 Ha. Wilayah *clear and clean* yang dimaksud adalah areal dimana batas kawasan telah dipahami oleh semua pihak sebagai batas TNGL, sehingga tidak akan menimbulkan konflik dengan kepemilikan lain apabila dilakukan kegiatan penanaman di wilayah tersebut. Namun yang kemudian menjadi tanda tanya adalah, dimanakah sebenarnya posisi di lapangan, areal sawit 53,5 Ha yang dinyatakan masuk ke dalam kawasan TNGL tersebut? Batas-batas di lapangan letaknya dimana? Sementara itu pal batas di lapangan sudah banyak yang hilang dan beberapa disinyalir sudah rusak, bahkan berpindah posisi. Untuk itu, tim dari BPKH Wilayah I Medan diturunkan, mengingat pentingnya penandaan dan pemasangan batas pada fase pra restorasi.

Kegiatan pengecekan dan pemasangan pal batas kembali berjalan mulus, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa, perusahaan bersangkutan, dan kepolisian. Sampai dengan beberapa titik pal batas, perwakilan dari perusahaan turut serta menyaksikan. Semua lega. Artinya penumbangan bisa dilakukan dengan batas yang telah jelas dan areal 50 Ha terpenuhi. Namun beberapa hari kemudian, pihak perusahaan kembali melakukan komplain, karena menurut mereka di lapangan batasnya tidak seperti itu. Hasil plotting sementara oleh tim TNGL ketika itu memang menunjukkan sedikit perubahan posisi pada beberapa titik. Namun, apapun hasilnya, pihak BPKH-lah yang memiliki kewenangan untuk masalah batas. Kemudian, untuk mengakomodir keinginan perusahaan serta menjamin mulusnya keberlanjutan program restorasi di lapangan, dilakukan beberapa kali dialog dan koordinasi. Akhirnya diputuskan untuk dilakukan pengecekan hasil pengukuran batas. Dari hasil cek ini posisi batas

kawasan kembali berbeda. Kali ini justru membuat kawasan TNGL menjadi berkurang luasannya. Inilah yang sering menimbulkan konflik. Di lapangan terjadi ketidak sinkronan mengenai batas kawasan. Bahkan dari petugas yang berwenang menentukan batas. Kondisi ini sempat membuat petugas lapangan berkecil hati, karena permasalahan batas yang diperkirakan akan segera selesai setelah melalui pendekatan dan dialog panjang dengan berbagai pihak, kembali buntu.

Namun program harus tetap berjalan. Setidaknya masih cukup tersedia areal *clear and clean* yang siap dipercepat suksesinya. Akhirnya di areal itulah tim lapangan bekerja. Banyak *improve* dan terobosan dilakukan oleh tim lapangan selama bekerja. Keberadaan pondok restorasi, kondisi hidup serumah di pondok, kunjungan intensif dari support tim (baik di Medan, Bogor maupun UNESCO Office Jakarta), membuat suasana kerja selalu fokus, sangat hidup, dan yang terpenting proses belajar dari lapangan begitu mengalir. Bahkan kemudian, ada kelompok masyarakat yang melakukan studi banding ke areal restorasi. Hal yang membuat semangat tim lapangan makin kuat karena merasa hasil kerja keras mereka mulai ada yang mengapresiasi.

Keberadaan pondok kerja menjadi satu poin penting tersendiri. Rumah kerja, dengan personil para penjaga hutan yang selalu *standby*, yang letaknya benar-benar berada di hutan, kemudian bertambah fungsi menjadi ”posko pengaduan masyarakat”. Satu persatu masyarakat mulai meminta kejelasan sebelum mengerjakan lahan, apakah lahan itu masuk kawasan TNGL atau tidak. Bahkan ada beberapa yang datang memberikan informasi dini mengenai kegiatan pembukaan lahan baru oleh masyarakat lain yang mereka yakini telah masuk ke dalam batas kawasan TNGL. Dari pondok

ini pula strategi pengamanan kawasan sering didiskusikan. Dari pondok inilah *home range* penaganan ilegal logging diperluas hingga ke Sei Glugur dan Sei Lepan yang beradius puluhan kilometer arah utara dan selatan pondok. Dari pondok inilah para pelaku ilegal logging dibuat kapok dan ketakutan karena petugas makin sering dijumpai, kendaraan motor dan mobil patroli sering berlalu lalang bahkan parkir di kampung-kampung untuk belanja kebutuhan pondok. Dari pondok inilah satu truk kayu milik cukong besar di Sei Musam (yang juga pemain lama, alm. Muat Sembiring) disita dan dibawa ke kantor Seksi Besitang. Dari pondok inilah Pak Keleng menjalankan pendekatan versinya, dengan mendatangi semua aktor utama ilegal logging dan perambahan. Dengan gayanya, halus namun menusuk (dan tetap tanpa alas kaki), mereka itu dibuat ”jiper”. *Support team* sendiri sering secara sengaja mengantar kebutuhan pondok dari Medan dengan menggunakan mobil patroli pada tengah malam. Hal yang sempat diprotes oleh Pak Keleng, kenapa selalu datang tengah malam, yang kemudian diakuinya sendiri bahwa ini bagian dari strategi. Datang tengah malam, pada saat jam-jam keluar kayu, dengan rute yang sengaja dilewatkan ke perkampungan para pelaku tinggal, cuma lewat, namun itu telah membuat mereka ketakutan, ngeri, dan berhitung.



Pencabutan tanaman karet perambah di sekitar areal
restorasi oleh personil pondok



emuan kayu ilegal di Sei Glugur, Resort Tangkahan oleh Polhut SPTN VI Besitang
berdasarkan informasi dari personil pondok

Begitu juga dalam urusan pembibitan dan penanaman. Banyak inovasi dilakukan oleh orang-orang pondok. Mereka memang dibebaskan. Melalui keuletan dan kesabaran Suer Suryadi, UNESCO Office, advisor dan salah satu inisiator program restorasi, serta ketekunan Ahtu Trihangga, seorang Penyuluh Kehutanan lulusan kehutanan dari UNILA yang senang bekerja di lapangan, kemauan belajar tim lapangan mulai tumbuh. Mereka tidak perlu takut salah, catat selalu hal-hal yang menarik, tuliskan kira-kira kenapa tanaman mati, serta melakukan kegiatan rutin seperti mengukur pertumbuhan, menyulam, menyiram bibit, juga mencari benih sampai ke tengah hutan untuk dibibitkan sendiri yang secara tidak langsung merupakan cara monitoring kawasan yang efektif karena tidak jarang berjumpa langsung kelompok masyarakat yang akan memulai beraktifitas illegal sehingga bisa dihimbau sejak dini. Diskusi yang tidak menggurui dikembangkan. Sering terdengar sentilan-sentilan lugu namun sangat jujur dari para penghuni pondok. Seperti, ”Nanti kalau Bapak-bapak ini pindah, siapa yang melanjutkan program ini?” atau ”Apa nggak capek kita nangkapin orang terus, mending diajak ngobrol, diancam dikit-dikit, diberi pengertian, tapi mereka kapok”. Suasana kekeluargaan dan saling menghargai sangat terasa. Dan ketika sisi kemanusiaan mereka disentuh, output-nya adalah dedikasi, totalitas, dan tetap bekerja dengan gembira. Faktor lain yang sangat penting dalam menjamin sebuah keberhasilan.

”Orang-orang pondok” itu juga memiliki idealisme. Mereka juga punya tekad, tidak mau gagal seperti ditempat lain dan tidak mau malu. Restorasi ekosistem di satu sisi, yang semula dibayangkan hanya melulu pekerjaan tanam menanam dan menjaga tanaman, ditangan mereka menjadi kendaraan untuk pengamanan

kawasan. Sudah tidak jelas lagi mana yang kegiatan utama, mana yang kegiatan pendukung. Restorasi sambil mengamankan, atau patroli sambil menjaga tanaman.



Peta plot areal restorasi Sei Serdang,
berisi informasi mengenai batas areal dan nomor plot

Kegiatan-kegiatan Pra Kondisi

Selain persiapan lahan dan batas kawasan, terdapat setidaknya empat kegiatan pra kondisi lainnya, yaitu: Kajian antropologis untuk mengetahui persepsi masyarakat, kajian teknis dan pembuatan plot permanen untuk monitoring, serta pelatihan personil restorasi. Ketiganya merupakan paket kegiatan yang dikemas dalam program kerjasama dengan UNESCO Office Jakarta, yang merupakan kesinambungan dari program kerjasama dengan UNESCO sebelumnya.

Kajian antropologis dilakukan oleh tim ahli/konsultan antropologi. Dalam kajian ini dihasilkan persepsi masyarakat

terhadap program restorasi, persepsi masyarakat terhadap penyelesaian perambahan di sekitar areal restorasi, dan pemetaan tokoh / pihak kunci. Dalam hal ini, keberadaan lahan sawit perusahaan PT. Megah Puspa Plantation yang sebagian berada di dalam kawasan TNGL, merupakan kunci masalah yang menjadi pegangan masyarakat bahwa selama perusahaan masih beraktifitas di dalam kawasan, maka masyarakat perambah enggan meninggalkan aktifitasnya. Di sinilah nilai penting restorasi, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan perambahan kawasan dan aktifitas ilegal lainnya. Aspek strategis tersebut menjadi acuan dasar pelaksanaan program restorasi selain aspek teknis untuk mempercepat suksesi alam dan pemulihan ekosistem.

Kajian teknis dilakukan oleh tim ahli dari Litbang Kehutanan dan Konservasi Alam, Kemenhut. Dalam kajian ini dihasilkan metode restorasi, kebutuhan pra kondisi kegiatan, dan penentuan permanen plot sebagai plot kontrol dan sumber bibit. Metode restorasi terkait persiapan lahan, penggunaan jenis asli Leuser melalui kontrol dari permanen plot, metode pencampuran kompos, ukuran polybag untuk pembibitan, penentuan lokasi pembibitan, kontrol naungan pada teknik penanaman, pembuatan peta kerja dan penentuan satuan plot tanaman, jarak tanam, ukuran lubang tanam, monitoring dan penyajian database. Kebutuhan pra kondisi kegiatan terkait pembangunan pondok kerja, persiapan tim, pelatihan teknis restorasi untuk personil tim, koordinasi dengan masyarakat/perusahaan terkait batas kawasan, program-program kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa dan anak-anak sekolah. Penentuan permanen plot pada kajian teknis selain berfungsi sebagai kontrol untuk melihat pertumbuhan /

perkembangan alami dan sebagai sumber bibit, juga berfungsi sebagai acuan jenis tanaman asli Leuser berdasarkan daftar tanaman yang ada di dalam plot (tiap jenis di permanen plot telah diberi *tagging* nama lokal dan nama latin).

Selanjutnya adalah kegiatan pelatihan restorasi untuk tim yang meliputi teknik pembibitan, penanaman, pemupukan, dan monitoring. Dalam kegiatan ini, instruktur berasal dari FORDA dan Balai Litbang Kehutanan Aek Nauli.

Kegiatan lain yang mensupport pelaksanaan restorasi ekosistem adalah inisiasi UNESCO pada serangkaian kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk masyarakat lokal dan anak sekolah. Kerja besar tersebut dihelat melalui kerja bareng antara Wildlife Conservation Society (WCS), dan BBTNGL serta dukungan tim voulenteer dari Sumatran Orangutan Society – Orangutan Information Center (SOS-OIC), Fauna & Flora International (FFI) dan Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) yang dibungkus dalam rangkaian *school visit*, sosialisasi ke desa-desa, pembuatan media kampanye (poster, mug, buku tulis, kaos, dll), dan puncaknya berupa jambore konservasi untuk anak SD dan SMP dari beberapa sekolah di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Tangkahan. Kegiatan jambore sendiri dilaksanakan selama 3 hari dengan beberapa materi lomba konservasi, pengenalan alam, serta aksi penanaman di lokasi jambore dan lokasi restorasi ekosistem (plot I). Satu pengalaman menarik dialami pada saat sosialisasi di Desa Sei Serdang, lokasi dimana secara administratif, site untuk restorasi ekosistem ini berada. Beberapa peserta yang hadir merupakan anggota cukong kayu lokal, dan tokoh perambah. Beberapa pertanyaan kritis dari masyarakat lainnya juga mencuat. Mereka mempermasalahkan ketidakjelasan batas, keraguan terhadap kemampuan petugas

di lapangan untuk menghentikan kegiatan ilegal logging dan perambahan, kegagalan proyek penanaman di resort Sekoci, serta perkembangan penyelesaian perambahan sawit oleh perusahaan di lokasi restorasi. Kesan yang kami tangkap adalah, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kawasan TNGL (dalam hal ini kelompok *logger* dan *encroacher*) datang ke forum sosialisasi untuk membaca situasi, mengukur kekuatan, dan berhitung mengenai keseriusan pelaksanaan restorasi ekosistem dan peningkatan pengamanan kawasan. Apalagi pertemuan ini dilakukan pasca operasi pencabutan tanaman karet di dalam kawasan TNGL di sekitar areal restorasi. Akibatnya pertemuan yang dilaksanakan menjelang buka puasa itu berlangsung sedikit panas, namun akhirnya semua hal dapat terklarifikasi. Dan yang paling penting, mereka telah menangkap keseriusan dan komitmen para penggagas dan pelaku restorasi.

Penguasaan Fisik dan Hasil

Dalam kunjungannya ke areal restorasi, Sekditjen PHKA waktu itu, Bp. Hariyadi Himawan menyatakan bahwa pola restorasi seperti ini (dengan adanya pondok dan personil standby) merupakan bentuk penguasaan fisik yang nyata dalam strategi pengelolaan kawasan konservasi. Pengalaman dari Cinta Raja tersebut memberikan hasil nyata, bahwa efek positif dari adanya aktifitas restorasi adalah :

1. Pengawasan areal dan lokasi sekitar restorasi lebih intensif dengan adanya personil standby di pondok, sehingga proses peremajaan tumbuhan baik yang di tanam maupun yang alami menjadi lebih optimal,

2. Satwa mulai berdatangan dan berinteraksi dengan habitat yang mulai pulih, yaitu jenis-jenis primata, burung, babi hutan, gajah, dan kambing hutan,
3. Aktifitas ilegal di sekitar lokasi dapat ditekan akibat peningkatan aktifitas patroli personil restorasi. Dalam keseharian, petugas dan masyarakat anggota tim restorasi melakukan monitoring tanaman, monitoring satwa, pemanenan biji dan anakan sebagai sumber bibit, dan belanja harian kebutuhan pondok. Lalu lalang mereka ini secara tidak langsung telah menunjukkan eksistensi manajemen BBTNGL di lapangan,
4. Informasi aktifitas restorasi ekosistem hutan TNGL telah banyak sampai ke masyarakat berbagai lapisan.

Sampai saat ini telah selesai tertanam areal seluas ± 27 Ha, dengan jenis-jenis asli Leuser (61 jenis), diantaranya : Meranti lilin (*Shorea teysmaniana*), Cengkuang (*Scutinanthe brunnea*), Rengas (*Glutta walichii*), Bayur (*Pterospermum buleanum*), Meranti merah (*Shorea leprosula*), Balik angin (*Mallotus barbatus*), Keranji (*Dialium indium*), Jering (*Archidendron jiringa*), Matoa/Pakam (*Pometia pinnata*), Cengal (*Neobalanocarpus heimii*), Terap (*Artocarpus odoratissimus*), Damar laut (*Hopea dryobalanoides*), Kelengkeng hutan (*Nephelium malaiense*), Kemenyan (*Styrax benzoin*), Medang landit (*Persea odoratissima*), Mayang durian (*Palaqium obovatum*), Meranti batu (*Shorea parvifolia*), Puspa (*Schima wallichii*), Suren (*Toona sinensis*), Sentang (*Azadirachta excelsa*), dan lain-lain.

Terhadap tanaman-tanaman tersebut dilakukan monitoring berkala (pengukuran tinggi, diameter, dan informasi kondisi tanaman). Hasil monitoring dituliskan dalam buku kerja harian dan dilakukan rekapitulasi, kemudian masuk dalam sistem database pada

program Sistem Informasi Restorasi (SIR). Meskipun SIR ini masih jauh dari sempurna, namun cukup untuk melakukan foldering data. Monitoring dilakukan pada blok dan sub blok tanaman yang pada akhirnya mengcover seluruh areal. Penentuan blok dan sub blok sangat membantu dalam membuat peta tanaman sehingga kondisi tanaman di masing-masing titik tanam dapat dideskripsikan secara jelas, bahkan asal bibit di masing-masing titik tanam dapat diketahui karena sistem *record* yang tercatat sejak tahap pembibitan. Hal yang sama juga dilakukan pada areal persemaian untuk monitoring kondisi bibit. Sambil melakukan monitoring dan pengukuran pertumbuhan tanaman, tim juga mengisi tally sheet perjumpaan satwa baik langsung maupun tidak langsung (jejak, bulu, suara), kondisi cuaca, dan temuan lainnya. Untuk memonitor kondisi cuaca harian, juga telah dipasang alat pengukur curah hujan harian. Di halaman pondok, disediakan areal demplot tanaman yang menggambarkan perwakilan jenis-jenis yang ditanam di areal. Tanaman di lokasi demplot dilengkapi dengan *tag name* yang berisi informasi identitas penanam, jenis tanaman, dan tanggal penanaman. Kami juga mewajibkan setiap pengunjung yang datang ke areal pondok untuk menanam pohon menggunakan bibit yang selalu tersedia di persemaian.

Untuk mengembangkan dan menyempurnakan aktifitas restorasi ekosistem ini, beberapa hal berikut perlu menjadi perhatian:

1. Tindak lanjut kejelasan batas kawasan tidak hanya di areal restorasi, namun juga pada tempat-tempat rawan disekitarnya, dimana banyak pal batas yang hilang,
2. Dalam tindak lanjut program, perlu dipertimbangkan peningkatan luasan dan kualitas kegiatan dengan personil yang berkomitmen dan terlatih,

3. Pendekatan dengan pihak perusahaan (PT. MPP) perlu terus dilakukan, demikian juga penumbangan areal sawit mereka. Hal ini bernilai sangat strategis terhadap penyelesaian perambahan di areal sekitarnya,
4. Perlu dipikirkan pengembangan areal restorasi menjadi areal wisata minat khusus yang terintegrasi dengan kawasan ekowisata Tangkahan yang telah dikenal, dan lokasi ekowisata baru di Damar Hitam yang juga sedang dikembangkan. Alternatif lain adalah sebagai lokasi penelitian. Banyak topik penelitian bisa digali dari lokasi ini, baik untuk S1, S2, maupun S3.

Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa jangan sampai restorasi menjadi kehilangan makna sebagai sebuah upaya yang scientific based yang memerlukan perancangan matang. Jangan sampai duplikasi restorasi hanya terbatas pada penamaan, sehingga kita mulai menamai apapun kegiatan tanam-menanam sebagai sebuah upaya restorasi. Untuk kawasan konservasi, apalagi taman nasional, pola pendekatan seperti GRNHL dan GERHAN memang sudah saatnya dievaluasi. Batasan yang lebih scientific seperti yang dilakukan di Cinta Raja harusnya lebih dikedepankan. Kalaupun harus melibatkan kelompok masyarakat, dapat dipikirkan kompensasi berupa kegiatan lain yang mendukung upaya restorasi tanpa harus kehilangan makna scientific-nya.

----------=====000O000=====----------



Foto pondok restorasi per 31 Agustus 2012, diambil dari arah demplot



Demplot restorasi di areal pondok yang merupakan representasi jenis-jenis yang ditanam di areal restorasi. Setiap tanaman di demplot dilengkapi dengan name tag yang berisi tanggal tanam, nama jenis, serta nama dan jabatanpenanam. Foto diambil tanggal 31 Agustus 2012. Nampak tanaman tertinggi adalah jenis Kedaung (*Parkia javanica*), yang ditanam pada tanggal 19 Maret 2010, dengan tinggi telah mencapai lebih dari 10 meter.

Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada tokoh-tokoh penggerak restorasi yang tak henti-hentinya memberikan masukan, saran, dan motivasi terutama kepada kawan-kawan penghuni pondok. Mereka-mereka yang sangat menginspirasi, punya kesabaran dan ketekunan, fighting spirit, kerendahan hati, dan selalu penuh solusi. Kang Suer Suryadi, Mister Koen Meyers, Pak Kuswata, Pak Ismayadi, juga rekan-rekan seperjuangan, Mas Ratna Hendratmoko, Pak Wiratno, terimakasih atas pelajaran mahal dalam memaknai "bekerja dengan hati". Support team yang luar biasa dari Pak Ari Subiantoro, Isra "Wen" Imran, Kang Tomin, Bang Subhan, Mbak Arantzasu Acha De La Presa, Mbak Rahma Akbari, Mbak Rina Purwaningsih, Kang Sunjaya, Mas Wanda Kuswanda, Mas Slamet Indarjo, serta para alumnus pondok: Pak Bolon, alm. Pak Suleiman, Pak Piyu Nabanan, Anto, Sumpeno, Djoko, Nuredi, Sopian, Arif, Doni, Jumiran, Agun, Remon Nababan, Budiman, Suparno, Rendi, dan Sunar. Dan tentunya juga kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.



Ujang Wisnu Barata. Lahir di Yogyakarta, 1 Desember 1975. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan. Selama kuliah, aktif sebagai pengurus Mapala Sivagama, sebuah kelompok pecinta alam di Fakultas Kehutanan UGM (1996 – 2000). Saat ini (2011-2013) sedang melaksanakan tugas belajar S2 sebagai peserta karyasiswa Bappenas pada program *Double Degree*: *Integrated Lowland Development Management Program*, Universitas Sriwijaya, Palembang, dan *Hydraulic Engineering – Land and Water Development*, UNESCO-IHE, Delft, the Netherland.Alamat Email: wisnoe_bharata@yahoo.com. Sejak tahun 2004 bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Besar TN Gunung Leuser. Terlalu banyak pengalaman lapangan yang menarik selama mengabdi di Leuser. Namun satu yang paling berkesan (karena terlalu konyol) adalah ketika pada tengah malam, bersama teman-teman Polhut Besitang menangkap dan mengawal tersangka illegal logging (plus kayu & mobil sitaan) ke Polres Langkat dengan waktu tempuh ± 1 jam. Saat itu tersangka adalah anggota Brimob yang dikirim bertugas di Besitang dari Gondowulung, Jogjakarta, bersenjata laras panjang lengkap dan dalam keadaan setengah mabuk. Sementara kami tidak membawa senjata apapun karena memang tidak punya. “Untung brimob itu mabuk, jadi mungkin nggak sadar kalau bawa senjata sehingga tidak melawan,” pikir kami... Buktinya, senjata hanya diletakkan di atas tumpukan kayu, bukannya ditenteng layaknya aparat yang selalu siaga...



AhtuTrihangga. Lahir di Poncowati, 28 November 1981. Lulusan Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selama kuliah aktif sebagai pengurus Organisasi Pecinta Alam Gumpalan FP Unila (2000-2007). Sejak tahun 2008 bekerja sebagai Penyuluh Kehutanan di Balai Besar TN Gunung Leuser (BBTNGL). Pengalaman yang sangat berkesan sekaligus menegangkan adalah ketika penulis mendampingi Komandan Kodim 0203 Langkat menginap satu malam di rumah eks pengungsi konflik Aceh di Barak Induk 13 - 14 Juli 2011. Saat itu keadaan masih memanas pasca Operasi Khusus Pengamanan Hutan (OKPH) tanggal 27 Juni 2011 yang berakhir dengan bentrok antara petugas gabungan BBTNGL, POLRI, TNI dan masyarakat dengan Perambah dan kelompok Eks Pengungsi Aceh yang menduduki Resort Sei Minyak dan Resort Sei Lepan. Melihat seseorang menunjukkan bekas luka tembak di perutnya, mendengarkan kisah-kisah heroik selama perlawanan, berjabat tangan dengan aktor-aktor pengggerak di balik layar. Sangat mencekam rasanya berada ditengah orang-orang yang jelas akan mencabik-cabik kita bila mengetahui bahwa penulis adalah petugas BBTNGL. Dengan pertimbangan keselamatan, penulis disamarkan identitasnya menjadi Sersan Budi anggota Intel Kodim 0203 Langkat. Sehari menjadi anggota TNI yang tak pernah terlupakan.



Keleng Ukur Sembiring. Lahir di Deli Tua, Sumatera Utara 23 Maret 1964, dan telah memiliki 5 orang anak. Pendidikan terakhir di SMAN 2 Medan. Sekarang tinggal di Dusun Otorita, Kelurahan Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumahnya berdekatan dengan kawasnya hutan TNGL di resort Sei Lepan. Sejak tahun 1986 bekerja sebagai Polhut di Balai Besar TN Gunung Leuser. Tidak heran jika beliau telah hapal seluk beluk kawasan TNGL wilayah Langkat. Bagi beliau, tidak ada pengalaman menarik selain terlibat dalam program restorasi ekosistem sejak tahun 2007, saat dimana beliau juga menjabat sebagai kepala resort pertama kali di Cinta Raja. Apa saja yang terkait dengan kegiatan restorasi menjadi pengalaman bahkan bekal hidup yang paling berharga buat beliau.

2 Menggalang Konstituen Konservasi di Dolok Surungan

Menggalang Konstituen Konservasi di Dolok Surungan

Bobby Nopandry

I

Siang itu puluhan anak bersorak-sorak gembira di pekarangan rumah Kepala Dusun Salipotpot, Desa Lobu Rappa. Dibimbing sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Sylva (Himas) Universitas Sumatera Utara. Mereka sedang memainkan game-game interaktif sambil belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Terutama tentang kelestarian hutan Suaka Margasatwa Dolok Surungan yang berbatasan langsung dan menjadi 'halaman belakang' Desa Lobu Rappa.



Hari itu memang hari istimewa. Sebabnya bukan karena cahaya matahari yang ramah seperti tersenyum dari balik awan tipis dan membuat suasana siang itu begitu teduh. Hari itu, 2 Pebruari 2012, warga Salipotpot sedang merayakan 'hari ulang tahun' atau hari jadi penetapan Suaka Margasatwa Dolok Surungan ke 38[1].

Sekelompok orang dewasa menyaksikan sambil sesekali tertawa melihat keluguan dan spontanitas anak-anak ini dari bawah tenda/terpal biru. Melebur di antara warga Salipotpot, petugas-petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan petugas Resort SM Dolok Surungan I terlihat Ny. A. Harahap-Ibu Camat Aek Songsongan, Toyip-Kepala Desa Lobu Rappa, dan Johannes Octo P. Manik, S. Sos-Kepala Seksi Konservasi Wilayah III, Balai Besar KSDA Sumatera Utara.

Baru saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini meresmikan Sekretariat Model Desa Konservasi Lobu Rappa dan pondok baca baru perpustakaan plus Rumah Pintar Dongan. Perpustakaan inilah yang pada hari-hari belakangan ini menjadi tempat bermain dan belajar anak-anak desa di sekitar SM Dolok Surungan.

Sebuah kelompok swadaya masyarakat (KSM) bernama Lestari Dongan bersama-sama dengan Forum Guru Dolok Surungan dan kelompok pemuda mendirikan dan mengelola perpustakaan ini

[1] Dolok Surungan sesungguhnya adalah nama sebuah gunung kecil di Kabupaten Toba Samosir. Dolok dalam bahasa batak dapat diartikan sebagai gunung/bukit dan Surungan berarti 'sesuatu yang (memiliki/ber)kelebihan'. Pada tahun 1924, pemerintah Belanda menetapkan area di sekitar Dolok Surungan sebagai kompleks kawasan hutan dengan luas ± 10.800 ha. Setelah Indonesia merdeka, kompleks hutan Dolok Surungan kemudian dikenal sebagai hutan Register 21.
Pada tanggal 2 Pebruari 1974, Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan No. 43/Kpts-Um/1974 menetapkan kawasan ini bersama dengan Kompleks Hutan Dolok Sihobun (± 13.000 ha) di sebelah selatannya (Register 22) sebagai Suaka Margasatwa Dolok Surungan dengan luas ± 23.800 ha. Kawasan ini diperuntukkan bagi perlindungan Tapir (*Tapirus indicus*) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai sipan dan satwa asli di bentang ekologi daerah Tapanuli lainnya.

secara mandiri. Buku-buku sebagian besar diperoleh dari donator-donatur perorangan maupun lembaga-lembaga konservasi yang menjadi jaringan Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan Yayasan PETAI yang menjadi pendamping kelompok-kelompok ini.

Setiap hari, selain sebagai tempat anak-anak membaca, menyelesaikan PR dari sekolah atau hanya sekedar sebagai tempat bermain, Rumah Pintar juga membuka kelas-kelas kreatif seperti Klub Baca, Pelajaran Bahasa Inggris, Menonton Film, Menggambar dan Mewarnai, atau Daur Ulang Sampah. Kelas-kelas ini dilaksanakan dengan pendampingan anggota KSM Lestari Dongan, Forum Guru, atau pemuda-pemudi desa. Sesekali dalam beberapa bulan relawan dari Universitas Sumatera Utara (USU) atau Yayasan PETAI datang mendampingi kelas sekaligus mengantarkan buku-buku sumbangan donatur.

Pada tahun 2008 – 2010, KSM Lestari Dongan membuat pembibitan swadaya tanaman meranti, petai, durian, rambe, dan aren. Hasil pembibitan ini ditanam di perladangan masyarakat sebagai bagian program ‘tabungan pohon’ dan penghijauan partisipatif. Selain itu, sebagian bibit dimanfaatkan dalam kerjasama perintisan pembuatan Arboretum Tanaman Asli Dolok Surungan dengan Resort SM Dolok Surungan I. Lima (5) ha areal bekas perambahan ditanami dan dirawat oleh masyarakat sebagai plot arboretum.

Forum Guru Dolok Surungan, sementara itu, menggerakkan program-program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah sekitar. Masing-masing guru yang tergabung di dalam Forum Guru menjalankan program seperti pembibitan siswa, majalah dinding, teater boneka, kelas drama, atau menciptakan lagu tema

Dolok Surungan di sekolah tempat mereka mengajar. MTs Nurul Falah, Desa Lobu Rappa, bahkan menggerakkan murid-muridnya untuk mengasuh tanaman Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) di SM Dolok Surungan. Setiap anak sebulan sekali membuat piringan dan membersihkan liana pada pohon meranti atau ingul yang menjadi asuhannya.



SM Dolok Surungan memang sedang menjadi pengikat antar kelompok-kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah, pemerintahan lokal, dan BBKSDASU sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kawasan ini. Bagi mereka, pelestarian SM Dolok Surungan adalah isu bersama dan Dolok Surungan sendiri adalah *stakeholder* utama dalam upaya partisipatif mewujudkan kawasan yang lestari dengan manfaat maksimal bagi masyarakat di sekitarnya sebagai tujuan kolektif.

Bahkan para mahasiswa Himas dari Departemen Kehutanan USU, Medan, juga ikut merasa sebagai *stakeholder* yang berhak dan wajib terlibat. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, HIMAS USU setiap tahun setidaknya dua kali mengirim kelompok-kelompok mahasiswa menempuh enam jam perjalanan darat dari Medan ke pedalaman Sumatera Utara menuju Lobu Rappa di ujung utara SM Dolok Surungan. Kata mereka, "Kami ingin belajar dan sekaligus berbuat bersama masyarakat maupun stakeholder lainnya melestarikan Dolok Surungan".

Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan keadaan lima tahun lalu. Sampai tahun 2008, hampir seluruh –untuk tidak mengatakan semua- mahasiswa Kehutanan USU belum pernah mendengar apapun tentang SM Dolok Surungan. Padahal Kehutanan USU adalah satu-satunya entitas pendidikan tinggi bidang kehutanan negeri di Sumatera Utara.

Pada level masyarakat, 5 tahun lalu belum ada petani yang sukarela menghijaukan kembali SM Dolok Surungan atau mengelola perpustakaan agar anak-anaknya kelak menjadi lebih pintar dan mempunyai pilihan bekerja lebih daripada sekedar bertani ekspansif membuka hutan. Belum ada guru-guru yang aktif

mengajak murid-muridnya memberi sumbangsih melestarikan SM Dolok Surungan, juga tidak ada anak-anak yang berlarian sambil bernyanyi merayakan 'ultah' SM Dolok Surungan atau membawa parang babat memelihara pohon reboisasi tanpa dibayar.

Meskipun sebenarnya memiliki kepedulian yang terpendam, masyarakat di SM Dolok Surungan I sebelumnya tidak terorganisir dan memiliki saluran untuk menyuarakan kepedulian terhadap hutannya. Dolok Surungan adalah nama kawasan hutan, masyarakat sekitar tahu itu. Tetapi 'hutan lindung' bernama Dolok Surungan (bahkan terminologi suaka margasatwa atau kawasan konservasi tidak mereka ketahui) adalah urusan pemerintah ! Termasuk dengan perambahannya, itu masalah kalian, kata masyarakat waktu itu[2].

II

Sebagian besar area SM Dolok Surungan berada di Kabupaten Toba Samosir, hanya sebagian kecil saja (± 25 ha) di sebelah utara yang berada di Kabupaten Asahan (Desa Lobu Rappa). Akan tetapi, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara di sebelah timur maka bentang ragam budaya masyarakat di kawasan penyangga SM Dolok Surungan juga berasal dari ketiga kabupaten ini.

Sejak akhir tahun 1980-an, kawasan SM Dolok Surungan mulai dirambah dengan pola klasik persekutuan jahat antara pengusaha dan petugas di lapangan. Pal batas kawasan dipindah untuk

[2] Pada tahun 2009, Resort SM Dolok Surungan I membuat sebuah KAP Survey untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan kawasan SMDS dan pola komunikasi. Sebagai hasilnya, di Desa Lobu Rappa tidak ada (0%) responden yang mengetahui status SMDS sebagai Kawasan/Hutan Konservasi, 14,3% responden menganggapnya sebagai Hutan Negara, 42,9 % responden menganggapnya sebagai Hutan Lindung, 17,9% responden menganggap SMDS sebagai Hutan Adat, dan 24% responden member jawaban lain dan tidak mengetahui apapun tentang status SMDS.



Kunjungan Pekan untuk kampanye pentingnya SMDS

kepentingan pembukaan kebun sawit milik dua orang pengusaha dari Kisaran, Asahan, Acun dan Su Hok.

Kepala Desa Meranti Timur (dari wilayah Tobasa) kemudian melepas lahan kawasan yang sudah berada di'luar' pal batas kepada kedua pengusaha dengan modus penyerahan tanah warisan dari warga. Setiap 2 ha lahan diakui oleh satu nama warga kemudian diserahkan kepada pengusaha dengan ganti rugi sekadarnya. Sampai dengan tahun 1990, 600 ha lahan kawasan disulap menjadi kebun sawit dengan modus ini.

Situasi ini merangsang datangnya pemain-pemain baru perambahan skala ratusan dan puluhan hektar. MD Panjaitan membuka 400 ha, Zebua membuka 50 ha, dan PT Nariti ikut-ikutan

melebarkan lahan kebunnya yang berada di batas kawasan ke arah dalam seluas 40 ha.

Kesan pembiaran dan impotensi penegakan hukum mendorong masyarakat sekitar (dari wilayah Tobasa dan Asahan) yang selama ini cukup menghormati keberadaan kawasan merasa 'berhak' ikut merambah[3]. "Kalau orang luar bisa mengapa kami tidak ?", kata masyarakat memberi pembenaran tindakan mereka ini.

Pembukaan lahan secara skala-skala kecil namun masif menjadi fase perusakan berikutnya. Hal ini diperparah oleh situasi psikologis masyarakat pada masa-masa reformasi dimana kewibawaan pemerintah yang memang sudah dikorup oleh oknum petugasnya sendiri di lapangan, menjadi semakin buruk di masa itu. Sampai tahun 2005, Balai KSDA Sumatera Utara II meyakini lebih dari 3000 ha kawasan telah diklaim perambah dan 90% dari luas itu sudah tidak bervegetasi asli lagi[4].

Minimnya kualitas dan kuantitas petugas serta minimnya sarana prasarana tentu menjadi alasan favorit untuk menerangkan kelumpuhan pengelolaan konflik ini, klise dan klasik. Selain itu itu koordinasi lintas instansi yang tidak maksimal, dan ketiadaan

---

3 Sebelum masuknya pengusaha perambah pertama (Acun dan Suhok) masyarakat bahkan tidak berani mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga di sungai di dalam kawasan karena upaya preventif yang kaku dari petugas. Hal ini menyebabkan terbangunnya 'bendungan hasrat' sebagai moral masyarakat memandang SM DS. Rasa hormat masyarakat terhadap kawasan pada periode 1980-1988 lebih dilandasi oleh rasa takut kepada petugas, bukan oleh pemahaman yang benar atas fungsi kawasan.

4 Ancaman utama di kawasan ini adalah pembukaan lahan untuk dikonversi sebagai kebun sawit dan karet. Pelaku utama adalah pengusaha yang membuka lahan dalam skala besar (40 – 150 ha per pengusaha) dan diikuti masyarakat yang membuka lahan dalam skala kecil per KK (2 - 4 ha) namun dalam jumlah kuantitas masyarakat yang besar. Sampai tahun 2008, diperkirakan ± 3500 ha kawasan SM Dolok Surungan sudah beralih fungsi menjadi kebun karet dan sawit.
Merujuk pada daftar skema klsaifikasi IUCN/CMP untuk ancaman langsung terhadap kawasan SM Dolok Surungan masuk dalam kriteria 6. Campur Tangan dan Gangguan Manusia (6.3. Pekerjaan dan Aktivitas Lainnya) dan kriteria 7. Perubahan (modifikasi) Sistem Alami (7.3. Modifikasi Ekosistem Lainnya).

main strategy untuk menyelesaikan permasalahan menjadi asalan berikutnya yang dipakai dalam analisis situasi.

SM Dolok Surungan dalam keadaan sekarat. Permasalahan yang terjadi bersifat kronis dan akut sekaligus. Tidak ada kata lain yang terlintas di benak staf Balai KSDA Sumatera Utara (II) selain kata 'Perambahan' jika mendengar tentang SM Dolok Surungan saat itu. Strategi penyelesaian masalah bersifat 'mengalir seperti air' mengikuti dinamika tanpa rencana yang taktis. Polanya sama, insidentil dan reaktif. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan, yang terjadi antar instansi saja tanpa melibatkan stakeholder lain, lebih bersifat formal dan semakin lama semakin menuntut pola penyelesaian masalah berbiaya besar.

III

Resort in Action

Awal tahun 2006, Kepala Balai KSDA Sumut II -Ir. Luhut Sihombing- menempatkan satu tim baru pada level resort di pusat permasalahan kawasan SM Dolok Surungan. Pada saat itu di Balai KSDA Sumut II resort disebut sebagai satuan Pengelola Kawasan. Maka, formasi baru ini kemudian disebut sebagai Pengelola Resort SM Dolok Surungan I[5].

Analisis awal tim ini adalah perlunya SM Dolok Surungan menjadi obyek pengelolaan partisipatif yang melibatkan lebih banyak *stake holder* di dalamnya. Tentu saja yang dimaksud adalah

5 Pada waktu itu kawasan SM Dolok Surungan dibagi menjadi 2 unit pengelola : SM Dolok Surungan I di Desa Lobu Rappa, Kabupaten Asahan dan SM Dolok Surungan II yang berkedudukan di Parsoburan, Kabupaten Toba Samosir. Penulis pada saat itu dipercaya menjadi Kepala Pengelola S M Dolok Surungan I sebagai salah satu dari dua orang sarjana yang diberi amanah bekerja pada level resort di Balai KSDA Sumatera Utara II selain Hasrul Tambak, S.Hut di SM Barumun. Hasrul kini menjadi salah satu pejabat eselon IV di Kabupaten Mandailing Natal



pembahasan potensi desa dengan PRA bersama tomas

stake holder yang dapat berperan dan berpikir aktif dalam kerangka pencapaian tujuan bersama, bukan tujuan masing-masing. *Non Government Organisation* (nGO)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup di Medan yang memiliki *track record* baik menjadi pilihan utama untuk didekati selain universitas yang memiliki jurusan bidang kehutanan (USU). Aspek konservasi dengan semangat pelestarian kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi ruh pengelolaan partisipatif ini.

Sementara pencarian mitra nGO berjalan, penguatan masyarakat dan komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal juga digulirkan oleh resort. Kepala-kepala desa di sekitar kawasan diajak bicara. Sifat terbuka diterapkan sampai batas maksimal yang memungkinkan sehingga masyarakat dapat bebas memberikan

pendapatnya tanpa jarak. Sehingga, sudut-pandang yang didapat dari komunikasi interpersonal ini tidak hanya pendapat 'yang mereka kira ingin kita dengar', tetapi pendapat sesungguhnya yang kadang tidak mungkin mereka sampaikan dalam kesempatan-kesempatan formal.

Perubahan kondisi partisipatif di SM Dolok Surungan dimulai dari inisiatif pencarian mitra dengan kapasitas '*analize stakeholder*' ini. Selama ini, jarang sekali ada lembaga nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau kehutanan tertarik, atau bahkan mengetahui, tentang SM Dolok Surungan dan permasalahannya[6].

Jaringan perkawanan yang memang lebih efektif untuk koordinasi daripada jalur formal dimanfaatkan untuk menjajagi kemungkinan rekan-rekan nGO seperti Conservation International Indonesia yang berada di Medan, Sumatran Orangutan Society – Orangutan Information Centre (SOS-OIC), USAID, dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) untuk membuat program di SM Dolok Surungan. Jawaban yang diterima seragam : Dolok Surungan tidak punya spesies kunci untuk 'dijual'. "Kalau saja ada bukti keberadaan orangutan, seperti foto sarang atau bulu, mungkin kami akan ke sana", kata salah seorang rekan waktu itu.

Sayangnya orangutan tidak termasuk spesies yang keberadaannya teridentifikasi di SM Dolok Surungan. Sementara kebanyakan lembaga-lembaga di atas, yang sekaligus merupakan penggiat konservasi dengan *sourcing* pendanaan yang cukup stabil, rata-rata bergerak dengan isu pelestarian orangutan sebagai *brand* atau identitas.

6 Hanya lembaga KSPPM yang tercatat pernah terlibat dalam upaya menolak perambahan di SM Dolok Surungan dengan merekrut pendamping lokal di lapangan

Ir. Wiratno (editor buku ini) bahkan pernah dimintai tolong oleh tim resort untuk mencarikan mitra aktif yang mau terlibat menangani permasalahan di Dolok Surungan. Setelah itu Pak Wir kami ketahui banyak berbicara dengan jaringannya mengenai SM Dolok Surungan[7].

SM Dolok Surungan adalah kawasan perlindungan bagi tapir, tetapi tapir tidak cukup 'seksi' untuk dijadikan pembungkus isu dalam *fund raising* kegiatan konservasi di Indonesia. Keberadaan harimau di daerah Toba Samosir dan Asahan (termasuk kawasan Dolok Surungan) juga tidak sebesar potensi yang ada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan yang menjadi kantong habitat harimau sumatera di Sumatera Utara[8].

Secara paralel, resort menyiapkan kajian-kajian lokal yang bisa dilaksanakan tanpa banyak biaya di sela-sela pekerjaan rutin. Sejarah kawasan dan sejarah konflik ditelusuri. Pengakuan jujur tentang kesalahan-kesalahan masing-masing pihak di masa lalu dihormati. Termasuk tidak menutup mata dengan kesalahan yang dilakukan oleh oknum petugas kehutanan sendiri di akhir tahun 1990-an yang menjadi pemicu awal masuknya perambah. Perbedaan pandangan dan pendapat dicarikan titik temunya. Bila

7 Belakangan tim Pokja Penanganan Perambahan di KSA/KPA yang diketuai oleh Pak Wir menominasikan SM Dolok Surungan sebagai salah satu calon prioritas penanganan di Sumatera Utara pada tahun 2011.

8 Shepherd and Magnus (2004) menyatakan Wikramanayake et al telah melakukan analisa yang luas dan menyeluruh terhadap habitat harimau untuk mengidentifikasi daerah yang akan diprioritaskan sebagai daerah perlindungan. Sistem Unit Perlindungan Harimau (TCU/ Tiger Conservation Unit) yang telah diadopsi secara luas oleh komunitas konservasi harimau dijadikan landasan ukurannya. TCU di Sumatera hanya memasukkan SM Dolok Surungan ke dalam Level III Tiger Conservation Unit (TCU) mendampingi 3 TCU utama pada Level I : TN Kerinci Seblat, TN Gunung Leuser, dan TN Bukit Barisan Selatan, serta beberapa wilayah konservasi lain pada Level II. Dari semua itu, Wikramanayake juga memperkirakan pada tahun 1998 di Sumatera terdapat sekitar 130.000 km2 habitat harimau dimana hanya 42.000 km2 atau sepertiganya, yang memiliki format perlindungan dari pembangunan dan penebangan kayu.



School Visit oleh Volunteer untuk melaksanakan pendidikan lingkungan

dalam proses argumentasi menemui jalan buntu maka perbedaan ini dicatat sebagai satu isu yang tetap akan dibicarakan solusinya.

Staf resort yang beragama Islam aktif dalam pengajian-pengajian masyarakat, ikut dalam solat berjamaah di masjid dan duduk bersama menunggu waktu solat berikutnya. Staf yang beragama Kristen juga memainkan perannya di gereja. Bahkan, staf yang tidak aktif di rumah ibadah berdialog dengan perambah di lapo-lapo tuak atau *pakter* yang tersebar di kampung-kampung sekitar kawasan.

Kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang penting, dan pranata-pranata utama masyarakat dipelajari. Tulisan-tulisan tentang hal-hal ini dibuat untuk mendokumentasikan sekaligus sebagai catatan yang kelak pasti berguna. Sedikit banyak, dokumentasi ini

menambah pemahaman internal mengenai nilai penting kawasan SM Dolok Surungan sekaligus kawasan penyangganya.

Dengan dukungan data-data dasar (*baseline*), komitmen resort mendapatkan pondasi untuk mulai membangun konsep penyelesaian masalah. Meskipun, tanpa kehadiran mitra yang dapat berperan sebagai *analize stakeholder* dan mitra penyeimbang dalam hubungan pemangku kehutanan dengan masyarakat, jalan rintisan pembangunan strategi masih gelap terasa.

Peluang itu datang di akhir tahun 2007. Seorang rekan dari Yayasan PETAI – Masrizal Saraan – menginformasikan mengenai Pride Campaign Program yang diselenggarakan oleh Rare, sebuah nGO internasional yang memiliki kantor program di Bogor.

Pada periode yang sama, Balai KSDA di Sumatera Utara yang sebelumnya dibagi menjadi dua (Balai KSDA Sumut I dan Balai KSDA Sumut II), dilebur menjadi satu : Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Dengan dukungan penuh Ir. Djati W. Hadi – Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara waktu itu – dan Ir. Tandya Tjahjana – Kepala Bidang KSDA Wilayah II – yang bersedia mensupervisi program, Rare dan BBKSDASU menandatangani kontrak kerjasama Pride Program di SM Dolok Surungan. Proses negosiasi dan persiapan ini memakan waktu hampir satu tahun selama tahun 2008.

Dalam program Pride, uniknya, Rare tidak menempatkan stafnya dalam pelaksanaan program di lapangan. Rare memilih mentraining seorang staf Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan kemudian selama dua tahun penuh akan melaksanakan program di lapangan dengan mentoring dan dukungan sarana dari Rare. Dalam kerjasama ini, site dan isu tetap menjadi 'milik' Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Demikian juga tanggung jawab pelaksanaan

program. Rare akan mensupport metodologi dan keperluan praktis di lapangan. Bahkan, penggajian staf yang disebut Campaign Manager beserta seluruh kompensasi biaya perjalanan staf yang diakibatkan program juga tetap menjadi tanggungan BBKSDA SU.

IV

Rules with Local

Pada tanggal 26 Januari 2009, satu pertemuan para pemangku kepentingan SM Dolok Surungan digelar. Pertemuan ini melibatkan Dinas Kehutanan Toba Samosir, pemerintahan lokal, perambah (dari masyarakat maupun pengusaha), Koramil, masyarakat pendukung Dolok Surungan, mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, dan BBKSDASU sebagai pemangku kawasan. Masyarakat Desa Lobu Rappa bersedia menjadi tuan rumah dan panitia pelaksana pertemuan ini.

Dengan pendekatan konsensus, Model Konsep permasalahan perambahan di SM Dolok Surungan digambarkan bersama. Faktor-faktor yang terlibat serta terminologi-terminologi disepakati bersama dalam pertemuan ini. Inilah kali pertama perambah, masyarakat, aparat, dan pemerintah bisa sama-sama menuangkan pendapatnya mengenai permasalahan SM Dolok Surungan dalam dokumen yang sama.

Model Konsep yang terbentuk setelah diverifikasi ulang secara logis oleh tim resort dengan melibatkan pihak-pihak yang mengetahui secara mendalam faktor-faktor utama maupun pendukung yang mucul dalam bagan dan kemudian menjadi landasan bagi proses berikutnya. Faktor-faktor utama yang menjadi ancaman bagi kawasan SM Dolok Surungan kemudian dianalisis lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan Pemeringkatan Ancaman.

Pemeringkatan Ancaman ini melibatkan PEH BBKSDASU, Mahasiswa Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan (PSL) USU, Mahasiswa Kehutanan USU, dan pejabat-pejabat teras Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Skala prioritas penanganan permasalahan muncul dari diskusi-diskusi ini. Ir. Dadang Suganda – Kabag TU BBKSDASU pada periode 2008-2011-, Ir. Hardiman –Kepala Bidang KSDA Wilayah II periode 2008-2011-, dan Pak Dahlan Napitupulu –Kepala Seksi Konservasi Wilayah III saat itu, memegang peran penting dalam proses ini.

Strategi penyelesaian masalah dimunculkan dari ancaman-ancaman yang memiliki peringkat paling tinggi. Di sinilah kemudian pentingnya upaya *awareness*, penguatan masyarakat, pengembangan ekonomi produktif masyarakat, dan *law enforcement* kepada pengusaha perambah menemukan landasan logisnya dalam keseluruhan strategi. Rantai hasil untuk menggambarkan alur logika keberhasilan penerapan strategi kemudian digambarkan di dalam bagan Model Konsep yang sudah dimodifikasi.

Tim lokal di level masyarakat kemudian dibentuk untuk mem-*breakdown* dan mengembangkan strategi-strategi ini. *Local leader-local leader* yang sudah teridentifikasi sejak kurun waktu 2006-2008 dilibatkan dalam proses penyusunan rincian pelaksanaan strategi.

Model Konsep dan Rantai Hasil dibuka kembali di hadapan tim lokal. Pilihan-pilihan strategi yang paling mungkin dilaksanakan didelegasikan kepada masing-masing yang paling cocok untuk melaksanakannya. Strategi yang membutuhkan mitra lainnya untuk dilaksanakan segera dikomunikasikan kepada yang bersangkutan untuk memperoleh dukungan.

Setelah strategi-strategi disepakati, survey tentang Knowledge, Attitude, dan Practice (KAP) masyarakat digelar. Mahasiswa USU mulai terlibat dengan SM Dolok Surungan pada kegiatan ini. Survey ini akan menjadi landasan untuk mengukur keberhasilan penerapan strategi. Lebih dari 400 rumah tangga baik perambah maupun bukan diwawancara untuk dimintai pendapat. Responden dalam jumlah yang sama disurvey di bagian lain SM Dolok Surungan sebagai kelompok kontrol. Target-target yang diukur dari kondisi fisik ditulis menggunakan data-data primer atau sekunder yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dengan ukuran yang logis, target yang SMART (*Spesific, Measurable, Action oriented, Realistic, and Timebound*) dituliskan sebagai kontrak kerja.

Delapan bulan sejak pertemuan para pemangku kepentingan digelar, aksi di lapangan dimulai. Guru-guru dan pemuka masyarakat mulai mengkampanyekan nilai penting kawasan, pilihan-pilihan perilaku, dan pentingnya menjaga SM Dolok Surungan. Media-media yang kreatif dirancang atau dicetak dan kemudian disebarkan. Sekolah, rumah ibadah, pasar, dan pusat pertemuan warga lainnya dimanfaatkan untuk penyebaran pesan dengan mengindahkan batasan masing-masing.

Kelompok Swadaya Masyarakat Lestari Dongan yang dibentuk sejak 2007 membantu strategi reboisasi kawasan partisipatif dan pembangunan pembibitan swadaya masyarakat. Pelaksanaan strategi ini adalah modifikasi dari kegiatan partisipatif yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh kelompok yang sama dalam program Tabungan Pohon.

Inisiatif pengembangan ekonomi produktif mulai dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan kelompok. Hal ini merupakan

bagian penting dari keseluruhan strategi yang dapat memberikan *insentif* bagi masyarakat yang secara sadar mau meninggalkan lahan rambahan ataupun memang sama sekali memilih tidak pernah merambah kawasan. Resort SM Dolok Surungan sekarang bekerja dengan target dan perencanaan yang logis bersama mitra-mitra setaranya.

V

BR Sebagai Kunci

Masyarakat menguasai lebih dari 60% lahan rambahan. Keseluruhan strategi yang melibatkan tim lokal ini bertujuan untuk mengurangi laju pertambahan perambah dan mengurangi perambahan dengan strategi persuasif. Tetapi tim resort menyadari bahwa keberadaan perambah berskala besar dengan level pengusaha telah menjadi penghalang (*barrier*) utama perubahan perilaku masyarakat perambah. Kata-kata “Kalau mereka orang luar bisa, mengapa kami tidak ?”, oleh masyarakat perambah menunjukkan pentingnya strategi penegakan hukum kepada salah satu atau keseluruhan perambah yang berlevel pengusaha sebagai strategi Penyingkiran Halangan (*Barrier Removal*) bagi pencapaian keseluruhan target.

Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul (BMT) dipilih untuk menangani aksi *Barrier Removal* ini. Kepolisian yang sebelumnya pernah menjadi mitra Balai Besar KSDA Sumatera Utara selama bertahun-tahun menyelesaikan permasalahan di Dolok Surungan memang dipertimbangkan untuk terlibat. Namun akhirnya SPORC BMT, yang memang berasal dari ‘rumah’ yang sama : Kementerian Kehutanan, dianggap lebih cocok dengan pertimbangan kemudahan koordinasi.

Law enforcement adalah kunci dalam strategi penyelesaian masalah perambahan di SM Dolok Surungan. Seluruh strategi penyebaran pesan pentingnya kawasan dan pentingnya menjaga kawasan beserta pengembangan aktivitas-aktivitas partisipatif dengan muara menciptakan insentif bagi perubahan perilaku perambahan akan tidak akan banyak berguna tanpa keberhasilan strategi BR. Hal ini seperti kampanye membuang sampah pada tempatnya tanpa menyediakan tempat sampah di tempat-tempat yang semestinya. Kesadaran yang terbentuk menemukan alasan untuk dibangkangi kembali[9].

Sebaliknya, penerapan upaya represif saja, seperti yang sudah sering dicoba di SM Dolok Surungan sejak tahun 1993-2005 tanpa strategi di level masyarakat juga hanya akan menghasilkan penyelesaian parsial yang tidak berumur lama. Gambarannya seperti menyediakan tempat sampah yang bagus tetapi tidak diletakkan di tempat-tempat strategis dan tanpa penyampaian pesan pentingnya

---

[9] Saat ditanya atau diminta menggambarkan pentingnya BR dalam sebuah rangkaian strategi penyelesaian suatu permasalahan, saya sering membuat tamsilan dalam kampanye Membuang Sampah Pada Tempatnya. Jika sampah adalah masalah bagi sebuah tempat, katakanlah sebuah kantor dan perilaku membuang sampah pada tempatnya adalah perilaku yang diinginkan dalam kampanye perubahan, maka pesan-pesan tentang pentingnya membuang sampah, buruknya perilaku membuang sampah sembarangan, atau tips-tips pemilahan sampah akan menjadi konten dalam media-media yang dibuat. Insentif maupun disinsentif mungkin akan diterapkan untuk setiap kepatuhan atau pelanggaran. Bila kemudian kantor menunjuk satu atau dua orang untuk mengkomunikasikan hal tersebut berulang-ulang (Kabag TU atau Kasubbag Umum-nya misalnya) maka pesan ini akan berpotensi menjadi bahan komunikasi interpersonal di dalam kantor dan belakangan akan menjadi pesan yang melekat.

Sempurnakah gerakan perubahan atau kampanye ini ? Ternyata belum. Ada satu hal paling penting yang akan berpotensi menjadi Barrier / Penghalang perubahan perilaku khalayak target kampanye. Hal itu adalah 'Ketiadaan Tempat Sampah' ! Oleh karena itu Penyediaan Tempat Sampah di tempat strategis plus signboard-nya merupakan strategi Barrier Removal atau Penyingkiran Halangan untuk mendorong perubahan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Gambaran ini memperlihatkan pentingnya mewujudkan strategi penyampaian pesan, pemberian insentif (atau disinsentif), dan strategi komunikasi yang selaras dengan strategi Barrier Removal dalam suatu upaya mencapai perubahan bagi penyelesaian suatu masalah.

membuang sampah pada tempatnya untuk merubah pengetahuan dan sikap khalayak. Kotak sampah menjadi tidak berguna.

VI

Api Perubahan

Di akhir periode yang disepakati keberhasilan penerapan strategi diukur kembali. KAP Survey kembali digelar dengan jumlah responden yang sama. Kelompok kontrol juga didatangi kembali. Ukuran-ukuran keberhasilan masing-masing target dianalisa berdasarkan data akhir dan data awal.

Seberapa efektif masing-masing media kampanye atau penerapan strategi partisipatif mempengaruhi khalayak juga dinilai. Pembelajaran-pembelajaran dari proses yang sudah terjadi dijadikan catatan untuk perbaikan di masa depan. Catatan-catatan proses di lapangan dikumpulkan dan dianalisa untuk melihat kembali bagaimana dinamika berkembang sejak perencanaan sampai akhir kegiatan.

Di akhir periode aksi ini, 18,3 % (meningkat dari 0 %) responden yang berasal dari Desa Lobu Rappa menganggap penyelesaian permasalahan di SM Dolok Surungan merupakan **tanggung jawab bersama** pemerintah dengan semua pihak termasuk mereka sendiri sebagai masyarakat. Di Desa Meranti Timur, Meranti Utara, dan Meranti Tengah yang merupakan desa-desa asal perambah bahkan terjadi peningkatan sebesar 7,1 % dari responden yang mengetahui status SM Dolok Surungan sebagai ‘kawasan konservasi’.

Pada sampel yang sama juga terjadi peningkatan sebesar 14,1 % responden yang setuju untuk mengembalikan keadaan SM Dolok Surungan seperti saat belum dirambah dulu. Bahkan untuk

pertanyaan mengembalikan SM Dolok Surungan sebagai habitat satwa langka seperti tapir dan harimau, sebanyak 61,7 % responden dari tiga desa ini menyatakan Setuju dan Sangat Setuju, meningkat sebesar 20,57 % dari survey pra aksi.

Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat lainnya dicatat dalam aksi menciptakan perubahan ini. Beberapa target perubahan yang tidak dapat dicapai dianalisa untuk menjadi modal bagi daur kegiatan di masa depan. Lebih banyak target yang tercapai menjadi api perubahan yang menjadi modal perbaikan nilai konservasi kawasan dan pembangunan masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk dan terorganisir membantu pelaksanaan strategi dicatat sebagai konstituen konservasi bagi SM Dolok Surungan. Upaya-upaya partisipatif yang berjalan selama periode aksi oleh Forum Guru Dolok Surungan, KSM Lestari Dongan, dan kelompok pemuda bersama tim resort dinilai sebagai peningkatan kapasitas masyarakat maupun petugas.

Seluas 1360,531 ha tutupan hijau yang teridentifikasi sebagai hutan sekunder baru dideliniasi pada lokasi-lokasi yang sebelumnya (Citra Landsat 2008) diduga sebagai lahan kosong atau semak belukar hasil perambahan. Beberapa perambah rupanya diam-diam mengabaikan lahan rambahannya dan membiarkan formasi vegetasi membaik di lahan-lahan yang ditinggal ini. Aksi-aksi lintas stakeholder dalam satu kerangka perencanaan bersama telah membuahkan capaian konservasi yang riil sejauh ini.

Hasil-hasil ini merupakan kristalisasi usaha penerapan strategi *social marketing* untuk penyampaian pesan, aksi partisipatif masyarakat, dan penerapan *law enforcement* sebagai strategi BR.

Kredit-kredit khusus harus diserahkan pada SPORC BMT yang sudah menghabiskan puluhan HOJ untuk patroli-patroli bulanan dan tim kuasa hukum BBKSDA SU yang telah menghabiskan puluhan jam kerja di ruang sidang dan analisis perkara dalam rangka melawan pengacara salah satu tokoh perambah di PTUN Medan.

VII

Menjaga Bara Perubahan dan Impian Masa Depan

Pada tahun 2011, Rumah Pintar Dongan didirikan oleh para konstituen SM Dolok Surungan bersama tim resort. Rumah Pintar Dongan diharapkan dapat menjadi simpul kerja bersama para pihak dalam rangka menjaga bara perubahan yang sudah dihasilkan demi upaya lestarinya SM Dolok Surungan yang berkelanjutan.

Inisiatif pembangunan Arboretum Tanaman Asli SM Dolok Surungan muncul dari simpul ini. Penyediaan buku-buku bacaan dan media informasi lainnya ditujukan untuk membuka kesempatan bagi anak-anak dan petani di Dolok Surungan melongok dunia yang lebih luas. Pak Mariadi, Ketua KSM Lestari Dongan, dan Pak Siddik, Fasilitator Forum Guru Dolok Surungan, mengatakan : "Masyarakat yang lebih pintar kelak akan lebih menjaga hutannya".

Hal ini menjelaskan pandangan logis mereka bahwa kesempatan yang dibawa ilmu pengetahuan akan menciptakan pilihan-pilihan bekerja dan berkarya yang lebih luas bagi masyarakat Dolok Surungan. Perubahan perilaku pertanian ekstensif menjadi target berikutnya kerja masyarakat sebagai konstituen konservasi di Dolok Surungan.

Tidak ada pendanaan khusus dari instansi, lembaga, atau

badan apapun untuk membangun Rumah Pintar Dongan sebagai simpul kerja. Semangat berbagi menjadi ciri khusus yang sengaja dipertahankan. Pak Mariadi mengetuk pintu-pintu rumah warga di kampungnya untuk mengumpulkan buku-buku bekas. Dengan tangannya sendiri Pak Mariadi dibantu pemuda Desa Lobu Rappa mendirikan pondok baca.

Himas USU mengumpulkan buku di kampusnya untuk dikirim ke Salipotpot yang menjadi basis Rumah Pintar. Jaringan-jaringan personal tim resort dan Yayasan PETAI dimanfaatkan untuk mendapatkan donasi. Maka Yayasan Titian di Pontianak, RMI di Bogor, Ibu Dewi Sophy di Jakarta, Ibu Febrina di Lampung, dan Dr. Stacey Sowards di Texas bersama donatur lainnya mencatatkan nama mereka sebagai bagian dari pendukung gerakan masyarakat di tepi hutan ini. Dengan pola ini, Rumah Pintar Dongan bercita-cita mengumpulkan 3000 buku sebagai koleksi baru pada tahun 2012 untuk mencukupi cita-cita mendirikan satu Rumah Pintar lagi pada tahun 2013 nanti.

Diskusi petani yang digelar setiap dua bulan sekali oleh Rumah Pintar saat ini bercita-cita merintis paket ekowisata terbatas, memanfaatkan keindahan alam di desa mereka dan SM Dolok Surungan. Bersama-sama resort, masyarakat juga merencanakan membangun satu Pusat Informasi Konservasi Dolok Surungan yang disatukan dengan Arboretum Tanaman Asli Dolok Surungan.

Kepala Balai Besar KSDA Sumut, Ir. M. Arief Toengkagie, pada tahun 2012 dengan gigih bersama Ir. Tata Djatirasa Gandaresmara, Kabid Teknis BBKSDASU, dan Bang Subhan, S.Hut, Kasubbag Perencanaan BBKSDA SU, menggolkan pendanaan untuk menangani permasalahan kasus SM Dolok Surungan secara lebih

serius. Sejak tahun 2009, Model Desa Konservasi (MDK) di SM Dolok Surungan terus menggerakkan inisiatif pengembangan ekonomi produktif yang belum terformat sempurna. Desa Lobu Rappa dan Desa Meranti Timur, kedua MDK SM Dolok Surungan, juga tidak sungkan lagi bercita-cita memiliki peta batas desa yang partisipatif.

Masih banyak pekerjaan tersisa di Dolok Surungan. Kamipun yakin sampai kapanpun selama kawasan ini masih ada, baik atau buruk kondisinya, tetap pekerjaan konservasi tersedia. Dengan konstituen masyarakat, LSM, dan mahasiswa yang ada di samping barisan, BBKSDA SU yakin dan percaya pembangunan konservasi menemukan arahnya di Dolok Surungan.

Kelak, entah lima ataupun sepuluh tahun lagi. Saat impian kita tentang SM Dolok Surungan yang lestari dan masyarakatnya yang sejahtera menemukan waktunya, kalau kita berkunjung ke sana, yakinlah masih ada anak-anak yang berdendang riang menyanyikan lagu suka tentang keindahan hutan Dolok Surungan yang dicintainya. Datanglah, Dongan, dan lihatlah …

PS :

Sejak tahun 2008, mentoring dari Rare telah mengupayakan transfer begitu banyak metodologi mulai dari perencanaan proyek dengan item-item seperti analisis permasalahan, pemeringkatan ancaman, maupun penentuan sasaran; konsep sosial marketing, teori perubahan, sampai pada metode ukuran keberhasilan. Oleh karena itu terminologi-terminologi seperti Model Konsep, Sasaran SMART, strategi Barrier Removal, dan rangkaian proses yang terjadi sepanjang 2008-2010 di SM Dolok Surungan harus diberikan kreditnya kepada Rare sebagai lembaga mitra BBKSDA SU yang sangat aktif membantu.

Ditulis untuk petugas resort yang tangguh di Dolok Surungan: Kennedy dan Rusli

Rujukan luar

Shepherd, Chris R. and Magnus, Nolan. 2004. *Nowhere to hide: The trade in Sumatran Tiger.* TRAFFIC Southeast Asia.

----------=====000O000=====----------



Bobby Nopandry, lahir di tengah kawasan hutan di Kotabumi, Lampung Utara pada 4 Nopember 1981. Pada umur 2 tahun sudah terusir dari kampungnya karena program reboisasi yang mengharuskan keluarga besarnya direlokasi. Sejak kecil mengenal terminologi 'reboisasi' membuat minatnya menjadi Pramuka melabuhkan dirinya ke Saka Wanabhakti saat SMA. Setelah tamat dari Jurusan Kehutanan Universitas Sumatera Utara tahun 1999-2004, Bobby memulai karir sebagai PNS Kementerian Kehutanan di Balai KSDA Sumatera Utara. Pengalaman menjadi Kepala Resort di SM Dolok Surungan dianggapnya sebagai modal utamanya saat ini untuk merintis menjadi seorang spesialis di bidang sosiologi kehutanan terutama mengenai kearifan tradisional. Bobby memegang gelar Master of Art (MA) di bidang Komunikasi Lingkungan dari University of Texas at El Paso (UTEP). Gelar ini diperolehnya dengan menjalankan studi selama melaksanakan Pride Campaign di SM Dolok Surungan, sebuah program kerjasama Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan RARE Pride Program pada tahun 2008-2010.

3 Merencana dari Akar Rumput: Pengalaman dari Siberut

Merencana dari Akar Rumput:

Pengalaman dari Siberut

Fifin Nopiansyah, Ahmad Munawir, Ecky Saputra

Pengelolaan Taman Nasional Siberut (TNS) mulanya dilaksanakan melalui Proyek Konservasi Alam Terpadu (PKAT) yang dimulai sejak tahun 1993 dan berakhir akhir tahun 1999, dimana sumber dana yang digunakan selama proyek berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) dan disediakan dana pendamping oleh Pemerintah Indonesia. PKAT bertujuan menyiapkan berdirinya pengelolaan TNS yang mandiri. Semenjak pengelolaan TNS melalui PKAT, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Hasil konkrit proyek PKAT, antara lain Dokumen Rencana Pengelolaan TNS dengan konsep *Integrated Protected Area System* (IPAS) dan sarana serta prasarana.

Penyiapan pengelolaan TNS yang melalui pendekatan "keproyekan" ini dinilai banyak pihak masih banyak kelemahannya, karena menggunakan pendekatan yang *top-down,* bersifat *project oriented*, tidak terfokus, dan tertutup. Walaupun di masa itu,



Air Terjun Ulu Kubuk (fifin n)

mungkin pendekatan keproyekan seperti ini yang paling tepat, namun kondisi ini terus berlanjut walaupun sudah terbentuk organisasi TNS (Unit/Eselon IV) pada tahun 1997.

Pendekatan "keproyekan" ini membuat situasi yang kurang kondusif dan kurang "nyaman" di internal pengelolaan TNS, terutama bagi staf-staf yang bekerja di lapangan. Beberapa situasi tersebut, antara lain:

1. Gap antar staf. Penyebab terjadi gap (jurang pemisah) ini karena ketidakterbukaan dan ketidakjelasan sistem penyusunan



Pantai Karang Bolong (fifin n)

kegiatan dan penganggaran yang ada di TNS. Hanya beberapa staf yang mengetahui kegiatan dan penganggaran yang akan dilakukan, sehingga saling curiga dan mencurigai anatar staf sangat tinggi. Dokumen DIPA (dulunya PO) hanya diketahui oleh pejabat struktural (bahkan ada yang tidak tahu) dan beberapa staf yang terkait dengan administrasi. Terdapat "tim eksklusif" di sekitar Kepala Balai yang mengontrol pengelolaan perkantoran.

2. Distribusi pekerjaan yang tidak merata. Beberapa staf mempunyai beban pekerjaan yang banyak, sedangkan yang

lain "hampir" tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini disebabkan pengelolaan administrasi keuangan "tertutup" yang diterapkan.

3. Kegiatan hanya disusun oleh staf perencanaan dan pembuat kebijakan, sehingga seluruh staf tidak merasa memiliki kegiatan karena merasa tidak pernah mengusulkan kegiatan. Dampaknya adalah pencapaian output kegiatan tidak maksimal dan tanggungjawab staf terhadap kegiatan menjadi berkurang.
4. Kekecewaan hampir semua staf ini dapat digambarkan dengan komitmen kerja yang rendah, misalnya: malas masuk kantor, bekerja apabila ada kompensasi, komitmen bekerja di lapangan yang rendah, walaupun terdapat sebagian kecil staf yang memang mempunyai kinerja "buruk".
5. Pejabat struktural sulit dalam memberikan *reward* dan *funishment*.
6. Tekanan pengelolaan kawasan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kinerja yang rendah ini mendapat apresiasi yang buruk dari masyarakat dan LSM, terutama masalah keberadaan staf di lapangan.

Ternyata permasalahan pengelolaan kawasan TNS, bukan hanya tentang perambahan, kolaborasi yang belum terbentuk, keanekargaman hayati yang belum tereksplorasi, dan lain sebagainya, namun sangat terkait dinamika kehidupan keseharian perkantoran. Permasalahan internal ini sangat berpengaruh besar dalam mengelolaan kawasan secara menyeluruh, sampai dapat menyebabkan rendahnya kinerja organisasi. Maka, penyelesaian masalah-masalah internal seharusnya menjadi prioritas dan seni dalam pengelolaan TNS.

Proses Perubahan

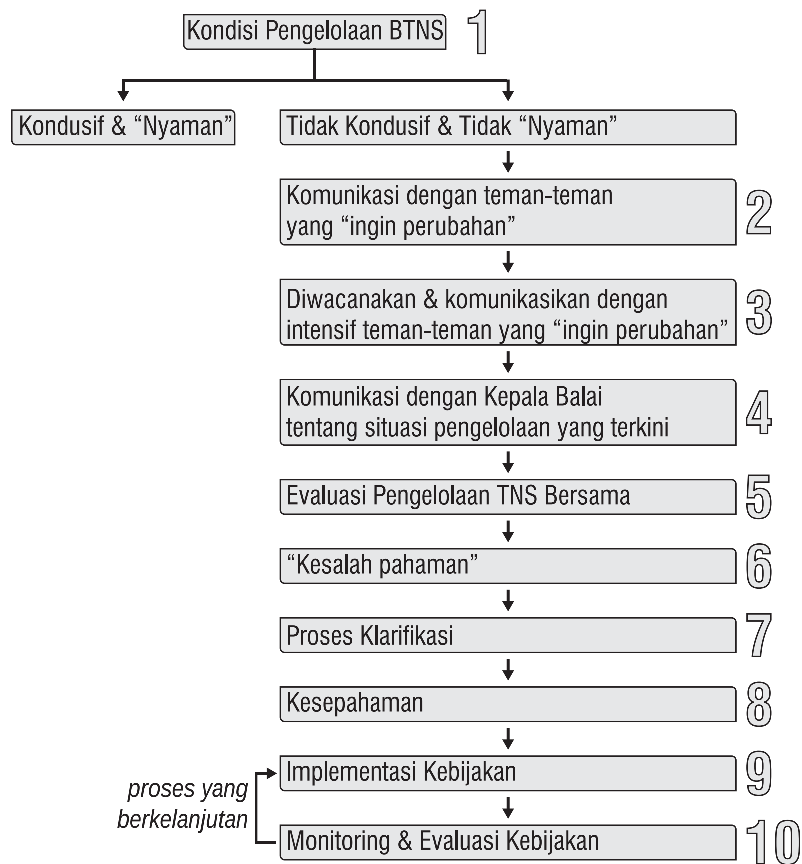
Seperti yang kita ketahui bahwa konservasi merupakan suatu upaya menggugah hati manusia agar lebih bijaksana dalam memanfaat sumberdaya alam. Bagaimana mungkin pengelola kawasan akan lebih baik apabila staf yang bertugas belum sepenuh hatinya tergugah untuk melaksanakan pekerjaan mulia ini? Bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kawasan apabila permasalahan internal kantor belum terselesaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dicarikan solusinya. Permasalahan internal kantor apabila dibiarkan berlanjut akan menghabiskan "energi" semua orang dalam suatu lingkungan kerja.

Kondisi internal pengelolaan kantor yang tidak kondusif seperti dikemukakan di atas hampir dirasakan oleh semua staf TNS, namun "tidak berdaya" untuk melakukan perubahan kondisi yang ada. Ketidaknyaman dalam bekerja ini berdampak juga terhadap rendahnya kinerja staf dan sulitnya pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja staf melalui penerapan *reward* dan *funishment*.

Pencerahan terhadap keinginan perubahan pengelolaan yang lebih baik juga didorong oleh perkembangan *colaborative management* (*co-management*) TNS dengan berbagai LSM dan masyarakat adat, yang diinisiasi dan didukung oleh UNESCO. Banyak pelajaran yang diambil oleh staf-staf yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan *co-management*, salah satunya adalah bagaimana melibatkan seluruh komponen organisasi dalam melakukan perencanaan dari bawah (*buttom up*). Proses kemitraan ini dimulai tahun 2002 masih berlangsung hingga saat ini dan semakin berkembang.

Beberapa staf yang tidak nyaman dengan kondisi ini dan mengetahui apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan

menambah buruknya pengelolaan TNS, khususnya pandangan di mata masyarakat. Berangkat dari kondisi di atas, maka mulai terjadi keingingan untuk mengubah sistem pengelolaan/ penganggaran yang ada. Sebagai bahan *sharing* pengalaman proses perubahan sistem perencanaan untuk kasus TNS, di bawah ini dijelaskan beberapa tahapan dan penjelasan proses dimaksud, sebagai berikut:



Alur Proses Perubahan Sistem Perencanaan di TNS Tahun 2004.



Proses Prencanaan bersama (TNS)

Pertama : Terdapat kondisi yang berdampak pada implementasi kegiatan TNS yang tidak kondusif di lapangan dan "ketidaknyamanan" staf dalam beraktifitas Kondisi eksisting seperti pengantar di atas. Hal ini dirasakan hampir semua staf dan berlangsung cukup lama, namun tetap terdapat segelintir staf yang merasa "nyaman" dengan kondisi ini.

Kedua : Melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ingin adanya perubahan dalam pengelolaan TNS. Upaya perubahan ini dimotori oleh salah seorang Kepala Seksi dan didukung oleh "*second layer*" (sebutan untuk teman-teman yang aktif di lapangan dan peduli akan pengelolaan Siberut). Bisa dikatakan staf-staf ini merupakan kelompok penggagas/agen perubahan sebanyak 5 orang.

Ketiga : Situasi ini terus diwacanakan dan dikomunikasikan kepada lebih banyak teman-teman yang menginginkan adanya perubahan. Teman-teman ini dapat diindentifikasi dalam pergaulan sehari di kantor dan yang dicari bukanlah orang yang dapat memperkeruh suasana, karena tujuan perubahan yang akan dilakukan untuk hal yang lebih baik. Komunikasi tahap 2 & 3 ini biasanya dilakukan informal. Dapat dikatakan, tahap ini merupakan tahap *brain storming* pertama dalam proses perubahan, untuk mensepakati cara-cara melakukan perubahan. Peran teman-teman penggagas sangat besar, karena apabila situasi menjadi lebih rumit dan karena cara perubahan yang kurang tepat, bisa saja menjurus dengan cara-cara yang kontra produktif. Cara yang kami pilih adalah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai.

Keempat : Komunikasi dengan Kepala Balai. Komunikasi hanya dilakukan oleh beberapa orang sebagai perwakilan, yang intinya menjelaskan situasi yang ada dan keinginan rekan-rekan untuk melakukan perubahan dalam beberapa hal. Akhirnya, kesepakatan yang diambil adalah melakukan evaluasi pengelolaan secara bersama. Perlu dipahami juga bahwa tidak semua pejabat struktural (termasuk Kepala Balai) merasa nyaman dengan situasi yang ada selama ini. Bahkan mereka ingin juga keluar dari permasalahan internal yang berdampak pada buruknya kinerja pengelolaan kawasan.

Kelima : Evaluasi pengelolaan secara bersama. Evaluasi ini dilakukan oleh seluruh staf TNS. Peran fasilitator sangat penting disini, dalam mengarahkan diskusi yang menuju pada hasil yang positif. Fasilitator untuk proses evaluasi kami pilih teman-teman penggagas, karena hal ini merupakan masalah internal kantor, maka pilihan fasilitator dari dalam lebih baik daripada memilih pihak fasilitator handal dari luar, sehingga dapat menjamin tujuan-tujuan evaluasi dapat tercapai. Fasilitator harus dapat membawa suasana diskusi dengan baik, sehingga tidak akan memperparah kondisi kantor pasca evaluasi. Sebaiknya tim fasilitator sudah mempunyai skenario-skenario terhadap proses evaluasi dan antisipasi-antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan tidak terbawa salah satu pihak dalam arus diskusi.

Tahapan kelima ini merupakan proses *brain storming* kedua, dimana dalam evaluasi ini semua orang dapat mengeluarkan ganjalan-ganjalan selama bekerja, sehingga akan ada ketegangan dalam diskusi, termasuk ketidaksenangan banyak staf terhadap atasan bahkan teman sekerja. Hasil evaluasi ini adalah diketahuinya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan (lihat Box 1).

Keenam : Kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini terjadi antara kepala balai dengan tim penggagas, hal ini disebabkan oleh Kepala Balai mendapat input yang "tidak sesuai dengan kebenaran" dari beberapa orang yang mungkin akan terganggu "kenyamanannya" dengan proses perubahan ini. Saat itu, tim penggagas dianggap provokator yang akan menjatuhkan Kepala Balai melalui evaluasi bersama.

Ketujuh : Proses klarifikasi. Klarifikasi dilakukan perwakilan staf ke Kepala Balai untuk menjelaskan proses sebenarnya dari evaluasi bersama dan hasil-hasilnya.

Kedelapan : Kesepahaman. Terjadi kesepahaman antara Kepala Balai dan staf yang berujung pada perubahan-perubahan kebijakan lingkup Balai, diantaranya adalah perubahan proses perencanaan yang berasal dari Seksi dan Resort.

Kesembilan : Implementasi kesepahaman. Implementasi ini membutuhkan waktu dan kerjasama setiap komponen yang ada di kantor untuk menghasilkan strategi-strategi yang terbaik dalam pengelolaan TNS.

Kesepuluh : Monitoring dan evaluasi kebijakan. Proses ini terus berlanjut untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan.

Box 1. Hasil Evaluasi Bersama TNS Tahun 2004

Beberapa faktor kelemahan dalam pengelolaan TNS, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan kurang didasarkan pada prioritas kebutuhan di tingkat lapangan dan kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Pada tingkat pelaksanaan, kegiatan lebih banyak dilakukan secara *top-down*, bersifat *project oriented*, tidak terfokus, tertutup, dan banyak hasil yang diperoleh tidak ditindaklanjuti.
2. Tidak berdomisilinya staf Balai TNS di Siberut, menyebabkan tidak intensifnya sosialisasi TNS di masyarakat dan di tingkat Pemerintah Daerah (desa, kecamatan, dan kabupaten).
3. Pendanaan pengelolaan TNS masih sangat bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat, yang saat ini sangat minim dan sering terjadinya kelambatan pencairan anggaran.
4. Motivasi kerja staf sangat rendah yang disebakan oleh rendahnya kapasitas *leadership* dan komitmen manajemen. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya sistem *reward* dan *punishment*.
5. Kurangnya kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi di lingkungan internal kehutanan maupun dengan instansi luar, baik di provinsi maupun di kabupaten sehingga banyak terjadi kesalahpahaman terhadap kepentingan perlindungan Pulau Siberut yang seolah-olah menafikan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pola dan kultur bekerja yang lama harus ditinggalkan karena tidak efektif, tidak efisien, kurang bermanfaat, bahkan kontra produktif. Pola kerja dan budaya baru perlu segera dipraktikkan, dalam rangka meningkatkan kinerja dan performa manajemen taman nasional yang lebih membumi dan bermanfaat bagi masyarakat Mentawai khususnya.



Sikerei, Sang Dukun Mentawai (TNS)

Pasca Perubahan

Setelah kesepahaman diperoleh, maka bagian terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan hasil evaluasi ke dalam pengelolaan TNS dan mengawal keberlanjutan proses yang ada. Dibutuhkan kerjasama, kekompakkan, keterbukaan, dan kerja keras semua komponen yang ada dalam mewujudkannya, serta waktu yang cukup lama (untuk proses perencanaan penyusunan kegiatan dan penganggaran baru dapat diimplementasikan pada tahun berikutnya). Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana menjaga proses tersebut tetap berkelanjutkan dengan tetap mengadaptasi dinamika eksternal dan internal kantor.



Uma, rumah tradisional Mentawai (fifin n)

Kerjasama ini menghasilkan buah yang manis bagi organisasi, hal-hal positif pasca proses perubahan, antara lain:

1. Perubahan dalam proses perencanaan (*bottom up*). Dulunya direncanakan oleh beberapa orang, saat ini direncanakan oleh semua orang melalui organisasi terkecil di Balai yaitu Resort hingga ke Balai (lihat Gambar 2). Aspek positif: staf merasa diikutsertakan menyusun kegiatan, sehingga merasa memiliki dan akan bertanggungjawab terhadap usulan-usulan kegiatannya. Dampaknya adalah kinerja TNS yang meningkat. Setiap staf dapat mengetahui anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan keterbukaan ini sikap saling curiga mencurigai dapat diminimalisasi, otomatis gap antar staf dapat dikurangi. Peran staf perencanaan di Kantor tetap menjadi penting, karena berperan mengontrol tata waktu/tahapan

perencanaan dan menyeleksi kegiatan serta satuan biaya yang sesuai dengan kebijakan nasional.

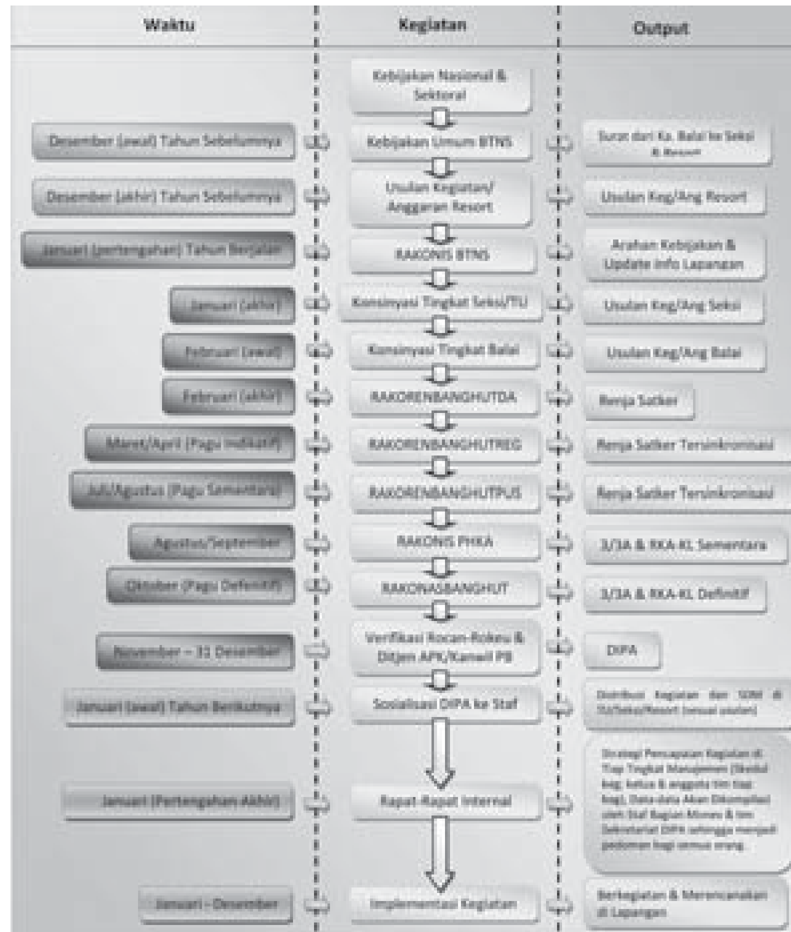
2. Independensi pengelolaan di tingkat Seksi Wilayah. Aspek positif: Kepala Seksi Wilayah mempunyai keleluasaan dalam merencanakan kegiatan sesuai karakteristik kawasan yang dipangkunya, mengatur personil, mengelola administrasi keuangan, dan menegakkan peraturan kepegawaian.
3. Berbagi beban kerja. Aspek positif: beban kerja terdistribusi kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, termasuk beban kerja Bendaharawan dan Sekretariat DIPA yang lebih ringan, karena pertanggungjawaban keuangan telah terbagi ke Seksi Wilayah/Resort (Ketua Tim). Perlu disadari juga bahwa staf yang beban kerja yang terlalu banyak di Kantor, sebenarnya tidak nyaman juga dengan kondisi tersebut, termasuk bila "dicurigai" oleh staf lain.
4. Pejabat struktural lebih mudah memberikan *reward* dan *funishment*. Aspek positif: akan terlihat kinerja dan motivasi masing-masing staf dalam bekerja, karena kesempatan dan kompensasi yang diberikan adalah sama.
5. Pengelolaan kawasan TNS yang lebih baik. Eksistensi TNS sangat tergantung pada keberadaan staf di lapangan dan kebersamaan dengan masyarakat, dengan keterbukaan manajemen keuangan akan memacu keberadaan staf di lapangan, karena kegiatan lapangan akan memberikan "insentif" lebih selain gaji. Aspek positif: semakin banyak masyarakat yang memahami konsep pengelolaan TNS berarti dukungan ke TNS semakin meningkat, dan LSM semakin meningkatkan kerjasama yang berarti dukungan ke pengelola semakin meningkat.
6. Bekerja sambil merencanakan. Selama berkegiatan selama

tahun berjalan, staf sekaligus menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Aspek positif: perencanaan yang dilakukan berdasarkan kondisi ril lapangan dan kondisi/informasi yang selalu *up to date*.

7. Perencanaan yang dinamis. Perencanaan melibatkan manusia, sehingga sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksernal pengelolaan kawasan, sehingga monitoring dan evaluasi mutlak diperlukan. Aspek positif : secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan di internal TNS dan setiap tahun TNS melakukan evaluasi pengelolaan bersama mitra.

Beberapa strategi yang dilakukan ketika terjadi perubahan yang akan berdampak pada pengelolaan internal TNS, yaitu :

a. Setiap pergantian kepala balai, maka selalu ada perwakilan staf (kepala seksi) yang memberikan masukan kepada kepala balai tentang dinamika internal dan eksternal dalam pengelolaan TNS.
b. Setiap staf baru, maka diberikan pemahaman tentang kondisi kantor TNS dan memperlakukan sebagai anggota tim kerja dengan memberi kepercayaan sesuai kapasitas.
c. Melakukan *sharing* informasi terbaru terkait dengan perkembangan kebijakan nasional dan Balai ataupun perkembangan lapangan.



Catatan:

Konsinyasi menjadi arena pembahasan kegiatan dan anggaran, disaat ini terjadi penyeleksian kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan satuan biaya, serta membuat skala prioritas kegiatan dan rencana sumber biaya (RM atau PNBP), kemudian hasilnya akan disepakati secara bersama. Selain kebersamaan dan keterbukaan, cara ini juga memudahkan kepala balai dan staf perencanaan menyeleksi kegiatan ketika mengikuti rapat-rapat koordinasi.

Alur Penyusunan dan Implementasi Kegiatan serta Anggaran TNS Saat Ini
(*Modifikasi dari Proses Penyusunan Anggaran Kementerian*).

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil dari proses-proses di atas, yaitu:

1. Proses pengusulan kegiatan dan penganggaran dari bawah (Seksi/Resort) merupakan masalah internal dalam pengelolaan taman nasional, sekilas nampak sepele, namun apabila tidak ditanggapi secara bijak maka akan berdampak besar pada pengelolaan taman nasional secara keseluruhan.
2. Kebijakan merupakan sesuatu yang dinamis, sehingga akan mengalami perubahan-perubahan berdasarkan hasil evaluasi bersama.
3. Keterbukaan dalam kehidupan kantor akan memberikan keuntungan positif bagi organisasi dan staf sebagai elemen penggerak organisasi.***

---------=====000O000=====----------



Ahmad Munawir, lahir tanggal 23 Maret 1973 di Maroangin Kabupaten Enrekang-Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan sarjana kehutanan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1997. Sebelum mencicipi gaji seorang PNS sempat bekerja di salah satu konsultan kehutanan di Bogor (PT. Sarbi Moerhani Lestari). Barulah pada bulan Maret 1999 resmi menjadi CPNS di Taman Nasional Siberut, dan sejak saat itulah memulai petualangan dan pembelajaran di Pulau Siberut. Selama kurang lebih 11 tahun mengabdi di TN Siberut, tepatnya pada bulan September tahun 2011 di alih tugaskan ke Seksi Taman Nasional, Subdit KPA dan TB pada Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.



Fifin Nopiansyah. Tenggelam di belatara kehutanan sejak masuk SKMA Pekanbaru 1992. Sempat mengeyam beberapa saat di Kanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Bidang Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan, kemudian terdampar di Pulau Siberut sejak 1996 hingga sekarang. Masyarakat Siberut yang mengajarkan tentang kearifan tradisional dan cara bekerja bersama ketika mendapat kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan *Co-Management* bersama NGO internasional dan nasional, serta dapat menerapkan pelatihan *Conflict Resolution in Natural Resources* yang pernah diperoleh ketika berguru di Thailand. Diberi kesempatan mengupdate pengetahuan teknis bidang kehutanan di Fakultas Kehutanan Muhamaddiyah Sumatera Barat dan pengetahuan teknis konservasi di Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB tahun 2006. Saat ini masih menyelami ilmu kehutanan di Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika IPB dengan fokus pada kelembagaan konservasi.



Ecky Saputra
Pria kelahiran Tanjung Karang tahun 1976 ini memulai kariernya di TN Siberut tahun 1998. Tinggal di Pulau, mengorbankan sekolahnya, dan mencoba larut dengan kehidupan disana namun tidak sempat merajah tubuhnya dengan sedikit tatto. Sempat mukim beberapa lama di Selandia Baru dan terakhir bekerja sebagai pengelola anggaran di Direktorat KKBHL.

4 Menaklukan Enggano

Menaklukan Enggano

Rendra Regen Rais

"*Kalau kalian macam-macam, tak pindahin Resort Enggano. Baru tau rasa!*" Ancam Kepala Balai KSDA Bengkulu Bapak Ir.Agung Setyabudi, M.Sc kala itu. Kata-kata ancaman, sekaligus secara tidak langsung memberikan gambaran negatif terhadap pulau kecil yang terdapat di pantai Barat Pulau Sumatera ini.



Sebagai pegawai Baru di BKSDA Bengkulu kala itu, kata-kata itu memberi kesan negatif. Sampai akhirnya pandangan itu berubah, setelah lima tahun menjadi informasi bernilai buta.

Resort yang paling jarang dikunjungi oleh pejabat ini --jika boleh dikatakan-- sebagai tempat buangan orang bermasalah atau paling tidak tempatnya petugas *afkiran*, atau memang petugas



(Regen)

yang merasa sedang bernasib sial sehingga menganggap bertugas didaerah terpencil merupakan musibah bukan tantangan untuk bisa berbuat yang terbaik. Mungkin dunia kerja baginya sebagai sesuatu yang menyiksa, tidak mengenakkan atau sekedar tempat menghabiskan masa tugas sebelum SK penempatan berikutnya dikeluarkan.

Minimnya kontrol dan pengawasan terhadap pulau yang dapat ditempuh selama 12 Jam perjalanan laut dari kota Bengkulu ini menjadikan kawasan konservasi yang ada jarang disebut-sebut

dan jarang menjadi pembahasan di tataran birokrasi Balai. Sangat berbeda dengan kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan perusahan perkebunan kelapa sawit atau berbatasan langsung dengan lokasi pertambangan batubara atau kawasan yang dipinjampakaikan bagi kepentingan pertambangan batubara atau kawasan yang sedang banyak menuai masalah karena kondisinya sudah rusak karena perambahan atau tumpang tindih kawasan. Tidak heran bahwa dari sekian kali pergantian Kepala Balai, baru sekarang Resort Enggano dikunjungi. Menyedihkan!

Sepertinya hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan bahkan berlangsung hingga saat sekarang bagi beberapa instansi tertentu di pulau kecil dalam satu kecamatan ini. Kenyataan tadi tidak pelak menjadikan bangunan kantor yang telah dibangun pemerintah ada yang menjadi kandang ternak, atau sarang ular karena telah ditutupi semak-semak, seperti juga yang pernah terjadi pada bangunan Pos Resort KSDA Enggano. Bahkan selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak pernah mengetahui siapa petugas yg ditempatkan di Pulau yang berpenduduk lebih kurang 700 kepala keluarga ini.

Hal itu memperparah kehidupan masyarakat pulau Enggano. Seperti halnya dalam pembangunan Rumah Sakit yang menelan biaya tidak sedikit, lengkap dengan peralatan medis yang memadai, namun sampai saat ini penggunaannya belum maksimal, dikarenakan petugas medis jarang dijumpai berada ditempat, kecuali pada saat kunjungan pejabat atau orang-orang penting saja.

Resort KSDA Enggano yang telah beberapa tahun "mati suri" pun saya jumpai sebagaimana keadaan beberapa aktifitas beberapa instansi lainnya di pulau yang luasnya 39.586,74 Ha ini. Kantor Resort

yang terendam jika air pasang purnama datang ini dalam keadaan tertutup oleh semak belukar dengan tumbuhan merayap sampai ke atap. Namun beberapa bulan sebelumnya bangunan semi permanen ini pernah pula ditempati nelayan pendatang dari Pulau Buton, Bang Rahmat bersama dengan anjing kurap kesayangnnya. Bang Rahmat yang telah hidup hampir 20 tahun meninggalkan kampung halaman mengaku tidak tau bangunan yang dihuninya milik siapa. Karena sepengetahuan beliau, semenjak bangunan itu berdiri sekira tahun 2004 belum pernah berpenghuni. Sampai akhirnya semenjak beberapa bulan sebelum saya jumpai, bangunan semi permanen itu ditempatinya. *"Sebelum saya tinggal disini, rumah ini tempat anak-anak sini main judi dan minum-minum"* Katanya dengan dialek Sulawesi yang kental. "*Ini karena sudah saya bersihkan sedikit. Sbelumnya, disini saya pernah jumpa ular di kamar mandi*" Tambah Bang Rahmat.

Kenyataan lain bahkan sangat menyedihkan, bisa juga digolongkan aneh atau bahkan ajaib. Bagaimana bisa ketika petugas pemangku wilayah resort yang telah setahun lebih bertugas di tempat ini tidak mengetahui nama kawasan konservasi yang ada di wilayah kerjanya. Apatah lagi mengetahui berapa luas kawasan, lokasi kawasan, batas kawasan, permasalahan dan ancamannya. *"Kamu yang belum pernah ke sini kok lebih tahu ya?"* Kata Kepala Resort ketika itu *"Ya Pak, aku pernah lihat dari langit*[1] *dan GPS"* Jawabku.

Satu sisi memang wajar ketika petugas Resort diperlakukan apa adanya. Menurut pengakuannya semenjak awal dia ditugaskan di pulau ini, tidak pernah diberi petunjuk kerja yang jelas. Peta kerja dan dokumen-dokumen penting lainnya pun tidak pernah didapat. Yang penting SPJ selesai dan laporan ada, *"Ya namanya kita anak buah,*

[1] Citra Satelit



(Regen)

ya ngikut aja Mas" tambahnya. Jika boleh saya menilai, agaknya kesalahan ini sebenarnya bukan terletak pada kesalahan personal semata, melainkan pada sistem dan pemahaman para pemegang kebijakan yang belum begitu memahami dan memprioritaskan Resort sebagai basis manajemen pengelolaan . Sumberdaya yang terlalu menumpuk dan di dipelihara di Balai, menjadikan Resort hanya sebagai tempat memposisikan petugas pelengkap penderita. Tapi inilah konsekuensi dari sebuah keputusan dan sebuah pilihan.

Semenjak meninggalnya Ramos S Kauno, Kepala Resort sebelumnya yang merupakan penduduk asli Enggano, seolah

terjadi pula *missing link* terhadap pengganti setelahnya. Ditambah lagi perhatian dan keiinginan terhadap wilayah terpencil ini masih sangat kurang. Suatu yang wajar pula ketika Bengkulu (daratan Sumatera) disibukkan dengan 29 kawasan konservasi yang semuanya bermasalah dengan perambahan, belum lagi masalah yang menyibukkan lainnya, antara lain masalah tapal batas, *illegal logging, MoU* pinjam pakai kawasan, pengadaan barang dan jasa, restorasi kawasan, Rencana Pengelolaan yang hanya sebatas rencana, perjalanan dinas bagi orang-orang penting, survey dan *database* yg tak jelas wujudnya, konflik satwa yang kian meningkat dan hal-hal lain yang membuat pulau terpencil ini terlupakan dan seolah tanpa ada masalah dan ancaman. Serta ini pulalah akibatnya, Jika ada yang bertanya "*Bagaimana kabar Enggano*" jawabnya selalu " *Amaaan* …."

Antara Pola Pikir dan Pola Sikap

Pengalaman di CICO[2] membuat kesadaranku seolah kembali tergugah. Mengingatkan kembali betapa pentingnya bekerja dengan hati, mengingatkan betapa perlunya sebuah keseriusan dalam kejujuran dan pengorbanan. Ditengah suasana serius dalam upaya penanganan terhadap perambahan kala itu, di pojok pikiran yang lain terbayang betapa permasalahan saat ini merupakan akumulasi dari permasalahan lainnya di masa lalu.

Bagaimana mungkin bisa memiliki karakter seorang konservasionis bilamana pola pikir dan pola sikapnya tidak selaras. Bagaimana mungkin jika ketidakselarasan itu menghasilkan sikap kritis.? Yang ada bahkan membunuh ide kreatif dan inisiatif.

Jika boleh saya katakan bahwa: "pola pikir seorang koservasionis adalah menyelamatkan Alam dari kepunahan,

[2] Workshop penanganan perambahan tahun 2010

menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan tatanan hidup dalam rangka keberlangsungan hidup dan kehidupan. Sebuah kerja mulia dan tentunya bernilai ibadah disisi-Nya". Namun sangat disayangkan jikala itu semua tidak sejalan dengan pola sikap sorang pekerja konservasi. Pola pikir sebagai konservasionis namun terkadang pola sikap seperti pebisnis pelit yang ketat memperhitungkan untung dan rugi. Katanya pegawai di Instansi Kehutanan, namun jarang sekali melihat hutan, melihat hutan kecuali ada urusan "penting".

Lima tahun mengenyam dunia kerja sudah menjadi modal dalam memetakan situasi itu. Tentu sudah bisa memilah, dan pada posisi bagaimana harus menempatkan diri jika tidak ingin bekerja hanya untuk cari muka didepan pimpinan, mencari aman dalam zona nyaman atau hanya sekedar menjalankan rutinitas sampai menunggu masa pensiun atau waktu ajal menjemput.

Permasalah demi permasalahan terhadap kawasan pun terus bergulir, baik itu permaslahan lama yang belum terselesaikan, permasalahan yang baru muncul dan permasalaan yang akan segera muncul. Selama itu juga kadang saya hanya merasa lebih banyak bekerja untuk menyelesaikan masalah namun sedikit sekali pekerjaan untuk mengatasi masalah.

Perambahan kawasan hutan terjadi hampir diseluruh kawasan konservasi, nyaris tidak ada kawasan yang tidak berperambah. Salah siapa? Tentu pembahasannya panjang. Apabila ditanya salah siapa tentu tidak bisa hanya menyalah salah satu pihak. Dari beberapa pihak, yang tidak bisa dipungkuri adalah kesalahan dari petugas itu sendiri, minimal karena adanya pembiaran dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana tidak, banyak dari perambah telah

menggarab lahan selama bertahun-tahun. Bahkan telah beranak pinak dilokasi garapannya, namun tiba-tiba mereka diingatkan dan diusir petugas karena berada didalam kawasan hutan dan merekapun disebut sebagai perambah. Sudah banyak tenaga yang mereka habiskan, sudah banyak modal yang mereka keluarkan demi untuk kehidupan yang lebih baik di zaman kapitalisme liberal ini. Dimana keberadaan petugas selama ini yang tidak pernah datang untuk mengingatkan mereka? Secara naluri dan keadilan, bisakah dikatakan kesalahan berada pada perambah semata? Dimana-mana kasus ini mudah dijumpai.

Mendatangi Pulau Enggano.

Banyak dilema dan permasalahan yang pada akhirnya mendorong untuk mendatangi kembali pulau ini. Masalah yang terlihat sebenarnya bukan semata permasalahan personal yang menjadi alasan mengapa akfitas Resort Enggano ini seperti hidup segan mati tak mau, melainkan permasalahan birokratis menjadikan wilayah terpencil ini dikucilkan. *Ada gula ada semut*, begitu kata pepatah, sama halnya dengan; dimana suatu wilayah terdapat *interest* maka suatu wilayah itu mempunyai daya tarik. Mungkin suatu saat pulau ini mempunyai daya tarik jika terdapat sebuah kepentingan atau masalah, sebuah teory hukum alam. Nah, jika sekarang Gula lebih banyak di Kantor Balai untuk apa turun ke Resort. Agaknya kali ini mencoba untuk menjewantahkan pepatah ini, padahal ada banyak sekali potensi yang ada di pulau ini yang belum tereksploitasi secara maksimal.

Ancaman yang mengganggu

Kini terjawab sudah ketika untuk pertama kalinya saya mendatangi pulau ini, tidak benar juga apabila ada anggapan

bahwa Kawasan Hutan Konservasi di Pulau Enggano aman dari permasalahan sehingga layak di"biarkan" tanpa perhatian. Apakah suatu saat nanti kita bekerja menyelesaikan masalah sebelum sekarang kita bekerja mengatasinya? Bukankah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati?

Banyaknya pendatang baru yang membuka lahan di pulau ini menjadi permsalahan serius. Meningkatnya kebutuhan akan lahan garapan dan menyempitnya lahan pertanian di tempat lain berimbas terhadap Pulau Enggano. *Image* yang terbentuk dari mulut-kemulut menggambarkan Enggano sebagai pulau yang masih menyediakan lahan yang sangat luas untuk di garap. Pada akhirnya di wilayah tertentu di pulau ini intensitas pembukaan lahan teramat tinggi. Terutama terjadi di Desa Banjarsari –utara pulau Enggano-- yang kala itu pembukaan tegakan hutan hampir terjadi saban hari.

Acapkali jika ada yang bertanya; "*Kerja dimana*?" saya jawab; "*Di Pulau Enggano*" kebanyakan diantara mereka biasanya bertanya lagi "*Saya dengar di Pulau Enggano harga tanah masih murah ya?"* atau "*masih luas nggak lahan yang bisa ditanami sawit?"*. Masyarakat sekarang memang sedang 'gila' sawit, cara gampang orang kaya menambah kekayaanya. Untungya masyarakat adat Enggano paham bahwa Kelapa sawit beresiko untuk pulau kecil seperti Enggano dalam hal tingginya tanaman ini menyerap air, sehingga masyarakat adat sepakat untuk menolak tanaman sawit masuk ke Pulau Enggano, namun masih membolehkan tanaman Karet dan Kakao. Tidak dapat dibayangkan jika tidak ada aturan adat mengenai hal itu, hamparan sawit akan mengancan pulau kecil ini. Itupun masih ada yang berani melanggar.

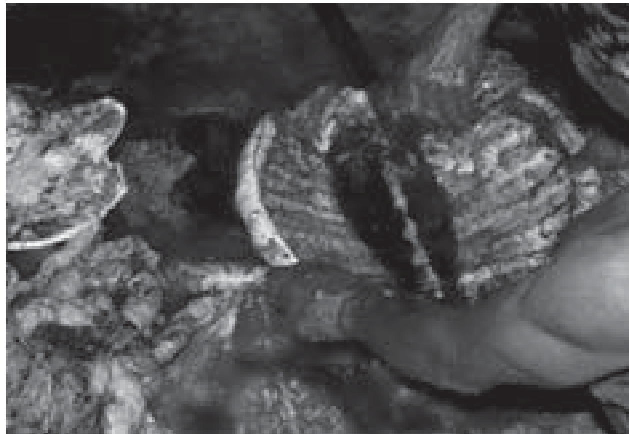
Dengan ditemani oleh kepala resortnya, kami meninjau langsung lokasi Kawasan Konservasi terdekat. Cagar Alam Sungai Baheuwo, salah satu kawasan konservasi dari 3 Cagar Alam dan 1 Taman Buru yang ada di pulau ini, merupakan kawasan terdekat dengan pelabuhan Ferry dan kawasan termudah untuk di akses.

Sekarang terbukti, bahwa kawasan didaerah terpencil dengan areal bukan kawasan hutan masih relatif luas serta belum banyak tergarap, mulai menghadapi ancaman. Kawasan dengan didominasi Mangrove, hutan pantai dan Ekosistem hutan rawa ini sudah terdapat aktifitas pengaplingan lahan yang akan diperuntukkan sebagai areal persawahan oleh penduduk desa setempat. Kawasan yang baru untuk pertama kalinya saya kunjungi ini --termasuk kepala resort ketika itu—mulai melihatkan adanya ancaman. Nyaris saja menjadi hamparan sawah, jika saja waktu itu kawasan ini tidak didatangi dan pemberitahuan kepada masyarakat dilakukan lebih awal. Mungkin kita akan menuai masalah, jika kawasan yang "tidak sengaja" didatangi ini di biarkan begitu saja. Ini menunjukkan selama ini lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan di Pulau dengan 3 Kawasan Cagar Alam (3.7% dari luas pulau), dan masing-masing memiliki 1 Taman Buru (18.37 %), Hutan Lindung (8.72 %) dan HPT (5.54 %).

Di sisi lain dari kawasan ini dijumpai beberapa tunggul pohon jenis komersil, diantaranya jenis Merbau, Kempas dan Bintangur. Dijumpai pula bekas jalan sarat menuju pantai terdekat, dengan panjang ratusan meter ke arah laut. Pada akhirnya diketahui bahwa sebanyak puluhan kubik kayu dengan jenis komersil --yang sudah susah dijumpai di tempat lain—kini telah keluar dari kawasan ini menuju keluar pulau Enggano. Aktifitas illegal ini pun luput dari pengawasan masyarakat setempat maupun oleh petugas yang ada.

Satwa Dilindungi untuk Hidangan Pesta

Perburauan penyu untuk keperluan pesta sudah menjadi tradisi adat di Pulau Enggano. Terutama pada saat acara adat dan pesta pernikahan. *"Disini Katung*[3] *halal pak"* kata salah seorang Kepala Suku. Jika ada pesta pernikahan atau pesta adat, biasanya ada petugas yang dikhususkan untuk mencari Penyu. Biasanya selama beberapahari petugas pencari penyu yang terdiri lima sampai tujuh orang itu menangkap berapa ekor Penyu pun yang mereka jumpai di laut. *"Kadang samapai 25 ekor Bang, kadang kurang dari lima ekor, malah kadang tak dapat samasekali"* Kata salah seorang yang biasa menjadi petugas pencari penyu pada saat upacara pesta pernikahan ini.



Pembantain penyu untuk Pesta Pernikahan. (Zulfan)

3 Nama lokal Penyu, yang paling sering di jumpai adalah Penyu Sisik, Penyu pipih dan Penyu Hijau.

Setelah hal ini ditanyakan dengan Pabuki[4], beliau membenarkan bahwa ini memang sudah menjadi kebiasaan adat Enggano. *"Tidak mudah merubah kebiasaan ini, tapi saya yakin jika pengganti lauk pauk untuk pesta bisa dipecahkan, mungkin suatu saat perburuan bisa di tekan walaupun mungkin tidak bisa sama sekali dihilangkan"* Kata Pabuki.

Beo Enggano sudah lama terkenal di pasaran burung di Kota Bengkulu. Pulau Enggano juga merupakan pemasok terbesar Beo dan Betet untuk wilayah Bengulu dan sekitarnya. *"Jika lagi musim Beo dan Kekek[5], ada ratusan ekor keluar pak"* . Kata petugas di Pelabuhan Penyebrangan di Pulau Enggano. Nasib Beo Enggano memang tak sebagus nasib Beo Nias yang telah digolongkan sebagai hewan dilindungi. Tapi walaupun belum berstatus dilindungi keberadaanya terancam oleh aktifitas perburuan guna memenuhi permintaan pasar yang tinggi.

***

Semenjak Desember 2010, setahun sudah saya rutin mengunjungi Pulau ini. Banyak yang mengagumkan maupun hal baru dijumpai. Posona alam liar yang belum pernah terdokumentasikan, pengalaman mendekati masyarakat adat Enggano yang unik, dan suka duka dalam menghadapi permasalahan pulau kecil yang terpencil.

Potensi Alam liar

Pulau Enggano menyimpan banyak potensi yang masih belum banyak dikenal bahkan di Publikasikan ke dunia luar. Semenjak aktifitas Resort mulai hidup, banyak lokasi-lokasi menarik yang

[4] Adalah Koordinator Kepala Suku, dari Enam Suku yang ada di Pulau Enggano di pimpin oleh seorang kepala Pabuki. Jika ada perselihan antar suku, Pabuki mempunyai tanggung jawab dan peran penting.

[5] Betet Ekor Panjang (*Psittacula longicauda*)

telah dipublikasikan di dunia maya, baik melalui Blog, jejaring sosial facebook bahkan Photo Panoramio yang terpampang di Google Earth. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri menjadi orang pertama yang mempublikasikannya, sebuah kepuasan dan motifasi untuk bisa berbuat lebih banyak.

Selain itu pulau ini telah dikenal sebagai Daerah Burung Endemik atau *Endemic Bird Area* (EBA). Merupakan konsep pendekatan *BirdLife International* dalam mengidentifikasi tempat-tempat terkonsentrasinya keanekaragaman hayati dunia. Enggano sebagai EBA terkecil di Indonesia untuk saat ini dikenal memiliki dua spesies burung Endemik. Ribuan burung yang bisa disaksikan sepanjang hari mencirikan bahwa Enggano masih menjadi tempat yang "nyaman" bagi sekitar 30 spesies lebih burung. Hal itulah yang memotifasi saya memulai menyusun sebuah buku tentang Spesies Burung di Kepulauan Enggano. Beberapa spesies burung sudah berhasil didokumentasikan dan diidentifikasi. Namun upaya itu untuk sementara ini terhenti, kamera DSLR dengan harga termurah yang mampu dibeli rusak total karena terjatuh dari sampan sesaat setelah gagal mendokumentasi spesies burung Merbau (Junai Emas) yang saat ini sudah susah dijumpai di Pulau Enggano. Burung gagal didokumentasikan, kamera hadiah dari istri tercinta harus rela dipensiunkan, Rp. 6 juta melayang sudah. *"Indak baliak modal"* Meminjam kata-kata saudagar minang.

Menelusuri dengan mengelilingi Pulau Enggano salah satu kegiatan yang menantang sekaligus menyenangkan. Pulau dengan panjang garis pantai sejauh 126,71 km ini, dapat dilalui melalui rute perairan dengan menggunakan sampan bermesin tempel, namun dapat pula dengan berjalan kaki. Rute perjalanan dengan menggunakan sampan dapat dilalui jika keadaan laut pasang.



Rumah Suku Kauno. (Regen)

Namun sebaliknya, rute perjalanan dengan berjalan kaki akan lebih leluasa dilakukan apabila keadaan permukaan laut surut.

Setiap sudut pulau Enggano memiliki keunikan dan memiliki sisi keindahan tersendiri. Untuk itu, akan banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan yang tentunya akan memenuhi memory keindahan yang ada di benak orang-orang yang mencintai dunia petualangan. Bentangan alam daratan yang berada di tengah Samudera Hindia ini menjadikan pulau ini menarik bagi beberapa spesies burung migran yang baru-baru ini berhasil diidentifikasi dan didokumentasikan. Selain dari jenis Aves beberapa mamalia dan hewan merayap juga bisa dijumpai, seperti Kerbau dan Sapi liar, Buaya Muara yang bisa dijumpai hampir disetiap muara sungai.

Kondisi Terumbu karang yang masih baguspun bisa dijumpai di beberapa titik laut dangkal. Sehingga ada beberapa tempat

yang menarik bagi aktifitas penyelaman permukaan (*snorkling*). Namun untuk aktifitas penyelaman (*scuba diver*) saat ini belum bisa dilakukan karena belum tersedianya peralatan yang memadai. Kecuali mau mencoba metode penyelaman yang dilakukan nelayan lokal dalam mencari Teripang dengan menggunakan kompressor yang biasa dilihat di tempat Tambal Ban (berani?).

Menjadi Pendatang

Pulau Enggano merupakan wilayah masyarakat adat yang terstruktur. Terdapat pula masyarkat pendatang seperti Bugis, Sunda, Banjar (Kalimantan), Jawa dan Sumatera yang semenjak masa kolonial sudah mulai bermukim di pulau ini . Dalam satu kesatuan masyarakat di pulau enggano terbagi didalam hubungan kekeluargaan yang telah mengakar yang disebut dengan suku. Masing-masing suku memiliki kepala suku. Masyarakat asli Enggano, melalui garis keturunan ibu terbagi kedalam dari lima suku; yakni suku Kauno; suku Kaahaoao; suku Kaharubi; dan suku Kaitora. Setiap masing-masing suku memiliki klan dengan dikepalai oleh Kepala Pintu atau *Kap Kaudar* dimana secara keseluruhan terdapat 14 Kap Kaudar. Masing suku memiliki wilayah kuasa adat atau wilayah ulayat masing-masing. Sedangkan untuk seluruh penduduk pendatang di golongkan kedalam suku Kamai'. Suku kamai' juga dikepalai oleh kepala Suku untuk masing-masing wilayahnya. Seluruh kepala suku dan Kap Kaudar dipimpin oleh seorang koordninator kepala suku yang disebut dengan Pabuki.

Selain tatanan masyarakat adat, di pulau Enggano terdapat tiga sistem pelapisan sosial tradisional dari tiga golongan sosial yakni tokoh-tokoh agama, orang-orang tua desa dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan tertentu yang disebut cerdik pandai.

Sebelum kedatangan agama Kristen yang dibawa oleh para misionaris Jerman dan agama Islam yang dibawa oleh masyarakat pendatang, masyarakat enggano menganut paham kepercayaan aninisme dan dinanisme. Masa peralihan itu belum lama terjadi, berdasar beberapa referensi menyebutkan pada akhir abada ke-19, orang-orang Enggano baru benar-benar bisa menerima masyarakat pendatang.

Secara adminstratif masyarakat Pulau Enggano berada dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara dan terbagi kedalam 6 desa. Dan 4 wilayah administratif desa berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Dua desa lainnya berbatasan langsung pula dengan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Jadi secara keseluruhan masyarakat Enggano berhubungan langsung dan menggantungkan hidupnya dengan kawasan hutan.

Sebagai seorang petugas yang samasekali baru mengenal dan bergaul dengan masyarakat adat Enggano, membuat saya harus membuat keputusan mendekati orang yang paling berpengaruh dan memberi pengaruh terhadap keberadaan selanjutnya di Pulau Enggano. Melalukan pendekatan dengan beberapa kepala suku, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi pilihan.

Pola pendekatan yang dilakukan selama ini adalah sebagai sosok pribadi bukan sebagai petugas. Dengan itu pendekatan lebih kepada personal sehingga hubungan emosional lebih bisa terbentuk. Hubungan itu bisa dalam bentuk Orang tua angkat, saudara angakat, atau sahabat. Sepertinya ini sebuah pengalaman berharga dalam rangka membangum hubungan emosional dengan masyarakat. Berbeda halnya jika pola yang digunakan dengan memposisikan diri sebagai seorang petugas sebagaimana pengalaman selama ini di seberang (Bengkulu – Sumatera), seolah

membentuk jarak hubungan emosional dan membentuk hubungan psikologis yang tidak kondusif bagi hubungan yang berkelanjutan.

Banyak hal yang bisa dibuat dalam rangka menjaga hubungan emosional dengan masyarakat. Sebagai orang tua tentu bersikap bagaimana perlakuan anak terhadap orang tuanya. Sebagai saudara pun berbeda sebagaimana halnya berbeda dalam hal sahabat. Menjaga hubungan emosional; melakukan kunjungan walaupun tidak rutin tentunya memberi pengaruh. Memberi cinderamata seperti koas polhut, topi berlogo Kehutanan, atau benda-benda lain yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila memakainya. Atau sebagai anak memberi sesuatu kepada orang tuanya walaupun tidak banyak berupa kebutuhan hidup sehari berupa Mie Instan dan Telor Ayam.

Sehingga tidak heran ketika ada kebutuhan akan lahan dalam upaya rencana pembangunan kantor dan tempat penangkaran rusa, lahan yang diperlukan dengan mudah didapat. Pak Amri sebagai orang tua angkat dan selaku tokoh masyarakat menghibahkan tanah seluas 1,5 ha untuk rencana pembangunan kantor. Dan Pak Sai Kauno yang juga merupakan kepala suku Kauno rela menghibahkan tanahnya seluas 1 ha untuk lokasi penangkaran rusa dan sentra pengolahan anergi alternatif berupa *bio ethanol* yang merupakan salahsatu program dari kepala Balai KSDA Bengkulu.

Peta Kerja, Darurat Tapi Asyik.

Dalam sebuah pengelolaan kawasan hutan peta kerja sangatlah diperlukan. Peta kerja memberikan informasi terhadap apa yang harus dilakukan dilapangan, apa yang direncanakan dan memberi informasi banya hal. Namun untuk saat ini tidak tersedia peta kerja yang memadai yang bisa digunakan baik untuk Resort enggano

maupun bagi resort lainnya di wilayah kerja BKSDA Bengkulu.

Peta virtual Google Earth bisa menjadi alternatif walaupun penggunaanya sangat terbatas bagi kalangan tertentu. Setidaknya kekurangan yang ada bisa ditutupi. Bahkan Google Earth memiliki kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan peta kerja dalam bentuk hardcopy. Pertukaran data dan transfer ke dalam berbagai format dapat dengan mudah dilakukan. Over Lay Citra terbaru pun bisa didapatkan dengan mudah dan gratis di internet.

Google Earth telah banyak membantu kegiatan konservasi dalam banyak hal, termasuk dalam rangka eksplorasi Pulau Enggano. Aplikasi yang mudah dipelajari semua orang ini pun sangat membantu dalam sosialisasi dengan masyarakat. Sehingga para Kepala Suku di Enggano sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Tampilan virtualnya yang menarik membuat mereka berdecak kagum, banyak juga diantara mereka bertanya dimana lokasi kebun mereka, luas kebun, lokasi yang sering mereka singgahi ketika mencari ikan, berapa jauh kebun mereka dari kawasan hutan dan banyak hal lainnya yang mereka ingin ketahui. Suatu kali mereka bertanya "*pak... si anu lagi mondok*[6] *bisa liat juga?*" Saya jawab "*mungkin suatu saat nanti bisa*". Diantara meraka bahkan ada yang baru mengetahui bentuk dan posisi Pulau yang sejak lama sudah ditempati oleh nenek moyangnya. "*O.. ini rupanya penglihatan Enggano dari langit?*"

Mungkin kendala dalam pengoperasiannya adalah dalam hal jaringan internet dan listrik. Apalagi diwilayah terpencil yang tidak terdapat jaringan GPRS dan instalasi listrik seperti Pulau Enggano.

[6] Mondok, istilah bagi nelayan untuk beberapa hari mencari ikan. Mondok biasanya dilakukan sampai saat hari kapal, dimana nelayan menjual tangkapannya untuk dibawa ke Bengkulu.

Dalam hal jaringan internet, Google Earth bisa di operasikan dalam keaadaan offline, namun diperlukan *streaming* terlebih dahulu sebelum suatu wilayah dikunjungi. Untuk mengatasi listrik bisa menggunakan inventer yakni alat yang berfungsi mengubah arus bertegangan DC di ubah menjadi AC. Inventer dapat disambungkan dengan aki yang terdapat di Mobil ataupun sepeda motor. Alat yang tidak mahal ini tentu sangat membatu dilapangan. Sehingga dimanapun Peta Kerja Google Earth bisa dibawa kemana-mana.

Berangkat Pakai Apa?

Kepergian rutin ke Pulau Enggano memerlukan dukungan finansial. Ongkos perjalanan dan konsumsi memerlukan dukungan dana yang tidak terlalu banyak namun sangat dibutuhkan. Setidaknya untuk menuju kawasan konservasi kita perlu menyewa sampan sebagai satu-satunya transportasi yang memungkinkan. Bulan-bulan awal merupakan ujian berat dimana keberangkatan tidak didukung oleh anggaran dari kantor karena kunjungan ke pulau ini atas inisiasi sendiri. **Tidak ada pilihan lain selain menggunakan uang dari gaji .**

Bulan-bulan selanjutnya dukungan finansial dari Resort pun bisa sedikit mendukung, Kepala Resort yang hanya bisa sesekali mengunjungi Enggano menyerahkan beberapa kegiatan Resort namun tentunya dengan syarat-syarat "khusus". Jika mau lancar dan rutin menerima anggaran bulanan, tergantung lobi dan rayuan terhadap Bendahara dan PPK. Anggaran itupun sebenarnya mencukupi apabila pengalokasiannya lebih adil. Namun dilapangan kebiasaan lama memang sulit untuk di ubah, "*tau sama tau saja*". Begitu kata si Badu. Tidak adanya perbedaan anggaran antara Resort perkotaan dan Resort terpencil membuat kitapun bertanya; "*apa ini adil tuan?"*

Untuk kegiatan survey dan orientasi kawasan dengan dana yang ada tentu masih sangat kurang walaupun sudah dibantu dengan uang pribadi dan bantuan dari teman-teman dekat. Akhirnya ada pikiran untuk menjual souvenir berupa koas dan sticker. Dari hasil penjualan, sedikit banyak bisa membantu kegiatan konservasi di Pulau Enggano.

Ada Gula Ada Semut

Resort Enggano yang selama ini jika boleh dikatan mati suri sudah mulai didengar aktifitas di Kantor Balai. Menyebutnya dari mulut ke mulut setidaknya metode paling praktis yang bisa dilakukan. Mendekati orang-orang berpengaruh agar bermurah hati mau mengalokasi kegiatan yang bisa di arahkan untuk wilayah kerja Resort Enggano. Begitu pun secara personal, satu-persatu diajak agar mau mengunjungi Enggano, ada yang terang-terangan menolak, sebahagian yang lain berjanji untuk berangkat, ada juga yang mau jika ada kegiatan yang dianggarkan. Sampai terkadang beberapa kali saya harus berangkat sendiri.

Untuk hal-hal yang baru menuju kearah yang lebih lebih baik agaknya kita tidak perlu risau, karena masih ada orang-orang yang mau bekerja tanpa mengharap imbalan bahkan mau mengorbankan segala sesuatunya. Bekerja memang untuk mendapatkan uang tapi tapi tidak semua pekerjaan harus ditimbang dengan uang. Dengan segala keterbatasan terkadang bisa menjadi semangat dan motifasi tersendiri, untuk bisa berbuat lebih baik. Namun terkadang pula dengan segala kelebihan dan perhatian membuat kita lalai bahkan bisa termotifasi kearah yang lebih buruk.

Beberapa bulan setelah rutin mengunjungi Enggano, drh. Erni Suyanti seorang tenaga medis di BKSDA Bengkulu --yang

dedikasinya tidak perlu diragukan lagi untuk kegiatan konservasi--akhirnya bersedia menjadi sukalerawan dalam kegiatan survey potensi pulau enggano. Sebuah survey kecil-kecikan dengan kegiatan swadana. Dibantu pula oleh dua orang jurnalis; dari kantor berita ANTARA, Marini Sipayung dan Antonia Sinaga dari RRI. Mereka membantu dalam publikasi pemberitaan yang sedikit banyak mulai kembali mempromosikan Pulau Enggano. Kedepannya pun teman jurnalis bahkan menunggu kabar tentang sesuatu yang bisa diberitakan, sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan harus terus dipelihara.

Dengan laporan hasil survey swadana inilah menjadi pintu bagi aktifitas pengembangan konservasi Pulau Enggano. Sehingga pada saatnya nanti menjadi buah bibir di Balai. Setelah adanya pembahasan singkat terhadap laporan kegiatan survey potensi Pulau Enggano, wilayah kerja Resort Enggano mendapat respon positif dari kepala Balai Bapak Ir.Amon Zamora, M.Sc. Beliau sangat berminat terhadap kondisi kawasan yang masih utuh dengan segala potensinya yang selama ini belum tereksplorasi. Hubungan harmonis dengan masyarakat setempat sudah terbentuk dengan baik. Sehingga dapat mempengaruhi beberapa arah kebijakan birokrasi. Sebuah kepuasan menjadi butu loncatan bagi Resort Enggano sebagai salah satu prioritas pengelolaan. Beberapa kegiatan pun mulai di anggarkan dan beberapa rekan kerjapun mulai berminat untuk mendatangi pulau ini. Benarlah pula, *"Ada gula, ada semut".*

Sepertinya akan percuma apabila apa-apa yang diperbuat di Pulau Kecil ini tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Beberapa upaya publikasipun dilakukan, mulai mempublikasikannya dengan media yang ada atau mengabadikannya dalam sebuah buku. Sejak Desember 2010 kegiatan konservasi di Enggano mulai di *posting*

di enggano.blogspot.com. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mendekati angka 10000 kali penayangan dengan pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Mungkin hanya dengan upaya sederhana dan sebisanya ini Enggano bisa lebih dikenal.

***

Kawasan terpencil dan sulit di akses bukan berarti beresiko kecil sehingga harus dibiarkan tanpa perhatian. Mencegah kerusakan Kawasan Hutan jauh lebih baik daripada 'mengobatinya'. Resort sebagai unit pengelolaan terkecil merupakan ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi. Namun keberadaanya terkadang tidak lebih dari syarat formil sehingga terkesan dijalankan apa adanya. Keinginan untuk itu tentu tidak bisa digantungkan kepada kesadaran personal semata, namun harus didorong oleh sebuah kesadaran yang terbentuk dari sebuah sistem. Saatnya bekerja, saatnya kembali ke lapangan, saatnya kembali ke Resort. ***

---------=====000O000=====----------



Semasa kecil sudah sering keluar masuk hutan disekitar desa kelahirannya di Pinggir Danau Kerinci, yang belakangan ini diketahui sebagai Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hingga sekarang mendatangi daerah yang baru menjadi kegemarannya. Hal itulah membuatnya pada tahun 2010 mendatangi Pulau Enggano. Menamatkan SKMA Pekanbaru pada tahun 2002 dan bekerja di BKSDA Bengkulu Sejak 2005 hingga sekarang.
blog: www.enggano.blogspot.com

5 Kalau Tidak Turun, Nanti Dimarahi Pak Kadus

Kalau Tidak Turun, Nanti Dimarahi Pak Kadus

Adhie Masturiatna

Pekerjaan penyuluh menurut saya merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Kegiatannya lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga kita bisa mendapatkan banyak teman dan saudara. Pekerjaan penyuluhan itu tidak membosankan, tidak monoton dan orang yang kita hadapi juga berbeda-beda karakter. Sebagai penyuluh, sebenarnya tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tapi melalui penyuluhan kita akan banyak berbagi dengan masyarakat dalam berbagai hal, karena tanpa kita sadari dengan berinteraksi dengan masyarakat kita juga banyak belajar dari masyarakat.

Sebelum di TNBBS saya sempat bekerja di sebuah lembaga sosial kemanusiaan Mercy Corps dari tahun 2006-2007, lembaga tersebut bergerak di bidang penanganan anemia dan penyuluhan pola hidup sehat bagi para siswa sekolah dasar yang ada di propinsi Lampung. Selama bekerja di Mercy Corps saya banyak belajar mengenai bagaimana melakukan penyuluhan. Walaupun hanya

kepada anak-anak sekolah dasar, tapi pengalaman tersebut sangat bermanfaat karena tugas saya di Kementerian Kehutanan sebagai penyuluh..Selesai di Mercy Corps, tahun 2008-2009, saya bekerja sebagai pendamping kelompok Petani Pengguna Pemakai Air (P3A) di wilayah Lampung Selatan. Selama bekerja sebagai pendamping kelompok tani tentu saya banyak belajar tentang bagaimana melakukan pendampingan para petani. Saya sangat bersyukur bisa bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Kehutanan.

Pada awal-awal bekerja di TNBBS tahun....., terus terang saya merasa bosan karena pada tahun pertama itu lebih banyak di kantor. Maklum saya masih masa orientasi sebagai pegawai. Selama satu tahun itu tidak banyak yang dapat saya kerjakan. Kerjaan saya saat itu paling baca buku mengenai TNBBS, bantu-bantu buat surat dan sesekali diikutkan SPT ke lapangan yang itu juga tidak berkaitan dengan penyuluhan. Jadi selama setahun awal saya bekerja, tupoksi saya sebagai penyuluh belum berjalan. Masuk tahun kedua, saya ditempatkan di Seksi Wilayah IV Bintuhan Bidang Wilayah II Liwa yang berada di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.

Berbekal semangat dan SK Penempatan, pada pertengahan Januari 2011 tepatnya tanggal 14 Januari, saya berangkat ke Kantor Bidang II Liwa di Lampung Barat untuk berkoordinasi dan meminta arahan dari Kepala Bidang terkait penempatan saya sebagai fungsional penyuluh di Seksi Wilayah IV Bintuhan. Liwa merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat yang juga merupakan tempat kedudukan Kantor Bidang Wilayah II TNBBS.

"Awalnya saya kaget karena lokasi penempatan saya sangat jauh, padahal wilayah-wilayah terdekat juga masih banyak memerlukan

penyuluhan," batin saya, "*Tapi ini tugas negara, dan saya harus siap ditugaskan di mana saja, dan di lokasi baru tersebut pasti membutuhkan penyuluhan juga*". Saya mencoba meyakinkan diri saya.

Di sana saya bertemu dengan Pak Edi Susanto, Kepala Bidang II Liwa. Beliau banyak cerita tentang pengalamannya selama bekerja di Kementerian Kehutanan. Beliau juga banyak memberi masukan kepada saya untuk bekerja dengan baik dan penuh semangat. "*orang muda itu harus penuh semangat dalam bekerja, karena kalau tidak, hutan kita akan tambah hancur*".

"Terima kasih atas saran dan masukannya pak, mudah-mudahan masukan bapak akan selalu saya ingat sebagai motivasi saya dalam bekerja"ucap saya".

Sebelum bertugas di Seksi Wilayah IV Bintuhan, saya terlebih dahulu bertugas di kantor Bidang II Liwa yaitu dari bulan Januari sampai Februari 2011, dan bulan Maret baru mulai aktif di Seksi Wilayah IV Bintuhan di Merpas.

***

TIBA-TIBA Pak Santoso menghentikan mobil yang sedang kami kendarai, kami berhenti di suatu wilayah bernama Simpang Kandis.

Hari itu, Rabu 12 Maret 2011 saya dan Pak Santoso berangkat dari Kantor Bidang II Liwa menuju Merpas. Ini kali pertama saya berangkat menuju Seksi Wilayah IV Bintuhan di Merpas. Merpas adalah nama desa di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, yang merupakan tempat kedudukan Kantor Seksi Wilayah IV Bintuhan.

Pak Santoso merupakan Kepala Seksi BBTNBBS yang bertugas di Wilayah IV Bintuhan, beliau sudah berumur sekitar 55 Tahun

dan sudah bekerja di TNBBS sejak Tahun 1983 atau sudah sudah 29 tahun bekerja. Tapi walaupun sudah tua dan sebentar lagi akan pensiun beliau tetap semangat dalam bekerja.

Simpang Kandis merupakan nama suatu tempat di dalam kawasan TNBBS, yang lokasinya berada tepat di dipinggir jalan lintas Sumatera. Simpang Kandis secara administrative berada di Pekon Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat (*Pekon sama dengan desa, karena di Lampung Barat nama desa diganti menjadi pekon*), sedangkan secara wilayah pengelolaan berada di Resort Pugung Tampak Seksi Wilyah III Krui Bidang Wilyah II Liwa.

Jalan lintas sumatera yang menghubungkan antara Propinsi Lampung dan Bengkulu tersebut berada di dalam kawasan TNBBS yang memiliki panjang sekitar 14 km. Jalan tersebut mulai dibuka oleh pemerintah sejak tahun 1986 dan mulai berfungsi dengan baik sekiat tahun 1994. Jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan Propinsi Lampung dan Bengkulu di wilayah selatan sehingga fungsinya sangat vital bagi masyarakat.

“Ada apa Pak? Tanya saya. “Kita berhenti dulu di sini, ini namanya Simpang Kandis,” ucap beliau.

Simpang kandis ini merupakan salah satu akses masuk bagi para perambah ke beberapa wilayah di kawasan TNBBS. Melalui tempat ini para perambah bisa masuk ke berbagai talang yang ada di dalam (talang adalah nama sebutan untuk sebuah umbulan/ kelompok perambah). Talang yang ada di dalam jumlahnya cukup banyak dan namanya unik-unik, seperti Talang Way Lungkah,Talang Selalayang, Talang Celerot dan lain-lain.

“Sambil mengatur napas, Pak Santoso kemudian melanjutkan ceritanya”,

Untuk menuju talang-talang yang ada di dalam, para perambah tidak perlu bersusah payah berjalan kaki untuk sampai ke tujuan, karena untuk sampai ke lokasi, jalan dari Simpang Kandis dapat dilalui kendaraan roda dua, dan kalau tidak punya motor para perambah bisa membayar jasa ojek yang biasanya mangkal di Pekon Rata Agung. Tidak hanya itu setiap hari Sabtu, di tempat ini sering ada pasar dadakan, sehingga kalau pada hari Sabtu tempat ini ramai dipenuhi oleh para perambah yang membeli kebutuhan sehari-hari.

Ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba datang beberapa orang dari arah berlawanan, mereka berjumlah sekitar 4 orang yang terdiri dari seorang ibu yang sedang menggendong anak kurang lebih berumur 2 tahun, dan dua orang laki-laki, satu kira –kira berumur sekitar 40 Tahun, sepertinya dia adalah suami dari ibu yang menggendong anak dan satu lagi berumur sekitar 15 tahun yang merupakan anak dari kedua orang tua tersebut.

"Dengan spontan saya bertanya kepada orang itu, dari mana pak", dari kebun pak, jawab bapak itu sambil menurunkan barang bawaannya"'

"Bapak tahu tidak kalau kebun yang bapak kelola berada di kawasan TNBBS, dan bapak tidak boleh berkebun di dalam kawasan ini, karena apa yang bapak lakukan itu melanggar undang-undang," tegas Pak Santoso".

"Iya pak kami tahu, apa yang kami lakukan ini salah, ucap bapak itu", tapi harus bagaimana lagi, kami tidak punya usaha lagi selain berkebun di sini.

"Iya kami mengerti itu, timpal saya" tapi apa yang bapak lakukan itu salah, dan sangat beresiko, karena atas perbuatan bapak

tersebut, bapak bisa dihukum dan dipenjara, tegas saya" dan itu ada undang-undangnya.

Di dalam Undang-Undang 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan dalam pasal 40" bahwa atas aktivitas yang bapak lakukan tersebut, bapak bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda 200 juta".

"Jadi saran saya, lebih baik bapak cari saja kebun di luar kawasan, karena selain beresiko, berkebun di dalam kawasan TNBBS itu merugikan orang banyak. Kerusakan TNBBS dapat menyebakan kekeringan di musim kemarau, dan kebanjiran di musim hujan dan TNBBS ini milik semua orang dan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan orang per orang" tegas saya".

Setelah diberi penjelasan panjang lebar, mereka akhirnya pergi menuju arah pesisir krui dengan menaiki angkot jurusan Bintuhan - Krui.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan Balai Besar TNBBS pada bulan Februari 2011 diketahui bahwa sedikitnya di wilayah Rata Agung terdapat 888 KK perambah dengan luas garapan sekitar 1.417 Ha. Secara rinci kondisi perambah di wilayah Rata Agung dapat dilihat pada table 1 di bawah Ini :

Tabel Kondisi Perambah di Rata Agung

No	Lokasi Perambah	Jumlah Perambah (kk)	Luas lahan garapan (ha)
1	Simpang Kandis Tengah	43	76
2	Simpang Kandis Bawah	9	14.5
3	Simpang PDI	39	50.5
4	Way Lungkah Tengah	247	402
5	Way Lungkah Ujung	33	35.5
6	Talang Celerot	71	142
7	KM 65 Kanan	28	29
8	Selalayang	94	95
9	Way Penaga	89	125

10	KM 65	37	73
11	KM 67	142	278
12	KM 68	36	63
13	KM 69	20	33.75
Total		**888**	**1417.25**

Sumber : Hasil Identifikasi Perambah di TNBBS Tahun 2011

Selesai melihat-lihat kondisi sekitar wilayah Simpang Kandis, kami melanjutkan perjalanan, dan selang 10 menit perjalanan, Pak Santoso kemudian menghentikan kembali kendaraannya. Saya kemudian bertanya lagi, " ada apa Pak?

"Ga ada apa-apa, saya cuma ingin ngasih tahu, ini namnya Simpang PDI. Simpang PDI juga merupakan salah satu akses yang biasa digunakan oleh para perambah untuk menuju kebun perambah yang ada di dalam kawasan TNBBS".

"Kok, namanya simpang PDI, apa ada hubungannya dengan partai PDI yang saat ini dipimpin Ibu Megawati, tanya saya penasaran".

" Saya juga tidak tahu apa hubungan nama tempat ini dengan Partai PDI, tapi yang saya tahu dari cerita orang, katanya dulu ada rombongan pengurus PDI dari Jakarta yang lewat sini, dan mereka sempat istirahat sejenak di tempat ini, karena ada salah satu anggota rombongan yang ingin buang air kecil. Ketika rombongan tersebut sedang istirahat, kemudain dilihat oleh perambah yang saat itu akan ke kebun, sehingga lokasi tersebut diberi nama Simpang PDI." Ujar Pak Santoso

"Tapi ada juga versi lain yang mengatakan, yaitu tempat itu dinamakan Simpang PDI karena para perambah di wilayah ini awalnya dibuka oleh orang yang mengaku simpatisan PDI, sehingga namanya menjadi Simpang PDI".

Tapi Wallahhualam, mana yang benar saya tidak tahu, ucap Pak Santoso, yang pasti masyarakat menyebut wilayah tersebut dengan sebutan Simpang PDI.

Di wilayah Simpang PDI, kondisi hutannya juga tidak jauh berbeda dengan di wilayah Simpang Kandis. Kondisinya sangat hancur, kayu-kayu besar sudah tidak ada lagi dan sudah diganti dengan tanaman kopi oleh para perambah. Sepintas lewat kawasan TNBBS yang berada di kanan kiri jalan lintas tersebut terlihat masih utuh, padahal di kiri dan kanan jalan tersebut hutannya sudah habis dirambah masyarakat dijadikan kebun kopi.

Agar hutan kelihatan tidak rusak, para perambah memang cukup cerdik. Mereka tidak membuka hutan yang lokasinya berada di kanan dan kiri jalan, jaraknya mungkin sekitar 200-500 m yang tidak dibuka masyarakat.

Ketika, sedang mellihat–lihat kawasan hutan di sekitar Simpang PDI, tiba-tiba saya melihat 2 (dua) ekor siamang yang sedang bermain. Saya merasa iba atas siamang tersebut karena habitat mereka telah dirusak dan mereka juga sepertinya sangat kesulitan untuk mencari makan. Dalam hati kecil saya berkata, apa yang akan terjadi dengan siamang-siamang tersebut bila hutan ini tidak segera di selamatkan.

“Kok, bisa hancur kayu gitu hutan kita ini, emang tidak dijaga ya”, tanya saya ke Pak Santoso”

”. Begitulah kondisinya saat ini, semenjak era reformasi, masyarakat sekarang bukan tambah bener tapi malah tambah rusak” Kok begitu pak, jawab saya”, Bagaimana gak rusak, dulu hutan di wilayah ini sebelum era reformasi kondisinya masih sangat bagus dan hewan-hewan seperti gajah, harimau, siamang, burung-



Kondisi Hutan TNBBS disekitar Simpang PDI dan Simpang Kandis

burung dan binatang lainnya masih banyak di wilayah sini. Tapi semenjak era reformasi orang-orang makin berani, hutan di babat habis dan dibuka menjadi perkebunan kopi".

Coba bayangkan, kayu-kayu tersebut diperkirakan umurnya sudah ratusan tahun (sambil menunjuk ke arah tonggak kayu besar), tapi hanya dalam hitungan hari kayu-kayu besar tersebut ditebang untuk dijadikan kebun kopi.

"Emang dulu tidak dijaga pak hutannya? kok bisa sampai hancur kayak gini, ucap saya".

Bukannya tidak dijaga, dijaga tapi gak maksimal karena petugasnya cuma sedikit. Bayangkan, satu resort di TNBBS rata-rata luasnya adalah sekitar 20.000 Ha sampai 30.000 Ha, sementara petugas resort rata – rata jumlahnya sekitar 2 – 3 orang". Bagaimana bisa maksimal menjaganya kalau petugasnya sedikit.

Selain petugasnya sedikit, saat ini masyarakatnya makin berani dan anarkis. Bentar-bentar demo, bentar-bentar demo sehingga banyak petugas di lapangan juga khawatir akan keselamatannya. Nah itulah kondisinya saat ini, bukannya tambah bener masyarakatnya, tapi malah tambah kacau, Ucap Pak Santoso.

Masyarakat kita saat ini makin susah diatur dan sudah tidak takut lagi sama petugas, dulu walaupun petugas kita sedikit, hutan kita tetap utuh dan terjaga karena dulu masyarakatnya takut sama hukum dan nurut sama petugas, ujar Pak Santoso sambil memutar stir mobil mengindari jalan rusak yang kami lalui.

“Zamannya sudah beda pak, timpal saya”, dulu kenapa kawasan TNBBS ini utuh walaupun petugasnya sedikit, karena dulu masyarakatnya belum sebanyak sekarang, dan tanah di luar kawasan juga masih luas sehingga masyarakat tidak kekurangan lahan untuk berkebun

Seiring pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan berdampak pada menyempitnya lahan pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Selain pertumbuhan jumlah penduduk pola pertanian masyarakat yang cenderung melakukan perluasan lahan juga menambah laju penyempitan lahan pertanian,” ujar saya. Dan yang terakhir saya setuju dengan bapak, mengenai dampak reformasi kebablasan yang menyebakan masyarakat semakin berani dan anarki serta tidak taat hukum.

Tapi bagaimanapun kawasan TNBBS ini perlu kita selamatkan, karena kalau tidak banyak masyarakat Lampung yang akan terkena dampak buruk akibat kerusakan kawasan TNBBS. TNBBS ini merupakan kawasan yang sangat penting bagi masyarakat Lampung karena merupakan hulu bagi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari 5 (lima) DAS utama yang ada di Lampung, yaitu DAS Semaka, DAS Sekampung, DAS Seputih, dan DAS Tulang Bawang.

Rusaknya kawasan TNBBS bisa berdampak buruk bagi masyarakat, di sektor pertanian, dikawatirkan akan mengurangi

pasokan air bagi para petani yang berada di sepanjang DAS tersebut, terutama pada saat musim kemarau sehingga berdampak buruk pada ketahanan pangan masyarakat Lampung karena sebagian para petani sawah sangat bergantung atas pasokan air dari 4 DAS tersebut.

"Itu baru satu sektor pak, ujar saya", belum sektor lainnya, yaitu energi. Untuk sektor energi, di Lampung ada 2 (dua) bendungan yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, yaitu Bendungan Batu Tegi di Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Bendungan Way Besai di Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, yang sumber airnya juga berasal dari TNBBS.

Rusaknya kawasan TNBBS juga akan berdampak pada berkurangnya energi listrik yang dihasilkan karena berkurangnya suplai air yang digunakan sebagai pembangkit listrik, sehingga dampaknya aliran listrik di masyarakat menjadi berkurang. Selain dua bendungan tersebut, di sepanjang 4 DAS utama tersebut, juga terdapat ribuan masyarakat yang memanfaatkan enegi listrik dengan membuat turbin atau kincir sebagai pembangkit listrik karena saat ini banyak di daerah pedalaman Lampung yang sampai saat ini belum dialiri listrik.

"Selain untuk kebutuhan pertanian dan energi, juga masih banyak masyarakat Lampung yang hidupnya bergantung terhadap sungai, karena saat ini masih banyak orang yang memanfaatkan sungai untuk kebutuhan rumah tangga., Oleh karena itu penting sekali membangun kesadaran semua pihak dalam menyelamatkan kawasan TNBBS untuk kehidupan yang lebih baik," ujar saya ke pada Pak Santoso dengan semangatnya.

"Idealnya begitu, tapi kenyataanya tidak begitu, ucap Pak Santoso", karena kondisi saat ini banyak masyarakat yang belum

sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, dan juga jangan kaget kalau kamu mendengar ada anggota dewan yang ikut membekingi perambah,”

“Kok bisa begitu pak? timpal saya,” karena saat ini para perambah sering dijadikan korban politik oleh para calon anggota dewan dengan janji-janjinya, sehingga ada anggota dewan yang berani memperjuangkan para perambah karena takut kehilangan suara.

Saking asiknya ngobrol, tidak terasa kami akhirnya sampai di Kantor Seksi Bintuhan di Merpas.

***

Seksi Wilayah IV Bintuhan merupakan salah satu seksi wilayah yang ada di TNBBS yang memiliki luas wilayah 82.530 Ha yang terbagi ke dalam 3 Resort yaitu Resort Merpas yang memiliki luas 30.504 Ha, Resort Muara Sahung dengan luas 25.601 Ha dan Resort Makakau Ilir dengan luas sekitar 26.425 Ha.

Dengan wilayah kerja yang cukup luas, Seksi Wilayah Bintuhan merupakan salah satu wilayah kerja yang kurang mendapat perhatian, karena dengan wilayah kerja yang sangat luas, petugas yang bekerja di wilayah ini hanya 8 orang dengan rincian masing-masing resort petugasnya 2 orang, ditambah Kepala Seksi dan satu orang penyuluh, dan dari 8 (delapan) orang tersebut, 2 (dua) orang petugas resort yaitu dari Resort Muara Sahung dan Makakau Ilir diperbantukan di RPU (Rhino Protection Unit), sehingga otomatis petugas yang aktif sebanyak 6 orang.

Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya melakukan pengeloaan hutan seluas 82.530 Ha dengan 6 orang petugas, padahal di daerah Pulau Jawa, Taman Nasional dengan rata-rata luas 40.000 Ha,

dikelola oleh petugas yang rata-rata lebih dari 100 orang, bahkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang luasnya sekitar 21.000 Ha dikelola oleh petugas lebih dari 200 orang.

“Tapi sudahlah, ujar saya dalam hati”, sekarang yang paling penting bagaimana kita bisa berkerja dengan baik, karena mengeluh juga tidak akan menyelesaikan persoalan.

“Kita istirahat dulu ucap Pak Ramni sambil memarkirkan motornya di salah satu warung yang ada di lokasi itu”. Pak Ramni adalah seorang Kepala Resort Merpas, dengan berperawakan kecil dan tinggi sekitar 160 cm yang telah bekerja sejak tahun 1989.

Hari itu, tepatnya Selasa tangal 22 Maret 2011 kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan pengecakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Propinsi Bengkulu yang ada di dalam kawasan TNBBS.

Lokasi yang kami tuju tersebut bernama Sidorejo. Sidorejo adalah salah satu titik lokasi perambahan yang berada di dalam Kawasan TNBBS yang secara administratif berada di Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.

“Ada apa pak berhenti”, ucap saya kepada Pak Ramni” tidak ada ada apa-apa, kita istirahat dulu sebentar sambil nunggu anggota pamswakarsa yang akan menemani kita”.

Ini namanya Desa Sukajaya, desa ini merupakan desa terakhir yang berada di luar kawasan TNBBS, setelah desa ini kita akan ketemu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dulu pernah dikelola oleh perusahaan HPH yang bernama Bengkulu Raya Timber (BRT), dan setelah melewati kawasan HPT baru kita

akan sampai di lokasi kawasan TNBBS," ujar pak Ramni sambil menikmati secangkir kopi yang dipesannya".

" Kira-kira berapa lama lagi kita sampai di lokasi, tanya saya"

"Kalau kondisi seperti ini Insya Allah satu jam lagi kita sampai di tujuan, tapi kalau kondisi hujan, bisa jadi 2 sampai 3 jam lagi kita baru sampai di lokasi karena jalannya sangat licin dan terjal, ucap pak Ramni.

Ketika sedang asyik ngobrol, kemudian datang sosok laki-laki berkumis tebal dengan tinggi, sekitar 170 cm.

"Siang nDan (panggilan singkat komandan)", ucap lelaki itu kepada Pak Ramni", Siang juga, ucap Pak Ramni".

"Silahkan duduk, kenalkan ini petugas baru kita, (sambil menunjuk ke arah saya) namanya Adhie Masturiatna, baru satu minggu lebih bertugas di sini dan bertugas sebagai penyuluh".

"Dan ini namanya Pak Asilin" ucap pak Ramni kepada saya", Pak Asilin adalah anggota Pamswakarsa kita yang bertugas di Resort Merpas.

Selesai istirahat dan ngobrol-ngobrol mengenai maksud dan tujuan kami ke Sidorejo, kamipun melanjutkan perjalanan.

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam, kami akhirnya sampai di lokasi tujuan. Satu jam perjalanan yang cukup menegangkan dan mengasyikan menurut saya, karena jalan yang kita lalui merupakan jalan setapak yang licin dengan turunan serta tanjakan yang curam sehinga kita harus ekstra hati-hati dalam melaluinya.

Sepertinya Pak Ramni dan Pak Silin sudah biasa melalui jalan tersebut sehingga setiap tikungan dan tanjakan yang dilalui

tanpa ada masalah, tapi saya yang baru pertama kali melalui jalan tersebut, agak ngeri juga, apalagi pada saat melalui turunan dan tikungan tajam sebelum jembatan gantung. Karena agak ngeri, saat itu saya memilih turun dan berjalan kaki sampai jembatan gantung.

Dulu waktu ada perusahaan HPH beroperasi, jembatan gantung yang kami lalui tersebut adalah jembatan permanen yang biasa dilalui mobil-mobil pegangkut kayu, tapi semenjak perusahaan HPH tersebut tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 1995, jembatan tersebut tidak terawat dan rusak serta terhantam banjir pada tahun 1996. Karena jembatan tersebut merupakan akses bagi masyarakat yang memiliki kebun di kawasan HPT maka jembatan tersebut kemudian diperbaiki masyarakat menjadi jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

"Silahkan masuk pak, ucap si empunya rumah, kepada kami" kemudian kamipun masuk ke dalam rumah tersebut",

Pemilik rumah tersebut adalah Bapak Muklisin. Bapak yang berumur sekitar 30 tahun dan beranak satu tersebut itu adalah Kepala Dusun Sidorejo Desa Merpas Kecamatan Nasal. Masyarakat Sidorejo berjumlah sekitar 290 KK yang terbagi ke dalam 9 Rukun Tetangga (RT). Dari 290 KK tersebut diperkirakan ada 240 KK berada di dalam kawasan TNBBS dan sisanya sekitar 50 KK bermukim di kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Sambil minum segelas kopi dan menikmati pisang goreng panas, kami kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami yaitu mengenai keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur.

"Jadi pak, kami minta keberadaan TPS yang ada di sini untuk dibongkar dan tidak boleh ada kegiatan pemungutan suara di lokasi

ini karena dilarang oleh Undang - undang, dan bapak tahukan kalau lokasi ini adalah kawasan TNBBS," ucap Pak Ramni"

"Tapi Pak, ucap Pak Muklisin yang didampingi oleh Pak Idris yang merupakan tokoh masyarakat setempat, kami tidak mungkin membongkar TPS tersebut karena undangan sudah disebar dan waktunya sudah mepet karena pelaksanaannya tinggal 2 hari lagi, sehingga tidak mungkin kami memindahkan TPS tersebut". Kalau seminggu sebelum pelaksanaan mungkin kami bisa memindahkannya.

"Bapak-bapak kan tahu sendiri, kotak TPS aja sudah dibawa ke sini";

"Ya, kami tahu itu, ucap Pak Ramni", tapi apa yang bapak-bapak lakukan itu salah dan melanggar hukum. Jadi kami harap tolong dipindahkan lokasi TPS tersebut ke luar kawasan TNBBS.

Setelah dilakukan diskusi yang cukup lama, akhirnya disepakati TPS akan dipindahkan ke kawasan HPT yang lokasinya tidak jauh dari Kawasan TNBBS, karena kalau dipindahkan ke Desa Merpas dikhawatirkan masyarakat tidak akan ada yang datang ke TPS.

"Baik, terima kasih atas kerjasamanya, kami harap ke depannya tidak ada lagi TPS di sini karena itu dilarang Undang-undang, ucap Pak Ramni sekaligus mengakhiri petemuan tersebut".

Sebelum pulang kami sempat berkeliling ke beberapa titik lokasi perambahan di wilayah Sidorejo. Di Dusun Sidorejo terdapat 3 Talang besar yang berada di dalam kawasan TNBBS yaitu Talang Azim, Talang Muslim dan Talang Kinal sedangkan Talang Idris lokasinya berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Selain ada TPS di Sidorejo juga terdapat Sekolah Dasar (SD) yang bangunannya terbuat dari papan,

tapi kami tidak bisa melihat aktivitas sekolahan tersebut karena pada saat itu murid-murid sekolah sudah pada pulang.

Hari itu merupakan pengalaman pertama saya melihat kondisi kawasan TNBBS di wilayah Seksi IV Bintuhan, tadinya saya berpikir kawasan TNBBS di wilayah ini kondisinya lebih baik dibandingkan dengan yang ada di wilayah Lampung, tapi ternyata kondisinya sama saja. Dimana – dimana wilayah kawasan TNBBS sudah terkepung oleh masyarakat.

***

Permasalahan yang terjadi di Seksi wilayah IV Bintuhan, mungkin tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya yaitu terdegrasinya kawasan akibat perambahan hutan yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan pada tahun 2010 diketahui bahwa kawasan TNBBS yang kondisinya paling parah tingkat kerusakannya yaitu di wilayah Resort Merpas. Di wilayah ini diperkirakan lebih dari 1500 Ha telah dirambah dan berubah fungsi menjadi areal kebun kopi.

Menyikapi maraknya aktivitas perambahan hutan yang berdampak pada terdegradasinya kawasan hutan, saat ini Balai Besar TNBBS telah menyusun rencana penurunan perambah dari tahun 2011 – 2014. Dan untuk Wilayah Resort Merpas akan dilakukan kegiatan penurunan perambah pada Tahun 2012,

"Ucap Pak Santoso membuka diskusi rapat bulanan Seksi".

"Kira-kira tahapan penurunannya seperti apa"ucap saya".

"Sebelum dilakukan penurunan, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian baru dilakukan

pemusnahan tanaman eksotik dan gubuk-gubuk perambah dan setelah dilakukan penurunan kemudian dilakukan penjagaan agar para perambah tidak kembali ke dalam kawasan"ujar Pak Santoso".

"Setelah diturunkan ada tidak bentuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap para perambah tersebut" tanya saya".

Setelah dilakukan penurunan, selama ini pihak Balai Besar TNBBS biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembinaan agar para perambah tidak kembali merambah kawasan, itu bagi warga yang berasal dari kabupaten setempat, tapi bagi warga yang berasal dari luar wilayah kabupaten setempat diharapkan untuk kembali ke wilayahnya masing-masing.

Kalau untuk pemberdayaan, ada tapi dalam skala kecil, karena kita memiliki keterbatasan sumberdaya dan dana, oleh karena itu dibutuhkan peran para mitra dan pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan bagi para perambah agar mereka tidak kembali merambah kawasan, "ujar Pak Santoso".

"Sekarang kira–kira apa masukan dari bapak-bapak semua untuk mendukung rencana Balai Besar TNBBS dalam melakukan penurunan perambah khususnya di Resort Merpas agar berjalan dengan sukses, tanya pak Santoso pada forum".

"Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap para perambah, agar mereka tidak kaget dan mereka lebih siap ketika akan dilakukan kegiatan penurunan perambah".

"Saya sih setuju aja, dengan ide tersebut, tapi kira-kira ada tidak anggarannya untuk kegiatan tersebut, "ucap Pak Ramni", Karena kalau tidak ada anggaran, saya rasa sangat berat karena biaya operasional kita untuk ke lokasi tersebut sangat besar".

“Anggaran untuk sosialisasi untuk tahun ini memang tidak ada, karena anggarannya baru turun tahun depan, tapi bisa tidak kegiatan sosialisasi ini kita lakukan pada saat kita ada kegiatan ke sana, atau bisa juga dengan menggunakan dana patroli” ujar Pak Santoso”

Setelah dilakukan diskusi kurang lebih hampir dua jam, akhirnya untuk mendukung kegiatan penurunan perambah di Resort Merpas maka akan dilakukan sosialisi sekaligus identifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan dana patroli rutin.

***

April 2011 kamipun mulai bergerak melakukan kegiatan sosialisasi dan identifikasi terhadap para perambah yang ada di Resort Merpas. Sasaran pertama kami adalah wilayah Sidorejo, karena selain wilayahnya lebih dekat juga karena jumlah perambahnya paling banyak.

Hari itu, 5 April 2011 saya, Pak Santoso, Pak Ramni dan Pak Asilin berkeliling datang ke gubuk-gubuk yang ada di Sidorejo yaitu untuk menyampaikan informasi kepada para perambah agar segera meninggalkan kawasan TNBBS, sekaligus menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan kawasan TNBBS paling lambat bulan Desember 2011

“Jadi kawasan ini mau ditutup yak pak, ujar seorang perempuan paruh baya, dengan raut muka lesunya sambil mengendong anak kecilnya” kalau kawasan ini ditutup kami mau makan apa pak? dan kami tinggal dimana?

Bukan ditutup bu, tapi memang kawasan ini tidak diperbolehkan untuk berkebun apalagi bermukim, karena

kawasan yang ibu tempati ini merupakan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan tahun depan di wilayah ini akan dilakukan operasi penurunan. Jadi ibu masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri keluar dari tempat ini dan mencari usah lain.

"Emang ibu dari mana asalnya? Saya dari Lampung Tengah Pak" jawab ibu itu

" Bagaimana ceritanya ibu bisa ada di sini"tanya saya?

"Saya dulu datang ke sini sama suami sekitar tahun1999, dulu kami tidak tahu kalau ini kawasan TNBBS, karena saat datang ke sini sudah banyak orang yang berkebun dan kami juga tidak pernah ada yang memberitahu kalau kawasan ini adalah hutan larangan (sebutan untuk kawasan hutan yang tidak boleh dibuka)"

"Kok ibu jauh amat datang dari Lampung ke sini"

" Ya niatnya sih pengen cari penghidupan yang lebih baik Pak, karena di Lampung saat itu kondisi kami serba sulit, boro-boro buat sekolah anak buat makan aja susah. Karena ada saudara yang ngajakin buka kebun, maka rumah kecil yang kami tempati di Lampung, kami jual untuk ongkos dan modal buka kebun, makanya kami bingung harus kemana lagi, kalau harus pergi dari sini" cerita ibu tersebut dengan wajah berkaca-kaca".

Kami mengerti kondisi ibu, tapi apa yang ibu lakukan dan orang-orang yang ada di sini adalah salah dan melanggar hukum, dan ibu masih punya banyak waktu untuk keluar dari sini, sebelum diturunkan oleh tim operasi gabungan. Dan yakinlah Allah pasti akan memberi jalan keluar bagi ibu dan keluarga, kalau mau berusaha, "Ucap saya memberi semangat kepada ibu tersebut".



Penulis dan petugas Resort Merpas sedang melakukan sosialisasi dan pendaataan perambah di Sidorejo

Sambil berjalan menuju gubuk lain, dalam hati kecil saya sebenarnya iba melihat ibu tersebut, apalagi melihat nasib anak kecil yang digendongnya. Tapi bagaimanapun mereka tetap salah dan mereka harus keluar dari kawasan TNBBS.

Di gubuk lain, kami bertemu dengan seorang bapak yang berumur sekitar 55 tahun, bapak tersebut namanya Pak Yono yang kebenaran merupakan salah satu ketua RT di wilayah Sidorejo. Selain sebagai Ketua RT, dia juga merupakan tokoh masyarakat di Sidorejo.

Pak Yono, menceritakan bahwa beliau berasal dari Tulang Bawang- Lampung dan datang ke sini sekitar tahun 1997. Awalnya saya datang ke Trans Bukit Indah (lokasi transmigrasi yang ada di kecamatan Nasal), berkunjung ke tempat suadara. Ketika di sana saya mendengar ada bukaan kebun bekas tebangan HPH, mendengar informasi tersebut saya kemudian membuka kebun di sana dan membawa keluarga.

Ketika membuka kebun, kami tidak tahu kalau yang kami buka tersebut adalah hutan larangan (TNBBS), karena tidak ada petunjuk dan tanda-tanda bahwa lahan ini adalah kawasan TNBBS. Selain tidak ada petunjuk, dulu lahan lahan saya buka ini sebagian

merupakan belukar bekas tebangan HPH yang telah berakhir sekitar tahun 1995. Karena melihat tanah ini tidak ada yang punya, dan saya rasa aman, maka kemudian saya mengajak beberapa teman dan saudara untuk berkebun di sini. Begitulah kira-kira cerita singkat kenapa saya bisa sampai ada di sini, "Ujar Pak Yono".

Setelah Pak Yono bercerita, kami kemudian memberikan arahan kepada Pak Yono untuk meninggalkan kawasan TNBBS, dan meminta kepada Pak Yono untuk mengajak saudara dan teman-temannya untuk meninggalkan kawasan TNBBS.

Selesai berkeliling dari talang ke talang dan dari gubuk ke gubuk, tak terasa haripun sudah sore, maka kami memutuskan untuk menginap di Rumah Pak Kadus Sidorejo.

Malam itu kami di rumah Pak Kadus berdiskusi dan menjelaskan mengenai rencana penurunan perambah di wilayah Sidorejo. Dan malam itu kami bersama pak Kadus merencanakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan para RT yang akan dilangsungkan besok pagi. Dan malam itu juga Pak Kadus berkeliling ke talang-talang untuk mengundang para tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan pada esok hari.

"Asalamualaiukum, wr wb, ucap Pak Kadus membuka diskusi hari itu,

Terimakasih atas kehadiran bapak-bapak semua, hari ini kita kehadiran bapak-bapak Polhut TNBBS yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi terkait keberadaan kita di dalam kawasan TNBBS.

"Pak, terus bagaimana nasib kami, kalau hutan ini ditutup" ucap salah seorang anggota pertemuan"



Suasana sosialisasi penurunan perambah yang dilakukan di luar dan di dalam ruangan

“ Ya, bapak-bapak kan sudah salah berada di dalam kawasan, dan kami tidak menyuruh bapak untuk datang ke sini, ucap Pak Santoso tegas. Dan kami harap bapak-bapak keluar dari kawasan ini karena apa yang bapak-bapak lakukan tersebut telah melanggar hukum dan kalau bapak-bapak tidak keluar juga, akan ada petugas gabungan yang akan menurunkan bapak-bapak semua”

“Betul pak, ucap Pak Ramni,” kami sarankan bapak-bapak semua untuk keluar dari tempat ini, karena tahun depan akan dilakukan operasi besar-besaran oleh Tim Terpadu dari Kepolisian, Tentara, Polhut TNBBS dan Pemda.

Perlu bapak-bapak ketahui, bulan Juni 2011 nanti, para perambah di Rata Agung dan sekitarnya juga akan diturunkan oleh Tim terpadu, kalau bapak – bapak tidak percaya, silahkan lihat aja nanti,” ucap Pak Santoso”.

“Kalau kami tidak boleh menggarap kebun kami, anak-anak kami mau makan apa? Dan kalau keluar, kami harus tinggal di mana? Karena kami tidak punya tempat tinggal lagi selain di sini?

“Bukannya kami tidak pedulil dengan bapak-bapak semua, tapi aturannya memang begitu, kawasan TNBBS ini bukan untuk

bermukim dan berkebun karena TNBBS milik semua orang bahkan dunia, dan kerusakan TNBBS bisa berdampak buruk buat orang banyak, jadi kegiatan bapak – bapak di dalam kawasan ini tanpa disadari telah menzolimi hak-hak orang lain," ucap saya memberi pemahaman kepada peserta pertemuan"

Setelah dilakukan diskusi kurang lebih hampir dua jam diperoleh beberapa kesepakatan yaitu :

1. Masyarakat akan membongkar gubuk yang ada di dalam kawasan TNBBS paling lambat bulan Desember 2011
2. Kayu-kayu bekas gubuk boleh dimanfaatkan masyarakat untuk membuat pemukiman di luar kawasan TNBBS
3. Masyarakat boleh mengambil hasil tanaman kopi sebelum dilakukan penertiban oleh Tim Terpadu, tapi masyarakat tidak boleh merawat tanaman
4. Sekolah Dasar yang ada di dalam kawasan, akan dikeluarkan paling lambat bulan Agustus 2011 karena menunggu proses kenaikan kelas

Selama bulan April sampai Juni 2011 kami terus melakukan sosialiasi sekaligus pendataan para perambah yang ada di wilayah kerja Resort Merpas, mulai dari Sidorejo, Talang Rumbai Abu, Dusun Lama,Talang Kalianda, Talang Ragom Mufakat, Talang Pulau Tengah, Talang Bangun Bersama, Talang Kedurang dan Talang Jabakan.

Karena banyaknya lokasi perambahan dan jaraknya berjauhan, maka untuk mempermudah kegiatan sosialisasi dan pendataan, semua petugas di Wilayah Seksi Iv Bituhan juga ikut membantu. Selain menggunakan dana patroli, kegiatan ini juga menggunakan dana-dana kegiatan yang lokasinya ke arah lokasi perambahan.

Dari hasil sosialisasi dan pendataan diketahui bahwa jumlah permbah di Resort Merpas sebanyak 838 KK dengan jumlah garapan sebanyak 1599 Ha. Secara rinci jumlah dan luas garapan perambah yang ada di Resort Merpas adalah sebagai berikut :

Tabel Kondisi Perambah di Resort Merpas

No	Lokasi	Desa	Kecamatan/ Kabupaten	Jumlah (kk)	Luas Garapan (ha)
1	Rumbai Abu	Tebing Rambutan	Nasal/Kaur	68	168
2	Dusun Lama	Tebing Rambutan	Nasal/Kaur	101	291.5
2	Talang Kalianda	Pasar Jumat	Nasal/Kaur	99	152
3	Dusun Sidorejo	Mepas	Nasal/Kaur	240	581,5
5	Ragom Mufakat	Batu Lungun	Nasal/Kaur	82	168
6	Pulau Tengah	Tebing Rambutan	Nasal/Kaur	104	168
7	Bangun Bersama	Batu Lungun	Nasal/Kaur	45	108
8	Talang Kedurang	Pasar Jumat	Nasal/Kaur	62	173
9	Talang Jabakan	Muara Dua	Nasal/Kaur	37	80,5
	Total			**838**	**1599**

***

Awal bulan Juli 2011 kami mendengar dari petugas Pamswakarsa (sekarang namanya Masyarakat Mitra Polhut atau MMP), bahwa saat ini para perambah di Sidorejo sudah ada yang mulai keluar dari kawasan TNBSS. Mendengar informasi tersebut kami sangat senang, dan untuk memastikan informasi tersebut saya dan Pak Ramni memutuskan untuk melihat kondisi lapangan.

Sampai di lokasi kami melihat para perambah sedang bergotong royong membangun pemukiman di luar kawasan TNBBS, tapi yang jadi masalah baru adalah para perambah tersebut membangun pemukimannya di areal kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang lokasinya berbatasan dengan TNBBS.

"Silahkan masuk pak, tegur seorang ibu yang kira-kira berumur 30 tahun".

Beliau adalah ibu Sumarni, sehari-harinya beliau mengajar di SD yang ada di dalam kawasan. Sekolah tersebut mulai berdiri sejak tahun 2000 atas inisiasi Pak Idris yang merupakan tokoh masyarakat setempat, karena saat itu beliau melihat banyak anak-anak kecil yang tinggal di dalam kawasan tidak bersekolah.

"Sudah lama tinggal di sini, sapa saya".

"Sudah pak, saya ke sini dulu ikut orang tua sekitar tahun 1998 dan menikah di sini serta sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang", jawab ibu itu.



Gambar sebelah kiri menunjukan bekas pemukiman peramabah yang telah dibongkar di kawasan TNBBS dan gambar sebelah kanan masyarakat sedang bergotong royong membuat pemukiman baru di luar kawasan

Kami sekarang bingung pak, harus bagaimana. Apalagi mendengar tanaman kopi kami akan dimusnahkan. Percuma saja pak kami ini pindah keluar kawasan TNBBS kalau kami tidak bisa menggarap kebun, pulang ke kampung juga percuma karena di sana kami tidak punya apa-apa, "ujar ibu tersebut".

Kenapa masyarakat tidak bisa mengelola hutan, saya dengar dari saudara saya di Lampung, katanya masyarakat boleh mengelola

hutan dengan sistem Hkm (Hutan Kemasyarakatan). Kenapa di sini tidak boleh Pak? Tanya ibu tersebut kepada kami.

"Beda status kawasannya bu, jawab saya".

Kalau Hkm (Hutan Kemasyarakatan) itu bolehnya di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas, sedangkan kawasan yang ibu garap sekarang adalah kawasan konservasi. Dan untuk kawasan konservasi tidak ada aturan yang membolehkan masyarakat berkebun, apalagi membuat permukiman.

Nah, itu yang kami tidak tahu Pak, kami ini kan masyarakat awam, sehingga kami banyak tidak tahu, karena itu kami minta kalau bisa bapak-bapak ini juga memberitahu yang lainnya. Saya yakin sebagian besar masyarakat di sini banyak yang tidak tahu peraturan mengenai kehutanan.

Atas permintaan ibu tersebut, malam itu saya, pak Ramni dan Pak Aslin merencanakan menginap di Sidorejo untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang kehutanan.

"Kenapa pindahnya ke kawasan HPT Pak", tanya saya pada salah seorang bapak-bapak yang sedang bergotong-royong membangun gubuk"

"Ya mampunya bangun di sini Pak, karena kalau harus beli di tanah marga kami tidak mampu" ini aja kami kami bikin gubuknya gotong-royong biar dananya murah, dan dalam satu hari, paling banyak kami bisa memindahkan dua buguk, ujar bapak tersebut".

"Kenapa bapak mau keluar dari kawasan TNBBS, tanya Pak Ramni"

"Dengan lugunya bapak tersebut menjawab, ya kalau ga pindah nanti dimarahi pak Kadus dan Pak RT. Kata Pak RT, Kalau ga pindah kalau terjadi apa-apa dengan kami mereka ga mau ngurisin, terus katanya kita harus nurut sama *pamarentah* (cerita bapak itu dengan logat jawanya)"

Hari itu kami lihat, para perambah sibuk bergotong royong membuat gubuk, ada yang sedang memaku, mengangkat kayu, mengangkat seng, meratakan tanah dan lain-lain.

Selain di Sidorejo, di daerah Talang Bangun Bersama dan Talang Jabakan para perambah kami lihat sudah ada yang mulai turun juga, yaitu sebanyak 10 KK di Talang Banguna Bersam dan sebanyak 5 KK di Talang Jabakan, dan permasalahannya pun sama dengan di Sidorejo yaitu para perambah turun ke Kawasan HPT dan merekapun masih menggarap kebun yang ada di dalam kawasan.

Kami sangat senang melihat adanya perambah yang sudah mulai turun, walaupun jumlahnya belum banyak. Untuk terus memaksimalkan jumlah perambah yang turun dari kawasan TNBBS, kami tetap berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di masing-masing talang, karena para perambah umumnya akan lebih mendengar tokoh masyarakat setempat dibandingkan petugas.

Kalau di Sidorejo ada Pak Muklisin sebagai kadus serta para RT yang mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu menyadarkan masyarakat untuk keluar dari kawasan TNBBS. Di Talang Bangun Bersama ada Pak Kuat yang merupakan tokoh masyarakat di sana, sementara di Talang Jabakan ada bapak Wanto yang merupakan Pak RT sekaligus tokoh masyarakat.

Kalau tidak sempat berkunjung ke lokasi, kami sering berkomunikasi melalui *handphone* dan kadang kami meminta mereka

datang ke kantor Seksi untuk berdiskusi mengenai perkembangan para perambah yang sudah turun.

Berdasarkan data terakhir pada bulan Desember 2011 perambah di Sidorejo sudah turun sebanyak 205 KK dari total perambah 240 KK, sedangkan di Talang Bangun Bersama, perambah yang sudah turun sebanyak 35 KK dari total perambah sebanyak 45 KK dan di Talang Jabakan perambah yang sudah turun sebanyak 19 KK dari total perambah sebanyak 31 KK, sehingga jumlah keseluruhan perambah yang sudah turun di Resort Merpas yaitu sebanyak 259 KK atau sebesar 30,9% dari total perambah yaitu sebanyak 838 KK.

Dibandingkan dengan jumlah perambah yang ada, memang jumlah perambah yang sudah turun lebih sedikit dari yang belum turun. Tapi dengan segala keterbatasan, baik dari segi dana maupun sumberdaya kami tetap bisa berbuat untuk menurunkan para perambah tersebut tanpa modal besar dan tanpa kekerasan serta melalui cara - cara yang sederhana.

Harus diakui bahwa tanpa adanya dukungan dari para tokoh masyarakat setempat serta pamong desa , mungkin para perambah yang turun tidak akan sebanyak itu, tapi berkat peran mereka banyak para perambah yang mau keluar dari kawasan TNBBS.

Dan setelah mereka keluar, tugas yang lebih besar sudah menanti yaitu bagaimana melakukan pembinanaan dan pemberdayaan terhadap para perambah yang sudah turun agar mereka tidak kembali lagi ke dalam kawasan TNBBS. Karena, kalau hanya diturunkan tapi tidak dilakukan pembinaan dan pemberdayaan, yakinlah mereka akan kembali merambah.

“Selamatkan Hutan Untuk Kehidupan yang Lebih Baik”.

---------=====000O000=====----------



Penulis dilahirkan di Kalianda Lampung Selatan pada tanggal 22 Februari 1982. Semasa Kuliah di Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), penullis pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian pada tahun 2003-2004, kemudian menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kehutanan (Himasylva) Unila pada tahun 2004-2005, dan mulai bekerja di Balai Besar TNBBS pada tahun 2010 sebagai penyuluh kehutanan. Penulis sudah menikah pada bulan Januari 2008 dengan Desi Puspitasari dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Muhamad Faishal Arkan yang lahir pada tangal 24 Oktober 2009 dan yang kedua bernama Arga Dikara Putra yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012.

6

Penanganan Perambahan di Sm.Cikepuh Tahun 2002:

Kisah Pengeluaran Perambahan 4000 ha di SM.Cikepuh Kekuatan Koordinasi dan Sukadukanya

Penanganan Perambahan di Sm.Cikepuh Tahun 2002:

Kisah Pengeluaran Perambahan 4000 ha di SM.Cikepuh Kekuatan Koordinasi dan Sukadukanya

Isep Mukti Wiharja

Awal Kisah

Tiba-tiba HP milikku memberi tanda bahwa ada SMS masuk. Aku tak mengenal nomor tersebut, pesannya "Kang minta dikirim nomor email akang" itu isinya. Aku tak lama berpikir, langsung kubalas SMS itu dengan menuliskan alamat email yang di maksud (pandusukabumikota@yahoo.co.id), kemudian ada jawaban *"nuhun Kang"*.

Tak lama berselang sms masuk lagi : *"kang buka email, sudah saya kirim TOR mengenai penulisan narasi apa adanya kejadian Cikepuh tahun 2002 yang lalu, barang kali akang bisa membuat tulisannya. Kalau operasi sih sudah biasa. Tapi yang luar biasa ketika proses akan operasi itu yang terjadi. Sehingga 4000 ha kawasan yang di rambah di Cikepuh dapat diatasi"*. Kata Nurman Hakim diseberang sana dengan HP-nya.

Mendengar wacana seperti itu, aku mulai berpikir dan terngiang masa-masa indah ketika aku dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menurut aku bijak dan mengerti anak buahnya. Ia,

aku sebut saja Pak Noor Rakhmat. Beliau orang yang dapat menjadi inspirasi dalam kehidupanku, khususnya sejak aku menginjakkan kaki di BKSDA Jabar tepatnya di Seksi Sukabumi-Cianjur-Bogor.

Awal terjadinya Pertemuan itu.

Aku, lulusan AIK (UNWIM) tahun 1994, dulu ketika jadi mahasiswa masuk dalam keanggotaan Pencinta Alam Rimbawan, dimana salah satu pendirinya tertera dalam buku sakuku "Noor Rakhmat". Dalam hal ini, maka fokus yang akan aku ceritakan barangkali beliau.

Setelah aku melanglang buana ke Irian (HPH PT. Prabu Alaska di Fakfak) tahun 1994 dan di Riau (HPH PT. Sejati Riau di Dumai) tahun 1996, aku mendapatkan tugas sebagai calon pegawai negeri (CPNS) dari Departemen Kehutanan, di Kanwil Kehutanan Sulawesi Tengah dan dipekerjakan di Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng di Palu, pada Sub Bidang Perencanaan (1998-2001). Tupoksinya antara lain jalan ke daerah untuk cek HPH/IPK.

Tak lama berselang pada tahun 2000 terjadi kerusuhan Ambon dan Poso serta terjadi perombakan struktur organisasi Departemen sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah. Yang asalnya Kanwil Kehutanan bergabung menjadi satu instansi dengan Dinas Kehutanan Propinsi menjadi Dinas Kehutanan Propinsi.

Saat itulah babak baru bagi kami, khususnya aku, karena di Departemen Kehutanan ada edaran tentang formasi pindah tugas pada daerah konflik, asal daerah yang akan ditempati menerima dan daerah asal melepaskan.

Alhamdulillah berkat doa semua serta orang tua khususnya, aku dapat diterima di Balai KSDA Jawa Barat. Hanya ada hal yang

tak akan aku lupa ketika menghadap kepala Balai, waktu itu Pa Sumin. Aku diwawancara tentang penerimaan menjadi pegawai pindahan.

Katanya :"boleh kamu pindah ke BKSDA asal tidak di Bandung, ---di daerah, mau?"

Aku balik tanya:"Dimana, pak di daerahnya".

"Ya, kalau tidak di Serang kemungkinan di Sukabumi?"katanya.

Spontan waktu itu juga aku katakan: "terima kasih pak (karena dalam pikiran ku, memang aku ingin di Sukabumi, wong asal tempat tinggalku di Sukabumi?!), "kalau begitu, kemudian Saya bagaimana mengajukan pindahnya, bahwa bapak sudah menerima saya?". Beliau bilang "Urus saja dari Palu", " saya mau pergi jiarah ke tanah suci dulu", kata Pak Sumin. Tiga bulan kemudian, Alhamdulillah pengurusan berkas selesai dan SK penempatan di Balai dari Departemen sudah Aku terima.

Sejak itulah selama kurang lebih 3 minggu, aku pulang pergi Sukabumi-Bandung. Melihat kesungguhan seperti itu, KBTU, Pak Zaenal Mutaqin (Alm) mempertegas kepada Pak Endang Karmana, agar aku segera ditempatkan di Sukabumi.

Barangkali orang-orang KSDA sudah pada tahu, sehingga pada suatu ketika aku bertemu seseorang yang tak lain adalah pak Noor, ia bilang "Yi (panggilan kakak ke adik, dalam bahasa Sunda), *hayu bade ngiring*?" "kamana kang?"kata ku.

"*Muhun, ka Sukabumi*?!"kata Pak Noor

"*Oh, akang teh di Sukabumi*?" balas diriku

Setelah ngobrol dengan Gelgel, pada waktu itu baru tahu, bahwa yang aku ajak ngobrol itu adalah Pak Noor Rakhmat, kakak kelas satu almamater di AIK dan pendiri Rimbawan.

Pertama

Tak terasa ketika itu pada hari Rabu, 2 Mei 2001, aku injakkan kaki ku ke kantor Seksi Konservasi Wilayah II di Sukabumi (waktu itu namanya SSWK Cianjur di Sukabumi) jalan Pelabuhan II Km.11 No.75 Pangleseran.

Inilah babak baru bagiku bekerja pada bidang yang berbeda (asalnya di HPH dan di Dinas Kehutanan) menjadi di BKSDA (Konservasi). Dari sini pula aku mulai belajar kembali mengingat-ingat materi-materi kuliah tentang konservasi (aku dulu kuliah jurusan Manajemen Hutan).

Dan memang waktu itu aku bertemu pertama kali dengan Gelgel dan Pak Noor yang lagi baca Koran pagi (Pikiran Rakyat) sambil minum kopi dan tahu sumedang. Kemudian tak lama keluar pak Agus Safari (Alm) yang menjabat tanganku kemudian. Selang beberapa menit datang dari luar, orangnya nyentrik bernama Pak Nazamudin Sugeha. Kami ngobrol sana-sini, dari mulai kerja di Dinas sampai kepindahanku ke BKSDA, hampir lebih dari 1 jam.

Dan ada kata-kata yang masih aku ingat ”kalau mau betah kerja di Sukabumi, kerja sungguh-sungguh” kalau tidak, saya bisa pindahkan, kemana saja saya bisa bahkan ke Cianjur Selatan sekalipun” itu kata-kata yang tegas dari Pak Noor, mungkin tak akan aku lupakan. Kata-kata ini, ternyata ampuh bagi diriku untuk kerja dengan giat, dan tentunya banyak belajar dari rekan-rekan satu kantor (Ujang Acep, Agus Safari, Gelgel, Ujang Suherli, Nazamudin Sugeha dan tentunya Pak Noor Rakhmat).

Tugasku pertama yang diberikan :

Baca buku-buku konservasi yang ada di kantor, lebih jauh lagi banyak tahu tentang aturan (Perundangan) ini pesan pak Bim (Nazamudin)

Tugas kedua ku yang diberikan pak Noor:

Coba data semua Pecinta Alam di masyarakat maupun di Sekolah-sekolah (SMK/SMU) se Kota Sukabumi, kemudian direkap.

Awalnya aku ragu untuk hal seperti itu, tapi aku rasakan inilah didikan yang aku resapi dari seorang Kepala Seksi (waktu itu Kepala Sub Seksi) kepada anak buahnya.

Hasil dari pendataan tersebut, pada tanggal 5 juli 2001. BKSDA mendapat undangan untuk mengisi ceramah KSDA di Pecinta Alam Genspala dalam acara Pradiklat PA Genspala di Babakansirna Kota Sukabumi. Saking perhatiannya, seorang kepala Seksi, mau mendampingi aku pada undangan tersebut. Disana aku mendapatkan pengetahuan/cara menjadi penyuluh dari beliau. Bagaimana berkomunikasi dengan PA untuk bicarakan Konservasi.

Dari situ aku berpikir 2 point pelajaran aku dapatkan, satu mencoba berkomunikasi dengan beberapa instansi saat pendataan pecinta alam, yang kedua bagaimana cara berkomunikasi dengan khalayak ramai setingkat pecinta alam. Sejak itulah, untuk kedua kalinya dan seterusnya, aku bisa sendiri mengajar konservasi di beberapa Sekolah (SMU 1 Sukaraja, SMU 4, SMU 3), di Pramuka Sakawanabakti di Perum Perhutani. Bbahkan hampir tiap tahun dari Sakawanabakti meminta diriku untuk mengajar tentang konservasi bila ada penerimaan anggota baru, sampai tahun 2010 yang lalu.

Kedua

Tanggal 23 Juli 2001, aku bersama pak Bim diminta menghadiri Ekpose Pengelolaan Penyu oleh BUMDES Gunungbatu di Pendopo Bupati di Sukabumi. Pelajaran yang aku terima ketika itu perlunya pemahaman perundangan ketika berbicara aturan hukum (aku ingat pesan pak Bim, hafalkan, minimal fahami peraturan perundangan konservasi). Karena ketika ekspose, terjadi perdebatan antara Bumdes dan KSDA juga Pak Adang Gunawan (CV.Daya Bakti), tentang arti Konservasi (semua *"keukeuh"* mengatakan aku konservasionis), maka pak Bim berbicara konservasi sesuai dengan perundangan RI No.5 tahun 1990.

Peran pak bim disini sangat berarti bagiku dalam menapaki perjalanan konservasi di Sukabumi. Orangnya tegas, keras dan berani. Ini yang memompa semangat rekan-rekan di lapangan untuk mau bekerja atau bertinddak ketika pelanggaran terjadi, khususnya yang berkaitan dengan aturan konservasi. Sekarang beliau sudah kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Utara pada tahun 2008. Dari pengalaman tersebut, aku mulai mengenal beberapa karakter manusia yang akan aku hadapi sekarang bahkan kelak, khususnya karakter orang-orang Pemda Kab Sukabumi juga tokoh-tokoh Sukabumi.

Pada tanggal 26 Juli 2001, aku ingat ketika itu aku diajak pak Noor untuk berkoordinasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk membicarakan rencana "eksekusi Villa De Ganza di Cidahu". Dalam hal ini, terlihat sederhana, hanya diajak berkoordinasi,-- titik.

Tanggal 10 Agustus 2001 Aku diajak Pak Noor bersama Kepala Resort Cikepuh (waktu itu Pak Saepudin) ke Cikepuh. Kunjungan Bupati, Kapolres Dandim dan Ketua DPRD Kab. Sukabumi ke

lokasi para perambah di Cikepuh. Saat itu terjadi konsolidasi personal KSDA lapangan untuk membentuk strategi penanganan perambahan Cikepuh, sehingga Kepala Sub Seksi datang langsung ke lapangan.

Tanggal 13 Agustus 2001, aku diperintahkan pak Noor untuk menyusun/mengumpulkan data Cikepuh sebagai bahan rapat di Pelabuhanratu, katanya. Dan memang pada tanggal 14 Agustus 2001 kami rapat di Dinas Kehutanan Kab. Sukabumi di Pelabuhanratu.

Tanggal 15 Agustus 2001 rapat di Setda Kab Sukabumi, membicarakan tentang Rencana Kostrad pinjam pakai kawasan Cikepuh.

Dari semua kegiatan tersebut, tak luput masuk dalam catatanku, baik secara tertulis aku catat dalam buku agendaku atau kadang dalam benakku berpikir. Meskipun akhir-akhir ini aku dapat memaknai hikmah dari seringnya aku diajak oleh pak Noor. Kami memang banyak ngobrol/berkomunikasi di mana pun ada kesempatan, dan memang pak Noor ini enak diajak berdiskusi. Dari hal pekerjaan sampai masalah keluarga. Salah satunya Si putih (Kijang Super milik beliau yang sering dibawa ke mana-mana D441BS, sebelum mobil patroli ada di Seksi kami, yang jadi saksi.

Pada kesempatan perjalanan dari Pelabuhanratu ke Cikepuh, hampir selama itu kami (Ujang Acep, Gelgel, Agus Safari, termasuk Aku dan Pak Noor tentunya) ngobrol dan bicara tentang bagaimana penanganan perambahan Cikepuh, karena sejak Nopember 1999 saat terjadi perambahan awal, semakin ramai jadi wacana pembicaraan, bagaimana strategi penanganan perambah harus dilakukan. (Sebagai catatan sejak tahun 2000 sudah dilakukan operasi gabungan, namun hasilnya tidak signifikan, hanya membuat

pernyataan di atas materai, ternyata di lapangan tetap terjadi penggarapan liar bahkan lebih besar dan lebih berani menghadapi petugas lapangan).

Diantaranya itu yang menjadi pokok bahasan, karena memang berangkat ke Cikepuh kali ini dalam rangka patroli dan memberikan penyuluhan kepada para perambah di dalam kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh.

Tanggal 16 Agustus 2001 di Cikepuh, kami melakukan patroli operasi fungsional dengan cara memberi penyuluhan. Sebelum bergerak, kami berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan anggota tim yang akan bergerak. Kebetulan selama ini di Cikepuh mulai banyak respon positif keinginan masyarakat, agar para perambah ini segera di tangani. Antara lain dari FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI) Sub Rayon Ciracap dan Tokoh Pemuda Jaringao.

Ada kisah yang menggelitik dan aku pun tak akan lupa bila mengenang hal ini, adalah saat para pemuda FKPPI memberi penyuluhan kepada para perambah, khususnya para perambah yang sudah tua. Mereka bilang, “Pak nyaho teu, pami hutan ieu ku bapa dituaran kayuna, bakal terjadi pemanasan global, engke es di Kutub Utara mencair. Tah bumi urang engke bakal tilelep, kumaha tah pak mun tepi ka kitu” orang tua yang diajak bicara termanggu-mangu, entah ngerti atau tambah bingung. Mungkin saking takutnya, karena mereka memakai pakaian seperti ABRI “loreng coklat”. (rupanya mereka ingat cerita pak Noor sebelum berangkat, karena pak Noor maksudnya memberi bekal kepada para pemuda FKPPI, eh malah bekal itu jadi bahan mereka memberi penyuluhan kepada perambah).



Aku waktu itu yang kebetulan satu tim dengan pemuda FKPPI, hanya senyum dan dalam hati sempat bilang (maksud pak Noor memberi penyuluhan pada anggota FKPPI, bukan untuk disampaikan sebegitu dasyat kepada para perambah, yang sudah tua-- lagi) wajar aja rada bengong.

Ketiga

Ujian pertama aku hadapi, dari pelajaran kehidupan yang diajarkan pak Noor selama ini. Aku diperintahkan untuk mewakili beliau rapat dengan Pemkab Sukabumi, tentang Ekspose Kostrad dalam hal rencana pinjam pakai kawasan konservasi SM.Cikepuh.

Dan memang barangkali ini yang dimaksud selama ini diajarkan oleh pak Noor. Aku selalu diajak ikuti rapat-rapat di Pemda. Dan memang kebetulan saat itu pak Noor ada rapat di Bogor. Sedang andalan selain pak Noor dalam rapat adalah Pak Bim dalam waktu bersamaan ada rapat pula di Pmkab tentang Penyu.

Aku sempat gugup. Tapi pak Bim mendorong dan memberi semangat. Aku tak bisa memilih, kalau rapat tentang penyu belum begitu kukuasai dan pasti pak Bim yang akan hadiri, karena merupakan rapat lanjutan sebelumnya. Sedangkan mengenai Kostrad ini meskipun sudah beberapa kali rapat, bagiku adalah pengalaman pertama. Aku harus sendiri mewakili Seksi.

Aku coba siapkan jiwa-raga juga berkas yang kira-kira ada sebagai bahan kalau-kalau ditanyakan oleh pimpinan rapat, yang waktu itu di pimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi. Seram rasanya, keluar keringat dingin, meski sudah berusaha setenang mungkin.

Rupanya keadaanku ada yang memperhatikan, salah satunya humas Perhutani KPH Sukabumi (Pak Atan), beliau bilang, "Tenang, yi, jeung akang, kita sama-sama". Memang agak tenang setelah beliau menguatkan diriku. Selesai rapat, lega, meskipun rapat akan dilanjutkan dengan cek lapangan ke Ciemas dan Cikadal.

Esoknya buru-buru aku buat laporan notulen hasil rapat. Persis seperti kaset rekaman. Pembicaraan dalam rapat itu dapat aku tuangkan dalam tulisan. Meskipun begitu kadang Pak Noor bila membuat laporan ke Balai kadang minta draf notulen ku sebagai acuan, bila aku ikuti rapat-rapat.

Dari beberapa rapat yang aku ikuti, pak Noor pernah berpesan "itulah maksudnya setiap rapat pak Noor minta didampingi, bila terjadi bentrok rapat bisa diwakilkan dan pokok materi saling memahami sehingga nyambung. Baru aku sadar maksud dari itu semua. Dan hasil didikan seperti itu terasa sejuk dan tidak otoriter sebagai seorang pemimpin. aku semakin *pede* bila disuruh untuk mewakili beliau dan mulai memahaminya.

Empat

Ingatanku kembali terusik. Pak Noor pernah bilang -- begitu juga pak Bim, Gelgel bahkan Pak Agus Safari, bahwa awal mula datang ke Sukabumi, pak Noor promosi jabatan Kepala SSWK. Pertama yang pak Noor lakukan, adalah mengajak orang-orang di kantor Balai di Bandung yang *memiliki karakter* untuk ikut membantu dan bergabung di Sukabumi. Antara lain mengajak Pak Bim (karakter keras, berani, bahan debat diskusi, dan bahan pemicu semangat bergerak); pak Agus safari (karakter lembut, memiliki jiwa seni, mudah diajak komunikasi); Gelgel (pemuda, seni Bali, mudah dididik, anak SKMA); Ari/Ujang Acep (Polhut , Sarjana, baru bergabung). Inilah tim Bandung yang ikut serta pindah dan berkedudukan di Sukabumi. Sehingga bila akhir pekan atau pun awal pekan selalu bersama-sama berangkat ke Sukabumi ataupun pulang ke Bandung. Yang tinggal dan bisa pindah sekeluarga adalah hanya pak Bim.

Dengan kedatanganku, barangkali bila boleh pede, mereka berharap besar, karena aku orang Sukabumi asli dan pasti punya keinginan untuk membangun Sukabumi dari Sisi Konservasi, ini barangkali tebakannya dalam benakku. Dan aku pun tak menyia-nyiakan hal ini, (seperti yang aku ceritakan pada awal bab di atas).

Kedua strategi yang pak Noor lakukan. *"test case"* seberapa jauh masyarakat Sukabumi mengenal BKSDA/Konservasi. Karena pak Noor dkk datang dari Bandung bukan tanpa beban tugas yang harus ditunaikan (masalah perambahan Cikepuh, masalah penyu dan peredaran/lalulintas satwa ex-situ yang perlu ditangani) Sehingga yang dilakukannya adalah melaksanakan pameran Konservasi Se kabupaten Sukabumi dan sekitarnya dengan diikuti berbagai instansi terkait dengan judul besar "Pameran Konservasi Keanekaragaman Hayati" pada tahun 2000.



PROPOSAL

PAMERAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sejak itulah koordinasi tersebut dibangun. Dalam kepanitiaan pameran tidak hanya dipegang oleh KSDA tapi coba dibaurkan dengan instansi lain. Bahkan dalam susunan organisasi kepanitiaan, sebagai pelindung adalah Bupati Sukabumi. Meskipun ketua panitia di pimpin oleh Pak Noor Rakhmat.

Dilain pihak, aku pun semakin intensif sering berhubungan dengan kalangan Pemkab Sukabumi, juga unsur terkait lainnya yang berhubungan dengan hutan dan kehutanan. Hal ini terjadi sejak usai rapat dengan Kostrad.



Kelima
Awal Operasi Cikepuh itu

Kembali kubuka catatan agenda harian ku, tepat tanggal 19 Januari 2002, tertulis "Bertemu Pak Solihin GP di Hotel Rengganis dan di Pendopo Bupati di Sukabumi". Aku kembali mengingat-ingat kejadian itu. Kejadian itu merupakan awal kesepakatan bersama di bentuk dalam penanganan perambahan di Sukabumi,khususnya di Cikepuh Kecamatan Ciracap dan Ciemas Kabupaten Sukabumi. Kala itu orang mengenalnya kawasan hutan Cibabi.

Pada tanggal 18 Januari 2002 malam, aku ditelepon pak Noor, agar besok menemui Pak Solihin GP di Hotel Rengganis, bersama-sama pak Saepudin. Kemudian pada pagi harinya ikuti rapat tentang "perambahan hutan di Sukabumi", dengan penggagas ide adalah Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) yang dipimpin oleh pak Solihin (sedang pimpinan wilayah Sukabumi oleh mantan Bupati, pak Anwari (alm))di Pendopo Bupati di Sukabumi, karena pak Noor ada acara di Bogor yang tidak bisa diwakilkan.

Aku berpikir, pekerjaan menantang juga untuk kali ini. Beruntung aku didampingi pak Saepudin (waktu itu sebagai kepala Resort Cikepuh) yang pasti banyak tahu tentang perambahan Cikepuh.

Ya—bismillah. Aku sanggupi untuk tugas ini.

Tepat pagi –pagi aku bersama pak Saepudin sudah berada di hotel Rengganis. Dan aku coba menuju resepsionis menanyakan keberadaan pak Solihin GP. Dan tak lama kami bertemu dengan beliau bersama rekannya.

Tak banyak yang dibicarakan, yang jelas hanya tanya sedikit tentang kawasan Cikepuh. Setelah itu diajak siap-siap untuk rapat di Pendopo, dan meyakinkan kami, bahwa nanti di pendopo, ceritakan kawasan hutan Cikepuh keadaannya sampai sekarang, beliau berpesan.

Tiba saatnya rapat di Pendopo. Suasana ramai, ternyata banyak instansi yang hadir. Pemkab Sukabumi terlihat dari jajarannya. Bupati hadir, Setda, Asda, Kepala Dinas Pemda terkait, Polres Sukabumi, Kodim 0607, Perum Perhutani KPH Sukabumi, termasuk kami KSDA, wartawan dan juga jajaran DPKLTS (Pak Solihin, Pak Anwari, Pak Ian Kusumadinata dkk).

Dalam rapat ini diawali "ekspose hutan Sukabumi yang dirambah" yang disampaikan oleh DPKLTS. Dalam bentuk visual, dan banyak menyoroti hutan Perum Perhutani yaitu "hutan Pasirpiring" yang jelas-jelas dirambah. Di sana pun disampaikan penjelasan dari pihak perhutani tentang kendala dan oknum-oknum pelaku dalam bentuk kelompok-kelompok perambah. Setelah tuntas dibahas dan rencana penanggulangan akan digulirkan. Tak lama kemudian Pak Solihin meminta penjelasan tentang hutan Cikepuh kepada kami.

Dengan sedikit gugup aku coba terangkan keadaan Cikepuh saat itu yang terjadi. Dengan masukkan masukan informasi waktu itu dari pak Saepudin, aku, alhamdulillah dapat dengan lancar dan meyakinkan khalayak, mendapat perhatian serius dari peserta rapat, lebih jauh lagi mendapat apresiasi dari pak Solihin. Karena kami kemukakan data, antara lain nama provokator, dan fakta tentang lokasi dan luasan yang dirambah, serta peta lokasi yang lebih strategis, bila akan direncanakan operasi penanggulangan

perambahan hutan dibanding hutan yang lain yang ada di Sukabumi.

Hasil rapat dibuat kesimpulan mengerucut kepada focus bagaimana penyelesaian perambahan Cikepuh. Sistem sergap atau gerilya, dimungkinkan karena lokasi Cikepuh berada di pinggir pantai. Bila pun ada penyergapan, para target operasi tidak jauh dari jangkauan tim penangulangan perambah, nantinya. Keputusan ini bulat dapat diterima dalam forum rapat ini. Untuk mematangkan hal tersebut, kami diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas lebih komplit lagi.

Pada tanggal 22 Januari 2002 kembali rapat pembahasan tindak lanjut penanganan Cikepuh, kali ini Pak Noor yang menghadiri rapatnya. Dan hasil rapat tersebut rupanya dilanjutkan di Rumah pak Solihin di Jakarta.

Setelah pulang dari rapat kembali ke kantor KSDA di Pangleseran, Pak Noor berpesan, bahwa besok akan ke Jakarta menemui Pak Solihin GP di rumahnya. Dan pesan pak Solihin jangan lupa yang berkaca mata kecil-kecil supaya ikut juga, katanya. Rupanya aku menjadi perhatian Pak Solihin. Tersanjung juga aku waktu itu dan aku bersyukur diberi kepercayaan untuk bertemu orang sebesar Pak Solihin yang dihadapan kita semua masih terlihat kharismanya sebagai seorang Jenderal.

Tanggal 23 Januari 2002, kami (Pak Noor, Agus Safari, Nano Winarno dan Aku) pergi ke Jakarta untuk menemui pak Solihin GP di kediamananya. Tak banyak yang dibicarakan hanya meyakinkan tentang keseriusan beliau untuk terlibat dalam penanganan perambahan Cikepuh. Waktu itu turut juga hadir Kostrad bersama anak buahnya.

24 Januari 2002 di Pelabuhanratu, pertemuan dalam rangka membahas pemantapan Rencana Kegiatan untuk diusukan ke Menhut.

25 Januari 2002 kembali rapat di Pendopo membahas tentang pandangan akhir Rencana Operasi Cikepuh. Dalam hal ini mulai intensif koordinasi antar pihak dilakukan baik bertemu langsung, surat-surat maupun melalui telepon untuk mengintensifkan/ mematangkan rencana operasi, dari mulai struktur operasi, strategi operasi, pendanaan, sampai pasca operasi yaitu penegakan hokum pun dibahas.

Keenam
Semakin kencang ikatan kebersamaan

13 Pebruari 2002 adalah waktu pelaksanaan kegiatan "Penyuluhan Hukum" yang diadakan di Kampung Margamulya Desa Cibenda Kec.Ciemas Kab.Sukabumi, tak begitu jauh dari kawasan hutan Cikepuh. Ini merupakan salah satu strategi kegiatan yang disusun pra operasi. Diselenggarakan bersama hampir semua instansi terkait hadir, sedang peserta undangan adalah seluruh perwakilan warga Ciemas. Kesimpulan pertemuan tersebut "masyarakat menginginkan penegakan hukum segera dilaksanakan bagi para perambah hutan".

1 Maret 2002 Pertemuan antara Menhut, Solihin GP, Bupati di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, yang membahas usulan rencana operasi penanggulangan perambahan hutan di SM.Cikepuh. Dalam tatanan koordinasi, Pemkab aktif terus berkoordinasi, waktu Itu pak Dayat, bagian Tata Pemerintah Pemda Kab Sukabumi, yang selalu kesana-kemari menyampaikan surat Bupati.

18 Maret 2002 rapat/konsolidasi di pendopo membahas hasil pertemuan di Jakarta, dihadiri oleh Kepala Balai KSDA Jabar I (Pak Padmo Wiyoso), DPLKTS (Pak Solihin GP) dan Bupati Sukabumi (Pak Maman Sulaeman), Kapolres, Direktur Konservasi Kawasan. Disepakati bahwa operasi penanggulangan perambahan di SM.Cikepuh akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur diantaranya Polres Sukabumi, Kodim 0607 Sukabumi, Polhut BKSDA Jabar I, Satpol PP Sukabumi, LSM, Brimob Polda Jabar serta anggota masyarakat setempat.

Tanggal 26 Maret 2002, di Pelabuhanratu dilaksanakan penyusunan Rencana Operasi (Renops). Rapat dipimpin oleh Sekda Sukabumi, Dandim 0607 dan Kepala SSWK Sukabumi.

Tanggal 11 April 2002, di Pelabuhanratu, pembahasan Pemantapan Rencana Operasi, dihadiri Kasdim 0607, Kapolres Sukabumi, Asisten Deputy Kantor Menteri Lingkungan Hidup bidang Penegakan Hukum (Sudarsono, SH.) dan Sekda Sukabumi serta Kepala Sub Direktorat Suaka Alam dan Taman Buru (Ir. Unu Nitibaskara).

Tanggal 18 April 2002 di Pendopo Sukabumi, pembahasan persiapan akhir operasi. Rapat dipimpin oleh Sekda Sukabumi dan Kepala Satgas Operasi (Nana Sukarna, Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Sukabumi) yang dihadiri oleh Wakapolres, Kepala SSWK Sukabumi dan unsur pimpinan dinas terkait.

Tanggal 19 April 2002, di Pelabuhanratu, Konsolidasi anggota Tim Satgas dihadiri oleh Kepala Balai KSDA Jabar I, Sekda Sukabumi, Kasdim 0607, Kasatgas serta sebagian anggota tim satgas.

Organisasi Pelaksana Operasi

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan dalam beberapa kesempatan antara pihak BKSDA Jabar I, Pemda Kab Sukabumi dan DPKLTS, disepakati bahwa operasi penanggulangan penebangan liar dan perambahan hutan SM.Cikepuh dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Sukabumi.

Satgas Penanggulangan Penebangan liar dan Perambahan Hutan di kawasan konservasi SM.Cikepuh selanjutnya disingkat dengan sebutan SATGASPAM CIKEPUH beranggotakan 200 (dua ratus) personil yang terdiri dari berbagai unsur, diantaranya anggota dari :

Polres Sukabumi (Dalmas, Intel, Serse); Brimob Polda Jabar; TNI Kodim 0607, termasuk anggota Koramil sekitar SM.Cikepuh; Satpol PP Kab. & Kec. Sukabumi; Dishut Prop.Jabar; Dishutbun



Kab.Sukabumi; Kantor Kesbanglinmas Kab.Sukabumi; Kejaksaan Negeri Cibadak; Polhut BKSDA Jabar I; DPKLTS; FKPPI Ciracap-Ciemas; Tokoh pemuda dan masyarakat di sekitar SM.Cikepuh; LSM (PSDAbM & GMPLH) dan wartawan Pikiran Rakyat dan Pakuan.

Susunan Organisasi SATGASPAM CIKEPUH adalah sebagai berikut :

Penanggung jawab dan Pengendali Operasi (Bupati bersama jajaran Muspida Kab.Sukabumi); Penanggung jawab Operasi lapangan (Kasdim 0607 dan Kapusdalop Polres Sukabumi); Penanggungjawab Administrasi & Logistik (Kepala Balai KSDA Jabar I); Ketua Satgas (Nana Sukarna); Wakil Ketua Satgas (Kompol Bambang Wahyu); Sekretaris Satgas (Noor Rakhmat Danumiharja, S.Hut); Seksi Intelejen (AKP Yono Haryono; Kapten Art.Chairil Anwar; Ujang Acep,S.Hut); Seksi Operasi (Mayor Inf.Sutjipto; AKP Amirudin; Drs.M.Yusuf); Seksi Logistik (A.Yogaswara, BSc.F (Alm); Saepudin; Agus Safari (Alm)); Seksi Humas (AKP.Supri Subandi; Isis Iskandar; Kapten Inf. Kardianto; Ir.Agus Yuliandies); Tim Hukum/Sidik (Kasatserse Polres Sukabumi; Kepala Seksi Intel Kajari Cibadak; Tim Ahli IPB; Tim Ahli Kantor Meneg LH.

Anggota Tim satgas :

Unsur Kepolisian (Polres Sukabumi; Polsek Ciemas; Polsek Surade; Brimob Polda Jabar);

Unsur Gabungan (Pol PP Kab.Sukabumi; Dishutbun Kab. Sukabumi; Dishut Prop jabar; Polhut BKSDA jabar I; Polhutan Perhutani; Kesbanglinmas; Kecamatan Ciracap dan Ciemas; DPKLTS; Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Sukabumi; Forum PSDABM; KNPI Ciracap dan tokoh ulama dan masyarakat);

Unsur TNI (Anggota Intel Kodim 0607; Anggota Buser Kodim 0607; Anggota Koramil Surade; Anggota Koramil Ciemas; Anggota Koramil Jampangkulon; Anggota Koramil Lengkong; Anggota Koramil Tegalbuleud.

Ketujuh
Pelaksanaan Operasi

Operasi dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 22 April 2002 dan berakhir tanggal 22 Mei 2002.

22 April 2002 seluruh anggota Tim Satgas berkumpul di Aula Kab.Sukabumi di Pelabuhanratu, untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Satgas mengenai pelaksanaan keberangkatan menuju lokasi (Pos KSDA di Jaringao), serta pembagian dan tugas masing-masing kelompok. Penjelasan Ketua Satgas mengenai operasi untuk tanggal 23 April, penentuan target operasi dan penugasan satuan intel untuk meyakinkan sasaran ada di lokasi.

23 April 2002, selesai apel pagi, anggota Satgas menuju lokasi sasaran utama yaitu blok Cibabi, Tipar dan Tunjanganginan, sesuai pembagian regu. Target operasi menangkap para tokoh penggerak perambah dan para pemodal yang memiliki usaha dalam kawasan (pabrik penggilingan padi); mencatat jumlah dan asal setiap perambah yang meninggalkan kawasan dan melewati Poskotis di Jaringao.





24 April 2002, anggota Satgas menuju lokasi sasaran utama di Cibabi, Tipar, Tunjanganginan dan Lewiurug. Target operasi menangkap tokoh penggerak, serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada para perambah untuk segera meninggalkan kawasan; mencatat jumlah dan asal setiap perambah yang meninggalkan kawasan melalui Poskotis di Jaringao.

25 April 2002, anggota Satgas mengamankan beberapa bangunan bekas tempat tinggal perambah sebagai barang bukti, dengan memberi tanda khusus, membuat foto-foto bangunan dan bekas garapan serta peralatan pertanian. Melakukan penangkapan terhadap tokoh penggerak perambah dan pembinaan kepada para perambah agar dengan kesadaran sendiri mau meninggalkan kawasan.





26 April 2002, melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang belum terjangkau sebelumnya yakni blok Pasawahan, Gunungputri dan Lebaksura. Sedangkan sebagian anggota satgas lainnya melakukan pengangkutan barang bukti berupa mesin penggilingan padi di blok Tunjanganginan. Mencatat jumlah dan asal setiap perambah yang meninggalkan kawasan melalui Poskotis di Jaringao.



27 April 2002, melakukan penyisiran ke blok Hujungan dan Lewiurug sambil memberikan arahan kepada para perambah yang belum meninggalkan kawasan untuk segera berkemas dan membawa hasil pertaniannya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 29 April 2002 pukul 24.00 WIB.

Pada tanggal tersebut menerima kunjungan pak Solihin GP bersama rombongan DPKLTS. Di Poskotis tetap dilakukan pencatatan jumlah dan asal setiap perambah yang meninggalkan kawasan.



28 April 2002, melakukan penyisiran ke blok Cibuaya, Pasawahan, Gunungputri dan Cigembonggirang; membantu para perambah yg kesulitan membawa hasil pertaniannya, akibat sulitnya medan yang tidak dapat dimasuki kendaraan roda empat.



29 April 2002, memantau daerah yang sudah ditinggalkan para perambah dan membantu evakuasi para perambah. Melakukan penangkapan terhadap salah satu tokoh penggerak yang masih buron. Mengangkut dan mengamankan barang bukti yang ditinggalkan para perambah berupa alat pertanian dan kayu hasil jarahan.

30 April 2002, melakukan penangkapan terhadap salah satu tokoh penggerak yang masih buron dan menyisir lokasi-lokasi yang masih belum ditinggalkan oleh para perambah. Mengirim 2 orang tokoh penggerak ke Mapolres Sukabumi bersama barang buktinya.



01 Mei 2002, memutuskan jalur lalu lintas ke dan dari kawasan berupa jembatan bamboo, mengangkut dan mengamankan kayu-kayu hasil jarahan yang berserakan di kawasan dan mengusir beberapa orang yang berusaha masuk kembali ke dalam kawasan.

02 Mei 2002, patroli dan penjagaan di blok Citireum dan memutuskan jalur lalu lintas ke dalam kawasan di blok Lewiurug dan Punclut.

03 Mei 2002, patroli serta pembuatan plang/papan himbauan dengan tujuan agar eks perambah tidak masuk kembali ke dalam kawasan.

04 Mei 2002, patroli dan pemasangan papan himbauan di blok Tipar karena masih ada sebagian eks perambah yang berusaha masuk.

05 Mei 2002, patroli dan penjagaan kawasan dengan tujuan agar kondisi lebih aman dari eks perambah yang berusaha masuk serta pemasangan papan pengumuman di blok Tipar.

06 Mei 2002, patroli dan penjagaan terus dilaksanakan karena ada sebagian eks perambah yang masuk untuk memanen tanaman dan mengambil bahan bangunan bekas gubuk mereka. Pemantauan di blok Citireum dan Tunjanganginan untuk mencegah masuknya eks perambah ke dalam kawasan.

07 Mei 2002, patroli di blok Leuwiurug dan Cibuaya serta penjagaan di lokasi yang rawan pencurian, guna mencegah timbulnya permasalahan baru. Pada saat yang sama di Pendopo Sukabumi dilaksanakan rapat penyamaan persepsi pemberkasan perkara pelanggaran lingkungan yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

08 Mei 2002, patroli dan penjagaan keamanan kawasan serta penanggulangan terhadap masyarakat yang tinggal sekitar kawasan.

09 Mei 2002, penjagaan di blok Tipar dan patroli di blok Pasirparahu dan sekitarnya, memberikan perhatian terhadap penduduk yang berusaha masuk ke dalam kawasan untuk mengambil palawija. Kunjungan Dewan Pemerhati Kahutanan dan Lingkungan Tatar Sunda dari Bandung dipimpin oleh Bapak Ian Kusumadinata.

10 Mei 2002, patroli di blok Citamiang dan Citireum seta penjagaan pada lokasi rawan pencurian.

11 Mei 2002, penjagaan di blok Batubentang, Lebaksura dan Talun, sebagian anggota lainnya patroli ke blok Tunjanganginan.

12 Mei 2002, patroli di blok Pasawan dan sekitarnya.

13 Mei 2002, sebagian petugas melakukan penjagaan di blok Tipar dan Cibabi, sebagian yang lain mengikuti pertemuan di Poskotis Jaringao antara Tim Satgas dengan para tokoh masyarakat Desa Cibenda, Cikangkung dan Gunungbatu serta tokoh lain dari Kecamatan Ciracap dan Ciemas.

14 Mei 2002, patroli di blok Cibabi, Tunjanganginan dan Citireum.

15 Mei 2002, Patroli dan Penjagaan di blok Tipar, Cibabi, Tunjanganginan dan Cibuaya.

16 Mei 2002, Dalam rangka penyelesaian proses penyidikan, di Pendopo Sukabumi dilaksanakan kegiatan Gelar Perkara oleh penyidik dari Polres Sukabumi yang dihadiri oleh beberapa pihak terkait dengan proses penyelesaian hukum atas 17 orang tersangka yang sedang menjalani proses pemberkasan perkara.

17 Mei 2002, patroli dan penjagaan di blok Tipar, Cibabi, Citireum, Tunjanganginan, Cibuaya dan Lebaksura. Member peringatan kepada 9 orang penduduk yang berusaha masuk kawasan untuk mengambil palawija.

18 Mei 2002, patroli dan pengamanan terhadap bangunan yang menjadi barang bukti di blok Tipar, Cibabi, Tunjanganginan dan blok Leuwiurug.

19 Mei 2002, patroli dan penjagaan di blok Solokanbokor, Leuwiurug, dan Citireum.



20 Mei 2002, patroli dan penjagaan di blok Cibabi, Citireum, Tunjanganginan dan blok Tipar.

21 Mei 2002, patroli di blok Tipar, Cibabi dan Cibuaya.

Hasil Operasi
Penegakan hukum

Upaya penegakan hukum dilaksanakan dengan tindakan penangkapan terhadap para tokoh penggerak yang selama kurun waktu lebih kurang 2 tahun telah menipu dan memprovokasi masyarakat dengan memberikan iming-iming bahwa mereka dapat memperjuangkan kepemilikan lahan di Cibabi (SM.Cikepuh).

Tokoh penggerak yang dijadikan target utama dalam operasi ini adalah yang pada saat operasi dilaksanakan berada dalam kawasan, sedangkan target berikutnya adalah tokoh penggerak yang diketahui berdasarkan hasil pengembangan dari pemeriksaan para tokoh penggerak yang terlebih dahulu tertangkap.

Hasil yang diperoleh pada saat operasi digelar adalah sebagai berikut :

No	Nama TSK	Umur	Keterangan
1	H.Saefudin alias H.Encang bin H.Soleh	52 th	- BB : rumah tinggal & lahan garapan di blok Tipar, gergaji, cangkul, sabit/gaet, serta surat-surat keterangan.
2	Surma bin Hatim	50 th	- BB : rumah dan lahan garapan, arit/sabit
3	Dudin bin Hudsa	50 th	- BB : rumah tinggal di blok Cibabi
4	Musthopa bin Ugon	42 th	- BB : lahan garapan di blok Cibabi
5	Oleh bin Ohi	40 th	- BB : cangkul, kapak, golok dan parang.
6	Achmad Rosadi bin Kokom	50 th	- BB : generator dan alat setrum accu.
7	Amur bin Mujib	40 th	- BB : mesin penggilingan padi, semprotan merk Swan, berbagai macam kunci, golok dan ban penggilingan padi.
8	Acun bin Ilo	45 th	- BB : pegangan cangkul dan cungkil
9	Makmur bin Mukti	50 th	- BB : bangunan pabrik penggilingan padi di blok Tunjanganginan
10	Lukman Nurhalim bin Bisri	34 th	- BB : rumah tinggal dan lahan garapan di blok Cibabi
11	Samsi bin Eman	43 th	- BB : bangunan dan mesin penggilingan padi, kunci inggris, engkol mesin serta ban penggilingan padi.
12	Herman bin Ukan	51 th	- Tertangkap di luar kawasan dengan dasar Sprint Kapolres No.Pol.: SP.Gas/169/IV/2002/Serse. - BB : parang dan kapak
13	Mad yahya bin Hori	65 th	- BB : rumah tinggal & lahan garapan di blok Tunjanganginan; surat pernytaan menggarap yg ditanda tangani Haryono, Sm.Hk.
14	Dahudin bin Ahrip	50 th	- BB : Surat tugas coordinator penggarapan lahan blok Cibabi yg ditandatangani Sofyan Kasim,SH. Dan Surat pernyataan yg ditandatngani Haryono,Sm.Hk.
15	Mad Lili bin Hali	46 th	- BB : senjata api rakitan (cuplis)
16	Fahrudin bin Alan	38 th	- BB : senjata api rakitan (cuplis)
17	Haryono SmHk. Bin Imran Ramrain	42 th	- BB : surat-surat keterangan yg menujukan keterlibatan ybs dalam kasus penggerakan tokoh perambah.

Sumber : *Laporan Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Penebangan Liar dan Perambahan Hutan di dalam kawasan konservasi SM.Cikepuh, 2002*

Selain ke tujuh belas tersangka tersebut, masih ada 5 orang tersangka lainnya sebagai DPO Polres Sukabumi ketika itu, yaitu : Empan, Ganda, Nandang, H.Sabturi dan Tedi. Namun akhirnya tertangkap juga, tidak lama setelah para tersangka lainnya di Vonis pengadilan).

Saat itu para tersangka yang tertangkap, telah selesai menjalani proses pemberkasan oleh Penyidik Polres Sukabumi dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan Negeri Cibadak untuk mendapatkan P.21.

Para saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tersangka tersebut di atas selain para petugas POLHUT BKSDA Jawa Barat I dan beberapa orang penduduk di sekitar lokasi kejadian, juga dihadirkan 2 orang saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dimintai keterangannya perihal kajian ilmiah akibat terjadinya kegiatan perambahan di SM.Cikepuh.

Evakuasi Perambah

Keluarnya para perambah dari dalam kawasan SM.Cikepuh telah terjadi beberapa hari menjelang operasi dilaksanakan. Hal ini akibat adanya bocoran rencana operasi yang diketahui oleh para perambah. Seminggu menjelang operasi dilaksanakan, berdasarkan catatan petugas Polhut, jumlah perambah yang meninggalkan kawasan sebanyak 150 kepala keluarga atau 340 jiwa.

Pada saat operasi digelar, secara bertahap para perambah berbondong-bondong meninggalkan lahan garapannya dan sama sekali tanpa ditandai insiden antara anggota satgas dengan para perambah.

Kepada masyarakat perambah, Tim satgas memberikan toleransi waktu selama seminggu terhitung sejak hari kedua operasi digelar dan selama tenggang waktu tersebut diberikan kesempatan untuk dapat mengangkut barang-barang miliknya masing-masing termasuk hasil tanaman yang memang sudah layak panen.

Rincian jumlah perambah yg meninggal kawasan terdaftar dan melalui Poskotis Jaringao

No	Tanggal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Meninggalkan kawasan Sebelum tgl 24 April 2002	150	340
2	24 April 2002	40	120
3	25 April 2002	86	227
4	26 April 2002	108	409
5	27 April 2002	168	415
6	28 April 2002	58	172
7	29 April 2002	147	586
	Jumlah sd tgl. 29 April 2002	757	2.269

Sumber : *Laporan Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Penebangan Liar dan Perambahan Hutan di dalam kawasan konservasi SM.Cikepuh, 2002*

Penjagaan dan Patroli

Dalam rangka mempertahankan kondisi lapangan yang telah kosong dari aktivitas perambahan, Tim Satgas melakukan upaya penjagaan dan patroli guna mengantisipasi niat para perambah untuk kembali menggarap lahan yang telah ditinggalkannya serta untuk mencegah timbulnya kemungkinan buruk lainnya seperti perusakan barang bukti di lapangan atau pencurian hasil pertanian yang masih ada.

Secara bertahap, mulai hari ke sepuluh secara proporsional jumlah personil Tim Satgas mulai dikurangi setelah melihat dan mempertimbangkan situasi keamanan di lapangan. Pada akhirnya setelah cukup sebulan, personil yang bertugas dipercayakan kepada

petugas Polhut BKSDA Jawa Barat I, yang didukung oleh unsur Muspika setempat.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, selama penjagaan dan patroli lapangan, dijumpai kejadian :

- Salah seorang tokoh penggerak (Ritonga, penduduk ds.Cikangkung), saat operasi tidak menjadi Target Operasi masih berusaha mempengaruhi beberapa bekas perambah untuk kembali masuk ke dalam kawasan.
- Beberapa warga sekitar kawasan berusaha mengambil palawija yang masih tersisa dalam kawasan serta barang lainnya termasuk kayu-kayu yang tak sempat diamankan Tim Satgas.
- Gubuk dan rumah tinggal dalam kawasan sering dipakai sembunyi untuk dimanfaatkan saat mengambil palawija, sehingga menyulitkan petugas patroli dalam melaksanakan pengamanan kawasan.
- Berkembang informasi simpang siur di tengah masyarakat tentang rencana tindaklanjut pasca operasi satgas, terutama menyangkut rencana rehabilitasi kawasan yang ditinggalkan perambah.
- Dengan belum tertangkapnya 5 orang tokoh penggerak yang sebelumnya menjadi target operasi, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat, karena disinyalir 5 orang ini berusaha menghimpun kekuatan baru dan mengembangkan opini menyesatkan.
- Laporan dari masyarakat, bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan anggota Satgas melakukan pemerasan kepada pengusaha kayu. Sedangkan oknum lainnya mendatangi perusahaan perkebunan dengan membawa nota dari suatu lembaga Tinggi Negara di Jakarta untuk meminta sumbangan dalam rangka pengamanan lanjutan di SM.Cikepuh.

Pembinaan Masyarakat

Upaya pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi respon dan aspirasi masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan dan hasil operasi serta tindak lanjut pasca operasi. Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2002 dengan dihadiri tokoh-tokoh formal maupun non formal dari desa Gunungbatu, Cikangkung dan desa Cibenda.

Secara bulat dan tegas para tokoh masyarakat yang hadir menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satgas yang dituangkan secara spontanitas dalam suatu pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Bahkan beberapa tokoh juga secara transparan menyampaikan kritik terhadap kekurangan/kelemahan Tim Satgas dan sekaligus menyampaikan harapannya untuk langkah selanjutnya.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan selain berbentuk pertemuan, juga berupa pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembuatan bibit pohon dengan jenis asli yang banyak ditemukan dalam kawasan.

Kedelapan
Akhir dari Cerita itu

Pelaksanaan operasi penanggulangan penebangan liar dan perambahan hutan di dalam kawasan SM.Cikepuh secara keseluruhan dinilai oleh banyak pihak berhasil dengan baik. Ukuran keberhasilan ini ditandai oleh beberapa parameter yang secara jelas bisa disaksikan secara nyata. Parameter keberhasilan tersebut diantaranya adalah dengan tidak terjadinya hal-hal yang

semula sangat dikhawatirkan yakni insiden bentrokan antara anggota Satgas dengan massa perambah yang lebih dari 2 tahun menghuni kawasan SM.Cikepuh.

Keberhasilan Tim Satgas juga ditandai dengan singkatnya waktu untuk menangkap para tokoh penggerak dan mengeluarkan para perambah dari dalam kawasan yakni hanya seminggu, padahal jauh-jauh hari sebelumnya diperkirakan kegiatan tersebut akan memakan waktu 1 tahun dan 3 bulan.

Dukungan masyarakat sekitar yang ditujukan dengan sikap yang kooperatif selama kegiatan operasi berlangsung. Merupakan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan operasi. Sebagian masyarakat kampung Jaringao yang menjadi lokasi Posko Tim Satgas, merelakan sebagian rumahnya untuk dipakai tempat menginap anggota Satgas. Sedangkan yang lainnya turut terlibat dalam kegiatan dapur umum dan penyediaan ransum sehari-hari bagi anggota satgas.



Kesembilan
Penutup

Tersentak aku, tiba-tiba. Masih terbayang rangkaian waktu itu, detik-hari-bulan bahkan tahun berikutnya yang terjadi.

15 Oktober 2002, merupakan sidang pengadilan pertama kasus perambahan di SM.Cikepuh digelar di Pengadilan Negeri Cibadak. Dari waktu ini sampai beberapa hari kemudian bahkan berbulan-bulan, kami ikuti sidang tersebut sampai terjadi vonis.

Bulan Pebruari 2004, didapatkan hasil vonis hukuman kasus-kasus perambahan SM.Cikepuh, antara lain ;

No	Nama TSK	Hakim	JPU	Hasil Putusan
1	Samsi bin Eman	Dulaimi,SH.; R.Azharyadi P,SH.; Ny.Ninil Ey.,SH.	Fahrudin N.,SH.; Basya, SH.	1,5 th penjara potong masa tahanan (19 Peb 2003)
2	Makmur bin Mukti	Nelson P., SH.; Ny.Sri S.,SH.; M.Ginting, SH.	Fahrudin N.,SH.; Basya, SH.	2 th penjara potong masa tahanan (18 Peb 2003)
3	Haryono, Sm.Hk bin Imam Ranrain	Dulaimi, SH.; R.Azharyadi P., SH.; Ny.Ninil Ey.,SH.	Marihot S.,SH.	2 th penjara potong masa tahanan (19 Peb 2003)
4	Herman bin Ukan	Ny.Jasinta D., SH.; Ny.Femina M., SH.; R.Azharyadi P., SH.	Marihot S.,SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
5	Ahmad Rosadi bin Kokom	Dulaimi, SH.; R.Azharyadi P.,SH.; Ny.Ninil Ey.,SH.	Fahrudin N.,SH.; Basya, SH.	1,5 th penjara potong masa tahanan (19 Peb 2003)
6	Amur bin Mujib	Nelson P.,SH.; Ny.Sri S., SH.; M.Ginting, SH.	Fahrudin N.,SH.; Basya, SH.	2 th penjara potong masa tahanan (18 Peb 2003)
7	Lukman Nulhakim bin Bisri	Ny.Jasinta D., SH.; Ny.Femina M., SH.; R.Azharyadi P., SH.	Marihot S.,SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
8	Madyahya bin Hori	O. Harianja, SH.; Suwarsa H., SH.; KC.Gaol, SH.	Edi W.,SH.; Awalia M., SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
9	Surma bin Hatim	Ny.Murniati I., SH.; Purnawan, SH.; Elly TP., SH.	Edi W.,SH.; Awalia M., SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
10	Dudin bin Hosda	Ny.Murniati I., SH.; Purnawan, SH.; Elly TP., SH.	Nurtaman, SH.; Fajar H., SH.	2 th penjara potong masa tahanan
11	Acun bin Ilo	O. Harianja, SH.; Suwarsa H., SH.; KC.Gaol, SH.	Edi W.,SH.; Awalia M., SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
12	Mustopa bin Ugon	Nelson P.,SH.; Ny.Sri S., SH.; M.Ginting, SH.	Nurtaman, SH.; Fajar H., SH.	2 th penjara potong masa tahanan (18 Peb 2003)
13	Oleh bin Ohi	O. Harianja, SH.; Suwarsa H., SH.; KC.Gaol, SH.	Nurtaman, SH.; Fajar H., SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
14	Dahudin bin Arip	O. Harianja, SH.; Suwarsa H., SH.; KC.Gaol, SH.	Afanie, SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)

No	Nama TSK	Hakim	JPU	Hasil Putusan
15	H.Saepudin als. H.Encang bin H Soleh	Dulaimi, SH.; R.Azharyadi P.,SH.; Ny.Ninil Ey.,SH.	Afanie, SH.	2 th penjara potong masa tahanan (13 Peb 2003)
16	Fahrudin			1,5 th penjara potong masa tahanan
17	Madlili			1,5 th penjara potong masa tahanan
18	Sofyan Kasim,SH. bin Kasim	Ny.Jasinta D., SH.; KC.Gaol, SH.; M.Ginting, SH.	Marihot S., SH.; O.Hendra, SH.	8 bulan penjara potong masa tahanan (19 Jun2003)
19	Nandang bin Sajim			2 th penjara potong masa tahanan (9Peb 2004)
20	Ganda Suherlan bin Uci			2 th penjara potong masa tahanan (9 Peb 2004)
21	Empan			Dalam pengejaran aparat
22	Tedi			Dalam pengejaran aparat

Sumber: *Dikutip oleh Seksi Konservasi Wilayah II Bogor di Sukabumi dari Data Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Pebruari 2004.*

29 Nopember 2002, pengecekan bibit pohon untuk persiapan rehabilitasi kawasan SM.Cikepuh pasca Operasi Penanggulangan Penebangan Liar dan Perambahan Hutan.

13 – 21 Desember 2002 dan 24 – 29 Desember 2002, pelaksanaan rehabilitasi kawasan pasca Operasi Penanggulangan Penebangan Liar dan Perambahan Hutan di dalam kawasan konservasi SM.Cikepuh.

Kesepuluh
Ya.....tugas berikutnya...

Aku ingat kembali..... masa itu. Setelah aku diamanahi sebagai PUMK dalam kegiatan rehabilitasi kawasan SM.Cikepuh..... dalam suatu acara (kalau bisa itu disebut acara, karena saat itu kami makan bersama, Pak Padmo (Kepala Balai KSDA Jabar I); Pak Noor Rakhmat (Kepala SKW II Bogor) dan rekan-rekan Sukabumi-Cikepuh, berkumpul jadi satu, hampir tak ada yang dibedakan).

Pak Padmo mengumumkan sambil makan di atas lantai. "Sep. Saya percaya. Sekarang kamu jadi kepala Resort Cikepuh".

Aku tak bisa bicara--- sesaat kemudian. Sambil keluar air mataku, kalau ini menjadi keputusan Kepala Balai, insya Alloh akan saya terima amanah ini dengan satu pintaku, dukungan dari semua pihak terutama rekan-rekan Cikepuh. Karena aku tak bisa menilai kegiatan ini berhasil karena usahaku semata, melainkan usaha dari semua pihak dan kekompakan dari semua unsur baik di kantor maupun di lapangan, terutama dukungan dan dorongan seorang Kepala Balai dan Kepala Seksi ketika itu. Haru saat itu keadaannya.. Tak terasa aku menjadi koordinator di Cikepuh selama 3 tahun 6 bulan (Januari 2003 sd Agustus 2006).

Saat terjadi penataan organisasi Balai, Tim Seksi Sukabumi waktu itu (kalau bisa disebut tim), Pak Agus Safari ditugaskan sebagai Kepala Resort di Talaga Warna. Ujang Acep,S.Hut ditarik ke Balai menjadi SPORC dan Kepala Polhut Balai. Pak Bim menjadi Kepala Resort Sukabumi. Gelgel mendampingi pak Noor ke Bogor.

Ya .... habis semua ---terpencar.

Agustus 2006 juga pak Noor dimutasi ke Balai Taman Nasional Gede Pangrango di Selabintana. Meskipun begitu, sampai saat ini pun kami masih menjalin komunikasi.

Sekarang--- ya sekarang ini... aku kembali membayangkan masa itu, begitu indah. Dengan suka dukanya kita rasakan bersama, ingin rasanya kejadian tersebut terulang. Pak Noor memang kuat dalam hal komunikasi dan koordinasi. Tapi memang hal tersebut dibentuk bukan dalam waktu pendek kalau diukur bulan.

Proses penanggulangan Cikepuh, berlangsung dengan jalinan komunikasi antar personil dan antar instansi yang intensif lebih dari 2 tahun.

Aku masih ingat. Pak Noor dihargai oleh 3 orang Bupati (Sukabumi, Cianjur, Bogor), karena beliau dengan mudah berkomunikasi dengan para kepala pemerintahan daerah, waktu itu.

Bahkan, pak Noor pernah berucap, saat pisah sambut kepala seksi di Talaga Warna (saat itu antara pak Noor dengan pak Agus Mulyana). Satu hal yang menjadi penghargaan yang sangat berarti adalah ucapan kepala Balai (waktu itu Pak Ir.Suyatno Sukandar MSc), meskipun sering beradu argumenasi. Beliau memberikan ucapan “SKW II meskipun diberi fasilitas di bawah minimum,

namun pekerjaan yang dihasilkan maksimum". Ya kami ingat, begitu lama, kami bekerja dalam satu tim tanpa fasilitas memadai.

- Kantor diPangleseran bebenah sendiri, ditata sendiri, pasang telepon sendiri, computer dapat bantuan dari pihak mitra yaitu PPSC.
- Kendaraan dinas Kepala Seksi tidak diberi, kecuali akhir –akhir tahun pak Noor menjabat di SKW II.
- Lemari arsip, kursi *Citose* bawa dari Balai yang bekas kemudian oleh Agus Safari di perbaiki.
- Rumah dinas, karena lama tak dipakai, akhirnya pasang listrik sendiri.

Dengan begitu, kami makin kuat, malah ada istilah, "fasilitas minimum kerja maksimum" dalam prinsip kami ketika itu....

Itulah pengalamanku saat-saat indah bersama Pak Noor Rakhmat Danumiharja, S.Hut. dalam satu tim. Kapan hal itu kembali terjadi.....??

Entah .....

Tapi aku berharap dan terus berharap.... dan buktinya.....

salah satunya, berhasilnya penanganan perambahan Cikepuh yang aman dan terkendali.....

Sampai pak Bim bernazar... "saya tak akan pindah kalau Cikepuh masih dirambah". ... dan sekarang pun pak Bim sudah pindah ke kampung halamannya di Sulawesi Utara....

Ya .. kembali aku sendiri.... sambil mengetik narasi ini, Aku tuntaskan perjalanan menulis ini...... wassalam.

---------=====000O000=====----------



Isep Mukti Wiharja, A.Md. (S.Hut), lahir di Sukabumi, 23 September 1971. Menikah dengan Ina Nurliana dan dikaruniai 3 putra : Salman Abdul Jabbaar Wiharja; Muhammad Faruqi Wiharja; Adil Wiharja. Aktifitasnya saat ini : Fungsional PEH di Balai Besar KSDA Jabar di Bidang Wilayah I SKW II Resort Sukabumi. Email : pandusukabumikota@yahoo.co.id

7

“SMS Blast Merubah Perilaku Nelayan di TN. Karimunjawa”

"SMS Blast Merubah Perilaku Nelayan di TN. Karimunjawa"

Yusuf Syaifudin

"Yang susah itu bukan menyiapkan program atau aplikasinya, tetapi bagaimana menyusun pesan-pesan yang menarik sehingga pesan tersebut benar-benar dapat diterima masyarakat" Itulah sepenggal kalimat Mbak Asti via telpon yang cukup nempel di ingatanku.

Ketika mendengar metode *SMS Blast* pertama kali pada fase Universitas Tahap II di Bogor, aku sudah tertarik dengan metode/ program ini. Cukup sederhana dan efesien, baik dari segi waktu maupun anggaran. Melalui program ini, hanya dalam hitungan menit kita bisa mengirim pesan ke ratusan bahkan ribuan orang. Begitu pula anggaran yang dibutuhkan dengan Rp. 100-150/sms, maka untuk menjangkau seribu orang, kita cukup mengeluarkan dana Rp. 100.000,-Rp. 150.000. Selain itu, sebagian besar masyarakat Karimunjawa telah memiliki HP.

Dengan alasan tersebutlah maka ketika aku mendapatkan *manual guide* penggunaan *software SMS Blast* langsung ku-*forward* ke

teman di kantor Balai yang membidangi *database* dan sistem informasi Balai TN. Karimunjawa. Aku juga langsung menelpon teman- teman di lapangan untuk mulai mengumpulkan nomor HP masyarakat.

Maka ketika aku masuk kantor hari pertama, aplikasi *SMS Blast* telah siap, begitu pula dengan nomor handphone masyarakat yang kubutuhkan juga telah ada. Lebih dari 800 nomor handphone telah siap. Nomer HP ini didapat dengan sistem berantai, teman-teman di lapangan yang berada di masing-masing Seksi dan Resort mengumpulkan nomor HP masyarakat dengan cara bertanya langsung ke beberapa orang yang sudah dikenal dengan baik. Selain dengan cara tersebut, untuk Pulau Parang dan Nyamuk, nomor HP diperoleh dengan mendatangi penjual pulsa yang berada di pulau tersebut, dan mencatat daftar nomer HP yang berada dalam daftar buku penjualan. Untuk Pulau Parang dan Nyamuk yang merupakan pulau terjauh dimana sangat jarang pengunjung/wisatawan sampai ke pulau tersebut, cara ini cukup efektif. Karena 90% daftar nomor HP yang ada pada penjual pulsa pastilah merupakan nomer HP masyarakat setempat.

Dalam memasukkan nomor HP sebagai suatu sistem database, maka nomor-nomor HP itu aku bagi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, berdasarkan nama desa, mitra terkait, dan untuk nomor HP yang belum teridentifikasi nama dan asal desanya aku masukkan dalam kelompok campuran. Dengan membagi ke dalam group/kelompok ini, aku berharap apabila ada informasi yang hanya aku tujukan untuk kelompok tertentu, maka dengan mudah aku bisa mengirimkan hanya ke kelompok tertentu tersebut.

Sekali lagi, yang menjadi kendala adalah bagaimana menyusun pesan tersebut bisa menarik. Maka kemudian aku mencoba

mengumpulkan teman-teman staff Balai dan juga teman-teman di lapangan yang kebetulan sedang berada di kantor Balai untuk membantu menyusun pesan. Pertemuan ini secara langsung dibuka oleh Bu KSBTU baru kami, karena pada saat yang bersamaan Kepala Balai sedang berada di Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kemenhut karena berhasil mendapatkan predikat UPT terbaik lingkup PHKA.

Setelah pembukaan, pertemuan tersebut aku awali dengan menggambar secara partisipatif (meniru materi dari Pak Direktur Training-nya RARE). Dari aktifitas tersebut aku ingin menyampaikan bahwa ini program kita bersama, dan tak dinyana Bu KSBTU kami yang baru pun ikut bersedia terlibat dalam aktifitas ini. Kemudian aku lanjutkan dengan menyampaikan Teori Perubahan (*Theory of Change*/ToC). Walaupun dalam setiap kesempatan presentasi aku sudah sampaikan ToC, namun tak ada salahnya ToC sebagai kerangka kerja selalu aku sampaikan.


(@ TNKJ, 2011)

Lebih dari 2 jam aku mengajak teman-teman untuk membantu menyusun pesan-pesan yang akan kami sampaikan melalui *SMS blast*. Dalam pertemuan tersebut aku tak menggunakan *power point* sama sekali. Mas Rully, *Program Pride Manager* (Mentor)-ku yang *keren* ini mengatakan via komentar di FB, kadang-kadang *power point* justru akan membuat kita kehilangan kekuatan dari *point* itu sendiri. Toh ketika nanti benar-benar di masyarakat tidak setiap saat *power point* bisa kita gunakan.

Hasil dari pertemuan tersebut selain menyusun pesan juga sepakat bahwa *SMS Blast* ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kampanye tapi juga pesan umum. Slain itu juga menyiapkan quiz, sehingga harapannya akan tercapai interaksi yang lebih menarik.

Namun pada saat pertemuan tersebut belum disepakati siapa pengirim resmi dari *SMS Blast* ini? Bisa saja kita menggunakan "si Manis" misalnya, tetapi toh kemudian akan muncul pertanyaan siapa "si Manis" ini? Beberapa teman tidak menyetujui menggunakan pengirim Balai TN Karimunjawa. Hal ini terkait dengan keberlangsungan program, dan Instansi pemerintah belum memiliki mekanisme pendanaan untuk pertanggung jawaban berupa pulsa, sehingga program ini belum tentu bisa dilanjutkan untuk tahun berikutnya oleh Balai TNKJ, dan masih adanya masyarakat yang tidak menyukai program-program Pemerintah. Akhirya, belum dicapai kesepakatan akan menggunakan nama siapa untuk pengirim SMS ini.

Atas masukan dari Mas Rully dan persetujuan Kepala Balai, nama pengirim SMS Blast ini adalah "Program Kampanye Bangga TN. Karimunjawa" maka nama itulah yang kemudian digunakan untuk pengirim SMS Blast ini.

Rasanya segala sesuatu untuk program *SMS Blast* ini telah aku siapkan, walaupun aku menyadari perencanaan dan persiapan ini belum sempurna. Tapi menurutku justru kesempurnaan adalah sebuah proses, yang membutuhkan waktu. Tak mungkin secara instan aku bisa menyusun dan menyiapkan program ini dengan sempurna. Aku juga ingat presentasi yang disampaikan Bang Togu Simorangkir ketika sesi pelatihan di Universitas, "Kalau hanya menunggu segala sesuatunya siap dengan sempurna lalu kapan kita akan mulai?"

Karena itulah aku mantap, mulai minggu itu tepatnya hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, aku sudah mengirim pesan pertama melalui *SMS Blast* ini. Semoga program ini bisa diterima masyarakat, dan benar-benar bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan secara efektif.

"Apakah Rasa Bangga Bisa Membuat Kenyang?"

Demikian salah satu bunyi sms yang aku terima setelah program SMS-ku di-*launching*. Isi SMS pertama pun sangat sederhana : *"Ini adalah program Kampanye Bangga Karimunjawa. Melalui SMS ini anda akan mendapat informasi gratis seputar Karimunjawa. "Terumbu Karang Karimunjawa terjaga, ikan melimpah, senyum masyarakat merekah" (Kampanye Bangga Karimunjawa)."* SMS pertama tersebut kukirim ke 786 nomor tujuan. Tidak semuanya terkirim, ada sekitar seratus nomor yang gagal terkirim (maaf tidak menghitung secara pasti).

Dari SMS pertama tersebut setelah 3 hari aku mendapatkan 38 SMS masuk, eh…41 jika ditambah dukungan dari Mbak Galuh dan Mbak Asty dan pertanyaan dari Mas Rully. Ada yang berupa ucapan selamat dan dukungan, ada yang lucu seperti berikut :

"Karimunjawa letaknya jauh, cocok untuk orang selingkuh"

Ada lagi "Karimunjawa letaknya strategis gak heran kalau ceweknya pada manis"

Ada beberapa yang menulis "n cpa?" (Menandakan masyarakat Karimunjawa ada yang gaul).

Ada yang membalas hanya dengan mengirimkan kembali SMS yang aku kirim.

Ada yang berisi protes "Kenapa kampanyenya hanya Karimunjawa? Kenapa Kemujan dan Parang Tidak?" (Padahal

Karimunjawa yang aku tulis dalam sms ya berarti Desa Kemujan dan Parang juga).

Selain itu, ada yang memberikan informasi tentang pengambilan harta karun BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam), ada juga yang bernada pesimis, menyudutkan, bahkan ancaman. Salah satunya seperti Judul di atas.

Ada lagi "Apa yang dibanggakan lagi dari Karimunjawa?"

yang lain "Jangan cuma slogan"

kemudian "Gak usah macam-macam pake kampanye, yang penting itu program nyata"

dan ada yang berbunyi "Ini semua hanya rekayasa Balai Taman Nasional Karimunjawa"

Dan sms masuk terakhir berbunyi " Sampai kapanpun aku tak sudi mematuhi zonasi Taman Nasional"

Aku tak bisa membohongi diriku sendiri, bahwa membaca sms masuk tersebut, ada perasaan gentar, takut dan khawatir. Tapi aku sadar betul, saat ini aku belum membutuhkan surat sakti yang disimpan Mbak Sari. Aku masih ingat isi surat tersebut. Aku tak boleh takut menghadapi tantangan, aku harus terus melangkah. Ini baru permulaan, sms yang aku kirimpun belum menjurus ke Kampanye Zonasi, namun sudah ada sms masuk bahwa sampai kapanpun tak akan mematuhi zonasi.

SMS masuk tersebut aku sampaikan juga ke teman-teman team. Ada beberapa yang segera aku tanggapi, namun ada beberapa pula yang tak kutanggapi. Aku benar-benar harus selektif dan berhati-hati menanggapi SMS masuk. Hal ini disebabkan karena sampai

dengan saat ini, rekomendasi revisi zonasi belum keluar dari Bupati sehingga belum bisa disyahkan oleh Dirjen PHKA. Jangan sampai timbul gejolak, sehingga Bupati justru tidak mengeluarkan rekomendasi revisi zonasi yang prosesnya sudah berjalan sejak tahun yang lalu.

Dan menurutku tidak semua SMS masuk harus ditanggapi dengan SMS pula. Ada yang bertemu langsung, ngobrol dan bergaul serta hidup bersama dengan merekalah yang akan membuat sudut pandang negatif terhadap zonasi berubah. Dan aku tidak akan melakukan hal itu sendirian. Kebijakan Kepala Balai yang menghimbau seluruh petugas lapangan dalam satu minggu minimal satu kali melakukan anjangsana (mendatangi/bertamu ke rumah warga) walaupun materinya tidak harus mengenai zonasi, akan sangat membantuku.

Perasaan gentar, takut dan khawatir ini kemudian hilang dengan sendirinya. Justru saat ini aku mulai mengetahui, siapa yang sudah mendukung dan siapa yang harus segera aku dekati dalam kampanye ini.

Kini, selain mengirimkan informasi melalui *sms blast*, Balai Taman Nasional Karimunjawa juga menerima laporan dari masyarakat melalui nomor pusat pelaporan.

"Malam Yang Mendebarkan"

Malam itu, tepatnya tanggal 23 Oktober 2011 hampir semua teman-teman di lapangan tidak dapat memejamkan mata. Dalam satu malam, kami harus menangani 2 kasus di 2 tempat yang berbeda.

Cerita ini diawali ketika sore hari ada pemberitahuan dari teman-teman di Seksi I Kemujan bahwa ada laporan dari kelompok



(@ Yusuf, 2012)

PAM Swakarsa yang melihat kapal Pursein yang berada di sekitar pulau Sintok dan disinyalir kapal tersebut akan beroperasi menebar jaring pada malam hari. Karena itulah sejak pukul 5 sore teman-teman Polhut Seksi II Karimunjawa sudah berangkat ke Seksi I Kemujan untuk membantu penanganan Kapal Pursein di Seksi I Kemujan. Hanya tinggal 1 orang Polhut yang tetap berada di Seksi II Karimunjawa bersama teman-teman PEH termasuk diriku.

Sekitar pukul 7 malam, ketika hendak makan malam bersama teman-teman PEH yang lain HP ku berdering. Kulihat dari Pak Wahyono (Polhut Seksi II Karimunjawa yang sedang bertugas di kantor Balai Semarang). Ketika kuangkat, Pak Wahyono menyampaikan bahwa dari tadi dia berusaha menghubungi teman-teman Polhut di lapangan namun tak ada yang bisa dihubungi (Ya…karena pada saat itu hampir semua Polhut berada di Kemujan untuk menangani kasus kapal Pursein, dan di Kemujan memang tak ada sinyal). Pak Wahyono menyampaikan bahwa dia barusan

mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Tanjung Bomang terlihat kapal pursein yang sedang beroperasi.

Terus terang….awalnya aku panik, bagaimanapun juga penanganan perkara atau penegakan hukum adalah tugas teman-teman Polhut. Sedangkan saat itu teman-teman Polhut sebagian besar berada di Kemujan. Aku berusaha mengecek informasi dari Pak Wahyono dengan melihat ke arah Tanjung Bomang dari daratan yang cukup tinggi. Dari situ memang terlihat ada kapal yang sinar lampunya sangat berbeda dengan sinar lampu kapal-kapal lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kapal tersebut memang bukan kapal dari wilayah Karimunjawa.

Aku segera kembali ke Mes, namun ternyata di Mes sudah cukup ramai. Ada beberapa masyarakat yang tadi lapor via telpon ke Pak Wahyono sudah berkumpul di Mes dan minta kami untuk menindak kapal pursein yang terlihat beroperasi di perairan sekitar Tanjung Bomang tersebut. Singkat cerita, walaupun hanya dengan satu orang Polhut, ditambah diriku dan beberapa teman PEH kami tindak lanjuti juga laporan masyarakat tersebut.

Inilah pengalaman pertamaku benar-benar terlibat dalam penanganan perkara. Walaupun kami memiliki speed boat namun operasi di malam hari, sangat beresiko menggunakan speed boat, apalagi jika digunakan untuk mendekati kapal kayu yang ukurannya lebih besar. Speed boat yang terbuat dari fiber tidak mungkin berani merapat ke kapal kayu. Karena itulah kami gunakan kapal kayu masyarakat untuk dapat merapat ke kapal Pursein tersebut. Sedangkan kapal speed boatnya mengawasi serta mendokumentasikan proses dari jarak yang cukup aman.

Aku ikut dalam kapal kayu bersama Mas Eko Susanto. Ia satu-satunya Polhut yang ada saat itu. Kami bertiga berusaha merapat dan naik ke Kapal Pursein. Jantungku berdebar sangat cepat, bagaimana tidak, kami naik ke kapal tersebut hanya bertiga, sementara di kapal Pursein tersebut terdapat lebih dari 20 orang ABK. Kami berusaha bersikap sangat ramah, menemui Nakhoda dan memeriksa dokumen perizinan. Belum selesai kami periksa dokumen perizinan tersebut tiba-tiba lampu mati karena generator kapal dimatikan. Teman-teman yang berada di speed boat berteriak meminta kami berhati-hati, lampu dari speed boat langsung diarahkan pada kami bertiga.

Akhirnya kami turun dari kapal Pursein ke kapal kayu kecil dengan membawa dokumen kapal. Dari kapal kayu kecil inilah negosiasi kembali kami lakukan. Kami minta Nakhoda bersama satu orang anak buah kapal dapat ikut bersama dengan kami untuk pemeriksaan lebih lanjut.



(@ TNKJ, 2011)

Akhirnya dengan penuh kepasrahan Nahkoda tersebut bersedia ikut kami untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor SPTN.

Sementara di tempat yang berbeda, yaitu di seksi Kemujan teman-teman Polhut dengan personil penuh juga telah menangkap kapal Pursein dengan dibantu kelompok Pam Swakarsa desa Kemujan.

Sampai dengan artikel ini saya tulis, proses pemberkasan terhadap tersangka telah selesai. Berkas telah dilimpahkan ke Kejagsaan oleh PPNS TN Karimunjawa sendiri. Dan untuk sampai tahap inipun juga tidak mudah. Berkali-kali Balai kedatangan tamu, dari DPRD Kabupaten Rembang, HKTI Rembang, semuanya dengan maksud sama, meminta tersangka yang memang berasal dari Rembang tersebut untuk tidak diproses.

Namun komitmen Balai TNKJ jelas, akan memproses nelayan luar TNKJ yang beroperasi di TNKJ dengan alat-alat yang tak ramah lingkungan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Penegakan Hukum dan Hati Nurani"

Proses awalnya bagaimana aku kurang mengetahui, yang jelas ketika kapal yang aku carter pulang dari pulau Parang dan sandar di dermaga Karimunjawa, aku melihat kapal speed patroli Taman Nasional merapat juga di dermaga Karimunjawa. Teman-teman Polhut turun dari speed tersebut dengan menggunakan seragam lengkap. Turun juga dari speed tersebut beberapa orang yang tidak aku kenal. Aku langsung berfikir pasti teman-teman Polhut baru saja menangkap orang. Siapa? Orang Mana? Melakukan Pelanggaran apa sehingga ditangkap?

Pertanyaan tersebut tidak beberapa lama langsung terjawab. Berawal dari laporan masyarakat melalui "pengamanan

partisipatif", ada beberapa kapal "cantrang" dari luar daerah masuk dan beroperasi di Karimunjawa. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti teman-teman Polhut, proses penangkapannya aku tidak tahu persis, yang jelas kapten kapal dan beberapa ABK (Anak Buah Kapal) berhasil dibawa dengan menggunakan kapal speed patroli dan 1 jam kemudian kapal "cantrang" tersebut bersandar juga di dermaga Karimunjawa.

Nakhoda dan beberapa anak buah kapal langsung dibawa ke Kantor Seksi. Teman-teman Polhut memberlakukan Nakhoda dan ABK tersebut dengan baik, dan surat izin diperiksa. Surat ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi tersebut jelas-jelas menyebutkan larangan menangkap ikan di sekitar TN Karimunjawa. Teman-teman Polhut terus memberikan penjelasan mengapa mereka ditangkap. Salah satu alasannya karena mereka telah melanggar wilayah tangkap. Sementara Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) Polhut TN. Karimunjawa terus berkoordinasi dengan Kepala Balai di Kantor Semarang.

Sementara yang aku lakukan adalah mengidentifikasi alat tangkap/jarring dan kapal yang mereka gunakan setelah kapal tersebut sandar di dermaga. Kapal yang digunakan bernama KM. Marga Mulya-3 dengan berat kapal 28 GT, asal Pekalongan. Jaring yang digunakan ternyata bukan jaring cantrang melainkan Purse Seine. Hal ini terlihat pada adanya tali kolor dibagian bawah jaring yang berfungsi menutup bawah jarring, sehingga membentuk kantong dan ikan yang sudah terkurung tidak dapat meloloskan diri dari bagian ini. Jaring ini dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis (ikan permukaan) hal ini terbukti dengan hasil tangkapan mereka yang sebagian besar berupa ikan Tongkol dan Kuwe. (Terimakasih Pak Gede, materinya bermanfaat)

Aku menduga, Nahkoda dan ABK hanya akan diberi peringatan dan dilepas kembali. Dugaanku ini cukup mendasar. Dana untuk proses pemberkasan dan penyidikan tindak pidana dalam satu tahun hanya 2 kali, itupun dari Januari sampai Agustus ini Balai TN Karimunjawa telah memproses kasus sampai P 21 (istilah yang sering digunakan pada saat berkas telah sampai di kejagsaan dan dinyatakan lengkap sehingga perkara siap disidangkan) sebanyak 3 kali. Jika kasus ini diproses dari mana dana yang digunakan? Tapi sungguh, ternyata dugaanku salah. Kepala Balaiku ternyata memutuskan bahwa pelanggaran ini tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kepala Balaiku lebih memperhatikan tuntutan masyarakat Karimunjawa, agar Karimunjawa bebas dari nelayan luar.

Mendengar keputusan tersebut Nakhoda dan ABK terus meminta maaf dan mengajak berdamai. Berkali-kali mereka menghubungi bos pemilik kapal yang berada di Pekalongan. Bos pemilik kapal pun melalui telepon mengajak berdamai. Bahkan menawarkan ganti rugi puluhan juta rupiah, agar kasus ini tidak dilanjutkan. Tentu kerugian yang besar bagi pemilik kapal jika kasus ini dilanjutkan. Bukan hanya kapalnya tidak bisa beroperasi, tetapi jaring dan kapal yang nilainya ratusan juta bisa jadi disita oleh Negara.

Sekali lagi aku cukup bangga dengan instansi tempat aku bekerja ini, belum pernah aku mendengar teman-teman Polhut menerima hal-hal semacam itu, walaupun sering kali tawaran itu ada. Keputusannya tetap, pelanggaran akan diproses. Nakhoda dan beberapa ABK yang dianggap bertanggung jawab akan dibawa ke Semarang untuk menjalani proses pemberkasan dan penyidikan.

Berkali-kali Nakhoda mohon maaf dan meminta untuk tidak diproses. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan mereka

sebenarnya juga sulit. Sekali melaut biasanya waktu yang mereka gunakan antara 10-15 hari. Apabila hasil tangkapan bagus ikan dilelang, setiap ABK bisa mendapatkan 300 ribu, tapi jika hasil tangkapan buruk tak jarang mereka mendapatkan jatah kurang dari itu. Bahkan sering juga hasil tangkapan hanya dapat digunakan untuk mengganti solar dan perbekalan selama melaut. Mendengar hal itu hatiku benar-benar tersentuh. Aku membayangkan bagaimana keluarga mereka di rumah menunggu. Bagaimana jika mereka benar-benar sampai dipenjara? Siapa yang akan menanggung beban hidup keluarga mereka di rumah?

Bukannya teman-teman Polhut tidak memiliki nurani, tetapi mereka benar-benar menjalankan tugas. Dan komitmen Balai TN. Karimunjawa jelas, mencegah nelayan luar daerah masuk kawasan taman nasional serta memproses secara hukum kapal-kapal luar daerah yang beroperasi di Karimunjawa. Walaupun dalam menjalankan komitmen ini, kami harus berperang terhadap hati nurani.

Tak banyak yang dapat aku lakukan selain hanya berharap, semoga proses pemberkasan dan penyidikan segera selesai dan pengadilan dapat memberikan keadilan. Yah…, bukankah adanya pengadilan di tiap kabupaten atau kota di Republik ini untuk memberikan keadilan bagi warga masyarakat? Setidak-tidaknya itulah tujuan didirikannya Pengadilan, bukan sebagai lembaga untuk menghukum tapi sebagai lembaga yang memberikan keadilan. Semoga!

“Email yang Kunanti”

Betapa leganya aku ketika Mas Rian Prasetya (WCS) mengirimkan padaku email yang beberapa minggu ini sudah aku tunggu. Yah…email mengenai laporan Monitoring Kajian Tingkat

Kepatuhan Nelayan Terhadap Zonasi di TN Karimunjawa (2009-2011). Segera kubuka *attachment* dalam email tersebut. Sinyal internet di Karimunjawa yang tidak lancar membuat proses tersebut terasa lama.

Setelah terbuka aku baca lembar demi lembar, sampailah pada Sub bab 3.3.1. Tingkat Kepatuhan Nelayan terhadap Zona Inti. Lega rasanya aku membaca angka demi angka dalam grafik tingkat kepatuhan nelayan terhadap Zona Inti. Dari angka 93.86 di tahun 2009 menjadi 96.01 di tahun 2010 dan berubah menjadi 95.08 di akhir tahun 2011.

Itu artinya salah satu sasaran SMART untuk menurunkan prosentasi pelanggaran nelayan di Zona Inti sebesar 20% dari data tingkat Pelanggaran Nelayan di Zona Inti sebesar 6.32% di tahun 2009 menjadi 5.06% di akhir tahun 2011 dapat tercapai. Karena jika membaca grafik tersebut dapat diartikan tingkat pelanggaran nelayan di Zona Inti saat ini ada pada angka 4,92%.

Munculnya kesadaran ekologis tersebut juga berdampak positif terhadap kenaikan jumlah ikan karang pada Zona Inti Taman Nasional Karimunjawa. Di Timur Karimunjawa, tahun 2009 tercatat 1,99 individu/m² sedangkan tahun 2012 tercatat 2,26 individu/m². Di Taka Malang, tahun 2009 tercatat 1,88 individu/m² sedangkan tahun 2012 tercatat 1,96 individu/m². Dan di Taka Menyawakan, tahun 2009 tercatat 1,1 individu/m² sedangkan tahun 2012 tercatat 1,17 individu/m².***

---------=====000O000=====----------



Foto oleh Hengky Bambang Supriyadi, 2011

Yusuf Syaifudin, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Oktober 1980. Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Susukan pada tahun 1997, berusaha mencari sekolah dengan system ikatan dinas dengan tujuan untuk dapat meringankan beban orang tua. Akhirnya bisa masuk di SKMA Kadipaten. Tahun 2000, setelah lulus dari SKMA Kadipaten ditempatkan bekerja di Taman Nasional Karimunjawa sebagai Teknisi Kehutanan yang kemudian beralih nama menjadi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sampai sekarang.

Atas dorongan semangat serta bantuan biaya dari Ir. Puspa Dewi Liman mulai tahun 2005, sambil bekerja juga melanjutkan study di Universitas Terbuka jurusan Biologi, lulus awal tahun 2010. April 2010-Mei 2012 mengikuti program RARE Pride Campaign. Kini menunggu akreditasi gelar *Master of Arts in Communication Program* di bidang *Communication for Sosial Change* dari University of Texas at El Paso, Amerika.

Pengalaman kerja yang menarik adalah menyusun program SMS Blast sebagai media komunikasi 2 arah dengan masyarakat di Taman Nasional Karimunjawa. Melalui program tersebut lahirlah Nomer Pusat Pelaporan di Taman Nasional Karimunjawa sebagai jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.

Email :ysyaifudin_tnkj@yahoo.com
HP : 081325781745
Blog : http://www.rareplanet.org/en/users/Yusuf Syaifudin/blog

8 Meremang Embaran

Meremang Embaran

Susi Sumaryati

Bergaya

"Agak ke atas sedikit, iya, terus daun yang sebelah kanan itu jangan sampai menutupi bagian buah," instruksi Pak Arif pada Kristiawan. Pak Arif siap dengan kamera SLRnya berusaha mengatur posisi Kristiawan yang sedang memegang untaian ranting. Kristiawan menampilkan senyuman termanisnya. "Okey, jangan bergerak, 1, 2, 3!"seru Pak Arif "Sip bagus Mas!" lanjutnya. Kristiawan tak sabar lagi ingin melihat hasil wajahnya terdokumentasi dalam foto. "Mana fotonya tadi Pak?" tanya Kristi bersemangat. Pak Arif tak berkeberatan menunjukkan, "Nah, ini, bagian bunga dan daunnya terlihat jelas," jawab Pak Arif. "Bukan yang ini Pak, yang saya barusan difoto!" sambung Kristiawan gemas. "Iya, ini hasil foto yang barusan Kris!" jawab Pak Arif tak kalah gemasnya. Meledaklah tawa saya, Pak Zali, Bu Tuti dan Bu Erni melihat kepolosan Kristi. Hari itu saya beserta Kristiawan mendampingi rekan-rekan dari LIPI untuk melakukan



Pengambilan sarang penyu di Pulau Geleang, Taman Nasional Karimunjawa. Pemindahan sarang dilakukan untuk menghindarkan telur dari predator alami, selanjutnya proses penetasan semi alami dilakukan di Pulau Menjangan Besar. (Susi)

eksplorasi jenis tumbuhan di Pulau Parang. Pak Arif bertugas untuk mendokumentasikan jenis tumbuhan yang kami jumpai. Pagi ini kami menyusuri bagian barat pulau yang memiliki luas 690 Ha. "Ckckckck..!cantiknya!" seru bu Tuti sesaat menjumpai bunga yang menurutnya dari jenis *Paciflora foetida*. Berulangkali saya mendengar ibu satu anak ini berdecak kagum. Decakan itu biasanya menjadi penanda bahwa kami harus berhenti untuk mengamati, mengambil bagian dari tanaman dan mendokumentasikannya.

Dengan dipandu Ngasri dan Ma'ruf, penduduk sekitar situ, rute kami berjalan membelah bagian tengah pulau yang dihuni hampir 200 jiwa. Dua kimoleter dari jalan desa, kami sampai pada jalan setapak yang memasuki tegalan. Rehat sejenak untuk mengambil nafas. Pemandangan dari arah situ memanjakan

mata kami. Dari tempat kami berdiri, Pulau Kumbang, Nyamuk dan Katang menyapa. Jadi tak tahan untuk foto bersama dengan background ini. "Bun..Cis! seruku sambil menampilkan deretan gigi cemerlang. Hari itu kami tercatat jenis tumbuhan: *Brucera javanica, Capparis micracantha,* C*asuarina equisetifolia, Ficus septic, Clerodendrum confusum, Clerodendrum inerme, Ixora blumei*, *Cayratia trifolia,* dan *Passiflora foetida*.

Meremang Embaran

"Waduh, banyak banget! Bisa se-abad gak habis-habis iki!" gurau Luluk. Saat mengajari saya mengaplikasikan AHP pada 1206 spesies yang terdata di Taman Nasional Karimunjawa. *Analytical Hierarchy Process*, AHP, sebuah metode ilmiah yang dikemukakan oleh Thomas L.Saaty, merupakan metode kuantitatif untuk meranking berbagai alternatif dan memilih satu terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode ini menggunakan perbandingan dari beberapa pilihan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dengan data yang kami dapat, tercatat 1211 calon kegiatan yang harus kami jalani. Berangkat dari asumsi bahwa tiap obyek tersebut memiliki 4 aktifitas yaitu identifikasi, inventarisasi, monitoring, pembinaan, maka kami terdapat 4844 kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya pengelolaan. Angka itu menunjukkan kegiatan mencapai angka yang fantastis sehingga mendorong kami untuk memilah kegiatan prioritas. Segera setelah semua kegiatan terhitung dengan menggunakan AHP, hasil itu saya *share* ke milis pada group PEH TN Karimunjawa. Saat ketidakhadiran menjadi penghalang, dengan *milis* bukan alasan untuk tidak tahu informasi seputar PEH di TNKJ.

Sore itu saya torehkan di milis :

"Hanya ingin berbagi supaya saya gak lupa, karena daya tangkap dan daya ingat saya lemah. Kemarin seharian di choacing tentang AHP oleh kawan Luluk. Saya dengan tersengal-sengal harus banyak belajar tentang metode ini. Dari hasil belajar kemarin dengan diskusi dan dibantu dukungan data dari mas Mulyadi, humor segar dari Mas Capung, mas Endang dan suplai "salad jawa" dari Mia dan Puji, ini saya buat semacam urutan penilaian pada 1206 spesies plus 5 tipe ekosistem yang ada di KJ. Supaya kita bisa saling mengingatkan".

Kegiatan prioritas diasumsikan pada jenis flora fauna yang berhubungan dengan ekosistem esensial, terdapat diseluruh kawasan TN Karimunjawa, jenis yang dilindungi, bernilai ekonomis tinggi dan endemik. Kegiatan membutuhkan minat dan kemauan tidak semua orang berminat. Hal itu melatar belakangi kami mengelompokkan. Pak Gunung, kepala balai kami saat itu, menyarankan agar untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai PEH. Pengelompokan kami berdasarkan kelompok minat.

"Aku terumbu dech!" seru Endang. "Saya di hutan" ujar Sobirin sambil mengelus janggutnya. Ketertarikan mewarnai kesepakatan kami mengelompokkan diri. Terbagilah kami kedalam 4 divisi : Mangrove, Hutan Hujan tropis, Terumbu dan Wisata Alam. Bidang tugas divisi Terumbu karang dan lamun meliputi : ikan, terumbu karang, lamun, invertebrata, alga, mamalia laut, pada divisi hutan hujan tropis dataran: mamalia, reptil, tanaman hias, vegetasi tumbuhan tingkat rendah, vegetasi tumbuhan tingkat tinggi. Divisi Mangrove dan hutan pantai meliputi bidang tugas: mangrove, burung, penyu, biota mangrove dan pantai sedangkan divisi wisata alam mengurusi : jalur trail, muatan lokal, pusat



Lokasi pengamatan di Terusan, merupakan tempat pengamatan favorit yang berada di areal mangrove penghubung dua pulau besar Pulau Kemujan dan Pulau Karimunjawa. Latar belakang foto ini merupakan puncak tertinggi di Pulau Karimunjawa (Hary Susanto)

informasi, arboretum dan pemberdayaan masyarakat. Keempat divisi bercampur dengan konsep AHP untuk menentukan skala prioritas akhirnya mengerucut pada program prioritas yang kami tuangkan dalam rencana aksi. Rencana aksi ini menjadi semacam garis besar haluan untuk melaksanakan tugas di lapangan.

Les privat

"Tidak sesuai kesepakatan!" seruku setengah menggerutu. Sutopo, instruktur selam dari POSSI, tertawa ngakak sesaat mendengar kisah lengkap dari dive master yang mendampingi saya. "Salah sendiri, sok ribet dengan masker, ya saya pikir maskermu bermasalah!" ujar Mustofa. Pagi itu, saya dan 30 peserta kader konservasi melaksanakan pelatihan selam. Latihan berlangsung selama 5 hari. Saya sebagai salah satu panitia dapat *privilege* waktu

berlatih dari dive master Mustofa. "Kita bisa karena sudah biasa", kata yang diucapkan Martin Welik saat membuka pelajaran selam di Kepulaun Seribu, ucapan itu merekat dalam sudut ingatan saya. Enam bulan setelah merasakan pertama kali menyelam, membuat saya jadi tidak biasa lagi. Meminjam bahasa tetangga, terjadi *back sliding*. Jadi harus mengulang dari awal lagi untuk berlatih menyelam. "Hari ini kita belajar masker clearing," ujar pak Mustofa. Masker clearing membantu kita untuk membersihkan masker bila saat menyelam masker mengalami pengembunan atau kotor. "Membutuhkan ketenangan dan kecepatan dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan ini," lanjutnya lagi. Fin, *Bouyancy Compensator Divice* (BCD), tabung, octopus, pemberat, masker dan snorkel, ehm..rasanya sudah lengkap peralatan SCUBA menopang kenyamanan saat menyelam. Saya dan Pak Mustofa berjalan dengan cara mundur untuk mencapai kedalaman menyelam. Pada kedalam 4 meter, saya mulai mempraktekkan masker clearing yang sudah disintruksikan saat berada dipermukaan tadi. Masker clearing berjalan lancar. Saya hanya tinggal menyesuaikan masker yang telah saya pakai. Rupanya Pak Mustofa menanggapi berbeda, melihat saya masih belum beres dengan masker, tiba-tiba dia melepas masker dan menyodorkan maskernya ke saya. "Ha?bukan kah tadi diatas tidak ada briefing tukar masker," ucapku dalam hati. Karena sudah disodorkan, refleks saya menanggapi dengan melepas masker saya dan menyerahkan pada Pak Mus. Tanpa kesulitan saya memasang masker lagi, selanjutnya kami bergerak kembali ke permukaan.

Never dive alone

Pagi pertengahan September 2011, Nurcahyadi, Mulyadi, Endang, Capung sedang bersiap melakukan penyelaman. Prosedur pengecekan alat selam mereka lakukan sebelum memulai kegiatan.



Seekor penyu hijau *Chelonia mydas* sedang beristirahat di sela terumbu karang, foto ini di ambil saat penyelaman di sekitar perairan pulau Geleang, TN Karimunjawa. (Mulyadi)

"Saya sudah periksa satu persatu tabung dan kelengkapan yang lain Mbak!" kisah Nurcahyadi. "Tidak ada yang ganjil, semuanya okey!" lanjutnya lagi. Peralatan kami rapikan di kapal. Dari dermaga barat Karimunjawa kami meluncur ke titik yang terkenal sebagai wreck dive kapal tongkang. Lokasi itu berada di sekitar pantai Batu Merah Pulau Parang. Setiba di lokasi, kami saling bantu untuk memakai peralatan SCUBA (*Self-contained Underwater Breathing Apparatus)*. Pukul 10.45 WIB. kami berada pada kedalaman 30 M tepat pada buritan kapal tongkang. "Waktu itu posisi saya ada di buritan kapal," jelas Nur Cahyadi, "Teman teman yang lain berjarak sekitar 6 – 8 meter dari posisi saya, di sekitar lambung kapal". Saya melirik indicator regulator, "1500 PSI, masih aman". Sesaat itu juga, Saya merasa aneh,

kok udara tidak terhirup! Segera aku menyusur ke badan kapal tongkang itu mencoba mendekat pada Endang yang akrab di panggil Mas Kendang sambil dengan menahan nafas, mencoba untuk tidak panik. Mungkin lima kali aku terminum air laut. "Puji Tuhan!" seruku dalam hati. Aku berhasil mendekat, jari telunjuk aku arahkan ke leher seperti membentuk garis lurus, sebagai kode bahwa aku mengalami kesulitan pada alat. Kendang dengan sigap menanggapi kode dari ku dengan menyodorkan *mouth face*nya padaku. Jadilah kami dari kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut dengan bergantian menggunakan *mouth face* sampai ke permukaan dengan selamat.

Sesampai di kapal, kami cek lagi peralatan itu, "Alamak… jarum di regulator masih pada angka 1500 PSI! Ugh..!Sialan..!," gerutu Nurcahyadi. Sudah tidak ada oksigen kok jarumnya masih di situ. Kejadian tersebut menjadi catatan pada *log book* Nurcahyadi. "Saya gak bisa bayangkan, seandainya itu terjadi pada penyelam pemula," ujarnya dengan tatapan menerawang. Menyelam menjadi aktifitas yang beresiko tinggi. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat seperti itu. Saat menyelam hidup kita tergantung pada alat sehingga hal itu menjadi salah satu dasar minimal penyelaman dilakukan dua orang.

Staf Ahli

"Saya hanya menyampaikan apa yang telah disusun oleh staf ahli saya," kata Hary mengawali presentasinya pada acara rapat kerja yang berlangsung selama dua hari di pertengahan bulan Januari. Sontak gelak tawa membahana di ruangan rapat itu. Pak Nababan yang sudah nampak kelelahan terkekeh menyaksikan gaya Hary. Hary orangnya jarang bicara, sore itu berkesempatan menyampaikan presentasinya tentang rencana kegiatan mangrove. Dia didaulat sebagai presenter karena posisinya sebagai koordinator

bidang mangrove. Lantas meluncurlah dari Hary rencana tentang mangrove. Tahun 2002, Balai Taman Nasional Karimunjawa melakukan identifikasi dan inventarisasi mangrove seluas 222,2 Ha. Berawal dari kegiatan itu, rangkaian aktifitas pendidikan lingkungan sampai dengan pariwisata terus bergulir sampai saat ini. Pengunjung biasanya hanya melintas, kadang berhenti sejenak di jembatan untuk berfoto. Mereka enggan untuk masuk dalam mangrove karena lumpur yang tinggi serta bau saat berada di dalam hutan mangrove. Ya, berbau, lumpur yang tersekap pada akar mangrove mengandung tumpukan senyawa organik tinggi, proses pembusukan menyebabkan bau yang tidak sedap. Trekking mangrove sepanjang 1377 meter selesai tahun 2011 lalu mencoba menjawab keengganan pengunjung menerobos mangrove.

Menanti Sentuhan

Pagi, 22 Juni 2011, Taman Nasional Karimunjawa mengundang 30 orang untuk mengikuti Pelatihan Transplantasi Karang. Materi yang tersampaikan saat itu: Pengelolaan Taman Nasional, Pengenalan Ekosistem Terumbu karang, Rehabilitasi Terumbu Karang di Taman Nasional Karimunjawa, Metode dan Tehnik Rehabilitasi Terumbu Karang. Hari ini saatnya peserta mencoba melakukan transplantasi karang di perairan Karimunjawa. Peserta terdiri dari perwakilan masyarakat Karimunjawa dan Kemujan. Persentase tutupan karang di Taman Nasional Karimunjawa pada kisaran 7 – 54,5%, menjadi tempat berlindung bagi 353 spesies ikan, 5 jenis kima, 15 jenis teripang dari kelas Holothuridae dan 2 spesies penyu. Fenomena alam dan aktifitas manusia menjadi faktor pembatas ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan menggunakan sianida, pukat harimau dan tehnik penyelaman yang



Menemukan teripang dari family *Holoturidae* sebesar guling saat melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi teripang . Sempat ngeri juga harus memegang teripang sebesar itu. (Mulyadi)i

ceroboh menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Upaya merehabilitasi dengan melakukan transplantasi menjadi satu dari sekian alternatif untuk mengembalikan kondisi tutupan karang yang menurun. Proses pemulihan terumbu karang yang lambat mendorong usaha yang melibatkan campur tangan manusia dalam bentuk transplantasi karang.

Lokasi transplantasi karang berada di perairan Menjangan Kecil, hanya membutuhkan waktu 25 menit dari Dermaga Perintis

Pulau Karimunjawa. Pulau yang berdampingan dengan Menjangan Besar ini memiliki perairan yang kondisinya sesuai untuk melakukan transplantasi karang. Pukul 09.35, kapal sudah menyandar di dermaga. Petugas mulai sibuk membimbing peserta yang antusias mencoba mengikatkan bahan substrat pada kerangka. Kerangka terbuat dari paralon yang dibentuk bujursangkar berukuran 100 x100 cm dengan dipasang jaring berukuran mata jaring 5cm. Substrat untuk menempelkan karang terbuat dari semen yang dicetak membentuk lingkaran berdiameter 10 cm dan tinggi 1 cm, pada bagian tengahnya dipasang paralon dengan panjang 6 cm dan berdiameter setengah inch. ”Satu substrat ini hanya membutuhkan biaya 3000 rupiah”, jelas Yusuf. Substrat diikatkan menggunakan tali strap pada kerangka jaring, masing-masing kerangka bisa untuk 36 subtrat karang.

“Pak, tali strapnya kurang!” seru Abdul Kodir yang sudah memasang lima substrat. Puji yang saat itu bertugas mendampingi, bergegas memberikan tali strap. “Ini Pak talinya, mengikatnya yang kencang biar gak tersapu ombak kalau sudah di laut!” ujarnya. “Ayo cepat, kelompok 3 sudah hampir selesai itu”, kata Panto, rekan kami dari WCS (*Wildlife Conservation Society)*, menyemangati kelompok yang didampinginya. Byur…dari ujung dermaga, Endang, dengan lihai meliuk-liuk ke dalam laut mengambil *Acropora sp*, salah satu jenis karang untuk transplantasi. Tak lama dia muncul dengan membawa keranjang yang sudah berisi terumbu karang. Endang sangat terlatih dalam mengambil karang untuk transplantasi. Pria yang biasa dipanggil Kenthung ini, sudah hampir 13 tahun akrab dengan dunia bawah laut Karimunjawa. Sementara itu, Yusuf mulai menginstruksikan peserta untuk turun ke laut. Masing-masing kelompok mendapat arahan cara memotong dan mengikatkan

karang pada substrat. Pemasangan karang harus dilakukan dalam air untuk mencegah karang mati. “Ini masih goyang! Ayo dikencangkan lagi!” seru Yusuf setelah mengecek hasil ikatan karang pada substrat buatan.

Matahari mulai meninggi, panas semakin menyengat, semangat peserta tak surut. Berendam di laut dengan kedalaman sepinggang orang dewasa, mereka tidak mengalami kesulitan mengikuti arahan dari instruktur. *Acropora sp* sudah terpasang dengan erat pada substrat, kini saatnya meletakkannya kedasar laut pada kedalaman 3 meter. Cekatan sekali mereka menyelam…. satu persatu kerangka transplantasi sudah terpasang dengan erat di dasar perairan Menjangan. Sekarang menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawasi transplantasi ini.

Memburu Sarang

Dengan peluh menetes dan bertelanjang dada, Mualim menggali pasir di tepi pantai pulau Geleang. Sutris, Hartono dan Kuswadi disampingnya tidak mau kalah dengan semangat pria setengah baya ini. Mengggali pasir mencari sarang penyu, ini sudah ketiga kalinya mereka menggali tapi sarang itu belum ditemukan juga. “*Bok cah*! Kok gak ketemu!” ujar Mualim. Mereka kemudian bergeser 50 meter dari tempat semula. “Yang ini pasti!” seru Kuswadi dengan wajah sok optimis. Hari itu kami berlima berjalan mengelilingi Pulau Geleang mencari sarang penyu. Sebuah jejak kami temukan, dibawah naungan *Scaevola tacada*, menandakan bahwa seekor penyu sisik semalam bertelur di sekitar situ.

Pemindahan sarang penyu ke sarang semi alami menjadi salah satu upaya dari Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk menyelamatkan telur penyu dari predator alami dan manusia.



Penyelaman “fun dive” di Indonor, lokasi penyelaman kapal tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Kemujan, pada kedalaman 5-10 meter. (Mulyadi)

Dua puluh tujuh pulau yang terdapat di kepulauan Karimunjawa menjadi tempat bertelur dua jenis penyu: penyu sisik *Eretmochelys imbricata* dan penyu hijau *Chelonia mydas.* Program konservasi penyu sudah berjalan sejak tahun 2003, sampai saat ini 15.693 telur penyu menetas di Tempat Penetasan Semi Alami Penyu di Pulau Menjangan Besar. Lokasi perteluran yang tersebar di beberapa pulau menjadi tantangan dalam konservasi penyu, sehingga keterlibatan nelayan menjadi kunci utama dalam menjalankan program ini. Perlahan tapi pasti, nelayan diajak untuk terlibat aktif dengan memberikan laporan temuan sarang penyu ataupun perjumpaan penyu saat berlayar mencari ikan. Melepaskan tukik menjadi atraksi menarik sekaligus kampanye penyelamatan penyu. Pengunjung dapat berpartisipasi untuk melepaskan tukik bersama sama dengan masyarakat sekitar kawasan.

Konservasi Penyu di Taman Nasional Karimunjawa menerapkan bayar langsung tunai sejak 2003, dengan implementasi

yang berbeda. Program ini memberikan penghargaan pada nelayan yang melaporkan keberadaan sarang, penghargaan itu berupa penggantian biaya bahan bakar. Jumlah penggantian ini disesuaikan dengan jarak tempuh menuju lokasi temuan sarang. Dengan menerapkan *direct payment* pada nelayan, tidak bisa dipungkiri bahwa respon mereka terhadap upaya konservasi menjadi sangat positif. *Direct payment* dalam bentuk penggantian BBM yang diberikan kepada nelayan pelapor sarang penyu. Data menunjukkan pelapor sarang mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003. Dari hanya satu orang pelapor, saat ini terdapat 23 orang yang melaporkan temuan sarangnya kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa. Tercatat, terdapat 108 laporan temuan sarang dari nelayan selama sepuluh tahun ini.

Tentu saja ini merupakan hal yang menggembirakan dalam upaya konservasi di Taman Nasional Karimunjawa. Menelisik dari sudut pandang yang berbeda, penerapan *direct payment* bukan tidak dengan pertimbangan. Faktor utama dalam penerapan ini adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam program konservasi. Masyarakat yang notabene merupakan penduduk asli memiliki kemampuan untuk mencari sarang penyu. Ketrampilan seperti ini tidak dimiliki oleh petugas dari Balai Taman Nasional, sehingga keterlibatan nelayan sangat penting artinya bagi konservasi penyu.

Keterlibatan mereka tidak terlepas dari ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya di Karimunjawa. Penerapan *direct payment* mendapat tanggapan pro dan kontra. Yang bereaksi pro melihatnya sebagai *reward* yang layak diberikan kepada nelayan pelapor sarang, sedangkan yang memberikan reaksi kontra melihat itu sebagai bentuk kegiatan yang memanjakan masyarakat. Tidak sedikit pula yang berpikiran bahwa nelayan sekarang

menjadikan *direct payment* sebagai salah satu mata pencaharian sehingga pelaporan mereka terhadap sarang hanya semata untuk mendapatkan imbalan. Lantas bagaimana menjembatani dua reaksi yang bertentangan tersebut? Semua upaya konservasi membutuhkan biaya, hal ini disadari benar oleh pengelola taman nasional. Pemikiran untuk membangun kemandirian dalam upaya konservasi terus digali. Pemanfaatan jasa lingkungan menjadi rangkaian kata yang lekat dalam mewujudkan kemandirian. Penerapan metode ini membutuhkan komitmen yang kuat dalam keberlanjutan pendanaan dari TN Karimunjawa.

Sabar itu tak berbatas

"Tiong lampu biasa!" jawab Maswa. "*Aku iki takok, iku jenis burung opo*?" tanyaku lagi. "Lha iya, Tiong lampu biasa!" jawab Maswa lagi. "Ugh..ditanya serius kok malah guyon!" ucapku dengan bersungut. "Ya ampyun ..ini lho lihat di buku Mac Kinon!," ujar Eko Susanto sambil menyodorkan buku yang dia pinjam dari Hary. Segera aku tertawa dengan wajah merah karena malu. "Tak kira tadi itu hanya gurau saja, masak nama burung kayak nama lampu," ujarku lagi. Hari ketiga pengamatan burung kami menginjakkan kaki di Pulau Nyamuk. Pulau ini berseberangan dengan Pulau Parang, hanya 30 menit kami sudah bersandar di dermaga Pulau Nyamuk. Melakukan identifikasi jenis burung karimunjawa, saat itu tahun 2004, kami meminta bantuan dari sobat Iwan "Londo" dan Maswa. Dari situ kami belajar melakukan identifikasi. Dua orang birdwatcher ini menjadi sobat pengembara kami untuk mendiskusikan burung-burung di Karimunjawa.

"Sabar itu gak ada batasnya, kalo ada batasnya berarti tidak sabar," kata Iwan "Londo" saat lebih dari satu jam tak menjumpai

seekorpum. Kursi lipat, termos kecil dan sebungkus biskuit menemani pengintaian kami pagi itu. Senyampang menunggu, diskusi menyelingi pengamatan kami, buku jenis burung menjadi pemandu pengidentifikasian: Panduan Burung Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali dari MacKinnon serta *Waterbird of Asia* menjadi kitab wajib kami saat pengamatan.

"Kalo alatnya lengkap begini yo wajar kalau dapat foto burung yang bagus!" kata Hary. "Bukan penghalang!" ujarnya Iwan. Sejenak kemudian kami mendapat jam pelajaran singkat ber*digiscoping*. *Digiscoping* merupakan teknik mengambil foto dengan memanfaatkan perbesaran dari binokuler atau monokuler serta perbesaran dari kamera digital. Caranya dengan menempelkan kamera digital pada lensa okuler binokuler atau monokuler. Hary Susanto mulai tergila-gila ber*digiscoping*. Dia giat berlatih dengan mengkombinasi antara jarak obyek, perbesaran pada monokuler, optikal zoom kamera, cuaca yang mendukung dan sebuah keberuntungan, akan mendapatkan hasil yang optimal. Seringkali untuk mendapatkan foto burung, harus menunggu berjam-jam, bahkan harus mencari keesokan harinya.

Agus *Ngambek*

"Agus, Agus….ayo terbang! elang *kok mlaku*!" teriak Hary sambil bersungut. Kami yang mendengar tertawa. "Sabar Har, ini jarang nich ngambil foto elang diatas pasir," seru kami terkekeh-kekeh. Limaryadi, Sutris dan Kuswadi mulai beraksi dengan kamera masing-masing mengambil gambar elang. "Cuek sekali *nich* elang ! kata Limaryadi. " Dia *nich* tahu kalau kita orang PHKA, jadi gak bakalan gigit," ujar Limaryadi. "Yo terang aja gak gigit wong elang gak punya gigi!," sahut Hary.

Sejenak kemudian elang itu terbang bertengger di atas kandan yang berukuran 3x 4 dengan tinggi hanya 2 meter. Kami menamai elang itu Agus, entah siapa yang memulai memanggil Agus. Sampai sekarang tak ada yang tahu. Tahun 2009 ada yang melaporkan kalau ada anak elang jatuh dari pohon tempat dia bersarang di pulau geleang. Bertindak cepat kami mengangkut elang itu. Melaporkan kejadian ke kantor balai dan berharap segera bisa melepaskan elang itu. Dua tahun berlalu, elang itu seperti peliharaan saja. Pakan kami berikan sehari dua kali, pagi dan sore. Kemampuan terbangnya sebetulnya tidak mengecewakan. Tapi ketergantungan pada pakan yang kami berikan akhirnya menjadi kekhawatiran kami selanjutnya.

Bertengger di atas sarang, kemudian melanjutkan terbang ke atas dahan cemara. Sambil memandang ke laut lepas "Kaaaak..kaak.. kaaak…!" dengan sayap mengepak pandangan tajam ke arah laut. Dia mencoba berpindah lagi ke pohon cemara yang hanya berjarak 5 meter. Keseimbangan hilang, perhitungan menginjakkan kaki pada dahan meleset. Sayap kanan elang itu tersangkut pada ranting kering. 2 menit berselang , tak berdaya elang itu menempatkan posisi. Dari jarak 2 Meter di bawahnya, kami hanya tertegun. Dengan sedikit usaha, burung berparuh lancip ini sukses memposisikan diri. Kepakan sayapnya membawa dia untuk *soaring* , berpindah ke pohon seruni. Masih mampu kami melihat dia bertengger disana. "Kalo dia balik masuk ke sarang, Lating kita ceburkan ke laut yach!" seru Mualim terkekeh membuat kesepakatan. Yang lainnya mengangggguk setuju. Satu jam berlalu, Agus tidak menampakkan tanda-tanda akan kembali ke kandangnya. Ini berarti pertanda bagus buat kami. Waktu bergeser menjelang senja. "Hore ..Agus gak balik ke kandang!" seru Lating lega. Gak jadi nyeburkan Lating

nich! Sambil berharap Agus tak akan kembali ke kandang. “Mbak… Agus balik! Itu sudah didalam kandang. “Asem!” sungut hari. Sudah terlanjur gembira dia gak balik sore kemarin. “Kelaparan Har! Gak bisa cari makan sendiri!” jelas Mualim. Memerlukan sebuah perjalanan yang tidak sebentar untuk melatih elang, dengan berprinsip mencintai tanpa mengurung, proses menuju pelepasan elang harus kami jalani dengan sabar.

Salah Pencet

“ Nguing...nguing...nguing” suara mirip sirine tiba-tiba terdengar disela rapat. “Sstttt...!” seru yang lain sambil memandang ke sumber suara. Oni terkesiap, rupanya dia lupa mematikan volume. “Hey..suara sirinenya nanti!” bisikku yang duduk bersebelahan. “Iya nich, salah pencet!” jawabnya. Sepanjang hari itu kami sekantor berkutat diruang rapat untuk membahas evaluasi kerja kami sepanjang tahun 2011. Agenda lain dalam rapat kerja yang kami gelar secara sederhana di ruang rapat kantor membahas juga tentang strategi pelaksanaan kegiatan 2012 serta usulan untuk kegiatan 2013. Urun rembuk, saling memberi masukan yang membangun menciptakan diskusi yang hangat sepanjang pertemuan. Tiba saatnya Pak Nababan secara simbolis meresmikan Sistem Informasi Management (SIM) terkait dengan pengelolaan kawasan berbasis resort. Tepuk tangan mengiring uji coba pertama *entry data* pada sistem ini. “Lho..sirinenya malah gak bunyi!” kata Mia, kami yang tersadar jadi tertawa sambil tetap bersemangat bertepuk tangan. Sempat terdengar insiden suara sirine, ketika tiba saatnya untuk dibunyikan malah terlupa.

Awalnya data yang tersedia di UPT kami tersebar dalam format excel pada masing-masing penanggung jawab. Kemudahan

untuk mengakses data terkendala karena penataan arsip yang tidak teratur dan belum terpadu. Sejak tahun 2009, data yang berserakan itu dikelompokkan. Sistem pengelompokan ini kami sebut dengan MDI (Manajemen Data dan Informasi). Sampai dengan tahun 2011 ini data yang kami tampilkan di MDI meliputi: profile kawasan, data kepegawaian, data potensi, peta tematik, perpustakaan, SIMAKSI dan persuratan. Tampilan pada MDI mengutamakan data yang informatif. MDI hanya dapat diakses dalam lingkup kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan menggunakan jaringan intranet. Setiap bidang di kantor balai memiliki hak akses untuk pengisian data.

Menjelajah Parang

Mulutnya komat – kamit mengucap mantra. Aroma kemenyan menyergap dalam ruangan berdinding bata, berukuran 3x4. Kami bertiga terdiam memperhatikan si Mbah ini beraksi dengan dupa, kembang kantil, mawar, dan daun kemuning. Sejenak kemudian suara Mbah itu berubah. Tatapan matanya merah, mencerap wajah tamunya satu persatu, berusaha mengenal lagi kami yang duduk melingkarinya. Mbah Yakub mengalami transformasi. "Tamu" yang diundang perlahan memasuki tubuh rentanya. Suaranya berat, bergetar menyapa. Logat bugis yang kental menjadi tengara, "tamu" itu sudah menyelapi ruang – ruang tubuh tua itu. "Kenapa memanggilku?" tanyanya dengan lugas sambil memandang wajah Suharno. Suharno terpaku sejenak tidak menyangka pertanyaan itu ditujukan padanya. Tergeragap dia menjawab seadanya, "Kepingin nanya-nanya Mbah!". Wawancara kami dengan Amir Abdillah yang meminjam tubuh Mbah Yakub, semata untuk menjawab rasa penasaran kami tentang dua makam yang bersemayam di Pulau Parang.

Seminggu ini kami terlibat suasana mistik saat menggali potensi wisata di Pulau Parang. Siang kemarin kami mengililingi Pulau Parang, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam dari Karimunjawa. Dengan menumpang kapal kayu nelayan. Sampailah kami di pulau Parang. Beruntung pemilik kapal kayu itu hapal *plawangan* dengan gosong-gosong karang yang terhampar diantara pulau parang dan kembar. Kalau tidak hapal bisa-bisa kapal kami teronggok tak berdaya menanti saat pasang tiba. Menyandarkan kapal di pulau ini. Tanah berwarna merah bata menjanjikan kesuburan. Bung..bung..bung suara yang ditimbulkan saat kaki dengan sengaja kami hentak-hentakkan diatas tanah. "Berongga Mbak! Tanah ini berongga, lapisan tanah hanya 6-10 meter saja. Selebihnya merupakan karang yang berongga!" ujar Mualim.

Hari berikutnya kami menuju ke Gua Sarang yang berada di sebelah timur Pulau Parang. "Ayo basuh muka kalian dengan air ini, maka permintaan kalian akan terkabul," ucap Mbah Warsan yang menemani kami masuk ke dalam gua. Kami harus berjongkok karena tinggi ujung gua itu hanya 60 cm. Harno yang jongkok disamping saya, mengambil setangkup air dengan dua tangannya, sambil tersenyum – senyum membasuhkan ke mukanya sambil berucap,"Kepala balai…kepala balai". Kami yang ada di sebelahnya hanya tersenyum. Sutris yang membelakangi berucap," Mau kudeta Kepala Balai ya?". Setelah dari gua yang berjarak sekitar 3 Km, kami mampir ke rumah Mbah Warsan. "Gua Sarang ini *ya* memang sejak dulu ada di sini Mbak," ucapnya sambil menuangkan segelas air putih dari ember berwarna hijau seukuran kaleng cat 1 kg. Sejenak pandangan mata tercuri ketika didalam ember itu tidak hanya air tapi didalamnya terdapat rendaman batu berukuran sekepalan tangan orang dewasa yang berwarna kecoklatan. "*Monggo*

diminum," ujarnya sambil mempersilahkan kami minum air bening itu. Tanpa ragu, saya yang duduk berhadapan dengan si Mbah, langsung meneguk air putih dari gelas seukuran minuman air kemasan. "Cleguk cleguk"…terhenti pada tegukan kedua, aroma bunga-bungaan tertancap tajam pada dinding-dinding tenggorokan saya. Otomatis air tersekat pada pangkal tenggorokan, membuat saya tersedak, memaksa saya bertahan untuk menjaga rasa hormat pada tuan rumah.

"Nanti *upload* di *milis* yach!" seru Dendy seraya mengarahkan pandangannya pada Mia. Seharian kami berkumpul di Aula kantor. Pertemuan kami tidak rutin tapi tergolong sering, seperti sore itu, lelah berdiskusi kami menutup perjumpaan dengan makan bersama. *Milis* menjadi salah satu media komunikasi antar PEH di TN Karimunjawa. Ide membuat *milis* awalnya muncul ketika kami merasa membutuhkan media yang tidak terkendala jarak dan waktu. Bertebarannya posisi 21 orang PEH di lapangan dan dari tempat tinggalnya, menjadi tantangan kami untuk mempercepat tersebarnya informasi dari kantor atau sebaliknya. Sekitar 2009, tantangan itu kami jawab dengan membuat milis. Bebaslah isinya, bisa curhat, diskusi serius atau sekedar *sharing* humor email tetangga. Dari media ini kami merasa jarak dan waktu bukan masalah lagi, dengan catatan, "Rajin-rajin *aja* ngecek milis," kata Puji yang menjadi admin di milis PEH TN Karimunjawa. Rangkaian gurauan mengalir dari kami sambil menyantap hidangan malam itu.***

---------=====000O000=====----------



Nama : Susi Sumaryati, S.Pi, M.Eng
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1977
Riwayat Pendidikan :

- Sarjana Perikanan Universitas Brawijaya tahun 2001
- Double degree Master Program on Graduate School of Science and Engineering, Yamaguchi University dan Magister Perencanaan Kota dan Daerah – UGM Yogyakarta tahun 2011

Tempat kerja : Taman Nasional Karimunjawa

9 Supaya Kami Bisa Terus Bekerja, Berkarya Untuk Hutan Lestari

Supaya Kami Bisa Terus Bekerja, Berkarya Untuk Hutan Lestari

Swiss Winasis

Tulisan ini direview serta diedit oleh semua anggota keluarga PEH Taman Nasional Baluran; rujukan utama dari tulisan Yusuf Sabarno berjudul "PEH TN Baluran: Berkarya Untuk Hutan Lestari"; disusun dari hasil pengalaman empat tahun penulis sebagai PEH Taman Nasional Baluran.

Adakah yang menyangkal bahwa PNS adalah pekerjaan yang bisa jadi sangat diidam-idamkan dan, di sisi lain, banyak juga yang menyumpahinya? Ya, diidam-idamkan karena siapa yang tidak mau kerja santai tapi tetap digaji, tidak dipecat, dapat pensiunan, bahkan tidak menutup peluang mendapat penghasilan sampingan baik dengan cara yang haram maupun halal? Yang jelas saya bukan orang yang menyangkal itu.

Banyak yang menyumpahi karena siapa manusia di negeri ini yang tak pernah berurusan dengan PNS dan dibuat *geregeten* olehnya? Minimal saat membuat atau memperpanjang KTP? Lalu

siapa lagi yang menyangkal jika ada orang bilang kalau PNS itu tidak pernah serius dengan pekerjaannya? Dan sekali lagi saya bukan orang yang mengelak itu.

Ok, memang sudah ada banyak sekali perbaikan dalam tubuh lembaga pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Tapi stigma itu seperti buku sejarah yang dibaca berulang-ulang. Dan saya adalah pembaca setia buku itu. Sampai tibalah waktunya saya membuktikan ke-konon-an itu melalui cara apalagi kalau bukan dengan menjadi PNS?

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Taman Nasional Baluran adalah dua hal yang sama sekali di luar teritori pengetahuan saya. Istilah "PEH" adalah kosakata yang benar-benar baru. Sampai akhirnya Apri Apriyanto, kakak kelas di bangku kuliah dan senior saya di Baluran, yang menjelaskan kepada saya apa itu PEH. Lalu Taman Nasional Baluran, meskipun pernah mendengarnya tapi tidak masuk dalam 10 besar tempat yang diidam-idamkan untuk saya kunjungi. Tentu pertama adalah Papua.

Tapi siapa yang menyangka kalau pada akhirnya dua nama asing itulah yang mengubah definisi saya tentang PNS. Meskipun tidak mengubah seluruhnya, tapi setidaknya kami, PEH Baluran, punya peluang untuk merevisi beberapa bab dalam buku sejarah tentang PNS.

Emang Enak Jadi PEH?

PEH yang dulu bernama Teknisi Kehutanan adalah "anak bungsu" keluarga besar Kementrian Kehutanan. Barangkali di saat yang sama mendapat predikat "anak tiri". Saya artikan begini, paradigma pengelolaan taman nasional masih *menganak-emaskan*


Inventarisasi bekas kebakaran savana (Swiss W)

pendekatan pengamanan dan perlindungan untuk mempertahankan hutan sebagai satuan ekosistem tak terganggu. Terutama sejak pecahnya reformasi 1997 lalu, keamanan adalah harga mati yang harus dibayar mahal. Saat itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seperti batu yang dilepas di ketinggian, terjun bebas, dibarengi dengan pudarnya kewibaan mereka sebagai pelayan publik. Maka tak heran jika masyarakat menempatkan hutan sebagai media pelampiasan "balas dendam". Sialnya, bahkan setelah kondisi politik dan sosial ekonomi masyarakat paska krisis moneter membaik, logika *polisi-maling* ini masih dipertahankan. Akibatnya hutan sebagai sebuah ekosistem hayati kehilangan jati dirinya. Ia menjadi obyek, bukan subyek atas dirinya sendiri yang seharusnya difasilitasi oleh sistem managemen balai taman nasional. Ia seperti sosok makhluk yang sangat rapuh yang seakan-akan harus dipapah supaya bisa berjalan.



Makan malam di Kacip (Swiss W)

Di Taman Nasional Baluran, kondisi ini bertahan hingga akhir 2007. Satu dekade sejak gejolak reformasi itu, yang namanya "perlindungan" dan "pengamanan" adalah nama kramat yang ditaruh di atas cupu logika berpikir tentang pengelolaan hutan. Akibatnya, banyak tupoksi PEH yang tidak bisa dikerjakan dengan baik. Kalaupun ada kesempatan, itupun dihargai dengan "sangat murah". Bagaimana tidak, jika kami memaknai penghargaan atas kerja PEH adalah sebuah angka kredit maka satu nilai kerja hanya seharga nol koma nol sekian-sekian. Tidak percaya? Baca sendiri Kitab Kuning PEH. Padahal jika saya adalah PEH Ahli golongan IIIA dengan modal angka kredit 100, untuk naik satu jenjang

jabatan di atasnya, saya harus mengumpulkan angka kredit 150, yang artinya saya perlu 50 lagi angka kredit. Lalu saya berhitung, 50 ÷ 0,0sekian-sekian itu sama dengan $10^{\text{sekian-sekian}}$ jumlah kegiatan! Selanjutnya silakan hitung sendiri butuh berapa tahun angka 50 itu bisa tercapai?

Tuhan, betapa melelahkan dan berat jalan kami untuk menagih janji para "bapak pejabat" itu yang mengatakan kalau profesi PEH (fungsional) adalah jalan terbaik untuk berkarir di instansi Kementerian Kehutanan. Dan jalan berat itu harus kami lalui dengan cara menerobos hutan, menaiki gunung Baluran, tertusuk duri akasia, kepanasan sampai kulit menghitam, kehujanan dan kemalaman di hutan, ban motor bocor di hutan, dihajar nyamuk, dan yang paling menyakitkan adalah meninggalkan istri sendirian di rumah! Pada saat yang sama, kawan-kawan non fungsional yang kebanyakan bekerja di ruang ber-AC tak harus mengumpulkan angka kredit sebanyak itu untuk bisa naik pangkat. Mereka hanya butuh empat tahun saja!

Tidak, saudara-saudara, kami tidak sedang iri dengan sesama kawan. Meski tak memungkiri, kadang rasa jengkel merajai isi kepala. Kami juga tidak sedang mencari musuh bersama, apalagi mengingkari nikmat Tuhan. Betapapun Kami hanya mencoba menaruh kesadaran di atas ubun-ubun kepala bahwa mungkin ini metode yang dipilih Tuhan untuk menemukan jati diri kami sebagai PEH. Ini adalah tugas dan tugas adalah amanah, dan amanah wajib ditunaikan! Walaupun, sekali lagi, ada saja yang merasa dijadikan "kelinci percobaan".

Suatu kali, seorang kawan Siswo Dwi Prayitno menjadi frustasi dengan proses kenaikan pangkatnya yang sangat lama. Proses yang

"super sulit" itu seolah membelitnya. Akhirnya dia memilih pindah menjadi polhut pada 2003 lalu. Keputusan yang tak terduga!

Tujuh tahun dia habiskan waktunya sebagai PEH terampil golongan IIA. Alasannya sangat sederhana, "Menjadi polhut golongan II lebih enak mengurus DUPAK karena proses penilaiannya hanya di balai, sedangkan PEH, apapun golongannya, harus berurusan dengan tim penilai DUPAK di pusat yang sesungguhnya tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan," ujarnya. Saya bisa membayangkan, betapa menyakitkan ketika jerih payah pekerjaan itu tak mendapat perhatian yang semestinya.

Melihat kondisi psikologis seorang kawan seperjuangan yang terpukul bak dirundung awan gelap bulan Februari, membuat kawan-kawan yang lain menjadi serba sulit. Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu menyelesaikan masalahnya? Sebagai sesama bawahan, hanya dengan terus memberi semangat dan dorongan supaya Siswo urung pindah menjadi polhut saja yang bisa kami lakukan.

Ada satu kalimat dari Pak Yusuf Sabarno - yang beberapa tahun kemudian menjadi koordinator PEH Baluran- kepada kawan-kawan , "Jangan kuatir teman-teman semua, saya janji suatu saat nanti kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik!" Bergetar dada saya mendengar kalimat itu.

Bahwa PEH Adalah Organisasi, Itu Wajib!

Pada tahun 2003 makin banyak peneliti, mahasiswa praktik lapangan dan kegiatan eksplorasi hayati lainnya yang datang ke Taman Nasional Baluran. Banyak dari mereka yang membutuhkan pemandu di lapangan, asisten lapangan atau sekedar pra-observasi

melalui diskusi perihal site study yang akan diambil. Kawan-kawan PEH mulai menyadari bahwa kemampuan teknis eksplorasi hayati sangat dibutuhkan.

Ada beberapa pertanyaan tentang wilayah kerja PEH, "Apa penelitian juga masuk dalam pekerjaan PEH?". Tidak salah-salah juga pertanyaannya. Karena pada saat output-output kegiatan diperlukan sebagai referensi ataupun acuan pengelolaan maka kaidah-kaidah keilmuan harus ada. Mulai dari merumuskan masalah, memilih ruang lingkup penelitian, menentukan metode, teknik analisa sampai ke kesimpulan.

Ada juga yang mengatakan, "PEH kan pekerjaannya bukan penelitian, karena itu pekerjaannya peneliti atau akademisi". Yang ini ada betulnya juga, karena memang praktisnya di lapangan yang dibutuhkan adalah semacam respon cepat terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Maksudnya, ada kalanya peneltian itu menjadi makruh karena membutuhkan waktu yang lama, di sisi lain permasalahan yang ada bersifat darurat dan membutuhkan penanganan segera. Tapi kita sepertinya semua sepakat meletakkan pemahaman terhadap PEH seperti yang diutarakan Suwono, anggota PEH Baluran terbaru, "Banyak pihak berpengharapan tinggi, kalau nggak malah ketinggian, berkaitan output-output dan cakupan pekerjaan PEH".

Kawan-kawan PEH yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan itupun melihat bahwa satu-satunya jalan untuk menunaikan amanah ini harus diawali dengan belajar. Bersama dengan para senior, proses belajar *learning by doing* pun mereka jalani. Pelan tapi pasti, akhirnya penguasaan pengetahuan dan pengalaman dalam mengenal berbagai potensi keanekaragaman

hayati di kawasan Taman Nasional Baluran semakin meningkat. Ini salah satu langkah awal menuju keberhasilan dalam menunaikan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diamanahkan. Insya Allah, amiinn.

Namun, prestasi ini tentu belum cukup. Kemampuan personal ini harus difasilitasi dengan baik supaya berfungsi optimal dalam tubuh Organisasi Balai Taman Nasional Baluran. Bagaimanapun juga PEH bukan satu-satunya kelompok kerja dalam institusi ini. PEH Baluran harus mengformat dirinya menjadi sebuah entitas yang tak lagi "Aku" tapi "Kami" sebagai strategi komunikasi ke luar. Dan "Kita" sebagai entitas dalam internal tubuh PEH. Untuk itu, PEH Baluran harus di-organisasikan!

Saya tidak bisa membayangkan kalau saja ada PEH yang bisa mengamalkan semua "amalan" yang tercantum di Kitab Kuning dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada, sumpah dia pasti ada keturunan dengan Avatar! Pasti dia menguasai semuanya, mulai pengelolaan kawasan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, sampai dengan pengendalian kebakaran dan rehabilitasi kawasan. Bisa jadi dia juga mengenal hampir semua bentuk species laut, air, darat dan gunung di kawasannya; mulai tumbuhan tingkat rendah sampai tinggi; mulai satwa kelas insekta, pisces, reptil, sampai mamalia. Jadi kalau sampai ada orangnya, bisa jadi otaknya lebih encer dari bapak ilmu botany Theophrastus, lebih gila dari ahli taksonomi Carl Linnaeus, bahkan lebih kontroversial dari Charles Darwin. Atau jangan-jangan dia lebih sakti dari Arya Kamandanu! Artinya, tidak ada orang, sebagai individu, di seluruh kolong jagad Kementerian Kehutanan yang bisa mengamalkan semua ayat-ayat dalam Kitab Kuning PEH.



Personil PEH Balai TN Balikuran di depan ‘basecamp’-nya (Swiss W)

Organisasi adalah satu-satunya alasan logis kawan-kawan PEH Baluran waktu itu untuk mewujudkan kebersamaan visi, misi dan langkah sebagai kelompok fungsional PEH yang menanggung amanah besar dalam tubuh mereka. Dan berkumpulah mereka di awal 2005 untuk mengukir mimpi dan cita itu. Saya sendiri masih belum menjadi bagian dari moment monumental itu. Tahun 2005 saya masih *beredar* di Yayasan Kutilang Indonesia dan insyaAllah masih belum punya niat untuk jadi PNS.

Ada beberapa prinsip yang ingin dibangun oleh PEH Baluran pada waktu itu. Pertama semangat ingin menjalankan amanah yang tertuang dalam tupoksi PEH sebaik mungkin. Lalu apa itu tupoksi PEH? Ya apa lagi kalau bukan “mengendalikan” ekosistem hutan. Benar-benar pekerjaan yang citarasanya seperti “menantang” alam, karena harus bisa mengendalikan. Tapi apapun itu, siapa lagi yang akan bertanggung jawab mengurusi tiap detil potensi hayati mulai



Selam balanan (Swiss W)

dari Banteng yang gegap gempita sampai bekicot, kupu-kupu atau cacing pipih yang "sepele" itu. Boleh percaya atau tidak, kami pernah mengagendakan kegiatan mengkaji keberadaan cacing pipih sebagai spesies yang berpotensi menjadi jenis invasif di Baluran. Memang terdengar sangat sepele, tapi karena tupoksi kami sebagai

PEH yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam hutan Baluran,membuat kami tidak boleh pilih kasih *kan*?

Kedua, kesadaran ketika PEH menjadi solid, dapat bekerjasama dengan baik dan berkegiatan secara ter-organisir akan mendukung karir dalam penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Karena bagi Kementerian Kehutanan, dan tentunya kementerian-kementerian lainnya, kelancaran pengajuan DUPAK merupakan indikator penilaian kinerja fungsional. Meskipun siapa saja di negeri ini berhak menggugat sistem penilaian itu. Karena sistem ini tak sedikitpun punya mekanisme untuk mendeteksi apalagi menindak para fungsional yang hanya handal menyusun DUPAK di atas meja, bukan berdasar aktifitas nyata yang mereka lakukan di lapangan.

Kami tidak ingin hal itu terjadi pada PEH Baluran. Serusak-rusaknya PEH Baluran yang telat menyusun DUPAK sampai bertahun-tahun, atau angka kreditnya *seret* merayap, setidaknya kami tidak menjadikan DUPAK sebagai tujuan utama sehingga menghalalkan segala cara. Lapanganlah rumah kedua kami. Dua puluh lima ribu hektar hutan Baluran adalah sawah bagi padi-padi rejeki kami, dan keringat adalah bukti nyata produktifitas kami. DUPAK tak lebih dari media komunikasi dengan para "dewa" penentu nasib meskipun mereka tidak kenal siapa kami. Semoga mereka paham, tiap tetes keringat orang-orang lapangan seperti kami di seluruh penjuru negeri ini punya hak untuk dihargai yang sepantasnya. Maksud saya, *mbok* jangan nol koma nol lagi gitu lo!

Ketiga, semangat kebersamaan yang mengesampingkan ke-"Aku"-an masing-masing personil. Semangat ini coba ditanamkan, melihat sistem organisasi balai pada saat itu. Ada kecenderungan

belum dapat menempatkan "sesuatu" dan "seseorang" secara proporsional sehingga muncul istilah orang yang "dipakai" dan "tidak dipakai" oleh organisasi balai, apapun itu faktor penyebabnya.

PEH Baluran berusaha dan berkomitmen untuk menjadikan "Kami" adalah PEH, bukan "Aku" adalah PEH. Walaupun tetap masing-masing kami itu senantiasa berusaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam berbagai hal sebagai upaya meningkatkan nilai dan posisi tawar PEH secara "organisasi" di dalam organisasi Balai Taman Nasional Baluran. Di satu sisi, untuk mewujudkan itu bukan tanpa kendala, akan tetapi sebisa mungkin kendala tersebut dikelola sehingga minim dampak.

Mungkin yang perlu saya luruskan di sini adalah, mengorganisasikan PEH bukan berarti membuat organisasi tandingan dalam tubuh besar Balai Taman Nasional Baluran. Kawan-kawan tidak sedang membuat struktur tandingannya Seksi Pengelolaan Wilayah atau Resort Pengelolaan Wilayah atau apapun itu. Barangkali organisasi ini boleh disebut sebagai media untuk belajar berbagi tugas (memimpin dan dipimpin) dan berbagi tanggung jawab, berkomunikasi dan berkoordinasi. Adalah sebuah keuntungan aksesibilitas antar wilayah di Taman Nasional Baluran dimana sebagian besar kawan-kawan PEH ditugaskan membuat proses belajar ini lebih mudah.

Dan akhirnya, ide berorganisasi berdasarkan ketiga prinsip itupun menjelma menjadi organisasi yang sederhana. Terdiri dari seorang koordinator yaitu Yusuf Sabarno, sekretaris Arif Pratiwi dan bendahara Agus Yusuf. Delapan sisanya adalah pemandu sorak: Sutadi, Yusuf Hernawan, Widyantoro, Achmad Toha,

Mochammad Iqbal, Siswo Dwi Prayitno dan Nanang Dwi Wahono beserta istri tercintanya Nia Diana –sayang sekali, nama saya waktu itu belum masuk dalam daftar para pemandu sorak-. Nampaknya, pemandu sorak menjadi pilihan saya untuk menyebut ini karena tanpa kehadiran mereka tak akan ada keceriaan dan ringan tangan dalam bekerja.

Organisasi: Leadership Adalah Kunci, Kebersamaan Anggota Adalah Pemegang Saham Terbesar

Dalam bab ini saya minta maaf kepada bapak-ibu sekalian jika saya terlalu emosional membahas betapa pentingnya peran leadership dalam tubuh organisasi. Emosional yang pertama adalah apresiasi setinggi-tingginya untuk koordinator kami, Pak Yusuf Sabarno. Sebagai seorang pemimpin ia sudah *komplit*! Cakap berkomunikasi, rendah hati, lembut, visioner, dan memiliki akhlak yang –menurut penilaian saya- sudah sampai pada level *ahlaqul karimah*. Sedangkan para pemandu sorak lainnya, termasuk saya, juga berakhlak tapi *ahlaqul usilah* dan *ahlaqul guyoniyah*! Dan yang paling usil itu siapa lagi kalau bukan Agus Yusuf, Nanang Dwi dan kalau katanya kawan-kawan berikutnya adalah saya! Tentu saya menyangkal tuduhan kejam itu.

Satu hal yang paling saya ingat dengan baik dalam ingatan, ketika memberi perintah kepada anggotanya, ia tidak pernah berlaku layaknya sedang memerintah. “Maaf Pak Swiss, saya bisa mengganggu *nggak*? Saya boleh minta tolong dibantu menyelesaikan laporan bulanan?” Ya Allah, beruntunglah Bu Yusuf yang telah mendapatkan hatinya.

Ia hampir tidak pernah menyuruh anggotanya ke lapangan kecuali turut serta kecuali jika memang ada keperluan di kantor

yang tidak bisa ditinggalkan. Ia tidak pernah mengambil keputusan kecuali didiskusikan dulu dengan anggotanya. Tiap rapat bulanan PEH, ia selalu mempersilahkan siapa saja kawan-kawan PEH yang bersedia memimpin rapat. Atau hal yang sangat sepele, di setiap sms koordinasi yang dikirim ke semua anggotanya hampir selalu dibuka dengan kalimat: "Assalamu'alaikum. Teman-teman PEH yang baik…" atau "Teman-teman PEH yang cakep-cakep…" atau "Teman-teman PEH yang selalu bersemangat…" dan masih banyak lagi.

Di saat kawan-kawan PEH, apalagi saya, kalau bicara selalu dibumbuhi kosakata *pisuhan* terminal, tidak pernah sekalipun saya dengar kata-kata kasar terucap dari mulutnya. Atau di saat kawan-kawan PEH, siapa saja, hobi *mengusili* orang lain dengan segala macam teknik dan metode, saya tidak pernah melihat beliau melakukan hal yang sama. Yang bisa beliau lakukan hanya beristighfar melihat akhlak umatnya yang *usilah*-nya keterlaluan itu.

Pernah suatu ketika beliau sedang ulang tahun. Dan kebetulan waktu itu berbarengan dengan kegiatan transplantasi karang. Kami mulai merancang rencana jahat untuk "menghabisi"-nya. Rencananya adalah, karena ini kegiatan di laut, setelah naik dari laut biarkan Pak Yusuf mandi dulu. Usai berganti baju kering, baru kita hajar. Dan rencana itupun berhasil dilaksanakan dengan baik tanpa ada perlawanan yang berarti. Tepung terigu, telor ayam, kecap, kopi, rendaman ikan semuanya ditumpahkan di atas kepala nya. Dan anda tahu apa responnya? Ia hanya berkata, "Sudah? Kalau sudah bolehkah saya mandi lagi?" yang diucapkan bersama dengan senyuman yang sangat ramah dan tanpa terlihat sedikitpun rasa marah. Selesai mandi, jabat tangan dan pelukan menghujaninya. Ia begitu sabar, bahkan ketika marah, kami yang dimarahi ini tidak pernah sekalipun merasa sakit hati atau setidaknya tersinggung.

Akan sangat panjang kalau saya harus menceritakan siapa koordinator kami dan bagaimana ia memposisikan diridi tengah-tengah keluarga PEH Baluran. Satu kata yang semoga bisa menampung segala persepsi dan deskripsi gaya kepemimpinannya adalah TAULADAN! Ya, ia adalah koordinator yang berhasil menjadi tauladan bagi kami semua.

Lalu dimana peran dan tanggung jawab personil PEH lainnya sebagai pemegang saham terbesar organisasi ini? Pak Yusuf mengatakan, "Ternyata mengawali sesuatu yang belum ada menjadi ada adalah suatu hal yang penuh tantangan, baik berasal dari dalam maupun luar organisasi." Dari dalam organisasi, tantangan internal yang pertama kali harus diselesaikan adalah belum terbiasanya kawan-kawan dengan pola pengorganisasian yang baru sehingga menyebabkan tugas dan tanggung jawab yang diemban belum berjalan semestinya. Tentu, ini membutuhkan proses pembiasaan yang terus menerus.

Metode teknis proses pembiasaan yang paling mujarab itu adalah bersama-sama ke lapangan di setiap jadwal kegiatan yang sudah direncanakan. Saya diterima bekerja di Taman Nasional Baluran tahun 2008. Tidak lama setelah itu, saya langsung diajak jalan ke lapangan. Kebetulan waktu itu adalah kegiatan survey mangrove di SPTNW II Karangtekok. Hampir seharian –selama dua hari -kami berjalan menyisir hutan mangrove. Diserbu nyamuk dan berendam di air laut setinggi dada adalah catatan pertama saya sebagai PEH Baluran. Dan perlu diketahui, ini bukan kegiatan yang didanai DIPA. Tidak ada lunsum, atau uang transport. Hanya jatah makan siang yang itupun diperoleh dari uang hasil iuran kawan-kawan yang dikelola dalam bentuk kas PEH.

Sambil mengulur pita meter, mencatat data, sesekali kami ngobrol-ngobrol ringan atau saling *ngledekin* satu dengan yang lainnya. Saat istirahat makan siang, kami selingi dengan bersenda gurau sambil saling mengingatkan siapa yang belum buat laporan, menyetorkan data kegiatan sebelumnya atau sharing informasi terbaru. Kegiatan lapangan yang dikerjakan bersama-sama menjadi media komunikasi yang paling penting. Selain itu juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan sehingga dengan sendirinya menjadi *self-reminder* terhadap jatah tugas dan tanggung jawab.

Metode pembiasaan lainnya, yang sama pentingnya, adalah rapat rutin bulanan. Sejak tahun 2005 PEH Baluran sudah memiliki program kegiatan tahunan yang pada tiap bulan berjalan diadakan diskusi tentang hal-hal teknis pelaksanaannya. Penyusunan program kerja tahunan itu dilakukan setiap akhir tahun periode sebelumnya atau awal tahun berjalan. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa semua peserta forum rapat punya hak yang sama untuk mengusulkan kegiatan. Juga kewajiban dan tanggung jawab yang sama pula untuk menjalankannya. Pun seorang koordinator tidak punya wewenang untuk membatalkan usulan anggota atau memaksakan usulannya sendiri. Dengan adanya program kerja yang berasal dari masing-masing personil akan menjadikan kami tidak punya alasan melarikan diri dari program yang sudah disusun dan sepakati bersama.

Proses *learning by doing* yang dulu dijalani kawan-kawan ini lambat laun menunjukkan dampak positif. Masing-masing personil PEH dengan sendirinya menemukan ketertarikan pada beberapa bidang -meskipun ada juga yang sudah membawa modal pengetahuan dan skill ketika kami masuk ke Baluran. Kalau bicara tentang Banteng maka Pak Yusuf-lah orang pertama yang harus

ditodong. Memang kalau namanya bos ya urusannya harus dengan sesama *Bos* (*javanicu*s). Bu Arif Pratiwi (Tiwi) membidangi kelautan beserta semua yang ada di dalamnya sesuai dengan disiplin ilmu nya semasa kuliah. Lain halnya dengan Pak Widyantoro sang pawang ular. Pak Nanang dan Pak Yusuf Hernawan (Ucup) para pendekar flora. Pak Toha dan Pak Sutadi (Tedi) sebagai pengamat burung yang piawai. Ada lagi Mochammad Iqbal memilih dunia digital, fotografi dan membidangi sosial masyarakat. Bahkan Pak Siswo yang sempat desersi menjadi informan utama tentang segala sesuatu yang terjadi di SPTNW II Karangtekok. Jeng Nia yang pawai dalam managemen *base camp* bersama Bu Arif Pratiwi menjadi tukang tagih laporan. Dan Agus Yusuf yang sejak punya lisensi menyelam menahbiskan dirinya sebagai "Gurita Membabi Buta". *Eureka!*

Tahun berganti tahun, rejeki bertambah nasib berubah. Pak Yusuf dikaruniai rejeki beasiswa S2 dari PHKA. Pembentukan divisi-divisi baru tahun 2010 oleh Pak Indra Arinal selaku kepala balai membuat stok tenaga PEH harus didistribusikan lebih merata. Bu Tiwi, dan Bu Nia menempati pos baru yaitu Divisi Pelayanan Pengunjung. Pak Iqbal yang sebelumnya *nyambi* sebagai PPK (Petugas Penarik Karcis) mau tidak mau harus ngepos di Visitor Center sebagai kantor divisi ini. Pak Ucup dinaikkan "derajatnya" menjadi Kepala Resort Labuhan Merak. Pak Siswo menjadi "wakil" Kepala Seksi SPTNW II Karangtekok. Lainnya tetap bertahan di posnya masing-masing. PEH sendiri secara tidak langsung diidentikkan sebagai Divisi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati.

Kekosongan kursi koordinator dan perubahan peta personil harus disikapi segera dengan restrukturisasi. Perubahannya sederhana: mencari pengganti Pak Yusuf atau lebih tepatnya mencari korban yang tepat sebagai koordinator.

Organisasi PEH yang sudah terbentuk pada hakikatnya lahir secara organis dari keinginan kawan-kawan PEH. Dari kejumudan hari-hari mereka oleh sistem manajerial yang *status quo*, dan optimisme serta harapan besar menemukan jati diri sebagai seorang Pengendali Ekosistem Hutan. Tidak ada perintah, SPT ataupun SK pimpinan tertinggi waktu itu untuk membentuk organisasi PEH Baluran. Saya sendiri terus memprovokasi kawan-kawan untuk segera mengadakan pemilu agar kursi kepemimpinan jangan kosong terlalu lama. Dan yang lebih penting lagi, tampuk koordinator harus orang-orang PEH yang menentukan. Jangan sampai koordinator yang baru lahir oleh keputusan dari "langit" yang pada akhirnya mencederai sejarah bagaimana proses organisasi ini dulu dibentuk. Maka duduklah kami ber-sebelas pada Oktober 2010 untuk memilih koordinator baru secara demokratis.

Singkat kata, koordinator baru itupun terpilih. Adalah Nanang Dwi Wahono yang menjadi "korban" untuk memegang kursi Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Baluran. Terpilihnya Pak Nanang sebagai koordinator yang baru adalah simbol egalitarian dalam tubuh PEH Baluran, bahwa kami punya hak yang sama dalam berkarir, berekspresi, beraktualisasi dan memilih istri atau suami.

Pak Nanang adalah PEH Pelaksana golongan II d. Adakah koordinator PEH di jagad Kementrian Kehutanan yang bergolongan II? Bukannya kami kekurangan stok golongan yang lebih tinggi untuk dikorbankan menjadi koordinator seperti layaknya koordinator-koordinator PEH di banyak UPT, tapi itulah PEH Baluran dengan segala kesetaraan dan *mainset out of the box*. Bahkan nama besar UGM yang saya bawa tidak berarti apa-apa di sini. Karena kualifikasi kami untuk koordinator bukan dari pangkat, golongan apalagi nama

besar kampusnya., tetapi lebih pada kompetensi, komitmen dan kemampuan kerja di lapangan. Dan yang lebih penting lagi diridhoi oleh kawan-kawan seperjuangannya. Saya pribadi sangat senang dan bangga menjadi bagian dari proses yang sangat demokratis ini.

Sedikit tentang koordinator baru ini. Pak Nanang adalah salah satu contoh PEH yang murni menjalani proses belajar di lapangan. Lulusan SKMA yang masuk ke Taman Nasional Baluran tahun 2000 ini menjalani proses pembelajaran di sela-sela waktu piket jaga di Resort Bama. Mendalami seluk-beluk flora adalah pilihannya. Tidak jarang buku-buku tebal dibawanya berangkat piket ke resort yang berjarak 15 km dari pintu gerbang kawasan itu.

Berikutnya, perjalanan PEH Baluran terlihat lebih berat yang tentunya menuntut kerja keras koordinator baru kami. Bukan hanya karena semakin tersebarnya personil PEH di beberapa pos baru karena tenaga mereka sangat dibutuhkan. Bahkan kawan-kawan yang masih berada di pos yang sama juga harus siap kerja ekstra karena kompetensi mereka sangat diperlukan. Pak Siswo, bisa dibilang memegang peran penting di wilayah kerjanya, SPTNW II Karangtekok, sebagai "tangan kanan" kepala seksinya, Pak Andik Sumarsono. Apalagi sejak Pak Andik mendapat tugas belajar di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Siswo adalah *care taker*-nya Karangtekok karena PLT dipegang KSBTU yang notabene harus konsentrasi di kantor yang jaraknya berjauhan dengan kantor seksi.

Mang Ucup (Pak Yusuf Hernawan) yang sejak menjabat kepala Resort Labuhan Merak menerapkan kebijakan baru di wilayah kerjanya membuat banyak pelanggar hutan mati kutu. Resort Labuhan Merak bisa dibilang adalah wilayah paling rawan terhadap praktik pelanggaran hutan. Kasus demi kasus pelanggaran hutan

berakhir di meja hijau. Karena ketegasannya, bahkan membuat Pak Mantri ini sampai mendapat ancaman pembunuhan!

Bu Tiwi dan Bu Nia di Divisi Pelayanan Pengunjung menjalani hari-hari sibuknya. Dalam dua tahun terakhir, pemasukan PNBP dari tiket kunjungan ke Taman Nasional Baluran meningkat lebih dari 100%. Dibantu oleh beberapa staff di divisi ini, bisa dibayangkan bagaimana mereka meladeni pengunjung dengan beraneka macam karakter dan kemauan.

Pak Toha, Pak Tedi dan Pas Agus Yusuf yang menggawangi "ibu kota" Baluran, Bekol dan sekitarnya, terus bergantian piket tiga hari dua malam, dua kali per minggu. Ditugaskan di pusat perhatian dan keramaian tentunya membutuhkan energi lebih.

Dan Pak Nanang, sebagai coordinator PEH dan Kepala Divisi Sumberdaya Alam Hayati membuat dia harus sedia *puyer* sakit kepala tiap hari. Menu utama hariannya: kantor-lapangan-kantor-lapangan; meladeni request mendadak kepala balai, dan tidak jarang harus dimarah-marahi segala; laporan-laporan sudah pasti; mengkoordinir kawan-kawan PEH; meladeni mahasiswa-mahasiswa PKL yang selalu berjibun di awal tahun.

Tapi namanya juga organisasi yang terbentuk secara organis, inisiasi-inisiasi intuitif pun terbentuk dengan sendirinya. Sutadi atau panggilan kerennya Tedi bahkan kami juluki sebagai KSBTU-nya PEH karena kepiawaiannya dalam mengurus DUPAK. Dan dia tidak segan membantu kawan-kawan untuk meyelesaikan urusan DUPAK bahkan sampai ke pusat. Tapi bukan borongan terima order pembuatan DUPAK lo ya. Saya adalah salah satu orang yang harus berterima kasih untuk si bapak KSBTU ini.

Atau Agus Yusuf, si pembuat masalah sejati ini. Jaringannya yang luas dengan para sopir truk, sopir buah, tukang batu sampai preman kampung membuat kami tidak kesulitan jika membutuhkan tenaga tambahan non-eksplorasi di lapangan. Dia adalah orang yang sangat lihai dan telaten dalam mengurusi pekerjaan-pekerjaan non-eksplorasi yang selama ini luput dari perhatian kami. Dan justru itulah kehebatan nya tidak tergantikan oleh orang lain.

Berkah terakhir kami di tengah-tengah kurangnya SDM adalah masuknya PEH baru, Suwono dan satu staff yang jelas-jelas bukan fungsional, Andy Effendy. Suwono punya keahlian yang bagus dalam urusan Sistem Informasi Geografi. Posturnya yang gagah sepertinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengejar sampai memukul roboh pelanggar segede apapun tuuhnya. Dan Andy adalah orang yang cepat beradaptasi dengan pola kerja kami dan tentunya tabiat usil kawan-kawan. Bahkan sangking lihainya beradaptasinya dengan PEH membuatnya ingin sekali pindah jabatan menjadi tenaga fungsional PEH. "Sesuatu yang nyaris mustahil kecuali dia adalah keponakannya Menteri!" Kata Pak Indra. Ya sudah terima saja, rejekimu memang cuma segitu.

Berdamai Dengan Keterbatasan: Semua Masalah Pasti Ada Solusinya

Tahun 2000-2007 bisa dibilang sebagai masa-masa sulit PEH Baluran. Meskipun dalam struktur organisasi balai jelas-jelas ada Kelompok Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dipimpin oleh seorang koordinator, namun itu hanya sekedar "gugur kewajiban". Dukungan balai terhadap berjalannya tupoksi PEH sangat tidak signifikan. PEH dipandang sebagai personal-personal mana yang bisa "dipakai" dan mana yang tidak masalah "dibiarkan".

Pola managemen yang berat sebelah tetap tidak menyurutkan perjuangan untuk meningkatkan eksistensi PEH. Tahun 2003 kawan-kawan rela kerja bakti membersihkan gudang guna memiliki sebuah *base camp*. Setelah gudang bersih dan mulai difungsikan sebagai ruang berkumpul dan berkoordinasi tiba-tiba balai mengeluarkan perintah untuk mengkosongkan *base camp* karena mau digunakan untuk keperluan lain yang "lebih penting". Jadilah kami kelompok manusia nomad yang harus berpindah-pindah *base camp* bahkan sampai beberapa kali hingga tahun 2007.

Seperangkat komputer baru diperoleh tahun 2008, itupun setelah beberapa kali kawan-kawan meminta dengan sedikit paksaan. Sarana transportasi, berapapun jumlah rodanya, hanya sebuah motor tua RX-spesial yang mau parkir di depan *bas camp*. Padahal kalau melihat kondisinya, saya pribadi lebih memilih naik becak. Dan baru 2011 mendapatkan *lungsuran* TS-100 untuk membantu aktifitas di lapangan di bawah tanggung jawab koordinator. Kalaupun ada roda empat untuk mengangkut kami bersebelas, yang paling bisa dipinjam adalah Daihatsu Hi-Line tua bak terbuka dengan chasis-nya yang sudah pada aus. Mau tidak aus bagaimana, saat mobil sedang berjalan tiba-tiba knalpot lepas. Bemper copot itu juga sudah biasa. Keluar masuk *kokpit* harus lompat lewat kaca jendela. Baut pengunci suspensi hilang. Dan yang paling parah baut gardan yang tinggal separuh. Itu semua masih belum termasuk kalau kita harus "rebutan" sama Pak Sukadi. Dia adalah staff bagian *maintenance*. Mobil dengan kondisi layak yang paling mungkin dipinjam hanya Isuzu D-Max. Itupun juga "kepunyaan" Divisi Pelayanan Pengunjung. Untung kepala divisi ini masih sesama PEH sehingga tidak terlalu banyak masalah yang berarti untuk meminjamnya. Mobil-mobil itu baru bisa kami akses setelah 2010.

Akhirnya, kendaraan yang paling pantas untuk digunakan tidak lain adalah motor pribadi. Bukannya kami manja ingin difasilitasi selengkap mungkin, tapi saya rasa ekspektasi besar balai terhadap peran dan kinerja PEH sudah seharusnya diimbangi pula dengan perhatian yang diberikan. Tentu itu bukan masalah bagi kami, pun tidak mau dipusingkan dengan hal-hal semacam itu. Karena kami harus sadar bahwa semua keterbatasan itu adalah bagian dari proses yang pasti dihadapi.

Perhatian dan fasilitas yang belum memadai tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Keterbatasan adalah sahabat, dan kami harus berdamai dengannya. Minimnya dana untuk mendukung program-program pengelolaan kehati membuat kami harus merebut posisi sebagai *second layer* di bidang itu. Kegiatan-kegiatan kehati yang didanai DIPA dalam satu tahun mungkin hanya 2-3 judul, dan yang pasti sifatnya keproyekan: parsial dan tidak berkelanjutan. Sehingga program kerja tahunan PEH adalah salah satu solusi yang kami ambil sebagai *second layer* itu.

Mengingat program kerja terdiri dari banyak item kegiatan, di sisi lain dukungan dari balai sangat minim waktu itu, kawan-kawan bersepakat mengorbankan sebagian lunsum dari kegiatan yang diikuti yang kemudian dikelola dalam bentuk kas PEH. Bahkan, kawan non-fungsional Apri Aprianto, tidak jarang dia ikut meyumbang uang pribadinya untuk kas PEH. Tidak besar jumlahnya, setidaknya cukup untuk beli makan siang dan sebotol air mineral di setiap pelaksanaan program kerja PEH. Jika ada kelebihan dana, kami gunakan untuk mengadakan seminar kecil-kecilan di balai dalam rangka sosialisasi hasil kegiatan akhir tahun. Pun kalau masih ada sisa dana bolehlah dipakai untuk membuat seragam PEH, beli tas lapangan atau mengganti uang bensin. Bahkan uang kas PEH ini

sesekali disulap menjadi koperasi simpan-pinjam bagi kawan-kawan yang membutuhkan dana cepat. *Alhamdulilah* proses tirakat ini mendapat respon positif saat kepemimpinan Pak Kuspriyadi dengan ada alokasi anggaran operasional fungsional PEH tahun 2009.

Saya pribadi senang bukan kepalang karena begitu mulai kerja di Baluran tahun 2008 sudah tersedia seperangkat kamera dengan lensa super tele. Alat yang menuntun saya dan beberapa kawan menemukan berlian yang lama terpendam: burung!

Adanya program tahunan yang kami inisiasi sejak 2005 sedikit banyak mampu menutup celah-celah data maupun aspek-aspek kehati yang tidak tersentuh oleh kegiatan keproyekan. Atau lebih tepatnya tidak cukup "seksi" untuk didanai. Paling tidak dalam satu bulan ada empat judul kegiatan yang dilakukan. Akan sangat banyak sekali jika saya sebutkan macam-macam kegiatan dan output data apa saja di tulisan ini. Tapi kalau boleh saya sebutkan satu-dua contoh data *time-series* yang diperoleh, misalnya dinamika perkembangan rumput di savanna Bekol. Atau siklus pembungaan beberapa jenis pohon di sepanjang jalan Batangan-Bekol. Dinamika pergerakan Banteng di sepanjang sungai Bajulmati dan kubangan-kubangan alami di sepanjang pantai timur Baluran. Efektifitas perlakuan pemberantasan akasia sejak tahun 2004. Update keanekaragaman burung beserta persebarannya dari tahun 2008-2011. Dan masih banyak lagi.

Beberapa data dasar (*baseline data*) juga tidak luput dari bidikan program kerja. Data dasar yang dimaksud adalah data yang belum pernah tercatat sejak Taman Nasional Baluran berdiri. Jenis-jenis mangrove di sepanjang garis pantai Baluran sepertinya sudah mencapai jumlah maksimal, ada 27 jenis yang tercatat.

Keanekaragaman kupu-kupu meskipun masih memungkinkan bertambah, sejauh ini sudah mencapai 160 jenis. Ada juga jenis-jenis ikan karang yang sudah mencapai 110 jenis, dan masih bisa bertambah pula.

Data-data itu, *time-series* dan *baseline data*, bukan kemudian menjadi milik PEH semata. Mereka terbuka untuk diakses siapa saja. Terutama bagi kepentingan pengelolaan Taman Nasional Baluran melalui program kerja balai. Beberapa peneliti, mahasiswa praktek lapangan atau sekedar acara televisi alam bebas hampir dipastikan selalu berurusan dengan data-data itu. Capaian-capaian ini pada akhirnya memberi dampak positif yang signifikan terhadap posisi tawar PEH di lingkup balai. Sampai pada titik ini, menjadi *second layer* dalam pengelolaan kehati, bukan berarti tanpa strategi. Ada beberapa strategi yang harus kami lakukan.

Strategi pertama, mengubah paradigma kegiatan *by project* menjadi kegiatan rutin yang terprogram. Hal ini cukup sulit dan membutuhkan pendekatan personal yang cukup lama. Bagaimanapun juga kegiatan keproyekan selalu ada angka-angka dalam rupiah yang diterima, sedangkan kegiatan rutin PEH –separah-parahnya- berarti justru keluar uang pribadi.

Kedua, melakukan konsolidasi "bawah tanah" dan menggalang dukungan dengan dari berbagai komponen yang ada, terutama kepala balai beserta pejabat esselon di bawahnya. Komunikasi yang intensif dan selalu memberi *progress report* rencana dan capaian yang dihasilkan terus kami dorong. Sedangkan untuk menggalang dukungan dari "sesama bawahan" dilakukan melalui sosialisasi dan jejak pendapat. Tentu media sosialisasi dan jejak pendapat itu tidak harus dalam bentuk lembaran kuisioner atau poster-poster. Tidak

jarang beberapa personil non-PEH kami libatkan di setiap kegiatan bulanan sehingga diharapkan mereka memiliki pengalaman dalam kegiatan-kegiatan PEH.

Ketiga, melakukan konsolidasi dan sosialisasi terbuka, tentunya atas persetujuan pimpinan. Strategi ini dilakukan dengan dua cara, mengadakan pertemuan tingkat balai untuk memaparkan program kerja PEH satu tahun ke dapan dan mengadakan Seminar Hasil Kegiatan-kegiatan PEH satu tahun yang lalu. Dari kedua metode sosialisasi tersebut diharapkan ada masukan, kritik dan saran yang kami gunakan sebagai bahan evaluasi untuk program-program berikutnya. Tapi sayang, padatnya kegiatan kawan-kawan, selama hampir tiga tahun terakhir kedua agenda ini tidak terlaksana. Semoga tahun ini bisa kita usahakan pelaksanaannya.

Keempat, menetralisir stigma-stigma negatif yang dihembuskan para *free rider* yang merasa tidak nyaman dengan kemajuan yang dicapai oleh PEH. Memang sepele, tapi sialnya, itu tidak bisa dihindari pasti terjadi dimanapun. *Free rider* ini akan melakukan apa saja untuk menghambat laju PEH. Taktik paling *jadul* adalah mempengaruhi pimpinan dan menyebarkan isu-isu miring. Membesar-besarkan barang sepele atau meremeh-temehkan sesuatu yang positif. Kalau sudah berurusan dengan orang-orang macam ini pasti ada saja yang jelek, ada saja yang salah. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan segala dinamika *sinetronian*-nya, dan tentunya campur tangan langsung Tuhan, *hijab* kebenaran dibuka sedikit demi sedikit. Akhirnya semua tahu mana yang layak diremeh-temehkan dan mana yang layak diapresiasi.

Ayo Bekerja, Ayo Bergembira

Dengan berjalannya program kerja tahunan minimal, dan *technically*, sangat membantu kami dalam penyusunan DUPAK. Memang itulah alasan paling sederhana organisasi ini dibentuk. Kawan-kawan yang mau menyusun DUPAK tidak lagi kesusahan *ngebut* laporan karena sudah tersedia. Di setiap akhir tahun, laporan-laporan yang pembuatannya digarap dengan kerja bakti ini sudah dibukukan dengan rapi beserta kelengkapan administrasinya. Dan kebiasaan kerja bakti ini akhirnya menular tidak hanya ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan DUPAK, tapi juga selainnya.

Pekerjaan apapun itu, kalau sudah dibebankan kepada PEH, *alhamdulilah* sejauh ini bisa ditunaikan dengan baik, meskipun ada juga yang membutuhkan kritik dan perbaikan. Karena pekerjaan itu tidak akan dilakukan individual. Selalu ada saja beberapa anggota PEH yang berperan aktif dalam penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada PEH. Beberapa sisanya adalah penggembira, saya adalah yang paling sering kebagian jatah penggembira ini.

Tapi tunggu dulu, penggembira-penggembira ini bukan tanpa peran penting lo. Kebiasaan yang paling mencolok di setiap kegiatan kami adalah tidak pernah ada habisnya *guyon* dan *usil-usilan*. Dan kebiasaan inilah yang membuat kami betah berkumpul dan bersama-sama ke lapangan. Adalah Pak Widyantoro yang sudah pasti jadi *lakon* adegan *gojek kere*. Pak Wid itu orangnya kalem, sabar dan mungkin *over* lugu. Kalaupun dia marah, bukannya menakutkan malah lucu. Ya sudah, habislah dia kalau sudah kumpul bareng.

Yang namanya pulang dari lapangan tas kami ternyata berisi batu, *conblock* atau botol kaca itu sudah sangat biasa. Batang-batang rokok tiba-tiba tidak bisa dihisap karena sudah berlobang dari

keempat penjuru mata angin di pangkal gulungan tembakaunya. Kopi yang tiba-tiba berasa asin. Minuman rasa jeruk yang diaduk dengan air laut. Helm bau terasi. Kacamata hitam benar-benar hitam nan gelap karena dicat sama ampas kopi. Berangkat ke warung beli rokok, begitu mau bayar, mengeluarkan dompet, tahu-tahu sudah ada pisang goreng di dalamnya! Ya Tuhan, sepertinya kawan-kawan ini sudah punya teknik mentransformasi materi ke tempat yang berbeda secara ghaib.

Dan acara yang paling meriah adalah ketika ada kawan yang ulang tahun. Sudah saya contohkan bagaimana memperlakukan –mantan- koordinator kami. Jika yang bersangkutan menyatakan "damai" berarti dia harus mentraktir kami semua makan-makan, dan jika tidak, maka konsekuensi logisnya adalah dia harus "dihabisi". Metode eksekusinya bisa bermacam-macam. Mulai dari yang paling kovensional: diguyur air, baik air biasa maupun air bekas rendaman udang selama berminggu-minggu dicampur dengan minyak goreng; yang agak canggih: dilempar bersama-sama ke kubangan kerbau, diikat di pohon atau diborgol kaki dan tangannya lalu diguyur fermentasi telor busuk selama satu bulan; atau yang paling canggih: diborgol di depan 210 peserta Baluran Birding Competition, setelah berkoordinasi dengan kepala balai bahkan, lalu dipersilahkan siapapun yang ingin ambil bagian.

Maaf bapak-ibu sekalian, saya bukannya membuka "aib" kawan sendiri, atau membahas sesuatu yang tidak penting di sini. Justru saya menekankan kepada Anda semua, bahwa inilah –salah satunya- yang membuat kami menjadi solid dan kompak. Organisasi ini bahkan sudah mentransformasi menjadi sebuah keluarga. Kebiasaan-kebiasaan itulah bumbu utama dalam dinamika PEH di Taman Nasional Baluran. Tanpa itu semua, hambar rasanya.

Kekompakan dan kesolidan itu tidaklah berlebihan jika saya simpulkan telah menjelma menjadi semangat. Sebelum saya tutup tulisan ini, ingin saya luapkan apresiasi saya buat satu kawan, Sutadi, atas semangat dan totalitasnya bertahun-tahun menjadi duet saya memata-matai burung se-Baluran. Buku Burung-Burung Taman Nasional Baluran yang kemudian disempurnakan dengan Birds of Baluran National Park tidak lepas dari kontribusi besar dia. Saya yakin, jika ditimbang, semangat kawan-kawan PEH lainnya pasti sama dengan semangat Sutadi, tapi saya heran kenapa Tuhan menjodohkan saya dengan manusia satu ini. Pak Toha sebagai *birdwatcher* yang lebih senior dari kami sesekali ikut *nimbrung* dalam proses kami memata-matai burung. Kalau Pak Toha tidak bisa ikut, maka kami bertiga sesekali berdiskusi tentang beberapa catatan di lapangan.

Setiap kali ke lapangan, ada saja makanan yang dibawa Sutadi, atau minimal setermos kopi panas. Bahan-bahan logistik yang dibawanya bahkan dia sendiri yang memasakkan untuk kami jika terpaksa harus menginap di lapangan. Motor Honda Karisma-nya adalah korban paling babak belur karena motor itu yang selalu kami gunakan ke lapangan, sampai akhirnya dia harus diganti dengan Honda Win-100. Perselisihan kadang terjadi diantara kami, kadang kami juga bisa sangat mesra. Ah, benar-benar layaknya suami-istri. Cuma kami tidak dikaruniai anak! ☺

Tapi ada waktunya kami harus “bercerai” supaya dia bisa menyebarkan semangat dan energinya dengan kawan-kawan yang lain. Begitu juga dengan saya, supaya saya bisa saling belajar dengan kawan-kawan lain bukan hanya tentang burung. Karena Baluran memang tidak hanya burung semata.

Bekerja adalah hiburan. Itulah yang saya rasakan selama ini menjadi anggota PEH Baluran. Ada semangat dan kebahagiaan di dalamnya. Meskipun, harus diakui, beberapa kali ada juga gesekan dan bahkan benturan yang membahana di antara kami. Terutama dalam dua tahun terakhir ini. Ada yang menanggapi dengan sangat emosional bahkan sampai ke ubun-ubun kepala, tapi ada juga yang tetap berpikir positif bahwa pertengkaran dalam sebuah keluarga adalah pertengkaran yang selalu merindukan perdamaian. Supaya kami bisa terus bekerja. Berkarya untuk hutan lestari.***

---------=====000O000=====----------



Nama: Swiss Winnasis (gak pake S.Hut! ☺)
TTL: Malang, 19 Mei 1981
Pendidikan terakhir: Kehutanan UGM, KSDH angkatan 1999 lulus 2005
Tempat Kerja: Taman Nasional Baluran, TMT 2008
Pengalaman kerja yang menarik? Apa ya? Seingat saya *everyday is Sunday in Baluran* hehehe….

10

Revolusi Budaya Pengelolaan Kawasan Melalui Praktik *Resort Based Management* di Taman Nasional Alas Purwo

Revolusi Budaya Pengelolaan Kawasan

Melalui Praktik *Resort Based Management* di Taman Nasional Alas Purwo

Wahyu Murdyatmaka

The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes.

(Marx & Engels; Conflict Theory)[1]

[1] Wikipedia, 2012. Conflict Theory; Marx and Engels, The Communist Manifesto, introduction by Martin Malia (New York: Penguin group, 1998), http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_theory, diakses tanggal 5 Januari 2012 pg. 35 ISBN 0-451-52710-0

I. Kerusakan Kawasan Hutan di Indonesia

Apa yang disampaikan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *Communist Manifesto*-nya tentang *Conflict Theory* merupakan implikasi yang diakibatkan oleh kepentingan manusia secara multi dimensional untuk memenuhi hasrat sosialnya, berkuasa dan hidup nyaman. Selalu saja ada korban dan dampak linier yang ditimbulkan, bukan hanya manusia lain, alam pun menangguknya.

Pada sektor kehutanan di Indonesia, dampak nyata akibat kepentingan politis dan sekuen konglomerasi telah mendorong berlangsungnya kerusakan kawasan hutan yang cukup parah. Angka pasti laju kerusakannya berbeda-beda, tergantung sumber yang merilisnya; apakah pemerintah, peneliti maupun lembaga-lembaga asing. Setidaknya, 0,7 – 2 juta ha/tahun kawasan hutan rusak akibat *illegal logging,* kebakaran hutan dan perambahan[2]. Pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Dua kali lebih cepat ketimbang tahun 1980. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan, dan menciptakan potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial ternyata semakin buram[3].

Anonim (2003)[4], menyatakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia diawali sejak 1960- an, kebijakan yang ditetapkan

[2] Data-data Kementrian LH, Kehutanan, Media Indonesia, Tempo dan beberapa jurnal penelitian.
[3] Cahyana, L dan Parlan, T.M., 2004. Potret Buram Hutan Indonesia. Institut Studi Arus Informasi (ISAI); http://www.isai.or.id/?q=node/10, diakses tanggal 18 Pebruari 2012.
[4] Anonim, 2003. Dibalik Rusaknya Hutan Indonesia. *Intip Hutan, Vol. April 2003.*

untuk memperkuat sektor yaitu; dengan mengambil langkah cepat dalam rangka membangun dan menciptakan kerangka kerja legal dan memungkinkan perusahaan swasta untuk memanen dan mengeskpor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama dalam eksploitasi hutan karena keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai ekonomis tinggi yang terbanyak dan letaknya dekat dengan pasar Asia.

Secara langsung maupun tak langsung, pada awal 1990-an sampai saat ini, ekses dari kerusakan hutan di Indonesia sangat terasa. Bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut seringkali terjadi. Selain itu, fragmentasi habitat satwaliar akibat perambahan dan konversi kawasan hutan telah menyebabkan konflik satwa-manusia yang cukup memprihatinkan. Kerusakan tersebut termasuk yang terjadi di kawasan-kawasan taman nasional (TN) dan ancaman serius terhadap kelestarian satwa langka; seperti yang dilansir VivaNews (2011)[5], yaitu terjadinya pembantaian ±750 ekor Orangutan dalam kurun waktu yang lama di Kalimantan akibat dianggap mengganggu perkebunan kelapa sawit dan lahan masyarakat. Padahal jelas bahwa kepentingan manusialah yang telah menghancurkan "rumah" mereka.

Kawasan hutan yang relatif masih utuh sekarang hanya dapat dijumpai di TN-TN di Indonesia. Itupun masih sangat rentan terhadap ancaman *illegal logging*, perambahan dan perburuan satwa liar seperti di TN Gunung Leuser (TNGL) dan Kutai. Predikat sebagai warisan dunia bagi TNGL tidak menolong rusaknya ±10.000 ha kawasan di Besitang.

5 VivaNews, 2011. Pembantaian 750 Orangutan Jadi Sorotan Dunia. http://nasional.vivanews.com/news/read/263890-pembantaian-750-orangutan-jadi-sorotan-dunia. diakses tanggal 12 Desember 2011.

II. Stigma Pengelolaan di Indonesia dan Posisi "Resort"

Saat ini, Indonesia memiliki 50 kawasan TN dengan tipologi biofisik dan kondisi kultural masyarakat penyangga yang berbeda-beda. Keunikan masing-masing TN berbanding lurus dengan beragamnya permasalahan yang dihadapi. Minimnya kapasitas SDM, baik secara kuantitas maupun kapabilitasnya serta keterbatasan anggaran menjadi isu klasik yang selalu ada.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, konflik kepentingan berbau politis maupun ekonomi seringkali menjadi preseden buruk bagi pengelolaan TN. Klaim kawasan oleh masyarakat adat, perusakan infrastruktur pengelolaan dan praktek penyuapan adalah fakta-fakta umum yang sering terjadi. Kondisi tersebut sering diperparah dengan lemahnya *leadership* yang berimplikasi terhadap terbatasnya jejaring kerja dan minimnya dukungan penegakan hukum.

Berdasarkan regulasi yang memayungi, TN merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu; perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDHE)[6]. Dalam dimensi keruangan, pengelolaan fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan dengan penetapan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, pemanfaatan dan zona lain yang diperlukan. Adanya sistem zonasi bertujuan untuk menjamin terpeliharanya proses ekologis kawasan guna mewadahi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian

[6] UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Alam (KPA); pasal 14, 16 dan 20; mengatur tentang penataan kawasan. Pasal 16 menyebutkan bahwa penataan kawasan meliputi; a) Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan (ranah fungsi keruangan), dan b) penataan wilayah kerja (ranah manajerial).

Dalam dimensi manajerial, tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan konservasi SDHE, diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor: P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional. Pasal 31 huruf (a) menjelaskan bahwa; guna meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah (kawasan), maka dapat ditetapkan ”Resort Pengelolaan Taman Nasional” (yang bersifat non-struktural/ bukan ruang Eselon) berdasarkan keputusan kepala UPT TN[7].

Dengan demikian, resort dapat disebut sebagai pemangku wilayah kerja TN yang ”membawa” dimensi keruangan dan manajerial sekaligus. Logikanya, wilayah kerja resort dapat melingkupi beberapa zona dan mampu menyediakan informasi dinamika wilayah pangkuannya.

III. Inisiasi *Resort Based Manajemen* (RBM) di TN Alas Purwo

RBM menjadi komoditas strategis pengelolaan taman nasional ketika TN Alas Purwo (TNAP) mampu menunjukan ‘’perubahan’’ signifikan atas menghegemoninya resort dalam pengelolaan kawasan. Melalui RBM, efektivitas pemanfaatan anggaran dan peningkatan kapasitas kelembagaan dapat tercapai. Dan paradigma RBM-lah yang telah menjadikan TNAP sebagai UPT terbaik versi Direktorat Jenderal PHKA pada tahun 2009.

[7] Pemangku wilayah kerja sesuai permenhut tersebut adalah seksi pengelolaan TN (SPTN).

Sebenarnya "resort" adalah istilah kuno yang telah ada sejak penunjukan lima taman nasional pertama di Indonesia. Umumnya, resort dalam ranah pengelolaan TN di Indonesia hanya terposisikan sebagai "pelengkap" struktur organisasi tanpa disertai *guideline* pengelolaan dan *operational budget* yang memadai.

Tahun demi tahun sejak RBM diimplementasikan (2008), upaya perlindungan dan pengawetan kawasan terlihat semakin baik. Isu *illegal logging*, perburuan satwa dan pencurian bambu di TNAP dapat terselesaikan dengan fantastis. Sementara itu, potensi SDAH, upaya-upaya konservasi jenis dan kerjasama pengelolaan dengan berbagai pihak sangat berkembang. *Good governance* dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran sebagai fenomena ''langka'' dalam pengelolaan taman nasional ternyata dapat diwujudkan.

Tapi apabila menengok lagi ke belakang, proses revitalisasi peranan resort dalam pengelolaan TNAP dilakukan tahap demi tahap melalui jalan yang berliku-liku. Memang wajar karena TNAP memang melakukan perjudian, tanpa pedoman yang jelas mencoba berkreasi menembus batas dan menjadi virus bagi TN-TN lain.

3.1. Diskusi Panjang

"Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well".

(Mahatma Gandhi)

Petuah bijak Gandhi di atas, mungkin selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Hartono[8] ketika pertama kalinya bertugas sebagai kepala balai TNAP, pada penghujung 2006. "Lapangan"

8 Ir. Hartono, M.Sc; kepala balai TNAP periode 2006-2011. Salah satu performer RBM dalam pengelolaan TN.

adalah sesuatu yang cukup "seksi" untuk dieksplorasinya. Hampir setiap hari semua resort dikunjungi, baik secara safari maupun "diam-diam." Tiga bulan berikutnya (awal 2007), satu kesimpulan mendasar yang terungkap; "Alas Purwo sedang sakit!!!!"

Memang benar adanya, *illegal logging,* pencurian bambu, perburuan liar dan minimnya kehadiran petugas di kawasan merupakan kelaziman pada saat itu. Bahkan praktik-praktik penyuapan petugas dari hasil pencurian bambu dan *rencek* (kayu bakar) terungkap. Akhirnya Hartono membuat kebijakan untuk melakukan diskusi secara komprehensif pada Januari-April 2007.



Diskusi komprehensif (Wahyu).

Dari hasil diskusi yang panjang bersama SPTN, resort dan staf teknis balai, beberapa hal mendasar yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak berdayanya resort dalam memangku kawasan karena tidak adanya dukungan anggaran yang jelas. Hal ini

menyebabkan resort "berkarya" dengan cara "melepas ikan kecil" untuk menangkap ikan "besar". Akibatnnya, pencurian bambu sudah dalam ambang memprihatinkan.
2. Tidak adanya transparansi pengelolaan anggaran. Indikasi nyatanya adalah sering beredarnya SPPD dengan kwitansi kosong setiap kegiatan teknis dilakukan.
3. Belum tertatanya wilayah kerja resort secara *reliable.* Pada waktu itu batas-batas resort tergambar sebagai garis lurus tanpa adanya pendekatan tipologi resort.
4. Tidak adanya skema perencanaan dan penetapan tugas minimal pada masing-masing resort yang sesuai.
5. Tidak adanya dukungan sistem informasi manajemen sehingga menyulitkan Kepala Balai untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis pengelolaan kawasan.

Berpijak pada kondisi tersebut, Hartono memimpin sebuah revolusi stratejik budaya praktik pengelolaan TN melalui cara:

1. Revitalisasi fungsi resort melalui pemenuhan sarpras dan anggaran operasional resort.
2. Memberlakukan pola transparansi anggaran dengan menyerahkan pengelolaan administrasi keuangan sampai dengan tingkat resort.
3. Penataan ulang wilayah kerja berdasarkan tipologi masing-masing resort dengan penilaian terhadap aspek aksesibilitas, tingkat gangguan, dan kemampuan personil untuk menangani permasalahan yang ada.
4. Perumusan tugas minimal resort dan pendampingan penyusunan rencana kerja serta evaluasi hasil kegiatannya.
5. Rancang bangun sistem informasi pengelolaan kawasan (SILOKA)

Disanalah peran *second layer* (baca: staf-staf teknis) begitu kental. Dengan spartan tanpa mengenal lelah, bekerja siang malam dan banyak mengorbankan waktunya mereka ambil bagian pada masing-masing bagian rumusan stratejik tersebut.

3.2. Konsensus

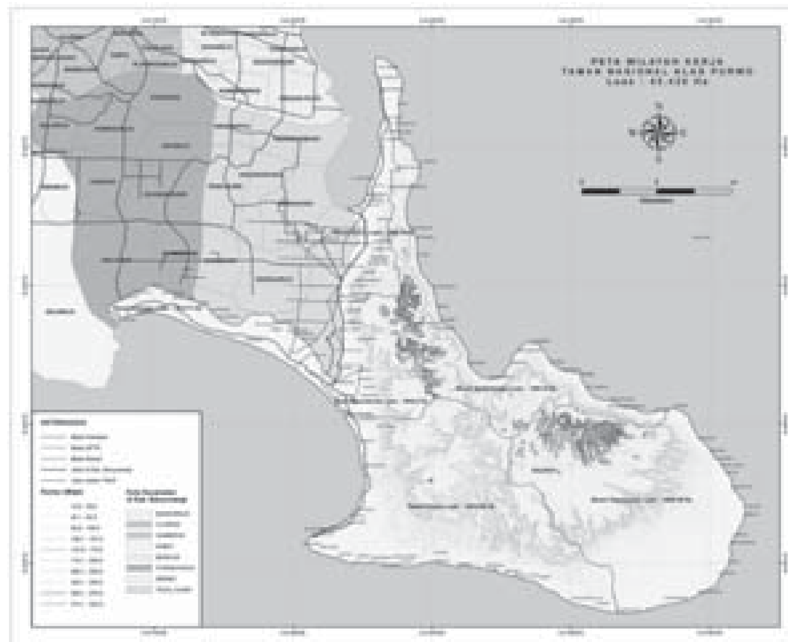
Dengan kesepahaman bersama mengenai arti penting RBM, maka konsensus menuju pengelolaan TN yang lebih baik tercipta. Penguatan kapasitas kelembagaan juga dilakukan dengan merotasi sebagian anggota resort didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan kawasan pada masing-masing resort. Hal ini dibarengi dengan pendistribusian fungsional pengendali ekosistem hutan (PEH) pada masing-masing resort untuk memperkuat lini pengawetan dan pemanfaatan.

Pada sektor perencanaan anggaran, RKA-KL dibahas bersama antara Balai, SPTN dan resort. Skema dukungan operasional diformulasikan melalui pengusulan belanja bahan non operasional lainnya berupa belanja BBM, ATK, alat bahan, honor Kepala Resort dan honor pengumpulan data. Akhirnya, 2008 adalah tahun yang disepakati untuk diterapkannya RBM untuk pertama kalinya.

3.3. Penataan Kawasan

Penataan kawasan adalah bagian sistem dukungan RBM yang cukup menantang untuk digarap. Betapa tidak, secuilpun data spasial baik berupa peta dasar tematik kehutanan (PDTK) maupun citra satelit tidak dimiliki oleh TNAP. Sebelumnya TNAP pernah difasilitasi PIKA melalui penyediaan PDTK dan pelatihan personilnya dalam pengelolaan data spasial dan non spasial (2005). Namun semua data hasil olah spasial yang dilakukan sejak 2005-2007 musnah akibat infeksi virus jenis trojan pada notebook dan PC yang digunakan.

Berbekal hubungan baik dengan rekan-rekan di UPT lain seperti BKSDA, Perum Perhutani dan BPDAS; semua *shapefile* PDTK yang dibutuhkan bisa didapatkan secara *voluntary*. Dengan keterbatasan penguasaan ilmu perpetaan digital, sedikit demi sedikit penataan wilayah kerja dilakukan. *Input themes* yang meliputi kontur, hidrologi, wilayah administratif, aksesibilitas dan sebaran gangguan kawasan di-*overlay*-kan pada peta kawasan TNAP, seperti tergambar sebagai berikut:



Peta wilayah kerja TNAP (resort). Batas-batas wilayah kerja direposisi untuk memudahkan penelaahannya di lapangan dan didasarkan pada tipologi masing-masing resort.

Dengan demikian masing-masing resort memangku luas wilayah yang berbeda-beda, semakin tinggi tingkat gangguannya

maka semakin kecil luasannya. Data luas wilayah kerja TNAP adalah sebagai berikut:

Tabel Luas wilayah kerja TNAP

SPTN	Resort	Luas (ha)
SPTN Wil. I Tegaldlimo	Resort Rowobendo	4,108.80
	Resort Pancur	14,247.80
	Resort Grajagan	2,286.58
SPTN Wil. II Muncar	Resort Tanjungpasir	12,935.55
	Resort Sembulungan	7,556.46
	Resort Kucur	2,284.81
Total luas		43,420.00

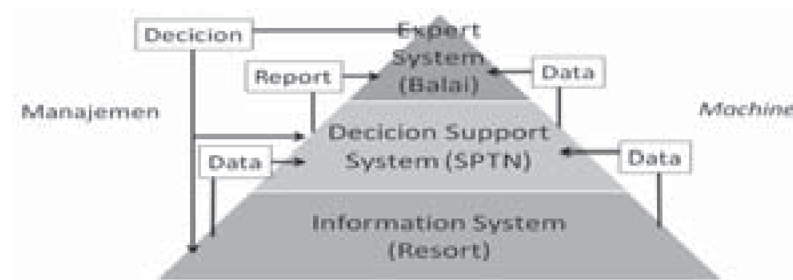
3.4. Rancang Bangun Siloka

Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik; input, model, output, teknologi, basis data (data base), kontrol atau komponen pengendali (Wikipedia, 2011)[9]. Dengan demikian, sistem informasi memiliki peranan yang strategis baik sebagai *baseline* maupun kontrol pengelolaan kawasan. Sistem informasi akan memenuhi fungsinya untuk menyajikan data kondisi kawasan. Dengan berbagai metode analisis, data-data tersebut akan menunjukkan dinamika kawasan serta estimasi tren ke depan. Hal ini akan sangat membantu untuk pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Saat ini dalam skala UPT, banyak model sistem informasi yang dikembangkan, baik sebagai pendukung RBM maupun secara parsial terhadap potensi biofisik kawasan. TNAP mengembangkannya sebagai SILOKA (sistem informasi kawasan) sebagai pendukung

9 Wikipedia, 2011. Sistem Informasi. http://id.wikipedia.org/sistem_informasi; diakses tanggal 2 Januari 2011.

RBM. SILOKA mengawinkan atribut-atribut spasial dan non spasial berdasarkan pola register. SILOKA dikembangkan secara mandiri dengan menggunakan MS SQL Server 2000 sebagai basis dan MS Visual Foxpro 9 sebagai *interface*.



Stratifikasi alur informasi dan olah data pada SILOKA.

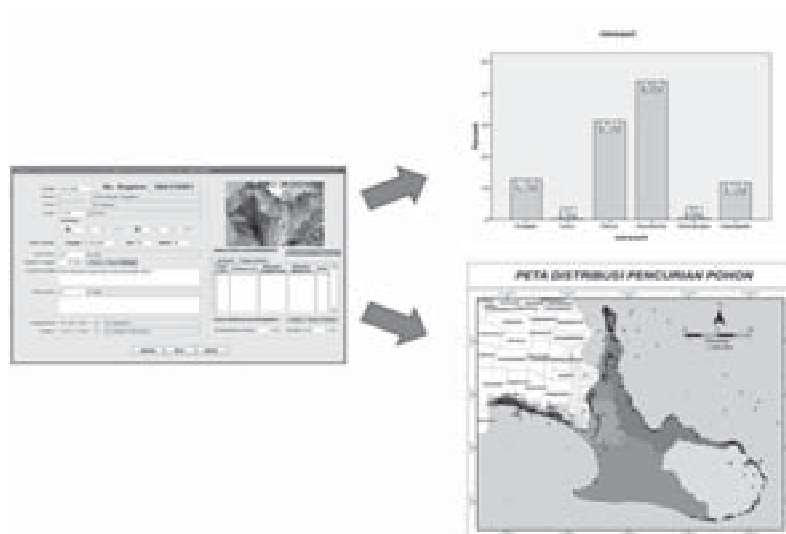
Manfaat SILOKA adalah untuk menampung data dinamika kawasan yang dikumpulkan oleh petugas resort. Keunggulannya meliputi:

1. Biaya rancang bangun dan operasional relatif murah
2. Mudah dijalankan
3. *Updatable*
4. *Accessible*: dapat dikawinkan dengan berbagai program pengolah data GIS maupun statistik
5. Menggabungkan variabel-variabel data spasial & non spasial
6. Dapat dikembangan menjadi *online* (melalui jaringan internet)

Sejak dirumuskan pada 2007, SILOKA melewati perjalanan sebagai berikut:

1. 2007:
   a. Formulasi struktur database
   b. Standardisasi form-form register

   c. Pembuatan aplikasi
   d. ToT penggunaan GPS *receiver dan lainnya* dan pengambilan data lapangan
2. 2008:
   a. *Trial* koleksi data lapang Reg. A-D dan entry data
   b. Analisis statistik dan spasial
3. 2009:
   – Koleksi data Reg. A-P, LK, LPT, LPS, Simaksi
4. 2010-2011:
   a. Supervisi/ pendampingan
   b. Analisis statistik dan spasial



Contoh proses koleksi sampai dengan analisis data lapangan.

Sampai saat ini, telah terkoleksi lebih dari 30.000 *records* data dari semua register yang dikumpulkan oleh resort. Setiap tahunnya, data-data tersebut dianalisis melalui pemodelan statistik secara aritmatik maupun spasial sebagai *decicion making input* di TNAP. Dengan adanya SILOKA, *feedback* pengelolaan kawasan yang dapat dihasilkan antara lain:

1. Rencana operasional resort dan implementasinya
2. Program-program perlindungan kawasan
3. Persemaian jenis-jenis tumbuhan rentan
4. Rehabilitasi kawasan
5. Observasi potensi bio-fisik kawasan
6. Prioritas pengelolaan penyu dan *feeding ground* Sadengan
7. PSP vegetasi berdasarkan tipe ekosistem

IV. Entitas RBM

Banyak hal yang telah dilakukan dari perjalanan implementasi RBM di TNAP. Nafas dan refleksi RBM terus mengakar dan diyakini sebagai “kendaraan” pengelolaan kawasan yang terbaik. Namun apabila ditengok lebih dalam, ada empat entitas kunci dalam implementasi RBM yang saling berkaitan dan mempengaruhi, yaitu:

4.1. Leadership

Siapa tidak mengenal Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Larry Page dan Sergey Brin (Google). Mereka adalah orang-orang yang sangat sukses “menguasai dunia” berbekal kesederhanaan dalam visi tajam tren teknologi informasi dan *leadership* yang kuat. Iklim *family corporation* mereka ciptakan sebagai nyawa perusahaan dan berdampak hebat terhadap loyalitas, peningkatan kinerja dan inovasi tiada henti karyawan-karyawan mereka.

Ledership memang merupakan konstelasi antara fikir, hati dan tindakan kongkrit. Seperti Panglima Besar Soedirman yang terus menggelorakan perlawanan terhadap kolonialisme ditengah fisiknya yang sangat lemah. Seperti Pattimura yang rela digantung untuk tetap mewariskan pekikan "merdeka!!!".

Hanya secuil kepala UPT TN yang fenomenal seperti mereka. Sebut saja Hartono dan Gunung Nababan yang telah sukses berinovasi dan mengakarkan RBM di TNAP dan TN Karimunjawa untuk pengelolaan kawasan yang lebih baik. Lugas, visioner, kebapakan dan memberi contoh adalah elemen-elemen retro-grafis mereka sebagai nahkoda.

Seringkali resistensi terhadap parahnya *leadership* menjadi ihwal carut marutnya pengelolaan TN di Indonesia. Celah antara "orang balai" dengan "orang lapangan" biasa terjadi akibat lemahnya *leadership.* Saling tidak percaya dan apatisme muncul akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan kebiasaan merencanakan DIPA hanya di belakang meja tanpa proses *bottom-up* dan *top-down*. Untuk itu, PHKA harus jeli dan punya ukuran kritera penugasan kepala UPT TN menuju *good governance* dari bawah.

4.2. Piyayi dan Pekerja

Dikotomi piyayi dan pekerja sangat kental dirasakan dalam manajemen hampir seluruh UPT TN. Entah ini karena sistem rekruitmen pegawai yang salah atau memang sistem yang sakit yang pada akhirnya menginfeksi sarjana-sarjana yang ditempatkan di UPT-UPT TN. Tidak sedikit dari mereka enggan ke lapangan, lebih suka bergenit-genit dengan teori akademik di belakang meja bahkan lebih parahnya berlindung dibalik tugas belajar mereka untuk pindah dari tempat tugasnya.

Kondisi inilah yang melahirkan friksi manajemen cukup parah. Mereka yang enggan ke lapangan lebih menasbihkan diri sebagai piyayi yang bekerja ala *desk study.* Menyusun program-program yang tidak *reliable* dan menyusahkan orang lapangan. Sementara di sisi lain, orang-orang lapangan (pekerja) adalah mereka yang termarginalisasi namun selalu menjadi tumpuan kesalahan apabila eskalasi gangguan kawasan meningkat.

Pada 2003-2004 pernah ada program magang dari Dephut selama enam dan tiga bulan untuk mengenalkan pengelolaan kawasan TN lebih dekat bagi CPNS yang berlatar belakang sarjana dan sarjana muda. Namun program ini tidak berlanjut. Ke depan, program ini perlu dikembangkan lagi sebagai bekal menanamkan kepedulian terhadap lapangan. Selanjutnya, apabila mereka telah ditempatkan, maka pendistribusian sampai dengan tingkat resort perlu dilakukan untuk mengasah kemampuan *downloading, presencing, performing* dan *team working* mereka.

4.3. Open Mind, Open Heart and Open Will

"Kerja adalah cinta yang mengejawantah"

(Kahlil Gibran)

Setiap perubahan selalu akan menimbulkan resistensi bagi mereka yang sudah merasa nyaman dengan kondisi yang sedang berjalan, dan merupakan harapan besar bagi mereka yang termarginalkan. Tapi perubahan ke arah yang lebih baik hanya akan memakan sedikit korban dan membangun struktur sistemik jangka panjang yang solid. Seperti yang dikatakan oleh Mao Tse Tung[10], bahwa Esensi dari perubahan adalah menyisipkan "cinta" dalam pekerjaan dan melahirkan *"ecosystem"* sebagai obat dari *"egosystem"*.

[10] Mao Tse Tung's quote: "The differences between friends cannot but reinforce their friendship".

Perubahan akan selalu melalui proses-proses vital, yaitu membuka pikiran, hati dan akhirnya kemauan. Semuanya hanya dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, konsistensi dan kontrol *reward and punishment* yang jelas.

4.4. Empat Budaya

RBM adalah sebuah budaya penggerak S.H. Koorders sebagai inisiator penunjukkan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia. Budaya ke lapangan, mencatat, mendokumentasikan dan bertindak adalah kultus pengelolaan TN yang krusial. Ketika dinamika kawasan tereksplorasi dengan seksama, terdokumentasi dengan baik, maka pengobatan terhadap "penyakit" kawasan akan dapat dilakukan secara tepat.

Perlu diingat bahwa RBM bukan berbicara tentang resort, tetapi sistem yang yang saling berkaitan antar komponen manajemen dengan tujuan utama pengelolaan kawasan yang berorientasi pada akselerasi penanganan permasalahan di lapangan.***

----------=====000O000=====----------



Wahyu Murdyatmataka, lahir di Purbalingga, 9 April 1982 dan menamatkan pendidikannya di SKMA pada tahun 2000. Saat ini bekerja sebagai PEH di Resort Tanjungpasir, BTN. Alas Purwo. Memiliki sifat liar yang sulit untuk dijinakkan, serba ingin tahu dan "*ngeyelan*". Sempat ke Jepang untuk mengikuti training manajemen ekowisata pada daerah tropis dan non-tropis dan mendampingi masyarakat penyangga secara *voluntary* selama 2 tahun. Dalam kurun 2009-2012 sering mondar-mandir ke beberapa taman nasional dan BKSDA untuk mendampingi proses implementasi RBM bersama Dit. KKBHL. Pria kurus ini menyukai *fishing* dan sepakbola, meskipun hanya tingkat amatiran.

11 Sarung Tandu Magic

Sarung Tandu Magic

Supriyanto
Diedit oleh: Sulistrianto

Dalam suatu kegiatan pendakian gunung kadang ditemui musibah berupa kecelakaan sehingga perlu dilaksanakan SAR (*Search and Rescue*). Problem utama terletak pada keterbatasan sarana prasarana, letak dari sarana tersebut dan mobilisasinya. Tentu saja keterbatasan akan menjadi-jadi jika standard penyelamatan harus dipenuhi secara mutlak.

Awal mula cerita ini terjadi di bulan Juli 2010, ketika kami bertiga sedang melakukan tugas rutin berupa penjagaan di jalur pendakian pintu masuk Sembalun, Seksi Pengelolaan TN Gunung Rinjani Wilayah II, Balai Taman Nasional Rinjani yang termasuk wilayah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Tim kami yang bertugas saat itu terdiri seorang Polhut bernama Taufikurahman dan 2 orang PEH, Mohammad Faesal dan kami sendiri, Supriyanto.

Saat itu merupakan bulan kemarau yang sangat baik untuk melakukan pendakian. Bulan-bulan semacam ini disebut " *high session* " yang artinya bulan dimana tingkat kunjungan wisata



PertolonganPertamapadaKorbanpadaprosesevakuasi di jalurpendakian (Supriyanto, 2012)

sangat tinggi, sehingga pada titik-titik lokasi yang dijadikan *camping area* hampir tidak mampu menampung lagi utuk didirikan tenda bagi wisatawan. Sehingga tidak heran jumlah kunjungan wisatawan ke TN Gunung Rinjani sangatlah tinggi. Untuk wisatawan mancanegara dalam tiap tahunnya tidak kurang dari 7 ribu orang. Sedangkan untuk wisatawan Nusantara hampir mencapai 8 ribuan setahunnya.

Siang itu sekitar jam 11.00 WITA, saat cuaca panas yang sangat menyengat, kami sedang beristirahat di bawah pepohonan cemara gunung (*Casuarina junghunniana*). Rasa sejuk menikmati udara di bawah pepohonan yang rindang, sehingga menghilangkan rasa gerah dan kami terkantuk-kantuk dan merasa malas untuk melanjutkan perjalanan patroli kami.

Ketika kami sedang terbaring tiba-tiba berdering salah satu HP dari kami yaitu milik Faesal. Begitu berdering, dengan malas dia menjawab : " Halo, ini siapa ? katanya, mengingat nomor panggilan hanya memunculkan nomor saja." " Ini Memet, Treking Guide Senaru, posisi kami sedang di Plawangan Sembalun" jawabnya. " Oh ya, ada apa Bos? Ada yang bisa kami bantu " jawabnya dengan nada bersahabat. Jawaban begitu biasa kami sampaikan sebagai pencerminan pelayanan prima kami. " Pak ! kami melaporkan bahwa salah tamu kami mengalami kecelakaan, terjatuh dari tebing di Plawangan."

Begitu mendengar kata terjatuh dari tebing di Plawangan Sembalun (2.639 m dpl), sontak Faesal pucat, sedangkan kami yang tidak mengetahui percakapan itu, belum *ngeh* dengan informasi tersebut." Ok, informasi kami terima, sekarang kami akan persiapkan bersama Tim untuk meluncur ke sana! " jawab Faesal setelah mengetahui perkiraan letak lokasi kecelakaan.

Faesal membangunkan kami dari tempat istirahat kami. " Mas..Mas, bangun! Ada kecelakaan di Plawangan nih..." Begitu mendengar kata kecelakaan, langsung kami berdua terperanjat dari tidur. "Apa…? Kecelakaan ? Dimana ? bagaimana kondisi korban terakhir?" sahut kami. Akhirnya, Faesal menceritakan informasi yang baru dia terima dan mendapatkan informasi lanjutan bahwa korban mengalami patah bahu. Laki-laki ternyata wisatawan manacanegara bernama Mr. John berkebangsaan Australia.

Yang membuat kami bingung bukan kepalang adalah bahwa posisi kami bertiga saat itu berada di dalam kawasan yang berjarak cukup jauh yaitu sekitar 4-5 jam berjalan kaki naik dari lokasi, sedangkan menuju Base Camp (Kantor Resort Sembalun). Turun juga pada jarak yang sama jauhnya.

Setelah kami bertiga berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk langsung berangkat menuju lokasi berbekal nasi 1 (satu) bungkus sisa perbekalan yang masih ada. Kami perkirakan walaupun tidak memadai, tapi cukup sebagai logistik darurat untuk sampai lokasi kejadian. Perhitungan kami, jika tiba di sana, kami bisa meminta bahan makanan kepada rombongan tersebut. Disamping itu, kami telah melapor atasan Kepala Seksi dan meminta rekan petugas di Kantor Resort untuk segera menyiapkan tenaga 6 orang dan segera menyusul kami. Walau dengan perasaan yang penuh tanda tanya, kami segera menuju meluncur lokasi dan ternyata baru dapat sampai ke lokasi sekitar jam 15.00 WITA.

Begitu sampai sana kami sangat terkejut, karena korban masih ada di lokasi kecelakaan (di bawah tebing) dengan kedalaman sekitar 30 meter (beruntungnya korban kok masih hidup ya…). Sayu-sayup kami mendengar suara lolongan menyayat" Help me!….help me, please….!! " kata Mr John dari bawah tebing. Kami sempat memarahi kepada guide dan semua porter yang ada di sana, kenapa tidak diangkat dari lokasi tersebut. Namun, si Guide dan porter disana menjelaskan bahwa mereka sudah mencoba, tapi si korban bersikeras hanya mau diangkat pakai helikopter dan tidak mau diangkut pakai yang lain. Mendengar hal itu, kami agak khawatir karena hari semakin sore. Akhirnya kami bertiga dengan berhati-hati untuk turun di lokasi Mr. John. Melihat kedatangan kami di sisinya, membuat dia terlihat agak merasa nyaman karena mungkin dia mengira pertolongan berupa helikopter akan segera datang. Dengan bahasa Inggris seadanya, kami mencoba menjelaskan kepadanya.

Oh ya, sebelumnya kami bertiga tadi sudah sepakat untuk membohongi si korban bahwa kami sedang mengurus





Proses evakuasi dari TKP menuju keluar kawasan jalur pendakian (Supriyanto, 2012)



Ekosistem savanna menuju Pelawangan Sembalun

helikopternya, mengingat posisi helikopter untuk SAR masih ada di Bali. Sehingga yang terpenting saat ini adalah mengeluarkan Mr. John dari lokasi tersebut untuk diangkut ke Camping Area. Dengan

susah payah kami jelaskan untuk segera kami evakuasi dari jurang menuju camping area di Plawangan Sembalun menggunakan alat angkut tradisional (tandu sarung) yang ada.

Dengan hati-hati kami mengangkut dan akhirnya si korban sampai juga di Plawangan Sembalun.

Tiba di Plawangan Sembalun dan mendapatkan pertolongan pertama, kami bertiga masih kebingungan, karena si korban tetap hanya mau diangkut pakai helicopter yang rasanya mustahil. Jam 17.00 WITA, porter yang kami pesan dari Kantor Resort akhirnya datang di lokasi kejadian, dengan hanya membawa potongan bambu sepanjang 3 meter, tali, serta kain sarung. Dengan berbekal tali porter (tali sapi sepanjang 5 meter) sebanyak 12 biji dan dua buah bamboo angkut (potongan 1,5 meter), kami menyuruh porter yang terlatih untuk mengikat badannya dan segera ditandu menuju Camping Area di Plawangan.

Dijalan kami merasa sedikit bingung, sedikit jengkel, sekaligus memutar otak untuk mencari solusi karena si korban semakin sering menanyakan kapan helikopternya datang, sementara jika dilihat dari lukanya, memang cukup parah, karena setiap tersenggol bahunya, dia mengerang kesakitan.

Akhirnya kami bertiga membulatkan tekad untuk menjelaskan kepada si korban . " Sir, barusan kami mendapat kabar dari lokasi helikopter, bahwa helicopternya telah terjadi kerusakan mesin sehingga tidak bisa diangkut pakai helicopter melainkan ditandu menggunakan kain sarung (secara tradisional) " dengan Bahasa Inggris yang kami mampu. Mr. Jhon menjawab, "Apa?!!...lalu kalian mau mengangkut aku pakai alat seadanya, saya tidak mau dijadikan bahan eksperimen...lihat lukaku!!" kata Mr.John dengan nada

emosi. Kami saat itu sepenuhnya sadar, menjelaskan kepada orang luar negeri memang agak susah apalagi hal-hal yang menyangkut tradisional. Dengan sabar kami bertiga secara bergantian meyakinkan si korban untuk mau dievakuasi menggunakan alat-alat tersebut. Dari menjelaskan tentang keadaan lukanya yang harus segera dapat pertolongan, hari yang semakin gelap, bahkan kami layaknya sales sedang demo produk sampai rela memperagakan demo (kami masuk ditandu sarung) sambil bilang " *Look is this, Sir ..it's nice, very save, and very comfortable. If you still worry, you can try for a moment* " bilang kami, sambil menahan ketawa di dalam hati karena kehabisan akal dan kami kira itu yang dirasakan oleh semua orang yang melihat kelakuan kami sebagai petugas seolah-olah kami bercanda. Hal itu kami lakukan untuk mencairkan suasana agar semakin nyaman dan Mr. John mau dievakuasi menggunakan alat itu, dan kami menjamin bahwa dia akan merasa nyaman 100 %.

Coba hitung, setelah 2 jam kami merayu dia, akhirnya dia baru menyerah mau, dan masih sempat bertanya apakah alat ini dijamin aman sampai bawah (mengingat perjalanan memakan waktu 7 jam menuju Kantor Resort) dan kami selalu bilang " *Don't worry be happy… Sir. Don't worry be happy,*" sambil terus menerus menyakinkan. Setelah kami memasukkan dia ke tandu sarung, jam 19.00 WITA, kami langsung menuju Kantor Resort Sembalun. Pada dua jam pertama dalam perjalanan evakuasi, sesekali kami menanya Mr. John. *"How is your condition, Sir ?" " I am fine, thanks."* Jawabnya. Mengingat keadaannya yang nyaman, kami segera bergegas dan mempercepat perjalanan yang semakin larut.

Setelah empat jam perjalanan, kami mencoba berhenti istirahat dan melihat kondisinya dan bertanya hal yang sama tentang kondisinya.Namun, pertanyaan kami tidak dijawab dan

kami mencoba membuka tandu. Jangan-jangan pingsan atau mati? Dengan kaget, kami bertiga melihat dengan perasaan kesal, tersenyum, walau sedikit marah melihat dia. Ternyata dia saking enaknya ditandu, dia ketiduran. " Sialan, dasar bule…tadi bilangnya takut pakai tandu sarung, gak tahunya keenakan tidur di dalamnya " bilang kami, sontak porter yang ngangkut, pada ketawa pelan-pelan dan semakin santai tetapi justeru cepat melangkah saat mengusung Mr. John karena sudah tidak mengerang kesakitan.

Akhirnya jam 02.00 WITA (tengah malam) kami baru sampai Kantor Resort Sembalun. Di sana rekan-rekan multipihak sudah menunggu (baik itu Polsek, TNI maupun unsur Muspika) dan segera mengungsikan Mr. John ke Puskesmas terdekat untuk diberi pengobatan. Kami beranikan untuk membangunkan dia dari dalam tandu sarung , " *Excuse me Sir, you have arrived at Sembalun already, we will take you to the hospital,*" bilang kami kepadanya. Begitu mendengar sudah sampai, sontak dia keluar dari dalam tandu sarung dan kaget sambil bahagia. "*What ..?!!! It's very fast*." Bilangnya sambil cengengesan tapi takjub. Anehnya, dia tidak menampakkan sakit sedikitpun seperti yang ditunjukkan di lokasi kejadian. Hal ini semakin memberanikan kami bercanda " Bagaimana Sir? Ternyata, helikopter tradisional lebih nyaman kan ?" dalam versi Inggris kami sambil tertawa…tak peduli lagi jawaban si korban.

"Ya..ya, ternyata memang benar, bahwa alat dan cara ini tidak kalah dengan alat-alat modern," walau sambil cengengesan, dia mengatakan lagi…"terima kasih semuanya Bapak-bapak, telah menolong saya, dan saya tidak akan melupakan hal ini, suatu saat saya pasti akan ke sini menjumpai Bapak-bapak lagi sebagai rasa terima kasih " bilangnya dengan nada perpisahan. Kami lihat matanya berkaca-kaca menunjukkan rasa harunya.



Kepulan asap letusan Gunung Baru Jari (Supriyanto, 2010)

Perasaan kami barcampur baur, ada perasaan senang, marah, jengkel sedih serta bangga, berpadu menjadi satu. Akhirnya setelah menyampaikan salam perpisahan, Mr. John dibawa ke Puskesmas terdekat. Seperginya dia, kami melepas lelah sambil teriak…" Katanya takut pakai tandu sarung…e….gak tahunya keenakan… dasar buleee!!!" He..he..he…….

Siapa bilang dalam evakuasi korban kecelakaan dijalur pendakian alat-alat tradisional kalah jauh efektif dan efisien dibanding dengan alat-alat modern ? Jika Anda mengatakan ya, itu adalah salah besar, karena hal ini sudah kami buktikan didalam kisah penanganan korban kecelakaan di jalur pendakian di Gunung Rinjani (3.726 m dpl). Pengalaman kami membuktikan bahwa tandu sarung dapat digunakan sebagai substitusi dari helikopter untuk evakuasi !

----------=====000O000=====----------



Supriyanto, adalah PEH Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang bertugas di Resort Sembalun SPTN Wilayah II Lombok Timur. Lahir di PatiJawa Tengah, 20 Desember 1979, dengan pendidikan terakhir SKMA Kadipaten Angkatan XVI. "Sembalun adalah wilayah kerja paling menarik bagi saya. Di sini saya bisa mempelajari ekoturisme dan melakukan *birdwatching*



Sulistrianto, Selepas lulus dari Biologi Lingkungan UGM tahun 1993, Sulistrianto bekerja di BKSDA Maluku-Irian Jaya I tahun 1995 - Desember 1999 sebagai Pengidentifikasi Dan Penginventaris Flora Fauna. Setelah sempat bertugas di TN Karimunjawa dan di Direktorat KKBHL, saat ini lulusan Program Studi Perencanaan Lingkungan - Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro ini bertugas di TN Gunung Rinjani sebagai Kasubag TU.

12

Kejar Setoran :

Upaya Mendobrak Kebuntuan Komunikasi dengan Pemerintah Daerah “Bantimurung”

Kejar Setoran :

Upaya Mendobrak Kebuntuan Komunikasi dengan Pemerintah Daerah "Bantimurung"

Deddy Asriyadi

Membaca dan mendengar itu, orang biasanya langsung teringat dan membayangkan kupu-kupu dan air terjun yang terdapat di daerah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah Bantimurung sejak dahulu telah menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di wilayah Indonesia timur khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan jumlah kunjungan yang sangat tinggi sebesar ± 600.000 orang pertahun. Jumlah ini merupakan salah satu jumlah kunjungan yang tertinggi di Indonesia untuk daerah wisata yang berbasis alam.

Namun ironinya, karena Bantimurung merupakan kawasan konservasi yang sejak dahulu belum pernah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai amanat Undang-undang. Pengenaan karcis/tiket masuk kawasan di Bantimurung selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang mengelola untuk Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Menurut informasi dari teman-teman KSDA Sulawesi Selatan yang dulunya memangku kawasan ini yang saat itu berfungsi sebagai Taman Wisata Alam, berbagai usaha telah dilakukan untuk sejak zaman Kanwil Kehutanan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Bantimurung sebagai "Kingdom of the Butterfly"



Air terjun Bantimurung (Dedy)

Alfred Russel Wallace, adalah naturalis berkebangsaan Inggris yang pernah menjelajah Kepulauan Indo-Malaya dari tahun 1856 sampai dengan 1862. Wallace melakukan ekplorasi flora dan fauna di kawasan Bantimurung dari tanggal 11 Juli 1857 sampai dengan awal Nopember 1857 dan berhasil mengumpulkan cukup banyak koleksi specimen di wilayah Maros. Sejak kembalinya ke Inggris sampai dengan tahun 1886, Wallace menerbitkan delapan belas dokumen, baik berupa catatan maupun *proceeding* untuk *Linnaean Zoological and Entomological Societies* yang menggambarkan atau mendeskripsikan koleksi specimennya. Setelah itu, ia kemudian menuliskan dan menerbitkan jurnal perjalanan selama enam tahunnya ke Kepulauan Indo-Malaya yang berjudul "*The Malay Archipelago*".

Sejak kembali ke Inggris dan mulai menuliskan laporan-laporan perjalanan dan koleksi speciemennya sampai dengan terbitnya "*The Malay Archipelago*". Sejak saat itu pulalah keanekaragaman hayati

kawasan Indo-Malaya terutama kawasan Sulawesi dan pulau-pulau satelitnya mulai dikenal oleh para naturalis, ilmuwan serta masyarakat di kawasan Eropa dan ke seluruh dunia. Deskripsi kawasan Karst Maros-Pangkep dan keanekaragaman faunanya dianggap sudah cukup lengkap pada saat itu. Wallace memberikan julukan "*The Kingdom of Butterfly*" untuk kawasan Bantimurung dan sekitarnya. Hal yang paling berkesan bagi Wallace di Bantimurung adalah pertemuannya dengan "*The Magnificent Butterfly*" *Papilio androcles* (sekarang diberi nama *Graphium androcles*), salah satu jenis Kupu-kupu *Swallow tailed* terbesar dan sangat jarang ditemukan.

Di suatu siang ketika matahari bersinar terik dan udara terasa sangat panas, setelah empat hari mengamati, pantai berpasir pada sisi kolam di atas air terjun Bantimurung (mungkin tempat yang oleh masyarakat sekarang disebut *Kassi Kebo*), menyajikan suatu pemandangan menakjubkan bagi Wallace. Kassi Kebo dihiasi oleh segerombolan Kupu-kupu yang memeriahkan suasana. Oranye, kuning, putih, biru dan hijau. Formasi ratusan Kupu-kupu ini membentuk awan beraneka warna. Ketika makhluk yang indah ini terbang, *the long white tails* berkelap-kelip layaknya melambai-lambai. Kurang lebih begitulah yang deskripsikan oleh Wallace tentang pertemuannya dengan *Graphium androcles*.

Kolektor-kolektor lain kemudian mengikuti jejak Wallace. Dua puluh lima tahun kemudian, di tahun 1882 *Graphium androcles* tidak bisa lagi ditemukan, walaupun species-species lain tetap ada (Guillemard, 1889 *dalam* Whitten, 2002). Hal ini mungkin merupakan pengaruh iklim, sebab 45 tahun kemudian Kupu-kupu ini kembali banyak ditemukan (Leefmans, 1927 *dalam* Whitten, 2002). Mattimu, dkk (1977) kemudian melaporkan bahwa dari hasil penelitian di kawasan wisata Bantimurung, ia berhasil menemukan 103 species Kupu-kupu.

Setelah kurang lebih empat bulan mengekplorasi wilayah Maros dan sekitarnya, di awal Nopember 1857 Wallace kembali ke Makassar. Pada tahun 1890, ia melaporkan telah menemukan 256 species Kupu-kupu dari kawasan Bantimurung. Berbeda dengan laporan tersebut, Mattimu (1977) melaporkan bahwa ada 103 jenis kupu-kupu yang ia temukan di hutan wisata Bantimurung, dengan jenis endemik antara lain adalah: *Papilio blumei, P. polites, P. sataspes, Troides haliphron, T. helena, T. hypolitus*, dan *Graphium androcles*. Achmad (1998) telah meneliti secara khusus habitat dan pola sebaran kupu-kupu jenis komersil di hutan wisata Bantimurung selama satu tahun. Ia juga menginformasikan bahwa kupu-kupu *Troides haliphron* dan *Papilio blumei* adalah dua jenis endemik yang mempunyai sebaran yang sangat sempit, yakni hanya pada habitat berhutan di pinggiran sungai.



Kupu-kupu Bantimurung (Dedy)

Sejarah Penunjukan Kawasan Bantimurung

Air terjun Bantimurung yang mulai terkenal sejak kunjungan Wallace dijadikan kawasan konservasi sejak tahun 1919 dengan luas 18 Ha berdasarkan Guvernements Besluits tanggal 21-2-1919 No. 6 Staatblad No. 90. Ditunjuk kembali menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama TWA. Bantimurung seluas 118 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981.

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung seluas ± 43.750 Ha terdiri dari Cagar Alam seluas ± 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Pada tanggal 1 Pebruari 2007, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (TN). Keputusan ini menjadi dasar pengelolaan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sampai dengan saat ini. Balai TN Bantimurung Bulusaraung secara efektif baru beroperasional melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dan pembangunan sejak April 2007 segera setelah Pelantikan Pejabat Eselon 4 yang terdiri dari kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Balocci untuk Kabupaten Pangkep dan Kepala SPTN Wilayah II Camba di Kabupaten Maros serta Surat Keputusan Mutasi Staf dari Balai KSDA Sulawesi Selatan.

Salah satu Kepala SPTN yang mendapat amanah pada saat itu adalah penulis-yang lahir, sekolah mulai SD, SMP dan SMA di Bantimurung. Masa kecil penulis dipenuhi dengan bermain dan upaya mencari uang jajan melalui kegiatan menangkap kupu-kupu, meskipun harus "bermain petak umpet" karena dikejar-kejar Polhut.

Segera setelah pelantikan sebagai KSPTN Wil II di Maros, penulis dipanggil Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung (Ir. Darsono) ke ruang kerja Kepala Balai. Kata-kata Beliau yang saya ingat sampai sekarang adalah *" Ded, kamu kan orang sini, tantanganmu menjadi Kepala Seksi adalah harus pandai-pandai menghadapi anak buahmu karena mereka adalah orang-orang yang dulunya mengejar ngejar kamu sewaktu kecil. Yang kedua kamu harus berani menegakkan aturan karena masyarakat yang kamu hadapi adalah keluarga kamu semua."* Penulis hanya menjawab " iya pak, tolong saya dibimbing pak"

Sekeluar dari ruangan, penulis merenungi kata-kata pak Darsono. "Bagaimana caranya ya menghadapi anggota yang dulu seingat saya sangat seram, berkumis lagi, hihi."

"Yang kedua adalah persoalan menghadapi masyarakat yang menangkap kupu-kupu dan menebang pohon, jangan-jangan kawan main bolaku atau kawan kecilku?"

Pertemuan kedua dengan Pak Darsono di ruangan beliau, penulis menyimak penjelasan tentang bagaimana visi dan misi beliau mengelola kawasan TN Bantimurung Bulusaraung (TN Babul). Beliau bercerita banyak hal termasuk mimpi-mimpi beliau menjadikan TN Babul menjadi salah satu taman nasional terdepan meskipun dengan statusnya yang baru lahir atau anak kemarin sore. Beliau memang senang bermimpi, penulis kebetulan punya kebiasaan yang sama.

Beliau bercerita, " Bekerja itu harus serius, punya target tapi ikhlas".Sedangkan bagi penulis, suka menggunakan *motto* dalam bekerja adalah : *"bussines and pleasure"*. Pekerjaan yang terbaik adalah hobby.

Sejak itu, penulis berpikir " Apa yang harus saya kerjakan, yang kira-kira mampu punya saya selesaikan sebagai KSPTN di Maros?" Seminggu kemudian, penulis memberanikan diri menghadap ke Pak Darsono " Pak, saya tiga target selama menjadi KSPTN yaitu menyelesaikan persoalan Penarikan PNBP Bantimurung, menertibkan penangkapan dan penjualan kupu-kupu dan menyelesaikan masalah Dusun Tallasa yang masuk dalam kawasan TN Babul"

Beliau menjawab "Berapa lama Ded?" Penulis jadi berpikir "Berapa lama ya?" kemudian penulis menjawab " tiga tahun Pak"

" Ok, bagus. Saya beri waktu tiga tahun, kalau tidak berhasil, kamu saya copot"

" Ha???? Kok begitu pak" jawab penulis.

"Ya harus begitu, karena kalau tidak berhasil dalam tiga tahun artinya kamu gagal, orang gagal buat apa dipertahankan?" jawab Pak Darsono.

" Waduh, gawat juga nih" pikir penulis. " Ok Pak " Jawab penulis.

Lika-liku proses penyelesaian Penarikan PNBP Bantimurung

Langkah awal penulis dalam memulai proses penarikan PNBP dimulai sekitar bulan Mei 2007, dengan mendatangi Kantor Pengelola Bandara dan Kawasan Wisata Bantimurung di Maros, penulis berkoordinasi dengan Kasub TU karena kebetulan kepala Kantornya tidak masuk pada hari itu. Pak Lakuma adalah nama pejabat Kasub TU pada kantor tersebut yang penulis kebetulan sempat membaca di Papan pengenal di atas pintu ruangannya.

"Assalamu alaikum Pak Lakuma, saya Dedy Asriady, Kepala Seksi Pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung di Maros"

"Oh, iya. Ada apa ya? Ada yang bisa dibantu?" begitu kira-kira jawab pak Lakuma.

" Iya pak, saya mau berkoordinasi tentang kawasan wisata Bantimurung pak, terkait PNBP" jawab penulis.

" PNBP? Apa itu pak?" jawab pak Lakuma.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak Pak"

"Apa Pak...?" jawabnya kemudian.

Akhirnya saya menjelaskan panjang lebar mengenai status kawasan Bantimurung, kenapa harus ada PNBP serta aturan perundangan yang mendasarinya. Namun beliau sepertinya bertambah bingung dan sedikit jengkel.

" Kami ini pegawai daerah pak, dasar kami mengelola dan memungut karcis adalah perintah Bupati Maros sesuai Perda bukan UU" jawabnya kemudian.

" Waduh, tambah pusing nih, bagaimana menjelaskannya ya?" pikir penulis.

"Sebenarnya menurut aturan, Pemda Maros tidak berhak memungut karcis di Bantimurung Pak karena kawasan tersebut tidak diserahkan pengurusan dan pengelolaannya ke pemerintah daerah"

"Kami sejak dulu mengelola itu dan semua itu kan terserah Bupati Pak, kenapa Taman Nasional mau mengembil alih?" jawab beliau dengan nada keras.

Setelah berdebat lama dan panjang, penulis menjelaskan tentang aturan perundangan sedang beliau bersikukuh bertahan terserah Bupati, akhirnya penulis pamit.

"Kalau begitu, saya pamit dulu Pak. Besok saya kesini lagi, mudah-mudahan bisa ketemu Bapak kepala kantor"

"Silahkan Pak Dedy, nanti saya sampaikan ke beliau besok" jawabnya.

Keesokan harinya, penulis mendatangi kembali kantor tersebut dan kembali di terima oleh Pak Lakuma.

"Assalamu alaikum Pak"

"Waalaikumussalam" jawab beliau.

"Pak Kepala Kantor ada Pak? Tanya penulis..

"Belum masuk kantor Pak" jawabnya.

"Jadi bagaimana mengenai Bantimurung Pak?" apa bapak sudah mengkomunikasikan dengan kepala kantor?" kata penulis.

"Sudah Pak Dedy, beliau janji akan ketemu Pak Dedy siang ini. Tunggu saja Pak di sini" jawabnya sambil tersenyum.

Saya jadi *geer* mendengarnya, apalagi melihat senyumannya. Pertanda baik barangkali.

"Anaknya Pak Rahman Sunar Ya?" pak Lakuma bertanya.

" Betul Pak, kenapa Pak?"

"Saya temannya bapakmu, Kamu sudah besar ya?" jawab beliau

Eh, ternyata Pak Lakuma, kawan almarhum ayah penulis. Akhirnya Pak Lakuma bercerita panjang lebar mengenai almarhum ayah. Cerita Nostalgia yang lama dan panjang.

Setelah hampir sejam bercerita, ternyata beliau marah-marah kemarin selepas ketemu ke semua stafnya.

"Enak saja itu orang taman nasional, mau mengambil alih pendapatan dari Bantimurung. Begitulah kalau orang luar bekerja di daerah orang. Apalagi orang Pusat, main ambil saja".

Salah seorang stafnya yang kebetulan kenal dengan penulis kemudian menjawab,

"Dedy itu orang asli Bantimurung pak, anaknya Pak Rahman"

Mendengar informasi tersebut, pak Lakuma menjawab, "saya kira orang Bandung, karena namanya mirip nama orang Sunda"

Tak kenal maka tak sayang

Ada benarnya juga pepatah itu, setelah mengetahui dan mengenal ayah penulis, sikap dan jawabannya jadi lain. Setelah menunggu sampai siang, akhirnya penulis pamit.

" Saya pulang dulu Pak" kata penulis.

“Iya, besok datang lagilah pagi, mudah-mudahan Pak Kepala Kantor sudah masuk kantor” jawabnya.

“Maklum lah kepala kantor ini menantu Pak Bupati dan istrinya adalah Ketua DPRD Kab Maros, jadi agak santai beliau” jawab Pak Lakuma.

“Oh begitu Pak, iya Pak besok saya datang lagi” jawab penulis.

“Biasanya, beliau lebih banyak di Lapangan Tenis” kata pak Lakuma.

Karena penulis hobby tenis lapangan, penulis langsung teringat seseorang yang dulunya sering main tenis di Bantimurung yang menurut informasi menantu Bupati Maros. Maklumlah penulis waktu kecil sering jadi kacung untuk memungut bola tenis di Bantimurung.

“ Andi Abdullah?” Tanya penulis

“Iya, kau kenal?” jawabnya

“Iya pak, Saya beberapa kali bertanding dengan beliau, tapi saya kalah sih, hehehe” jawabku sambil tersenyum

“Kalau begitu Saya telepon dulu biar janjian ketemu besok” kata Pak Lakuma

“Iya Pak, makasih” jawab penulis

Akhirnya Pak Lakuma memberanikan diri menelpon kepala kantor dengan pertimbangan penulis mengenal dengan baik bosnya. Selang beberapa lama kemudian Pak Lakuma menghampiri penulis.

"Beliau bilang, besok pagi langsung menghadap Pak Setda saja. Nanti beliau yang telepon Pak Setda untuk bersedia menerima Dedy, namanya Pak Muslimin" kata pak Lakuma.

Heran juga penulis mendengarnya, seorang kepala kantor yang notabene Eselon 3 tapi kesannya setara seorang Sekretaris Kepala Daerah yang Eselon 2. Tapi setelah dipikir-pikir pastilah karena beliau mantu Bupati dan suami Ketua DPRD Maros.

Keesokan harinya diawal Juni, penulis menuju kantor Bupati Maros dan langsung mencari ruangan Pak Setda Maros.

"Pak Dedy ya? Sudah di tunggu Bapak di dalam" Salah seorang staf Setda langsung bertanya ke Penulis setelah melihat seragam Polhut yang penulis.

"Iya Pak, makasih" jawabku dengan bangga karena seorang Setda ternyata mau meluangkan waktunya. Sakti juga pak Kepala kantor Pengelola gumanku dalam hati.

"Assalamu alaikum Pak" kataku setelah masuk di ruangan pak Setda.

"Waalaikumussalam" Jawab Pak Setda

"Silahan duduk Pak Dedy" kata pak Setda sembari masih sibuk menandatangani kertas-kertas yang bertumpuk di atas meja beliau.

Setelah beberapa saat kemudian beliau menghentikan aktifitasnya,

"Apa yang bisa saya bantu?" pak Setda memulai pembicaraannya.

"Begini Pak, Bantimurung menurut aturan Undang-undang ,bla bla…." Jawab penulis sambil menerangkan panjang lebar

menerangkan status kawasan Bantimurung, aturan tarif pungutan masuk kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Sehingga Bantimurung wajib menyetorkan PNBP ke kas negara.

Mendengar penjelasan penulis, pak Setda berdiri sambil marah-marah,

"Wah enak sekali Pusat mau mengambil uang dari Bantimurung, kami selama ini yang mengelola tidak ada masalah. Kenapa setelah ada taman nasional tiba-tiba bermasalah? Tau tidak, tahun lalu saja waktu kunjungan Presiden, Pemda Maros mengeluarkan dana kurang lebih 3 milyar untuk membenahi Bantimurung. Selama ini, mana kontribusi Kehutanan untuk Bantimurung?" jawab Pak Muslimin.

Beliau kemudian melanjutkan omelanya dengan kuliah otonomi daerah panjang lebar. Kaget juga mendengar jawaban Pak Muslimin, akhirnya penulis menjawab :

"Kami di Kehutanan memang belum ada investasi dalam bentuk sarana ataupun yang lainnya yang berupa fisik pak, tapi kami sebenarnya menjaga agar kawasan wisata tersebut tetap terjaga kelestariannya sehingga wisatawan tetap merasa nyaman berwisata. Kami merehabilitasi di kawasan hulu Bantimurung agar debit air terjun di Bantimurung tidak menurun. Kami berpatroli menjaga kawasan agar penangkapan kupu-kupu dapat terkendali sehingga pengunjung masih bisa menikmati keindahan kupu-kupu" jawab penulis diplomatis.

“Ya harusnya kalian bertugas itu saja tidak usah mengurus wisata, biar kami saja karena dari dulu kami kelola”. Jawabnya lagi.

“Tapi pak, amanat undang undang menugaskan kami untuk mengelola wisata Bantimurung dan menyetorkan ke kas Negara PNBP Pak” jawab penulis lagi.

“Sudah, bawakan saya semua dasar hukumnya taman nasional, tapi poin-poinnya saja karena saya repot kalau harus membaca semuanya” jawab beliau terakhir

Akhirnya penulis pamit dengan perasaan tak menentu. Penulis langsung menghadap Kepala Balai menceritakan secara detail hasil koordinasi selama seminggu ini.

“Hahaha, lanjutkan saja upayamu. Kan sudah resiko kalau dapat damprat dari Pemda” jawab beliau dengan ringannya…

Penulis kemudian mempersiapkan bahan yang diminta Pak Setda dengan membuat cuplikan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan TN dan PNBP.

Beberapa hari kemudian penulis berusaha bertemu dengan Pak Setda namun selalu gagal karena beliau sibuk.

Seminggu kemudian penulis mendapat kesempatan diterima kembali dengan perjuangan yang ekstra, melalui kenalan bahwa Pak Setda biasanya setelah Apel Upacara hari senin pasti ada di ruangannya.

Setelah menunggu beberapa lama di ruang tunggu, Pak Muslimin masuk ruangannya tapi tidak melihat penulis yang duduk di ruang tunggu. Salah seorang stafnya kemudian masuk menghadap dan menyampaikan kalau penulis mau menghadap beliau.

Beberapa saat kemudian, stafnya mempersilahkan penulis masuk..

“Assalamu alaikum pak” kata penulis.

“”Waalaiku mussalam” jawabnya singkat.

“Mana aturannya taman nasional” Tanya pak Setda ke penulis.

Karena tidak dipersilahkan duduk, penulis kemudian menyodorkan map yang berisi 8 aturan TN yang berkaiatan dengan Taman Nasional dan PNBP.

“Susul dengan surat resmi ya, supaya bisa di rapatkan dengan Tim di Pemda” katanya kemudian.

Tanpa membaca isi map tersebut, Pak Setda langsung meminta untuk disurati resmi tentang permintaan PNBP. Penulis jadi berpikir, rugi juga susah-susah mengedit 8 peraturan kalau beliau belum baca. Namun kemudian penulis berpikir pasti beliau sudah paham ada aturan perundangan yang mendasari permintaan PNBP, namun gengsi jugalah yang mendasari perdebatan awal dengan penulis sehingga Pak Muslimin meminta aturan-aturan tersebut. Penulis yakin beliau tidak membacanya.

Beberapa hari kemudian, penulis membuat konsep surat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai untuk permintaan penyetoran PNBP ke Pemda Maros terkait kawasan wisata Bantimurung dengan melampiri dasar-dasar aturannya sebagaimana yang telah penulis berikan ke pak Setda. Tembusan surat ke Bupati Maros juga disampaikan ke Dirjen PHKA dan Direktur PJLWA di Jakarta.

Setelah menunggu sebulan tidak ada jawaban resmi dari Pemda, pada bulan Juli, penulis menelusuri ke kantor Pemda, kenapa tidak

ada jawaban ke TN Babul. Akhirnya penulis mengetahui dari Pak Lakuma bahwa disposisi surat dari Babul sedah lama di serahkan ke Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan, Pak Ir. Gunawan Palaguna yang merupakan adik dari Mantan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Zaenal Basri Palaguna.

Menurut informasi, Pak Asisten orangnya sangat cuek dan sangat santai sampai-sampai jarang masuk kantor. Repot lagi deh.

Bener juga, pembahasan mengenai PNBP Bantimurung akhirnya terlaksana di Ruangan Asisten II pada Bulan Desember 2007 sebanyak 2 kali yang di hadiri oleh kepala satuan perangkat daerah yang terkait. Penulis juga diundang dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Pemda Maros memahami permintaan BTN Babul mengenai PNBP.
2. Pemda Maros akan mempertimbangkan memberikan sebagian hasil tiket masuk kawasan Bantimurung ke Kas Negara sesuai permintaan BTN babul.
3. Besaran hasil tiket masuk akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4. Hasil rapat ini akan dilaporkan ke Bapak Bupati Maros pada kesempatan pertama.

Setelah menunggu lama, pada bulan Januari 2008, penulis kembali menelusuri ke Kantor Bupati hasil laporan tim yang di pimpin oleh Asisten II. Ternyata menurut Pak Lakuma dari Kantor Pengelola Bantimurung, Bupati belum dilapori oleh Pak Asisten II. Waduh kacau juga ya mekanisme kerjanya,.. bagaimana cara kerjanya nih di Pemda? Pikirku.

Akhirnya saya menemui adik kelas saya di SMA Maros dulu, dengan nama panggilan "Aso" (Iqbal Najamuddin) yang merupakan anak Bupati Maros waktu itu. Ia bekerja di salah satu kelurahan di Maros. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya dia bersedia membisikkan persoalan tersebut ke Bapaknya. Beberapa hari kemudian, Aso menelpon penulis untuk menghadap ke Bupati.

Penulis kemudian menghadap Kepala Balai, mengenai rencana bertemu Bupati Maros terkait PNBP. Pak Dar dan penulis kemudian berangkat ke Kantor Bupati untuk menghadap ke Bupati. Ternyata untuk bertemu dengan Bupati tidaklah mudah. Menurut salah seorang stafnya kami harus didaftar dulu beberapa hari sebelumnya karena jadwal beliau padat.

Akhirnya penulis menelpon adikku tersayang "Aso" menyampaikan hal tersebut. Aso kemudian menyampaikan bahwa memang begitu seharusnya namun dia bisa mengusahakannya. Tak lama kemudian ajudan Bupati memanggil kami yang sudah lama menunggu di ruang tunggu Bupati, antri dengan Kepala-kepala Dinas lainnya. H. Husain, nama ajudan Bupati tersebut, yang merupakan anggota Polres Maros yang bertugas menjadi ajudan Bupati Maros. Dia menyampaikan bahwa Bupati siap menerima kami sekarang…akhirnya…

Setelah memasuki ruangan Bupati, kami ditanya maksud kedatangan kami,

"Sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak Bupati, Saya Darsono, Kepala Balai TN Babul yang bertugas sejak 2007 dan disamping saya Pak Dedy KSPTN Wil II Maros"

Setelah kepala Balai menjelaskan maksud pertemuan kami, Bupati Maros kemudian bercerita tentang pandangan beliau tentang TN Babul dan masalah PNBP Bantimurung. Beliau pada dasarnya memahami namun keputusan mengenai PNBP terkait dengan adanya Perda Maros tentang penarikan retribusi sehingga memerlukan persetujuan anggota DPRD Maros.

Beliau berjanji akan membicarakan dulu dengan DPRD Maros terkait permintaan tersebut. Akhirnya kami pamit dan menunggu hasil pembahasan dengan DPRD Maros terkait masalah tersebut.

Tahun 2008 ternyata masih menyisakan persoalan hasil Pilkada Gubernur Sulsel pada 2007, dampaknya masih terasa hingga ke Kabupaten Maros. Pembahasan mengenai PNBP Bantimurung masih terkatung katung di DPRD Maros. Anggota DPRD Maros masih sibuk dengan gonjang ganjing Pilkada Gubernur, yaitu molornya penetapan Gubernur Sulsel.

Setelah selesainya pelantikan Gubernur Sulsel pada bulan April 2008, akhirnya ada perkembangan dalam pembahasan PNBP di DPRD Maros. Mei 2008, beberapa anggota DPRD Maros bertemu dengan penulis dan mempertanyakan permintaan PNBP Bantimurung.Namun sampai akhir tahun 2008, kejelasan tentang PNBP Bantimurung belum membuahkan hasil. Beberapa surat dari Dirjen PHKA ke Bupati Maros juga tidak mendapatkan jawaban, tidak dibalas.

Tahun 2009 sepertinya menjanjikan, beberapa kawan-kawan dan keluarga ikut dalam pemilu legislatif DPRD Maros. Momentum ini penulis jadikan sebagai posisi tawar untuk menyukseskan pembahasan PNBP di DPRD Maros ke depan. Pada Bulan Oktober 2008, PusdalReg Wilayah 4 juga melaksanakan Lokakarya

Pengelolaan Wisata di Kawasan Konservasi yang dilaksanakan di sebuah Hotel Di Makassar yang menyepakati penerapan aturan PNBP di Kawasan wisata Bantimurung.

Betul juga, pada bulan Agustus 2009, 5 orang yang dekat dengan penulis terpilih menjadi anggota DPRD Maros yang pada tulisan ini tidak etis untuk menyebut namanya dengan posisi masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Maros, Ketua Komisi yang membidangi Kehutanan dan Pariwisata, dan 3 orang lainnya menjadi anggota biasa.

Hasilnya pada bulan Desember 2009, pembahasan PNBP Bantimurung disetujui melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 03 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Maros.

Isi Perda tersebut memuat kesepakatan penyisihan PNBP dari pungutan Karcis masuk wisata Bantimurung yang berlaku per 1 Januari 2010.

Data Kunjungan Kawasan Wisata Bantimurung

TAHUN	KATEGORI			JUMLAH
	DEWASA	ANAK-ANAK	MANCANEGARA	
2002	302,519	53,408	2,510	358,437
2003	346,229	57,040	1,164	404,433
2004	386,402	61,393	1,740	449,535
2005	401,238	65,726	1,719	468,683
2006	377,647	66,942	1,679	446,268
2007	509,091	91,774	2,152	603,017
2008	494,726	82,198	2,057	578,981

TAHUN	KATEGORI			JUMLAH
	DEWASA	ANAK-ANAK	MANCANEGARA	
Jumlah	2,817,852	478,481	13,021	3,309,354
Presentasi	**85.15 %**	14.5 %	0.39 %	

Data kunjungan ke kawasan Bantimurung ternyata 85 % merupakan kunjungan dewasa sehingga begitu ditawari oleh Pemda Maros dan DPRD Maros kategori mana yang diterapkan lebih dahulu. Penulis berpikir untuk mengusulkan wisatawan nusantara dewasa.

Akhirnya Hasil kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Maros dan DPRD Maros menghasilkan kesepakatan penerimaan PNBP untuk wisatawan nusantara dewasa. Sementara wisatawan nusantara anak-anak dan wisatawan mancanegara akan diberlakukan pada tahun 2011.

Satu hal sangat berbeda dengan kawasan konservasi lain di Indonesia, petugas pemungut karcis di kawasan Bantimurung dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pariwisata Maros sejumlah 60 orang yang terdiri dari staf 20 orang, Satpol PP 6 orang, petugas kebersihan 25 orang dan petugas parkir kendaraan sejumlah 9 orang.

Kawasan ini dijaga 1X 24 jam. Coba bayangkan jika BTN Babul yang harus operasionalkan kawasan wisata tersebut? Pegawai TN Babul yang berjumlah 63 orang semuanya akan diarahkan kesana dan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk itu. Belum lagi pada hari-hari menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri setiap tahun yang merupakan puncak kunjungan. Pemkab Maros menyiapkan petugas 200 orang lebih untuk operasional kawasan wisata ini.

Sekarang ini, Balai TN Babul hanya menunjuk 1 orang petugas yang bertugas untuk mengambil pungutan PNBP setiap hari, dari Bendahara Pariwisata Maros, sehingga kita seakan-akan menjadi Bos alias *" debt collector"*.

Metode ini pun bisa berjalan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Maros Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Retribusi Daerah Pungutan Masuk Obyek Wisata Bantimurung pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros.

Ada hal yang termasuk *"off the record"* yang menjadi catatan penulis. Meskipun peraturan Bupati ini dikeluarkan oleh Bupati Maros, namun penulis harus turun tangan membuat draf peraturan Bupati ini, karena ternyata mandeknya pembuatan PerBup ini bukan disebabkan oleh tidak adanya keinginan untuk membuatnya, tapi adanya kebingungan staf Pemkab untuk menyusunnya. Penulis kemudian membuat peraturan Bupati ini dengan memasukkan hampir semua dasar hukum yang berlaku di Kementerian Kehutanan.

Pada bulan Februari 2010, penulis selaku KSPTN membuat surat kepada Kepala Balai TN Babul perihal perkembangan pengelolaan Bantimurung dan membuat draf surat kepada Dirjen PHKA dengan harapan agar Dirjen PHKA dapat menindak lanjuti temuan BPK RI tahun 2009 untuk segera di hapuskan. Pada bulan April 2010, sesuai dengan surat BTN Babul ke Dirjen PHKA, Bupati Maros dan Kepala Dinas Pariwisata Maros serta Kepalaa Balai TN Babul dan penulis berangkat ke Jakarta untuk menemui Dirjen PHKA.

Sangat disayangkan karena pertemuan hanya berlangsung sekitar 10 menit dikarenakan Dirjen PHKA tiba-tiba harus

menghadap Menteri Kehutanan. Pemda Maros kelihatannya kecewa sekali karena banyak hal yang rencananya akan dibicarakan namun tidak dapat terlaksana karena hal itu. Hal inilah yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan sisa pungutan karcis masuk anak-anak dan mancanega yang direncanakan pada tahun 2011.

Pada bulan Januari 2011, setoran PNBP kawasan wisata bantimurung untuk tahun 2010 sebesar Rp. 1.242.180.000,- dari yang sebelumnya Rp.0,-.

Sampai Bulan November 2011, pembicaraan dengan Pemda Maros dan DPRD Maros belum menyepakati penerapan PNBP untuk wisatawan anak-anak dan mancanegara sesuai temuan BPK RI tahun 2009.

Bulan Desember 2011, melalui pembicaraan warung kopi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maros, Drs. Rahmat Burhanuddin, M.Si yang pada waktu di SMA dulu merupakan kakak kelas penulis, akhirnya beliau mau memfasilitasi pembicaraan dengan Bupati Maros (Ir. H. Hatta Rahman) yang merupakan sepupu beliau sendiri.



Pertemuan dengan Bupati Maros agak menggelitik penulis.

“ Ded, kalau karcis masuk Bantimurung saya naikkan, PNBP juga naik ya?” Tanya Bupati Maros.

“Naik 1 Juta pun Pak Bupati, PNBP tetap Rp.2.500,-“ jawab penulis.

Singkat cerita akhirnya Bupati Maros menyetujui penerapan PNBP untuk semua kategori. Wisatawan nusantara baik anak-anak maupun dewasa serta mancanegara yang direncanakan mulai 1 januari melalui perubahan Perda 2009 yang lalu. Namun rencana ini tertunda dikarenakan Revisi Perda 03 tahun 2009 terlambat dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimintai persetujuannya. Baru pada tanggal 1 Februari 2012 pelaksanaan pungutan PNBP kawasan Wisata Bantimurung rampung juga pada akhirnya.***

----------=====000O000=====----------



Dedy Asriady,S.Si, lahir di Bandung (Bantimurung Dekat Gunung), 18 Agustus 1974. Menikah dengan Suci Ahmad Handayani, S.Hut. Dan dikaruniai sepasang anak : Siti Najyah Tristania Aiditha; Muhammad Tristan Naufal Riady.
Aktifitas : Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai TN Bantimurung Bulusaraung Sulawesi Selatan.

13

Mencermati Pedang Hakim di Rimba Hukum Kehutanan

Mencermati Pedang Hakim di Rimba Hukum Kehutanan

Suer Suryadi

Sepuluh tahun lalu di Papua, ketika sedang meneliti efektivitas penegakan hukum dari sisi ekonomi, saya berusaha mendapatkan data lengkap perkara pidana kehutanan/konservasi dari Balai KSDA (Konservasi Sumberdaya Alam), Dinas Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam 10 tahun terakhir. Sebagian besar datanya berupa tabel dengan sedikit gambaran perkara dan vonisnya. Ketika saya cari putusan lengkap perkaranya, nah…banyak yang hilang dengan aneka rupa alasan, salah satunya karena kantornya terbakar. Dan jawaban standarnya adalah "wah, dimana ya? dulu sih ada".

Di era digital sekarang ini, mestinya arsip-arsip itu tersimpan rapi dalam bentuk file elektronik. Kalaupun belum sempat dibuat file digitalnya, setidaknya arsipnya tetap tersimpan rapi. Beberapa pengadilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bahkan telah memuat putusannya dalam website resmi mereka. Namun masih ada pula pengadilan

yang tetap menyimpannya dalam bentuk kertas karena berpotensi mendapatkan dana pengganti fotokopi dari yang membutuhkan. Adapula pengadilan yang bersedia meminjamkan putusan untuk kita fotokopi sendiri, tanpa biaya apapun.

Sebagai makhluk dengan latar belakang biologi dan konservasi, saya *shock* berat ketika pertama kali bersentuhan dengan urusan per-hukum-an. Saya harus mengubah pola pikir 1 + 1 = 2 MENJADI 1 + 1 = (6 : 2) – 1 yang hasilnya tetap angka 2. Biasanya mengurusi hal-hal yang pasti, terpaksa harus berargumentasi dulu untuk mencari kepastian. Contohnya, ketika jaksa penuntut umum (JPU) salah mengetik satu huruf nama tersangka atau alamatnya, kita cenderung mengabaikannya karena kita paham maksudnya. Dalam ranah hukum, JPU dapat dinilai tidak cermat, salah orang (*error in persona*), dakwaan kabur (*obscuur libel*) sehingga dakwaan dapat dieksepsi lawan atau ditolak majelis hakim.

Kita juga sering baca pasal dalam Undang-Undang yang menurut kita tidak/belum jelas, tapi di Penjelasan pasal itu tertulis "cukup jelas". Masalahnya "cukup jelas" bagi siapa? Lantas mau kemana kita mencari penjelasannya kalau belum jelas? Akibatnya, aneka interpretasi dapat terjadi, tergantung posisi dan kepentingannya. Interpretasi penyidik, penuntut, advokat, dan hakim dapat berbeda walau sumbernya sama! Adakalanya terjadi argumentasi untuk mencari pembenaran, BUKAN kebenaran.

Dalam kuliah pengantar ilmu hukum, seorang dosen berkata, "Jika dua orang ahli hukum berdebat mengenai suatu hal, dapat menghasikan sedikitnya tiga pendapat. Yaitu dua pendapat masing-masing ahli hukum plus hasil kompromi. N*ggak* lucu tapi itulah kenyataan yang kita lihat dalam debat-debat hukum

di media massa. Pemahaman dan interpretasi itu justru menjadi seni berargumentasi untuk menyampaikan dalil-dalil hukum oleh pihak yang berperkara di pengadilan. Bahkan hakim pun diberi hak untuk berbeda pendapat sehingga dalam gugatan/dakwaannya, para pihak menuliskan *ex aquo et bono*, alias jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tuh kan?

Pendapat majelis hakim di suatu pengadilan bisa berbeda dengan majelis hakim di pengadilan lainnya, walau masalah yang ditanganinya relatif sama. Tergantung kemampuan pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim, plus pengetahuan dan interpretasi hakim terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan pada saat banding, hakim di pengadilan tinggi dapat mengoreksi putusan hakim pengadilan negeri. Kemudian pada saat kasasi, hakim agung di Mahkamah Agung dapat mengoreksi pendapat hakim sebelumnya.

Biasanya, pendapat atau putusan Hakim Mahkamah Agung yang dengan konsisten diterapkan untuk sejumlah perkara yang (hampir) sama, akan menjadi sumber hukum bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Hal ini disebut **yurisprudensi**. Wajar dong ya, namanya juga pertimbangan dari kasta hakim tertinggi dengan pengetahuan dan pengalaman di ranah hukum, termasuk ribuan jam sidang.

Menyadari kenyataan itu, maka suka tidak suka, kita harus mencermati putusan lengkap majelis hakim. Kebutuhan yang telah menjadi kebiasaan kita hanyalah melihat putusan hakim yang isinya menghukum/membebaskan, menang/kalah, menerima/menolak. Kebiasaan itu membuat kita hanya meminta KUTIPAN PUTUSAN yang hanya 2-3 lembar. Biaya untuk mendapatkan Putusan lengkap

mungkin "lebih mahal" karena lebih tebal daripada Kutipan. Namun dari putusan lengkap itu kita dapat mencermati pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai materi untuk mengajukan Memori Banding/Kasasi (tugas jaksa pada kasus pidana, tapi akan jadi tugas kita yang berperkara.

Kita juga dapat menggunakan pertimbangan hakim untuk mengantisipasi agar kita tidak mengulangi kesalahan prosedural di masa depan. Bahkan kita juga dapat menggunakan pertimbangan hukum dari hakim yang termuat dalam putusan lengkapnya sebagai alasan/dalil dalam perkara lainnya di pengadilan. Jangan salah *lho*, pihak lawan juga menggunakan hasil-hasil putusan pengadilan sebagai salah satu dasar argumentasinya. Contohnya pada Perkara Pra Peradilan No. 01/Pid/Pra.Per/2012/PN.Stb yang menggunakan pertimbangan dan putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahkan dengan membaca lengkap putusan pengadilan, maka kita dapat menentukan langkah lanjutan yang tepat untuk kepentingan konservasi dan kewibawaan lembaga. Misalnya, dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Stb antara 212 perambah di Sekoci Besitang melawan BBTNGL, Polres Langkat, dan Bupati Langkat. Dalam putusannya, majelis hakim menolak seluruh gugatan konpensi, menolak gugatan rekonpensi, dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi. Apa artinya konpensi dan rekonpensi? Terus, siapa sih sebenarnya yang menang dalam perkara itu?

Sengaja atau tidak, masyarakat memahami putusan itu sebagai kemenangan mereka karena keberadaan penggarap ditolak, dan klaim kawasan konservasi juga berkesan ditolak. Itu yang dipahami

masyarakat. Padahal dalam pertimbangannya, hakim dengan tegas menyatakan bahwa kawasan yang disengketakan berada dalam kawasan TNGL. Tidak dilakukannya analisa hukum dan menyampaikan kepada masyarakat mengakibatkan berlanjutnya kesalahpahaman di tingkat masyarakat dan aparat. Masalah pun tak kunjung usai.

Dalam perkara pidana lainnya di Suaka Margasatwa Karang Gading-Langkat Timur Laut, Sumatera Utara, terdapat putusan pengadilan yang dengan tegas menyatakan terdakwa bersalah menggarap kawasan konservasi, tetapi tidak dapat dipersalahkan sehingga dilepaskan dan tidak dipenjara. Jika kita analisa putusan itu lebih lanjut, jelas disebutkan bahwa kawasan yang digarap itu terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai kawasan konservasi. Namun tidak adanya tindak lanjut terhadap putusan tersebut atas kawasan, akhirnya area itu kembali digarap. Masyarakat pun menilai perbuatan terdakwa sebelumnya seolah-olah tidak bersalah.

Mengawal perkara melebihi tupoksi

Seorang PPNS yang tak mau disebut namanya menjelaskan ke saya, “Sesuai aturan, Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) PPNS hanya mengantarkan perkara sampai P-21”. Betul bin benar. Penyidik Polri yang pernah saya temui juga menggunakan dalil yang sama. TUPOKSI. Ketika kita sudah membatasi diri kita sendiri dengan dalih tupoksi, biaya, dan azas “kebiasaan” yang menggantikan *peraturan*, kemudian tidak mau berpikir kreatif dan *out of the* box, ya wassalam. Barangkali tulisan ini pun menjadi tidak layak untuk dibaca lebih lanjut. J

Memantau jalannya persidangan perkara pidana/perdata kehutanan mungkin bukan tupoksi dari UPT. Namun penerapan

yang telah dilakukan oleh BBKSDA Sumut (2012) dan BTN Gunung Leuser (2006-2008) menunjukkan manfaat nyata sehingga kita dapat segera mengantisipasi ketika terjadi *anomali* dalam penanganan perkara.

Perkara pidana No. 453/Pid.B/2011/PN-Kbj yang dipantau persidangannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Penyidik PNS dan intelijen Kehutanan di persidangan untuk menjelaskan proses penangkapan. Namun pertanyaan yang diajukan JPU berpoetensi melemahkan posisi aparat dalam perkara ini. Sejumlah antisipasi pun segera disiapkan dengan seksama. Salah satunya dengan mengekspose perkara perdagangan orangutan tersebut melalui media tanpa maksud melakukan *trial by the press.* Sayangnya, dalam kasus itu, pemilik yang menjual orangutan tidak tersentuh hukum karena masalah teknis politis dan yurisdiksi.

Demikian halnya perkara pidana No. 56/Pid.B/2007/PN.Stb dengan terdakwa pada waktu itu DMS dan NKS. Isi dakwaan untuk kedua terdakwa itu merupakan *copy-paste* sehingga ditemukan cacat formil yang berpotensi membebaskan terdakwa. Adanya pantauan atas kasus itu di pengadilan, membuat kita segera bertindak untuk meluruskannya secara halal.

Masih ingat dengan perkara Uji Materi yang diajukan PT. Sorikmas Mining terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK-126/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Taman Nasional Batang Gadis? Perkara Nomor 29 P/Hum/2004 itu saya nilai sebagai bentuk kegagalan memantau perkara sehingga Kementerian Kehutanan tidak memberikan bantahan apapun kepada majelis yang memeriksa uji materi. Apapun alasannya, hal itu berakibat pembatalan batas-batas TN Batang Gadis yang beririsan dengan

area konsesi tambang. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas kelalaian itu? Jawaban paling aman, ya kita semua…. J

Belajar dari beberapa kasus di atas, mungkin sudah saatnya, PPNS Kehutanan atau staf yang menangani penegakan hukum di setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) KSDA/TN mau meluangkan waktunya untuk mencermati setiap kasus dan mendokumentasi proses teknis/non-teknis penyidikan hingga keluarnya putusan, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan hakim dan putusannya, lalu menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa mengenai hasil-hasil penanganan perkaranya. Langkah akhirnya adalah berbagi kiat dan pengalaman dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain di Indonesia mengenai keberhasilan dan kegagalan penanganan perkara. Kita juga bisa belajar *lho* dari kegagalan penanganan sehingga tidak perlu terulang lagi di UPT yang sama atau di UPT lainnya.

Mengawal proses hukum memang butuh waktu, biaya, dan kesabaran. Proses sidang dimulai dari penyampaian dakwaan oleh JPU (pidana) atau permohonan (pra peradilan) oleh terdakwa atau gugatan (perdata) oleh inisiator (pemohon, penggugat). Kemudian pihak lawan akan menyampaikan bantahan (jawaban atas gugatan/ permohonan), yang dijawab lagi oleh inisiator (replik), lalu dibantah lagi oleh pihak lawan (duplik). Untuk berbantahan secara tertulis saja perlu 4-5 kali sidang dalam tempo 5-8 minggu. Setelah itu pembuktian dan kesaksian (pemeriksaan saksi dan alat bukti) yang menyita paling banyak waktu sidang. Proses ini diakhiri oleh isi tuntutan/pembelaan/kesimpulan dari masing-masing pihak, lalu majelis membuat putusan sidang.

Serius *banget* ya? Ya begitulah, karena hukum ibarat pedang bermata dua, yang dapat menebas penjahat dan penegak hukumnya

yang salah dalam bertindak. Apalagi ada anekdot untuk cenderung *"lebih baik membebaskan yang bersalah daripada menghukum yang tak bersalah jika kurang alat bukti dan kurang meyakinkan hakim"*. Artinya, kita harus mengantisipasi dan menyiapkan alat bukti yang tak terbantahkan.

Mencari kebenaran, bukan pembenaran

Sebelumnya, mari kita samakan dulu pemahaman perbedaan KUHAP dan KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini semacam tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, *penyidikan* , penangkapan, penahanan, penyitaan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis pelanggaran/kejahatan pidana umum dan sanksinya. Ketika ada tindak pidana yang diatur khusus seperti UU Kehutanan/Konservasi, maka jenis pelanggaran dan kejahatan yang disangkakan sesuai dengan pidana khusus itu. Tetapi pasal-pasal KUHP tetap dapat dijadikan senjata "cadangan" atau pendukung dan alternatifnya.

Demikian halnya dengan perkara perdata. Ketentuan-ketentuan mengenai keperdataan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), sedangkan proses beracara di persidangan menggunakan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*, berlaku di Jawa-Madura) dan RgB (Rechtsreglement Buitengewesten, berlaku di luar Jawa-Madura) yang semuanya produksi Belanda tempo doeloe. HIR dan RgB hanya diberlakukan bagi rakyat Indonesia, China,India, Arab. Untuk orang eropa, ada aturan sendiri.

Saya yakin, PPNS Kehutanan dari UPT KSDA/Taman Nasional telah banyak menghadapi berbagai tindak pidana kehutanan/

konservasi dan gugatan perdata. Namun secara individu, saya kenal beberapa PPNS yang tidak pernah menyidik hingga habisnya masa berlaku Surat Izin Menyidik, bahkan sampai pensiun. Hmm.. itu masalah pola rekrutmen, kaderisasi PPNS, dan kesempatan ya?

Saya membayangkan sesuatu yang dahsyat dampaknya jika perkara-perkara yang ditangani PPNS Kehutanan se-Indonesia terkompilasi dan teranalisa. Apapun medianya, hal itu akan menjadi wadah berbagi dan belajar bagi PPNS dan UPT. Ingat *lho,* jabatan kepala UPT adalah target dalam Pra Peradilan dan gugatan Perdata, sehingga Ditjen PHKA selaku organisasi perlu meningkatkan kapasitas personalnya untuk bertindak tegas namun penuh perhitungan dan kehati-hatian. Semoga ada pengambil kebijakan dari Direktorat PPH yang membaca tulisan ini, lalu MAU dan DAPAT mewujudkannya. Mau dan Dapat ini bisa terwujud jika sudah menjadi kebutuhan dan ada kepentingan bagi organisasi dan personalnya.

Ternyata Balai KSDA/TN tidak hanya menghadapi masalah pidana kehutanan, tetapi juga harus siap menghadapi gugatan perdata, pra peradilan, dan tata usaha negara. Keterbatasan halaman dalam buku ini, membuat saya hanya memilih perkara pra peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas kebaikan rekan-rekan di BBKSDA Sumut dan BBTNGL, saya mendapat tiga perkara Pra Peradilan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Perkara Pra Peradilan

Para penyidik (Polri dan PNS) memang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memeriksa tersangka, antara lain penangkapan, penahanan, penggedelahan, dan penyitaan. Agar kewenangan yang merampas

kemerdekaan seseorang itu dilaksanakan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar hak asasi tersangka, maka pengawasannya dilakukan melalui mekanisme Pra Peradilan di pengadilan negeri.

Permohonan pra peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk diuji oleh hakim tunggal mengenai sah atau tidaknya penangkapan/penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP). Walaupun penggeledahan dan penyitaan tidak termuat dalam kedua pasal tersebut, tetapi sebagai tindakan paksa yang mengganggu hak privasi seseorang (*personal privacy right*), pra peradilan biasanya tetap memeriksanya dengan berpedoman pada pasal 32 dan 38 KUHAP.

BBKSDA Sumut menghadapi dua permohonan pra peradilan di PN Stabat pada Februari 2012, berasal dari satu perkara pidana yang sedang disidik PPNS SPORC Brigade Macan Tutul di bawah komando BBKSDA Sumut. Perkara No. 01/Pid/Pra.Per/2012/PN.Stb, mempersoalkan penangkapan dan penahanan tersangka RF dengan Termohon Kepala BBKSDA Sumut, dan Perkara No. 02/Pid/Pra.Per/2012/PN.Stb mempersoalan penyitaan alat berat *excavator* dengan Termohon Menteri Kehutanan, Dirjen PHKA, dan Kepala BBKSDA Sumut.

Begini ceritanya. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang disampaikan tanggal 13 Oktober 2011 kepada Pemkab Langkat, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat membentuk Tim Penertiban Alih Fungsi Lahan di Pesisir Kabupaten Langkat. Tim gabungan itu berasal dari jajaran

pemerintah kabupaten, antara lain Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Peninjuan pada tanggal 3 Januari 2012 di Dusun III Lubuk Jaya, ditemukan adanya *excavator*.

Tempat kejadian perkara (TKP) itu diakui milik Dian Apok yang dibeli dari Tengku Soran bin M. Yasin, sesuai Akta Jual Beli tanah (AJB) No. 110/III/1973 tertanggal 25 Oktober 1973 yang dibuat Camat Tanjung Pura selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (2005, 2006), RTRW Sumut (1993), dan pengambilan titik koordinat, TKP merupakan kawasan hutan produksi tetap. Dalam perkara ini, Dian selaku pemilik tanah memborongkan pekerjaan membuat tanggul kepada Supargiaman yang kemudian menyewa *excavator* merek Komatsu PC 200-7 nomor seri C75629 dari Surianto.

Ketika Tim Terpadu mendatangi TKP, operator *excavator* (RF) kabur, namun atas inisiatif sendiri ia mendatangi Kantor BBKSDA Sumut pada tanggal 25 Januari 2012. Setelah dimintai keterangan, RF ditangkap untuk kemudian ditahan sebagai tersangka karena telah membuat tanggul di kawasan hutan, yang bertentangan dengan Pasal 50 Ayat 3 huruf a juncto Pasal 78 ayat 2 UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Proses penangkapan dan penahanan itulah yang menjadi substansi Perkara Pra Peradilan No.01 yang diajukan Tersangka di PN Stabat pada tanggal 1 Pebruari 2012.

Sesuai permintaan tertulis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DisHutBun) Kabupaten Langkat kepada Kepala BBKSDA Sumut, tim SPORC Brigade Macan Tutul dan DisHutbun Kabupaten Langkat mendatangi TKP tanggal 5 Agustus 2012 untuk menyita *excavator*. Penyitaan itu kemudian disetujui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, dan telah dilaporkan ke Kepolisian

Daerah Sumatera Utara. Penyitaan alat berat inilah yang menjadi substansi keberatan Surianto dalam Perkara Pra Peradilan No. 02 di PN Stabat yang diajukan tanggal 6 Pebruari 2012.

Dalam Perkara No. 01, RF meminta Hakim Pra Peradilan untuk menyatakan penangkapan dan penahanannya tidak sah dan meminta agar penyidikan dihentikan, dengan alasan sebagai berikut: 1. Penangkapan/penahanan tidak dilakukan oleh Polisi (pasal 18 ayat 1 KUHAP); 2. Penangkapan/ penahanan tanpa kordinasi dan pengawasan Polisi (pasal 7 ayat 2 KUHAP dan SKEP Kapolri No. 1205/IX/2000 pada Buku Petunjuk Lapangan tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap PPNS); 3. Termohon dituduh bukan Penyidik PNS.

Dalam perkara No. 02, Surianto meminta Hakim Pra Peradilan menyatakan penyitaan tidak sah dan mengembalikan barang sitaan kepadanya dengan alasan 1. Penyitaan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 33 ayat 1 KUHAP); 2. Penyitaan tidak dalam kondisi tertangkap tangan; 3. Termohon dituduh bukan penyidik sehingga tak berwenang menyita (SK Kapolri No. Skep/1205/IX/ 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap PPNS.

BBKSDA Sumut dibantu pengacaranya menyampaikan argumentasi berdasarkan UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS (pasal 77), Peraturan Pemerintah No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan (pasal 39 dan 40), dan KUHAP. Berikut adalah dalil pembelaannya.

✻ Termohon Pra Peradilan, yaitu Kepala BBKSDA adalah Penyidik PNS Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

RI No. C-32.HN.05.01 tahun 2004, sehingga berwenang menangkap, menahan, menyidik, dan menyita barang bukti sebagaimana diatur di dalam KUHAP Pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat 2 termasuk Penjelasannya (Penyidik), pasal 16-19 (Penangkapan), pasal 20-24 (Penahanan); UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.45/2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 39 dan 40 (kewenangan PPNS Kehutanan);

- Dalam kondisi mendesak, penyidik dapat menyita barang bukti lebih dulu, untuk kemudian meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 38 ayat 2 KUHAP);
- Termohon menyampaikan bukti-bukti telah melaksanakan prosedur administrasi sesuai KUHAP, antara lain menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Polda Sumut dan Kejati Sumut, Surat Perintah Penyitaan, Surat Penetapan Penyitaan dari PN Stabat, dan Laporan Perkembangan Penanganan Perkara kepada Polda Sumut, dan dokumen-dokumen pendukung yang menerangkan TKP sebagai kawasan hutan produksi tetap.

Dalam perkara No. 01, hakim berpendapat bahwa proses penangkapan dan penahanan tersangka oleh PPNS telah memenuhi syarat formal administratif, syarat yuridis, dan syarat kepentingan yang diatur KUHAP. Mengenai SK Kapolri sebagai dasar permohonan, hakim berpendapat bahwa SK tersebut mengikat internal tetapi tidak boleh bertentangan dengan UU, dalam hal ini UU Kehutanan yang memberikan kewenangan PPNS untuk menyidik, menangkap, dan menahan tersangka, lalu melaporkan kepada Penyidik Polri sesuai KUHAP. Hakim menerapkan asas *lex*

superiori derogate lege inferiori, artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah hirarkinya.

Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di atas, Pemohon menggunakan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 04/Pid.Pra/2010/PN.Pbr yang menafsirkan pasal 18 ayat 1 KUHAP, bahwa penangkapan dilakukan oleh Polri. Namun karena putusan hakim itu belum menjadi yurisprudensi, maka hakim pra peradilan di PN Stabat memberikan interpretasi yang berbeda. Hakim cenderung menerapkan asas *lex specialis derogate lege generali.* Saritilawahnya dalam konteks kewenangan PPNS adalah UU Kehutanan yang lebih khusus mengesampingkan KUHAP yang lebih umum. Atas pertimbangan tersebut, hakim menolak seluruh permohonan tersangka.

Dalam kasus ini, kedua hakim dalam dua perkara pra peradilan itu telah cermat menginterpretasikan UU Kehutanan berdasarkan azas hukum yang berlaku universal, sehingga menolak permohonan Tersangka dalam pra peradilan. Interpretasi dan pertimbangan hukum tersebut perlu digarisbawahi apabila kita menghadapi persoalan yang (hampir) sama di kemudian hari, terutama perkara yang mempertanyakan kewenangan PPNS untuk menyidik, menangkap dan menahan tersangka.

Mengenai permohonan untuk menghentikan penyidikan perkara, hakim bersikap bahwa permohonan penghentian penyidikan bukanlah kewenangannya. Pada Pasal 80 KUHAP berlaku ketika penyidik menghentikan penyidikan, maka penuntut umum atau pihak ketiga dapat mengajukan ke pra peradilan untuk menguji apakah penghentian penyidikan itu sah atau tidak. Sayangnya, pasal itu diartikan pengacara pemohon sebagai

dalil untuk meminta hakim pra peradilan untuk menghentikan penyidikan. *Tuh kan*, satu pasal bisa diinterpretasikan berbeda dari maksud awal sebuah peraturan karena adanya kepentingan.

Dalam perkara No. 02, pada dasarnya hakim menilai bahwa seluruh proses penyitaan telah sesuai dengan UU No. 41/1999 dan tata cara penyitaan yang diatur oleh KUHAP. Pertimbangan terpenting dalam perkara ini adalah pasal 82 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 KUHAP, serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus yang diterbitkan Mahkamah Agung RI. Mengingat bahwa *excavator* yang disita oleh PPNS Kehutanan merupakan alat pembuktian dalam tindak pidana yang sedang disidik, maka hakim Pra Peradilan tidak berwenang untuk memeriksanya. Dengan kata lain, tindakan BBKSDA untuk menyita *excavator* sebagai barang bukti dibenarkan oleh hakim.

Untuk menghadapi perkara pra peradilan, BBTNGL kurang beruntung. Perkara No. 15/Pra.Pid/2012/ PN.Mdn diajukan tersangka SbS pada bulan Mei 2012 karena ditangkap dan ditahan oleh PPNS Kehutanan atas perintah Kepala BBTNGL.

Begini kisahnya. Seorang pria bernama SbS diduga keras sebagai salah satu tokoh yang merambah kawasan TNGL di resort Sei Lepan, Besitang. Tanggal 5 April 2012, SbS ditangkap oleh Polhut di sebuah warung kopi. Merasa tidak terima, rekan perjalanan SbS melaporkan penangkapan itu ke Polres Langkat. SbS selanjutnya ditangkap dan ditahan di Markas SPORC Brigade Macan Tutul di Medan sebagai tersangka yang melanggar pasal 50 ayat 3 huruf a Jo Pasal 80 ayat 1 UU No.41/1999, dengan alternative sangkaan pelanggaran pasal 33 ayat 3 jo pasal 40 ayat 2 UU No.5/1990 tentang Konservasi Hayati.

Pemohon (SbS) meminta hakim pra peradilan untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan penyitaan handphone serta menghentikan penyidikan dengan alasan: 1. tidak ada bukti permulaan yang cukup; 2. Penangkapan, penahanan, dan penyitaan hanya dilakukan oleh Polri (pasal 18 ayat 1 KUHAP).

Atas dalil-dalil tersebut, BBTNGL mengajukan eksepsi antara lain bahwa PN Medan tidak berhak memeriksa perkara karena seharusnya PN Stabat di mana lokasi penangkapan dilakukan. Hal ini menyangkut kompetensi relative yang terkait dengan tempat kejadian perkara/*locus delicti*. Hakim menolak alasan tersebut karena permohonan pra peradilan didasari oleh adanya perintah Kepala BBTNGL yang beralamat di Medan. Sebuah alasan yang tidak kuat dan kurang jelas. Tapi ya begitulah, hakim boleh berpendapat lain ketika ia merasa tidak cukup yakin dengan dalil yang kita sampaikan. Terlepas dari berhak tidaknya suatu PN mengadili, itu hanya masalah tempat sidang *(kompetensi relative)*. Kalaupun eksepsi kewenangan PN yang memeriksa itu diterima, pemohon dapat mengajukan lagi ke PN yang seharusnya.

Secara keseluruhan, hakim tidak mempertimbangan UU Kehutanan sebagai peraturan khusus yang memberikan kewenangan kepada Penyidik PNS untuk menangkap, menahan, dan menyidik. Hakim berpendirian bahwa yang berhak menangkap tersangka di luar tempat kejadian perkara adalah penyidik POLRI. Atas dasar itu, ia menyatakan tidak sahnya penangkapan dan penahan tersangka.

Hakim dalam perkara ini telah membuat keputusan melebihi dari yang dimohon karena ia memutuskan adanya rehabilitasi dan ganti rugi kepada Pemohon sebesar satu juta rupiah. Padahal

Pemohon tidak memasukkan permohonan adanya rehabilitasi dan ganti rugi, sedangkan Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi dan ganti rugi diajukan oleh tersangka. Namun hakim berpegangan pada pasal 82 ayat 3 huruf (c), ketika putusannya menyatakan penangkapan/penahanan tidak sah, maka putusannya mencantumkan ganti rugi.

Pelajaran penting

Hakim pra peradilan hanya memeriksa apa yang menjadi kewenangannya sehingga ia tidak memeriksa substansi perkara. Atas dasar itu, apapun keputusan dari hakim pra peradilan dalam hal penangkapan/penahanan/penggeledahan/penyitaan, tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang dilakukan. Kekalahan dalam pra peradilan, mungkin akan menyulitkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kekalahan itu juga seharusnya membuat penyidik untuk berbuat lebih cermat di kemudian hari.

Saya sangat memahami, dalam perkara No.15, penyidik mengalami kendala teknis untuk melakukan penangkapan tersangka di area TKP, yang merupakan area perambahan. Namun alasan kemungkinan terjadinya keributan jika ditangkap di lokasi TKP tidak tersampaikan dalam bantahan BBTNGL. Sejumlah bukti keberadaan tersangka di kawasan perambahan, sudah memasuki substansi perkara sehingga wajar jika hal itu diabaikan oleh hakim pemeriksa..

Pertimbangan hukum dan putusan pengadilan atas perkara No. 01 dan No. 02, perlu dicermati dan dipahami dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk menangani perkara lain yang hampir sama. Saya sangat menyayangkan bahwa dua putusan tersebut tidak

dijadikan sebagai salah satu bukti yang diajukan kepada hakim pemeriksa. Padahal kedua perkara yang dimenangkan BBKSDA Sumut itu diputuskan sebelum adanya Perkara No. 15 ini. Memang tidak ada jaminan hakim di PN Medan ini akan mengikuti pendapat hakim di PN Stabat, tetapi setidak-tidaknya hakim di PN Medan akan mendapatkan interpretasi alternatif.

Adanya putusan dalam perkara No. 15 itu membuktikan Kementerian Kehutanan masih perlu memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi mengenai kewenangan PPNS kepada aparat-aparat penegak hukum di daerah. Kasus ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita perlunya mengumpulkan, menganalisa, dan berbagi pengalaman antar UPT dalam penanganan perkara yang (hampir) sama sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu.

Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 yang diputuskan tanggal 21 Pebruari 2012, berpotensi menjadi putusan dengan interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum. Ketika ada perkara yang terjadi sebelum putusan MK tersebut, akan ada yang mengartikan putusan MK itu tidak berlaku surut, namun tetap terbuka untuk menginterpretasikan lain. Penyamaan pemahaman atas persoalan ini perlu dilakukan oleh jajaran Kementerian Kehutanan, dengan cara-cara yang konvensional atau langsung meminta fatwa hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.***

---------=====000O000=====----------



Suer Suryadi adalah advokat dengan latar belakang biologi konservasi. Seluruh gelar akademiknya, sarjana biologi, master biologi konservasi, dan sarjana hukum diperoleh dari Universtias Indonesia. Sejak 1993, Suer telah bekerja di Wildlife Conservation Society, Pusat Studi Biodiversitas dan Konservasi-Universitas Indonesia, Conservation International, dan UNESCO. Kini Suer menjadi konsultan pada DESMA Center dan Suryadi Widi & Partners.

14 Kepemimpinan Konservasi



Kepemimpinan Konservasi

Hari Kushardanto

1. Kisah kepemimpinan klasik dan modern



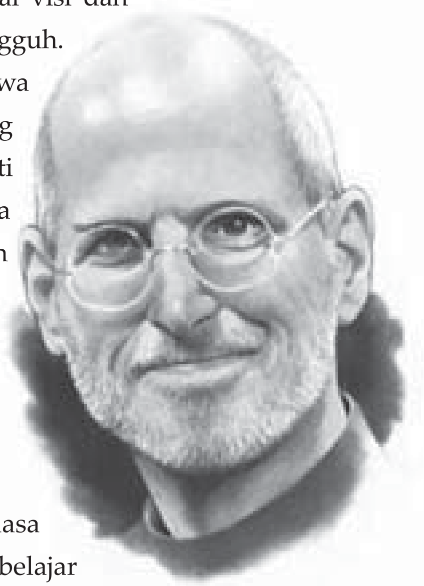
Bangsa Sparta di dalam peta Yunani Kuno
(sumber: www.thelatinlibrary.com)

Berdiri dengan gagah di hadapan 300 prajurit Sparta (sebuah bangsa di Yunani kuno) yang tersisa, Raja Leonidas (hidup sekitar 480 SM) menatap mata semua prajurit yang dipimpinnya dalam peperangan Thermopylae. Sementara itu, berjarak beberapa kilometer di seberang mereka berbaris dengan rapat prajurit Persia yang dipimpin oleh Xerxes yang berkeinginan mengusai dan menjajah Sparta. Gerakan pasukan kavaleri dan parade prajurit Persia yang mencapai puluhan ribu tersebut meninggalkan

kepulan debu dan garis hitam tebal di horison. Sejenak Raja Leonidas terdiam, peperangan yang sudah berjalan selama empat hari ini belum kunjung usai. Beberapa ribu prajurit Sparta sudah tewas dalam peperangan ini, namun jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan puluhan ribu prajurit Persia yang berhasil mereka bunuh. Meskipun demikian jumlah prajurit Persia seolah-olah tidak pernah menyusut dan Raja Leonidas sekarang menghadapi sebuah dilema, apakah dia akan menyerah kepada Xerxes dan membiarkan prajurit Persia masuk dan menguasai Sparta atau dia akan berjuang dengan 300 prajuritnya yang setia sampai darah tertumpah ke bumi. Setelah menarik nafas panjang, dengan lantang Raja Leonidas berteriak: "Prajurit Sparta … Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mundur. Inilah hukum Sparta, inilah alasan kita berdiri disini, bertempur untuk bangsa kita dan mati kelak. Kita memiliki kemerdekaan untuk hidup merdeka dan jika kelak kita mati dalam pertempuran ini maka seluruh manusia akan tahu bahwa sampai dengan hembusan nafas terakhir yang kita miliki kemerdekaan ini kita pertahankan".

Kisah kepahlawanan Raja Leonidas ini menginspirasi banyak orang dan mengajarkan mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang kuat. Nilai yang pertama: kepemimpinan adalah mengenai mengelola manusia. Tiga ratus prajurit Sparta yang tersisa adalah mereka yang setia, akan tetapi tanpa motivasi dan contoh yang diberikan Raja Leonidas tidak akan 300 prajurit ini berjuang mati-matian menahan gempuran perajurit Persia yang jumlahnya beratus-ratus kali jumlah mereka. Nilai yang kedua: seorang pemimpin siap untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Bisa saja Raja Leonidas memutuskan untuk menyerah kepada Xerxes akan tetapi dia akan dikenang sebagai seorang raja yang pengecut dan pengkhianat bangsa Sparta. Nilai

yang ketiga: kepemimpinan dalah mengenai visi dan memperjuangkan visi dengan sungguh-sungguh. Dalam kisah Raja Leonidas ini visi yang dibawa adalah kemerdekaan bangsa Sparta. Nilai yang keempat: kepemimpinan bukan hanya berarti menyuruh akan tetapi juga ikut turun bersama orang yang dipimpinnya, memberi contoh dan teladan. Raja Leonidas berdiri dan bertempur bersama prajurit Sparta dan bahkan ketika mereka semua tewas dalam dua hari pertempuran terakhir, hal ini memberikan gelombang perlawanan diseluruh Sparta.



Steven Paul Jobs
(sumber: www.arbiteronline.com)

Sekarang kita terbang 2500 tahun ke masa depan setelah kisah Raja Leonidas dan belajar mengenai gaya kepemimpinan yang lain dari seorang pria yang bernama Steven Paul Jobs, atau yang lebih dikenal dengan Steve Jobs. Mantan orang nomer satu Apple Inc yang meninggal pada usia 56 tahun[1] ini banyak meninggalkan sukses baik dalam kehidupan pribadi maupun karir professionalnya. Jobs sering digambarkan sebagai seorang visoner, pionir dan jenius dibidangnya (bisnis dan disain produk), penemu kreatif yang telah mengubah wajah dunia digital. Pada saat kembali ke Apple Inc, perusahaan yang didirikannya bersama Steve Wozniak, di tahun 1996 Jobs membidani lahirnya banyak produk digital inovatif yang bukan hanya handal dan indah secara estetika

[1] Dilahirkan pada 24 Februari, 1955, dan didiagnoza menderita kanker pankreas di tahun 2003, Steve Jobs akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 5 Oktober 2011. Kematiannya bukan hanya membuat sedih seluruh pegawai di Apple Inc tapi juga menjadi kedukaan bagi jutaan penggemar produk-produk perangkat digital pintar Apple di seluruh dunia

akan tetapi juga menjadi acuan bagi produk-produk sejenis yang dihasilkan perusahaan serupa. Dimasa kepemimpinannya, Jobs berhasil menjadikan produk-produk Apple seperti iMac, iTunes , iPod, iPhone dan iPad laris manis di pasaran berkat inovasi teknologi termasuk layar sentuh, kemudahan pengoperasian dan dukungan jaringan internet, system operasi yang handal serta penampilan yang indah. Gaya kepemimpinan Jobs dan kemampuannya menjadikan Apple Inc sebagai satu perusahaan digital terkemuka didunia sering dijadikan pembelajaran di sekolah-sekolah bisnis maupun diangkat sebagai suatu kasus telaahan oleh banyak pengajar bidang studi bisnis.

Tiga hal yang dapat diangkat disini mengenai gaya kepemimpinan seorang Steve Jobs adalah:

1. Berorientasi kepada konsumen. Jobs menyadari bahwa yang membuat sebuah perusahaan besar adalah konsumennya dan hal yang dicari oleh konsumen produk-produk digital adalah daya guna dan kepraktisan produk yang dibelinya. Apple sangat memanjakan konsumen dengan semua aplikasi dan layanan yang disediakan baik oleh produk digitalnya maupun purna jualnya. Apple menjual manfaat kepada konsumennya bukan hanya menjual sebuah perangkat digital.
2. Jobs sangat yakin bahwa hal yang membuat sebuah perusahaan terus maju adalah jika perusahaan tersebut tidak berhenti untuk berinovasi. Begitu sebuah perusahaan berhenti berpikir sesuatu yang baru dan besar, maka perusahaan tersebut akan kehilangan posisinya di dalam pasar dan lambat namun pasti perusahaan tersebut akan mati.

3. Dalam kepemimpinan Jobs banyak orang-orang muda maupun berpengalaman yang direkrut[2], mereka yang memiliki banyak kreatifitas di bidangnya (teknologi, pemasaran, dan sebagainya) dan senang mendapatkan tantangan untuk membuat sebuah ide besar menjadi nyata. Apple selalu mencari orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi yang sesuai dan didukung dengan kondisi yang membuat orang tersebut berkembang.

2. Pentingnya Kepemimpinan Konservasi

2.1. Permasalahan konservasi



Kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam

Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki sistem sosialekonomi-politik yang berbeda akan tetapi kalau kita berbicaramengenai permasalahan konservasi di negara yang

2 Di dunia bisnis dimana persaingan sangat keras, praktek yang lumrah terjadi adalah 'pembajakan' atau *high jacking staff* dari perusahaan lain. Apple juga melakukan hal yang sama ketika di tahun 2009 Apple banyak menarik pegawai RIM, perusahaan BlackBerry, pindah ke Apple

berpenduduk lebih dari 250 juta ini, cerita klasik mengenai pengurasan sumberdaya alam, lemahnya dukungan masyarakat bagi konservasi serta tidak berfungsinya sistem penegakan hukum masih tetap relevan untuk dibicarakan. Jika kita tarik mundur untuk menemukan akar masalahnya, isu konservasi di Indonesia dapat dijelaskan dalam narasi sederhana berikut. Terbatasanya sarana dan akses kepada pendidikan ditambah dengan lemahnya perekonomian menyebabkan masyarakat yang hidupnya bergantung kepada sumberdaya alam menjadikan mereka sangat bergantung kepada keberadaan sumberdaya alamnya. Akan tetapi ketaktersediaan teknologi yang tepat dan sangat minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan mengakibatkan sumberdaya alam dieksploitas dengan tidak senonoh[3]. Pembukaan kawasan hutan dengan cara tebas bakar yang tak terkendali, perambahan kawasan hutan untuk lahan pertanian, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak seperti bom dan racun, adalah untuk menyebut beberapa contohnya. Akibatnya sumberdaya alam menjadi rusak dan jika cara-cara itu berlanjut maka yang terjadi adalah kehancuran sumberdaya alam tersebut. Hutan menjadi rusak dan terumbu karang menjadi hancur, yang pada akhirnya menyebabkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan pun terganggu.

Disisi lain ada sekelompok atau individu yang memiliki motif ekonomi dalam mengeksploitasi sumberdaya alam ini. Rendahnya kepedulian untuk memanfaatkan secara berkelanjutan dan akses yang mudah (atau dimudahkan) untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, dan ditambah lemahnya penegakkan hukum hanya akan

[3] Menurut definisinya, senonoh berarti perkataan atau perbuatan yang tidak patut tidak layak atau tidak enak dipandang



Motif ekonomi mendorong kerusakan sumberdaya alam

menyebabkan eksploitasi berlebihan dan berujung kepada rusaknya sumberdaya alam. Pengrusakan sumberdaya alam, baik yang bermotif subsisten maupun yang bermotif ekonomi, baik di masa rejim politik sentralistik maupun dalam rejim desentralistik tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya sistem politik yang menjadi konteksnya dan tingkat kerusakan yang terjadi. Saat ini tentunya sistem politik menyebabkan tingkat kehancuran semakin cepat—karena proses ijin dan kemudahan-kemudahan perijinan yang diturunkan ke tingkat pemerintahan daerah—dan semakin parah.

2.2. Kepemimpinan juga dibutuhkan di konservasi

Pelik dan kompleksnya permasalahan konservasi ini bisa kita asosiasikan dengan kisah Raja Leonidas di awal tulisan ini. Ratusan ribu prajurit Persia dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Xerxes mewakili derasnya gempuran dan besarnya

tantangan yang akan datang untuk 'menghancurkan' konservasi, yang 'dikomandani' oleh 'pembangunan dan kepentingan politik'. Agar berhasil mengatasi tantangan yang datang menghampiri dengan brutal maka diperlukan seorang pemimpin yang memiliki visi konservasi dan mampu mempertahankan idealisme—apa yang diperjuangkan: bagaimana pengelolaan konservasi dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pemimpin yang juga berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populer, namun memiliki dasar yang benar dan alasan yang rasional mengapa kebijakan tersebut diambil. Pemimpin yang berhasil memberikan teladan dan memotivasi orang-orang yang ada di belakangnya untuk terus bersemangat bekerja dan memberikan yang terbaik bagi konservasi.

Bayangkan jika pemimpin yang kita harapkan mampu mengatasi tantangan tersebut gagal untuk menunjukkan visinya dan mempertahankan idealismenya. Jika pemimpin tersebut kemudian lebih memilih untuk bermain aman dan tidak berani mengambil kebijakan yang berbeda, yang terjadi sama dengan kisah Raja Leonidas jika dia menyerah kepada Xerxes; prajurit Persia akan menjadikan bangsa Sparta budak selamanya. Meskipun pemimpin tersebut memiliki visi dan idealism dan berani akan tetapi jika dia gagal memotivasi orang-orang yang ada di belakangnya maka yang ada adalah dia akan bertempur sendirian. Jika kita mengibaratkan sebuah lembaga adalah sama dengan mobil, maka seorang pemimpin adalah supirnya, dia harus memahami cara mengemudikan mobilnya dan tahu arah yang akan dituju (visi), sedangkan orang-orang yang ada dibelakang seorang pemimpin diwakili oleh roda-roda mobil tersebut. Sepandai-pandainya sang supir mengemudikan mobilnya dan sejelas-jelasnya arah yang akan

dituju, akan tetapi tanpa mesin yang handal dan empat roda yang siap berputar maka mobil tadi hanya akan diam di tempat.

Permasalahan konservasi seperti dijelaskan di atas adalah mengenai manusia. Punahnya species tertentu, rusaknya ekosistem dan habitat penting serta hilangnya fungsi alam untuk mendukung sistem kehidupan secara keseluruhan bukan semata-mata rusaknya sistem ekologi dan biologi akan tetapi adalah sebuah *symptom* atau gejala dari akan hancurnya sistem sosial-ekonomi-politik[4]. Kalau ita sekarang menggunakan pendekatan yang diambil seorang Steve Jobs untuk mengatasi permasalahan konservasi maka yang harus dilakukan seorang pemimpin (pengelola) kawasan konservasi adalah fokus kepada 'konsumen'. Siapa konsumen konservasi? Nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada taman nasional laut, petani yang hidup disekitar taman nasional, kelompok dive operator yang menjual kegiatan menyelam kepada para penyelam. Pada dasarnya konsumen konservasi adalah mereka yang mengharapkan mendapatkan manfaat dari sebuah kawasan (atau juga species) yang di konservasi. Sama dengan Jobs, sang pemimpin juga harus berani berinovasi untuk membuat konsumen konservasi tadi mendapatkan manfaat dari upaya konservasi. Dan terakhir, sang pemimpin harus bisa mencari orang yang pas untuk ditempatkan di posisi yang benar dan kemudian diberi ruang dan dukungan agar dapat berkembang dan menampilkan performa yang terbaik. Jadi, seorang pemimpin konservasi harus melihat kualifikasi staf penjangkauan masyarakat yang dibutuhkan, menempatkan staf tersebut di divisi komunikasi dan penjangkauan masyarakat, embangun kapasitasnya sehingga pandai berkomunikasi dan tahu teknik-teknik penjangkauan masyarakat, serta memberikan ruang

4 Dalam banyak hal

untuk menggunakan kapasitasnya dan berkreasi dengan kapasitas yang dimilikinya.

3. Cerita Kepemimpinan dari TN Karimunjawa

Tidaklah mudah menemukan kisah kepemimpinan di konservasi yang cukup menonjol. Berbeda dengan di sektor militer, bisnis dan politik, kita bisa menemukan contoh-contoh pemimpin dan gaya kepemimpinan yang kuat, di sektor konservasi tidak banyak – jika boleh dikatakan demikian – tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan kuat untuk dijadikan contoh. Di dunia internasional kita bisa menunjuk kepada ketokohan Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat era Bill Clinton ini menerima penghargaan Nobel Perdamaian untuk inisiatifnya menyelamatkan iklim[5]. Ada dua sebab mengapa kepemimpinan konservasi sangat jarang ditemukan:

1. Permasalahan konservasi, kecuali saat ini isu perubahan iklim, bersifat sangat lokal atau setempat sehingga kepemimpinan konservasi tidak sehingar-bingar di sektor bisnis, militer dan politik yang bersifat nasional bahkan internasional. Seringkali misalnya kerusakan hutan di suatu daerah hanya hanya dipandang sebagai kasus lokal yang dampaknya sekadar berimbas pada masyarakat sekitar kawasan. Isu banjir bandang di Wasior Papua Barat yang diduga karena rusaknya hutan di kawasan hulu berakhir menjadi isu setempat saja.

[5] Memiliki nama lengkap Albert Arnold Gore jr, Al Gore saat ini nyaman dengan sebutan sebagai aktivis lingkungan untuk dirinya, dia telah mendirikan banyak lembaga non profit dan salah satu diantaranya adalah *Alliance for Climate Protection*. Selain Nobel Perdamaian, Al Gore juga menerima banyak penghargaan untuk filmnya *Inconvenient Truth* dan juga didapuk sebagai *runner-up "Person of the Year 2007"* oleh majalah *Time*

2. Berbeda dengan misalnya di sektor militer atau bisnis atau politik dimana target pencapaian sukses boleh dikatakan singkat – dalam hitungan satu atau dua tahun – Penyelesaian persoalan konservasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Isu konservasi yang diangkat ke media akan hangat pada awalnya saja. Selanjutnya kita seakan kehabisan energi dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan atau kadang menguap begitu saja. Masalah Lumpur Lapindo misalnya, menjadi isu besar di awal akan tetapi sekarang penyelesaian berlangsung lama dan sampai sekarang pun masih belum tuntas.

Meskipun demikian, ada sepenggal kisah kepemimpinan konservasi dari Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) yang dapat diangkat disini. Tidak ada alasan khusus pemilihannya selain beberapa karakter kepemimpinan yang tidak (belum) ditemukan di tempat lain dan kesesuaian beberapa karakter kepemimpinannya dengan nilai kepemimpinan yang diangkat di awal tulisan ini.


M Gunung Nababan, ketika masih menjabat sebagai Kepala Taman Nasional Karimunjawa (sumber: Taman Nasional Karimun Jawa)

Tidak ada yang cerita yang berbeda dari seorang Gunung Nababan dengan karakter seorang batak pada umumnya: berbicara lantang, blakblakan dan apa adanya; takut tidak ada dalam kamus hidupnya, berkeyakinan kuat mengenai tindakannya dan cuek. Akan tetapi ketika seorang Gunung Nababan mendapatkan posisi sebagai Kepala Balai TNKJ maka

ceritanya akan berbeda. Paling tidak bagi Yusuf Saifudin[6], hal yang paling diingat mengenai sosok Gunung Nababan adalah gaya kepemimpinannya yang terbuka dan inklusif atau melibatkan semua orang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Nababan – beberapa staf Balai TNKJ memanggilnya Pak Gunung ketika pertama kali menempati posisi kepala balai disini: *"… yang saya butuhkan adalah kepercayaan dan dukungan dari staf saya dan itu tidak saya dapatkan kalau saya tidak terbuka dan melibatkan mereka sebagai bagian dari kemana saya membawa taman nasional ini"*.

Tidak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan dukungan ini, paling tidak menurut pengakuan Pak Nababan, diperlukan waktu dua tahun untuk meruntuhkan sekat canggung dan angker antara Pak Nababan dan stafnya. Ketakseganan Pak Nababan untuk turun ke lapangan, bercengkerama dengan staf lapangan – termasuk "mengerjai" dan "mengusili" stafnya – juga berinteraksi dengan masyarakat, sepertinya menjadi faktor penting dari terbangunnya kepercayaaan dan dukungan dari staf Balai TNKJ. Hal yang sama yang dilakukan oleh Raja Leonidas ketika dia mendapatkan dukungan dan loyalitas penuh dari 300 prajuritnya: terjun ke lapangan bersama mereka, bersimbah darah dan peluh melawan musuh tapi tetap memberikan semangat untuk bertempur. Kepemimpinan adalah mengenai memberi tauladan dan contoh.

Di bawah kepemimpinan Pak Nababan, Balai TNKJ mendapatkan predikat UPT Terbaik di tahun 2010. Suatu pencapaian yang tidak mudah tanpa adanya seorang pemimpin yang memiliki visi, memotivasi dan berani berinovasi. Bagi stafnya nampaknya

6 Yusuf Syaifudin adalah staf Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNKJ yang ketika tulisan ini selesai ditulis sedang mengikuti program kampanye Rare Pride untuk TNKJ

Pak Nababan cukup memotivasi mereka, memberikan tanggung jawab dan arahan yang jelas, memantau kemajuan secara detil dan peduli kepada stafnya. "*Ketika Pak Nababan tidak kembali ke Bogor mengunjungi keluarganya, beliau tidak segan untuk datang berkunjung kepada stafnya hanya untuk sekedar ngopi dan mengobrol dengan mereka*", demikian cerita Yusuf Syaifudin.

Pencapaian UPT Terbaik ini juga langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kebijakan *laptopisasi*, pengadaan laptop bagi staf Balai TNKJ dengan menggelontorkan pinjaman lunak kepada mereka. "*Sekarang tidak ada alasan bagi staf Balai TNKJ untuk tidak bekerja dan menyelesaikan DUPAK-nya*", demikian alasan Pak Nababan dengan inovasi laptopisasi-nya. Kepemimpinan adalah mengenai menjaga visi dan mentransfer visi tersebut kepada orang-orang yang ada dibelakang sang pemimpin, selanjutnya mengelola mereka untuk bekerja bersama-sama mencapai visi tersebut.

Bahkan seorang Raja Leonidas, yang gagah perkasa dan pandai pertempur sekalipun membutuhkan orang lain untuk mencapai visinya. Seorang Steve Jobs yang kompetitif dan memiliki banyak ide cemerlangpun tetap membutuhkan orang lain untuk menerjemahkan ide-ide cemerlangnya dan membuat Apple menang dalam berkompetisi dengan pesaingnya. Demikian pula di konservasi, kemampuan mengelola staf adalah mutlak; tantangan yang dihadapi sangat kompleks, sedangkan seringkali penghargaan yang diperoleh tidaklah sepadan, oleh karenanya seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada stafnya, memberikan penghargaan – meskipun hanya berupa terimakasih dan pengakuan lembaga, dan membangun kepemilikan bersama mengenai visi konservasinya. Seorang pemimpin konservasi harus dapat membuat stafnya memahami visi konservasinya dan

memfasilitasi mereka untuk menerjemahkannya sebagai sebuah rencana kegiatan.

Pak Nababan nampaknya faham bahwa sebuah kantor taman nasional dan manusia juga infrastuktur yang ada di dalamnya selayaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang tak tersentuh dan memiliki jarak dengan masyarakat. Bagi Pak Nababan, konservasi selayaknya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Sama seperti Steve Jobs yang berfokus kepada konsumennya sehingga terus berinovasi dan memberikan banyak manfaat dari *gadget* Apple yang dibeli konsumennya. Demikianpun Pak Nababan yang tidak berhenti berinovasi. Untuk menyebutkan beberapa diantaranya:

1. Program rehabilitasi kerapu: menebarkan bibit kerapu di perairan TNKJ untuk membantu memperbaiki populasinya. Awalnya banyak yang menentang ide ini dari mulai isu spesies (ikan) asing yang dimasukkan sampai dengan isu keberhasilan, tapi pada kenyataannya saat ini, setelah masyarakat tidak mengambil kerapu untuk beberapa waktu, tangkapan kerapu mengalami peningkatan baik jumlah maupun volume
2. Bensin untuk pengamanan partisipatif: memberikan insentif bahan bakar bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Menjaga dan mengawasi kawasan taman nasional dengan luas 111.625 ha tidaklah mudah apalagi kalau mengingat kawasan taman nasional ini terbuka dan semua orang memiliki akses mudah kedalamnya. Menggantungkan kegiatan pengawasan kepada Balai TNKJ tidaklah murah, inovasi penggantian BBM ini menjawab mahalnya biaya pengawasan dan sulitnya menjaga kawasan perairan yang luas.

3. Program pelestarian penyu: memberikan insentif – penggantian bahan bakar – bagi masyarakat yang menemukan telur penyu. Tujuannya sederhana: untuk menjaga populasi penyu dan melibatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pelestarian penyu. Saat ini insentif yang diberikan didapatkan dari partisipasi dan kontribusi wisatawan dan pengusaha wisata yang ada dan mengambil manfaat dari keberadaan TNKJ.

Keberanian (utamanya mengambil keputusan), karisma, kemampuan mengelola orang dan menerjemahkan visi memang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memimpin orang lain dan menjadi faktor penting dalam gaya kepemimpinannya akan tetapi satu hal yang yang menjadi pembeda adalah kemampuan menciptakan inovasi dan memperkenalkan ide baru yang seringkali dianggap aneh oleh orang lain.

> *"Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand." (Jenderal Collin Powel)*

(Para pemimpin besar hampir selalu adalah mereka yang hebat dalam menyederhanakan sesuatu, yang dapat memutuskan perselisihan, perdebatan, dan keragu-raguan untuk menawarkan solusi yang dapat dipahami oleh setiap orang). ***

---------=====000O000=====----------



Hari Kushardanto, lahir di Bandung pada 6 Mei 1968, Hari Kushardanto memiliki ketertarikan professional maupun personal di bidang perubahan perilaku untuk konservasi, kepemimpinan konservasi dan mobilisasi masyarakat (*community mobilization*). Ketertarikan ini muncul dari pengalaman bekerja untuk lingkungan hidup dan konservasi serta berkenaan dengan latar belakang pendidikan S2- nya mengenai *Environment and Development* (Pembangunan dan Lingkungan) dari University of East Anglia (UEA), Inggris. Sedangkan pendidikan lanjutnya ini didasari kepada keyakinan bahwa permasalahan kawasan konservasi membutuhkan bukan hanya sekadar perbaikan dari sisi sistem pengelolaannya semata akan tetapi juga penanganan yang lebih menyeluruh yang meliputi pelibatan masyarakat (*inclusivism*), pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang hidupnya bergantung kepada kawasan konservasi.